SOSIOLOGI PEDESAAN

Kumpulan Bacaan

Jilid I

Editor

Sajogyo

Pudjiwati Sajogyo

Institut Pertanian Bogor

GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

1983

SOSIOLOGI PEDESAAN

Kumpulan Bacaan

Jilid I

Editor

Sajogyo

Pudjiwati Sajogyo

Institut Pertanian Bogor

GADJAH MADA UNIVERSITY PRESS

1983

SOSIOLOGI PEDESAAN

KATA PENGANTAR

Kumpulan Bacaan ini sudah beberapa tahun lamanya dipakai di Institut Pertanian Bogor sebagai pendukung kuliah pengantar memperkenalkan Sosiologi Pedesaan di tingkat pertama.

Kuliah pengantar memerlukan baik ''textbook'' maupun ''kumpulan'', yang kedua untuk melatih mahasiswa di dalam mengolah konsepsi-konsepsi dan metode berpikir ilmiah yang dibawakan cabang ilmu yang sedang diperdalam itu. Baru buku ''kumpulan bacaan'' ini yang dapat disajikan pada khalayak yang lebih luas, belum ''textbook'' yang diharapkan orang juga. Sampai kini masih memakai ''textbook'' sosiologi umum yang ada di pasaran, misalnya karangan Surjono Soekamto, untuk menggali konsepsi dan metode ilmu tersebut.

Dari 34 karangan, kutipan singkat, yang dijadikan menjadi 2 jilid ada 60% yang menyoroti keadaan pedesaan kita, selebihnya ada yang mengenai kehidupan kota (a.l. mengenai mahasiswa dan pemuda), masyarakat yang lebih luas, apa yang terjadi di tingkat ''atas-desa'' atau di negeri lain, yang membawakan suatu metode berpikir atau konsepsi yang akan berguna jika juga kita coba untuk menelaah masyarakat desa di Indonesia. Sepertiga jumlah karangan berasal dari hasil penelitian yang mencakup pengumpulan data di lapangan, artinya langsung dari masyarakat yang diteliti di desa, sehingga pembaca mulai dibina dalam menilai isi dan cara penyajian hasil penelitian.

Lima bab pertama berturut-turut memperkenalkan konsepsi nilai sosial-budaya (pola kebudayaan), apa yang dijadikan pedoman bertindak oleh masyarakat, proses-proses sosial yang mengantarkan masyarakat pada perwujudan nilai-nilai itu serta saluran atau ''alat'' yang dipakai dalam proses mencapai cita-cita kehidupan bersama itu: beragam lembaga dan grup, pendukung organisasi sosial. Jika di dua bab ada beberapa karangan mengenai masyarakat kota lingkungan mahasiswa dan pemuda, tak lain atas pertimbangan didaktik: akan lebih mudah memperkenalkan suatu konsepsi dalam satu metode berpikir tertentu dengan memakai bahan yang paling baik dikenal mahasiswa itu.

Memang, sebagian besar mahasiswa kita (lulusan SMA) juga di Bogor, berasal dari lingkungan kota.

Sampai mana kita mampu membina mahasiswa (sebagian besar anak kota) agar siap menjalankan peranan sebagai pembaharu yang sanggup mengajak petani dan golongan lain di desa jalan "kemajuan" dan "pembangunan"? Mencari bidang-bidang berpijak yang sama antara orang kota (khususnya calon untuk lapisan elite) dan orang desa berarti usaha membuat jembatan antara dua pola kebudayaan. Jika diusahakan di dalam suatu pola kebudayaan-pun, hal itu berarti: hubungan antar dua (atau lebih) pola subkultur. Mahasiswa (pembaca) dibina agar secara kritis menanggapi kerangka pemikiran yang dilontarkan oleh beberapa eksponen dari subkultur lapisan elite, baik itu dari peneliti Indonesia (misalnya Koentjaraningrat dalam hal "rintangan mental") maupun peneliti dari barat (Niehoff dan Anderson) yang menyajikan bagan "hubungan antar pola kebudayaan" dari segi pandangan si-pembaharu, tokoh dari "dunia maju". Sajian mereka dapat dibandingkan dengan apa yang dibawakan oleh unsur "negara": apa fungsi LSD (Lembaga Sosial Desa) dan usaha menggolongkan desa-desa Indonesia atas beberapa tipe (Departemen Dalam Negeri), yang masing-masing juga membawakan ukuran-ukuran dari sub-kultur "di atas-desa". (Bab mengenai "perobahan sosial").

Sekumpulan bab-bab lain memperkenalkan konsepsi sistem status dan pelapisan (stratifikasi) yang dipersambungkan pada soal kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat, hubungan antara sukubangsa yang terjadi di pedesaan (ini jarang disoroti), arti keluarga dan peranan wanita (agar pembaca lebih mendalami "azas kekeluargaan" yang hendak kita bawakan secara lebih meluas, di luar jaringan kerabat) serta dua jenis proses yang secara khusus disoroti: komunikasi di satu fihak dalam pola tradisional, hubungan antara bapak dan pengikut, di lain fihak lewat media massa) dan adaptasi ekologi (dari segi ekologi kebudayaan).

Bab penutup berupa tiga esai yang menyangkut sosiologi terapan sosial ("social thought"): dua esai membawa pesan dan tantangan sampai mana kita di Indonesia mampu memahami masalah masyarakat desa kita, bukan saja masalah petani melainkan juga golongan yang lebih menyedihkan nasibnya yaitu petani gurem dan buruhtani tak-bertanah? Dan sampai mana atas dasar pemahaman itu kita akan mampu bergerak di dalam usaha perbaikan nasib yang dijanjikan oleh pembukaan

undang-undang dasar kita sejak 1945? Esai ketiga membawakan jawaban atas tantangan ''modernisasi'' itu dengan berpijak pada falsafah dan etika yang digali dari agama Islam, dikutip dari suatu thesis di Stanford University, Amerika Serikat, sebagai pembanding.

Dari suatu kumpulan bacaan, dengan hampir tiga lusin karangan berupa kutipan pendek (diperpendek), seorang pembaca belum akan memperoleh gambaran yang agak bulat, mengenai perkembangan masyarakat desa kita, dalam keseluruhan masyarakat Indonesia dan dunia, juga dalam perkembangan sejarahnya: dari mana berasal dan akan menuju ke mana. Harapan itu lebih baik ditujukan pada satu buku lain, sebaiknya ditulis oleh satu orang, yang sambil memperkenalkan perkembangan masyarakat desa kita, sekaligus memperkenalkan konsepsi-konsepsi dan metode berpikir ilmu sosiologi. Mencontoh kumpulan bacaan ini, setiap dosen sebenarnya dapat menyusun sendiri kumpulan bacaan dari beragam sumber bacaan yang mudah diperoleh sendiri, yaitu dari suratkabar atau majalah. Hal ini dapat dikerjakan bersama mahasiswa yang dibimbingnya, sebagian dari pekerjaan rumah, misalnya. Kita dapat juga menggali dari isi suatu film cerita, dokumenter atau dari satu roman, novel, bahkan dari perbendaharaan puisi, di dalam mendapatkan bahan yang digali dari masyarakat kita. Sayang, terlalu sedikit buah kesusasteraan kita yang punya relevansi cukup, sesuai dengan maksud kita. Untuk mendorong kepada pemikiran secara kritis, sejak lama di Bogor diikuti pola penugasan pada mahasiswa berupa pekerjaan rumah (membaca) yang disusul dengan praktikum diskusi dalam kelompok di ruang praktikum. Pola itu mendorong mahasiswa, setelah menelaah sendiri bahan bacaan, pada sikap terbuka, untuk saling menguji dan menunjukkan sampai mana sesuatu konsepsi baru itu sudah difahaminya. Atau kalau pengertian mahasiswa akan suatu masalah pedesaan yang kita persoalkan, sampai mana persoalan itu telah difahaminya, menurut segi tinjauan sosiologi, akan teruji dalam proses itu. Mahasiswa bukan saja didorong untuk mampu menjawab pertanyaan, tapi juga untuk mampu bertanya. Kemampuan mempertanyakan sesuatu ini (masalah, konsepsi, metode) menjadi modal baginya di jalan ilmu pengetahuan.

Kepada beberapa fihak yang pernah membantu dalam menyiapkan kumpulan bacaan ini dalam bentuk sekarang pantas kami kemukakan ucapan terima kasih. Misalnya Departemen Ilmu-ilmu Sosial-ekonomi,

Fakultas Pertanian, IPB, Ford Foundation dan Yayasan Obor Indonesia untuk dukungan menterjemahkan separoh dari bacaan tersebut. Tapi terima kasih paling besar tertuju pada rekan-rekan dan para asisten di dua Bagian di Bogor yaitu Bagian Sosiologi/Kependudukan dan Bagian Penyuluhan Pertanian serta para mahasiswa sekian angkatan di Bogor (sejak 1975) yang telah mendalami dan menguji bahan-bahan itu dalam praktek mengajar dan belajar. Moga-moga dengan usaha Gadjah Mada University Press edisi cetakan ini dapat mencapai lingkungan peminat yang lebih luas.

Bogor, November 1980 — **Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo**

Kata Pengantar untuk cetakan ke-3

Pada Bab I bacaan ke-4 tentang "Penyuluhan Pertanian" oleh W.W. Turner untuk cetakan ke-3 ini diganti dengan "Proses Belajar Mengajar Dalam Pendidikan Penyuluhan" oleh J.P. Leagans.

Bagian-bagian yang lain tidak mengalami perubahan.

Bogor, 3 September 1983 — **Sayogyo dan Pudjiwati Sayogyo**

DAFTAR ISI

Halaman

I

POLA-POLA KEBUDAYAAN

1. MAHASISWA DAN KELUARGANYA*)

Uraian-uraian tentang hal ihwal masyarakat yang dianggap ilmiah dan dapat dipercaya waktu sekarang, hanya yang berdasarkan statistik. Tentang pendapat umum hanya yang berdasarkan angket. Itupun tidak sembarang statistik atau angket. Bentuk, susunan dari isi harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Maka uraian kami ini, yang sama sekali tidak berdasarkan statistik maupun angket, dimaksudkan hanya sekedar untuk menarik perhatian mereka yang berkecimpung dalam dunia mahasiswa.

Dengan statistik atau angketpun kita belum dapat mengetahui situasi sebenarnya. Yang sebenarnya itupun hanya berlaku untuk waktu yang singkat. Seluruh masyarakat kita, baik usaha obyektif maupun pendapat subyektif, sedang dalam peralihan atau transisi. Keadaan dunia mahasiswa sedang dalam transisi: sikap subyektif para mahasiswa, situasi keluargapun sedang dalam peralihan.

Situasi dunia mahasiswa[1] sekarang tak dapat diramalkan bahwa akan terus demikian. Bahwa perguruan-perguruan tinggi waktu sekarang sedang dibanjiri oleh ribuan mahasiswa mungkin lima tahun lagi akan berubah. Umum sudah tahu mengapa orang dengan sangat mudah mendirikan perguruan tinggi antara lain karena banyaknya permintaan.

---

*. Kutipan dari *BASIS*, Agustus 1970, No. XIX-11, hal. 370-375 oleh Drs. Th. Koendjono.

1. Kata mahasiswa dalam karangan ini mencakup mahasiswi juga.

Mengapa banyak orang mengunjungi perguruan tinggi: karena banyaknya perguruan tinggi dan mudahnya diterima di perguruan tinggi itu?

Di desa-desa sekitar kota-kota besar yang delapan tahun yang lalu masih sedikit pelajar-pelajarnya, kini dapat membanggakan adanya banyak mahasiswa. Demikianlah perkembangannya. Perkembangan yang belum berarti kemajuan. Ribuan pemuda-pemudi membanjiri perguruan-perguruan tinggi dengan alasan yang sama: memperbaiki nasib atau mencari kedudukan dalam masyarakat. Hal mana adalah wajar dan dapat dimengerti.

Dari semua lapisan masyarakat, dari semua macam keluarga, dari semua pelosok daerah datang arus menuju perguruan tinggi ini. Di suatu panewon di Jawa Tengah yang dalam tahun 1930—1940 jumlah pemuda-pemudanya yang belajar di *Algemene Middelbare School* (*A.M.S.* = S.M.A) dapat dihitung dengan jari tangan, sekarang ratusan sudah mahasiswanya.

Dalam arus kemajuan bangsa, pemuda-pemudi di desa-desa dengan sendirinya dihinggapi demam ini juga. Mereka merasa terhalang dengan batas-batas situasi dan masyarakat desa. Banyak beranggapan bahwa kemajuan berarti pergi dari desanya. Untuk dapat berarti di luar desanya, diperlukan keahlian yang dinyatakan dengan suatu ijazah. Sembarang pekerjaan yang memberikan kemungkinan mengangkat situasinya di desa itu dikejarnya dengan sepenuh tenaga. **Jabatan guru yang waktu sekarang sedang dalam diskredit, tidak digemari orang, masih mendapat simpati dari pemuda-pemudi di desa.** Maka terjadilah bahwa banyak keluarga-keluarga desa, keluarga petani mempunyai putra-putri di Universitas atau perguruan tinggi lain. Dapat dikatakan bahwa banyak orang tua-orang tua ini, dulu hanya mendapat pendidikan Sekolah Dasar. Mungkin lebih banyak yang masih buta huruf. Sedikit yang mendapat pendidikan Sekolah Menengah. Dan mungkin hampir tidak ada yang pernah mengikuti sendiri kuliah-kuliah di perguruan tinggi. **Memanglah pendidikan di sekolah bukan satu-satunya sumber pengetahuan atau pengalaman.** Tetapi dapat digambarkan berapa orang tua yang sama sekali tidak tahu menahu sedikitpun tentang perguruan tinggi, di mana putra atau putrinya belajar. Ada suatu anekdote yang menggelikan; seorang bapak menegur anaknya, mahasiswa, di perguruan tinggi, mengapa ia sudah tiga tahun menjadi mahasiswa

belum juga memakai kaca mata.
Menjadi mahasiswa, bukan hanya mengenai mata kuliah saja melainkan kesibukan-kesibukan lain, mentalitet, perhatian, cara berfikir dan lain-lain. Dunia mahasiswa adalah dunia tersendiri. Memanglah kehidupan mahasiswa dengan segala sesuatunya, aktivitas-aktivitas, perkumpulan-perkumpulan, perayaan tak dihayati oleh semua mahasiswa secara menyeluruh. Tidak juga oleh mahasiswa yang diam di kota perguruan tinggi itu sendiri. Apalagi oleh mereka yang *menglajo*.

KITA MEMBICARAKAN DULU mereka yang menglajo, yaitu yang tiap hari pergi dari desanya ke sekolah. Situasi dan suasana desa dan keluarganya lain sekali dengan di kampus. Persoalan-persoalan yang dibicarakan, cara-cara membicarakan sesuatu. Dengan begitu ada suatu jurang pemisah antara dunia kampus dan dunia desa dan keluarga. Bagi mahasiswa golongan ini ada dua dunia yang sangat berlainan. Mereka itu tiap kali harus menghayati kedua dunia itu, menyesuaikan diri dengan dua cara hidup ini. Hal mana tidaklah mudah. Pergantian sikap tidak selalu berhasil. Tergantung kepada kesupelan mental.

Tak boleh diungkiri bahwa ada mahasiswa yang mempunyai kesupelan ini sehingga baik di masyarakat desa maupun di kampus mereka dapat diterima; mereka tidak menjadi unsur asing. Tetapi tidak sedikit, mungkin banyak sekali yang dalam dunia kampus masih membawa tingkah-laku dan sikap mental yang kedesa-desaan dalam arti tertentu, dan dalam masyarakat desa membawa tingkah-laku dan sikap mental kemahasiswaan serba intelektualistis dalam arti tertentu, sehingga di manapun mereka tak dapat berintegrasi. Di kampus mereka tidak bertingkah-laku seperti diharapkan dari mahasiswa baik bahasa maupun pakaiannya atau sopan santunnya, terlalu takut atau terlalu berani. Dalam berilmu mereka tidak berfikir logis, tidak kritis, terlalu percaya kepada dosen sebagai orang tua. Terlalu memakai argumentasi yang berdasarkan kepribadian dan kewibawaan orang lain (*gezags-argumenten*). Ketaatan didasarkan kepada kewibawaan, tidak kepada *evidensi.* Ini ternyata dari takut mengubah rumusan yang diberikan oleh dosen. Atau, mereka membawa argumentasi yang dalam praktek hidup di desa sudah diterima lingkungannya, karena dalam praktek hidup sehari-hari orang tidak selalu dapat bertindak logis. Disiplin bahasa tidak diperlihatkan karena dalam situasi kongkrit dan praktis, di desa, pernyataan yang hanya setengah sudah dimengerti.

Sebaliknya bagaimanapun juga mahasiswa-mahasiswa itu sedikitnya membawa cara-cara berfikir yang ilmiah atau intelektualistis, sehingga tak dapat menerima cara-cara berfikir di desa yang tercermin dalam pembicaraan-pembicaraan, dengan seratus persen lagi. Keseragaman penerimaan ini dengan sendirinya nampak dalam sikap mereka. Dengan demikian terjadi suatu desintegrasi yang tidak disengaja. Terjadi juga dengan sengaja desintegrasi oleh mereka yang ingin menonjolkan diri sebagai orang yang sudah lebih tinggi pendidikannya daripada penduduk desa. Sikap ini dapat merupakan kompensasi bahwa mahasiswa-mahasiswa itu kurang mendapat penghargaan di kampus antara kawan-kawannya. Rasa ''minder'' di kampus ditutup dengan lagak di desa. Kerapkali mahasiswa-mahasiswa ini ada dalam situasi desa di mana mereka tak mempunyai teman untuk membicarakan bersama, tidak hanya bahan mata kuliahnya yang khusus melainkan juga hal-hal yang umum dari dunia mahasiswa. Orang tua dan saudara bukan lagi menjadi teman bicara. Bahan kuliah tak mendapat resonansi di tempat tinggal mereka. Jika kuliah-kuliah itu tidak merangsang, situasipun tak merangsang juga untuk mengolah, memikirkan kembali bahan kuliah yang mereka dapatkan di rumah masing-masing. Situasi perumahan merupakan suasana yang tak memberikan dorongan untuk belajar di malam hari.

TAK USAH DIKATAKAN bahwa dari orang tua tak dapat diharapkan suatu bimbingan. Dalam seluruh desa mungkin tak terdapat satu orang dewasa yang dapat diajak bicara, apalagi diminta bimbingan tentang studinya. **Dan seperti keadaannya sekarang masih sedikit sekali dosen yang memberikan bimbingan, karena banyak dari mereka dihinggapi pula demam memperbaiki nasib.** Maka tidak sedikit mahasiswa yang sama sekali tidak mendapat bimbingan, sedangkan mereka masih sangat membutuhkannya. Mahasiswa-mahasiswa dari Tingkat I yang baru lulus dari Sekolah Menengah dan masih muda, sudah harus berdiri sendiri dalam menyiapkan diri dalam mencari ilmu yang menentukan kepribadiannya. Maka mereka merasa hidup di padang pasir tak tahu akan sesuatu orientasi. Paling-paling mereka dapat membicarakan soal-soalnya bersama kawan-kawannya, yang sedang bergulat dengan aneka warna persoalan. Moral dan intelektual mereka banyak kesepian. Maka menarik sekali bagaimana mereka itu membutuhkan teman tetap, mahasiswa bersama mahasiswa, mahasiswi bersama mahasiswi. Rasa

kesepian ini mendapat kompensasi dari kedudukan mereka yang baru, yaitu kedudukan yang bernama ''Mahasiswa'' dan dunia yang serba baru dan penuh kebebasan. Jadi lapangan hidup ini membawa kebebasan bergerak tetapi juga suasana sepi. Tetapi karena banyak dari mereka belum mampu mengisi gelar ''mahasiswa'' maka ada keragu-raguan menggunakan ''gelar'' mahasiswa ini. Terlalu mudah mendapatkan gelar ini hanya dijadikan ejekan belaka; terlalu kerap dan secara sarkastis nama ini digunakan.

Banyak orang tua hanya tahu bahwa belajar di Universitas atau perguruan tinggi adalah jalan untuk mengangkat kedudukan keluarga mereka. Maka mereka merasa sanggup mengeluarkan biaya yang sering di atas kemampuannya. Tetapi kehidupan anaknya sebagai mahasiswa merupakan satu tanda tanya besar.

Karena tak tahu bagaimana dunia mahasiswa itu, orang tua mereka tak mampu memberikan nasehat atau bimbingan yang kongkrit. Nasehat-nasehat yang mungkin diberikan, masih sama seperti yang diberikan kepada anaknya yang masih di sekolah menengah. Dengan sendirinya nasehat-nasehat semacam itu tak mengenai sasarannya. Mahasiswa tetap tanpa bimbingan. Keuntungan situasi mahasiswa golongan ini ialah, bahwa mereka terhindar dari ekses kehidupan mahasiswa. Dalam bidang moril mereka masih dilindungi oleh suatu kontrol dari keluarga dan masyarakat.

Sifat baru dari dunia mahasiswa tidak selalu bertahan. Cukup cepat dunia itu menjadi biasa: sumber petualangan akhirnyapun kering juga. Pemuda-pemuda yang ada di perguruan tinggi kebanyakan ada dalam umur-umuran 19—25 tahun, jadi umur yang normal untuk mencari kawan hidup. Pada waktu itulah mereka mengharapkan menemukan teman tetap untuk hidupnya. Dalam hubungan mereka dengan orang tua dan keluarga timbullah juga persoalan-persoalan baru. Terjadi lagi suatu gap, perselisihan faham, sedangkan konflik pun tak jarang pula terjadi.

Kebebasan yang baru dikenyam dan dirasakan baik dalam menemukan dirinya dalam mencari kedewasaan, akan juga ditetapkan dalam memilih teman hidup. Kebebasan dalam hal ini dalam dunia mahasiswa biasanya lebih besar dari manapun juga, karena mereka bukan hanya berkuliah bersama, tetapi juga banyak bersama, bekerjasama dengan erat dan akrab dalam aktivitas-aktivitas ''extracurriculair''. Apalagi bagi mereka yang berasal dari desa juga masih tetap

menjadi anggota masyarakat desa. Dalam hal itu mereka hidup dalam dua dunia, di mana mereka tiap kali harus berganti sikap. Ada seorang mahasiswi yang dengan jujur berkata bahwa ia mempunyai pakaian-pakaian yang ia tak berani memakainya di desa. Dalam hal ini ada gap, yang tidak jarang menyebabkan konflik antara mahasiswi dengan orang tuanya. Dalam kesepian intelektual atau kekosongan intelektual, karena kurangnya pengetahuan yang mendarah daging, dan dalam kesepian moril, orang dengan sendirinya mencari pelarian dalam hubungan dengan jenis yang lain. Maka tidak sedikit yang diombang-ambingkan antara rencana membina keluarga dan rencana menyelesaikan studi. ''Kalau saya tidak naik tingkat (lulus) saya akan kawin saja,'' sekali-kali terdengar. Meskipun dikatakan secara bersenda gurau tetapi tidak tanpa latar belakang.

Tanpa mengetahui dunia mahasiswa dan keadaan jiwa para mahasiswa, orang tua sukar memberikan nasehat dan bimbingan yang tepat.

SITUASI MAHASISWA yang tidak menglajo, melainkan hidup di kota di mana mereka berkuliah, sukar disamaratakan. Ada yang hidup bermondok, alias hidup sendiri. Bahwa mereka hidup di kota dengan sendirinya, membawa keuntungan dan kerugian.

Keuntungan: jurang antara dunia mahasiswa atau kehidupan kampus dan tempat tinggalnya tidak besar. Mencari kawan yang sebaya dan setaraf pendidikannya tidak sukar. Hidup kota dengan adanya surat kabar dan radio, film, pertunjukan-pertunjukan seni, perpustakaan, sedikit banyak menyangkut paut bahan-bahan kuliah. Hal mana membantu sekali untuk ''mempraktekkan'' bahan kuliah. Tetapi keributan hidup kota mudah menggelisahkan jiwa, mengaburkan perhatian, sampai dapat melupakan bagian hidup yang lebih besar. Hal ini mungkin, lebih-lebih bagi mahasiswa yang hanya berkuliah di sore hari, di mana jiwa kurang segar untuk menangkap kuliah. Pergi berkuliah dapat hanya merupakan variasi, selingan, bukan tugas pokok. Hidup manusia bagaimanapun juga harus diisi, meskipun hanya sedikit, dengan sesuatu yang serius. Dengan pergi berkuliah secara iseng-iseng itu mereka merasa hidupnya sudah diisi dengan sesuatu yang serius. Inilah kerugiannya kecuali ekses-ekses hidup mahasiswa seperti yang disebut di atas.

Orang tua yang hidup di kota dengan sendirinya lebih tahu-menahu, lebih banyak mendengar tentang kehidupan mahasiswa dengan

rapat-rapatnya, perayaan-perayaannya dan mungkin juga demonstrasi-demonstrasinya, meskipun tidak semua dapat mereka mengerti. Ada orang tua yang hidup di kota ini—karena pendidikannya—tetap acuh tak acuh tentang kehidupan anaknya sebagai mahasiswa. Dunia mahasiswa terlalu asing bagi mereka. Ada pula yang memperhatikan, tetapi karena kurang tahu dan membandingkan hidup mahasiswa, yaitu ''mereka yang harus mengejar ilmu dan mencari ijazah'', hanya melihat anehnya saja. Dunia mahasiswa yang menyangkut banyak bidang, dikira hanya seperti hidup para pelajar Sekolah Menengah belaka. Meskipun jarak antara orang tua dan anaknya yang menjadi mahasiswa sesuatu yang riil, namun tetap harus disesalkan. **Dan siapa berpendapat, baik orang tua maupun mahasiswanya sendiri, bahwa mahasiswa tak lagi membutuhkan keluarga, salah benar.**

Dari apa yang kami gambarkan di atas, malah jelaslah bahwa justru mahasiswa membutuhkan keluarga dengan suasananya. Dunia mahasiswa yang merupakan tempat macam-macam pengaruh bersimpang siur, harus diberi kompensasi dari suasana keakraban keluarga. Dari keributan dunia mahasiswa, mahasiswa harus dapat kembali ke ketenangan keluarga, kasih sayang yang nyata dari ayah, ibu dan saudara-saudaranya. Dan mungkin inilah sebabnya mengapa para mahasiswa yang mondok di kota pada hari pertama liburan terus buru-buru pulang. Mereka membutuhkan suasana yang pada hakekatnya akrab, keakraban yang asli. Maka beratlah nasib dan berbahayalah situasi mahasiswa yang tak mempunyai ''kampung halaman'' yang menyejukkan jiwanya dari panasnya dunia mahasiswa. Bahkan cinta kasih orang tua inilah yang dibutuhkan mahasiswa lebih dari segala serba pengertian dan bimbingan yang konkrit. Cinta kasih yang dinyatakan dengan perhatian meskipun hanya secara pasif. Dengan penuh perhatian mendengarkan ceritera tentang kesibukan mereka, tanpa tergesa-gesa mengecam ini atau mengecam itu. Ada orang tua-orang tua yang menjadi guru sendiri, untuk menutupi ketidak fahamannya tentang dunia perguruan tinggi, dan para guru mudah merasa banyak tahu—suka mencela apa saja yang tak dimengertinya. Dengan begitu malah timbul suatu pertentangan yang sering mengakibatkan kegagalan si mahasiswa. Lagi pula beberapa mahasiswa—lihat para mahasiswa tingkat I—yang belum dewasa sungguh-sungguh.

Dan karena studinya, mereka bergaul dengan rekan mahasiswa yang

masih juga belum dewasa, tetapi tidak lagi diperlakukan oleh orang tua sebagai anak yang masih harus dibimbing. Para mahasiswa sendiri hanya memperhatikan nasibnya sendiri; masih egocentris. Ditambah dengan rasa cemburu terhadap mahasiswa lain yang lebih berhasil dalam usahanya. Karena orang tua dan melalui orang tua, para mahasiswa mendapat kesempatan bergaul dengan orang dewasa.

Untuk lengkapnya masih harus kami katakan bahwa ada orang tua juga yang ''sok modern'', yang a priori membenarkan dan menyetujui perbuatan-perbuatan anaknya sebagai mahasiswa. Orang tua semacam itu takut dikecam kolot, ketinggalan jaman. Mereka itu hanya berlagak. Kebanggaan mereka ialah jika anaknya menjadi tokoh dalam dunia mahasiswa pelopor suatu aktivitas, tanpa mau melihat bahwa nanti menjadi korbannya sendiri.

Kesimpulan dari semua ialah bahwa para orang tua yang anaknya menjadi mahasiswa wajib mencari keterangan-keterangan tentang dunia mahasiswa baik dari anaknya sendiri maupun dari orang lain yang tahu menahu tentang dunia mahasiswa.

2. BENARKAH NORMA-NORMA PERGAULAN MUDA-MUDI DI IBU KOTA SUDAH BERUBAH?*)

(1) Cara penyelidikan.

Mengapa dipilih penyelidikan tentang kaidah-kaidah atau ukuran norma? Dasar pertimbangannya ialah bahwa salah satu aspek yang dikhawatirkan oleh orang tua dan para pendidik umumnya, adalah kekaburan atau hilangnya batas-batas normatif yang menyangkut hubungan antar jenis. Ini menyangkut tidak adanya batas-batas yang jelas mengenai tingkah laku apa yang boleh atau yang tidak boleh dalam pergaulan antara muda-mudi, khususnya dalam pergaulan sebelum memasuki kehidupan perkawinan.

Untuk keperluan penyelidikan ini, ukuran normatif ditinjau dari derajat *permissiveness* atau kelonggaran sikap seseorang yaitu yang menunjukkan, seberapa jauh suatu tindakan (seksual) tertentu ia benarkan (ia anggap boleh), khususnya yang bertalian dengan batas-batas normatif dalam pergaulan sehari-hari sebelum masa perkawinan.

Dalam penyelidikan pendahuluan ini dipilih 4 bentuk hubungan antar jenis, yaitu bentuk-bentuk hubungan yang berdasarkan suatu ikatan emosional tertentu dan secara kualitatif berbeda satu sama lain. Keempat macam bentuk hubungan tersebut, ialah: 1) Bertunangan, 2) Berpacaran, 3) Berteman akrab, dan 4) Berteman biasa.

Di antara keempat bentuk hubungan ini, keterlibatan emosional pada pertunangan dianggap yang paling kuat. Keterlibatan emosional itu berkurang pada berpacaran (artinya tidak sekuat pada pertunangan) dan lebih berkurang lagi pada berteman akrab. Dan pada berteman biasa keterlibatan emosional itu adalah paling lemah.

Di samping pola-pola hubungan emosional tersebut tadi, dalam pergaulan sehari-hari masih dikenal pula beberapa tingkah lagu konkrit. Dan untuk keperluan di sini, dipilih jenis tingkah laku, yaitu

---

*) Suatu penyelidikan selintas oleh Fakultas Psikologi , Universitas Indonesia Jakarta bersama *Kompas*. Dikutip dari harian *Kompas*, Rabu, 22 Maret 1972.

1) pergi berduaan tanpa ditemani orang lain, 2) bermesraan, 3) bercumbuan dan 4) berhubungan kelamin.

Keempat jenis tingkah laku ini dibedakan satu sama lain, dasar perbedaan ialah bahwa sampai derajat tertentu, setiap jenis tingkah laku tersebut dianggap secara gradual berbeda dalam menimbulkan gairah seksual.

Dalam hubungan ini kami catatkan definisi-definisi yang diberikan kepada para siswa dalam kelompok penyelidikan ini mengenai istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

a) berduaan tanpa ditemani orang lain, artinya: pergi bersama-sama berduaan, misalnya: menonton, piknik, pesta dan lain-lain dengan tidak ditemani oleh orang ketiga (atau lebih) tanpa ada tindakan-tindakan yang lebih jauh dari sekedar bersama-sama.
b) bermesraan, artinya: tindakan-tindakan yang dilakukan antara sepasang muda-mudi dalam suasana mesra atau intim, berpandang-pandangan, berpegangan tangan atau bergandengan akan tetapi tidak sampai pada bercumbuan.
c) bercumbuan, artinya: melakukan pendekatan-pendekatan badaniah seperti berciuman, berpelukan, berangkulan dan lain-lain, yang dapat membangkitkan gairah seksual, akan tetapi belum sampai pada hubungan kelamin.
d) hubungan kelamin, artinya: hubungan kelamin dalam arti yang sebenarnya.

PENYELIDIKAN mengenai ukuran-ukuran normatif dilakukan dengan suatu skala sikap. Skala sikap ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berdasarkan keempat bentuk hubungan tersebut (bertunangan, berpacaran, berteman akrab dan berteman biasa) dan berdasarkan keempat jenis tingkah laku tersebut di atas (pergi berduaan, bermesraan, bercumbuan, dan berhubungan kelamin).

Untuk jelasnya kami ambilkan beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang menyatakan skala sikap itu, di antaranya sebagai berikut:

(1) Menurut pendapat saya, sebelum menikah seorang pemuda yang telah bertunangan diperbolehkan bermesraan dengan gadis yang menjadi tunangannya.
(2) Menurut pendapat saya, sebelum menikah seorang pemuda yang

berpacaran diperbolehkan bermesraan dengan gadis yang menjadi pacarnya.

(3) Menurut pendapat saya, sebelum menikah seorang pemuda diperbolehkan bermesraan dengan seorang pemudi yang merupakan teman akrabnya.

(4) Menurut pendapat saya, sebelum menikah seorang pemuda diperbolehkan bermesraan dengan seorang pemudi yang hanya merupakan teman biasa.

Masing-masing pertanyaan dijawab dengan: (S), Setuju atau (TS), tidak setuju.

Sebagai kelompok penyelidikan telah dipilih siswa-siswa yang masih duduk di bangku S.L.A. (Sekolah Lanjutan Atas). Dipilih 3 buah S.L.A.; ketiganya berada di lingkungan daerah Jakarta Raya.

Kelompok penyelidikan terdiri dari 56 siswa laki-laki dan 40 siswa perempuan dengan batas umur antara 16 tahun sampai 19 tahun.

Pilihan ketiga SLA didasarkan atas anggapan umum bahwa ketiga SLA tersebut dikenal sebagai sekolah: *upper middle class* (yaitu, umumnya murid-muridnya berasal dari golongan menengah lapisan atas), *middle class* (golongan menengah) dan *lower middle class* (golongan menengah lapisan bawah).

Masing-masing sekolah bersifat campuran, dalam arti, siswa-siswa perempuan dan laki-laki dididik bersama dalam satu kelas, satu sekolah.

(2) Beberapa hasil pokok

Penyelidikan dengan sampel yang terbatas ini, memberikan beberapa hasil pokok yang cukup menarik.

1. Secara umum diperoleh gambaran berikut. Bagi muda-mudi kelompok penyelidikan ini, kuat lemahnya ikatan emosional dijadikan ukuran dalam menentukan batas-batas normatif mengenai cara mereka bergaul. Semakin kuat ikatan emosional, makin besar pula derajat *permissiveness* untuk memilih jenis-jenis tingkah laku yang makin menjerumus pada perangsangan gairah seksual. Dengan lain perkataan makin kuat keterlibatan emosional, makin longgar pula sikap atau anggapan mereka mengenai jenis tingkah laku yang boleh dilakukan.
2. Bagi kelompok ini, berhubungan kelamin dapat diterima sejauh hal

tersebut dilakukan antara muda-mudi yang telah bertunangan (artinya telah terikat dalam suatu ikatan yang sudah resmi dikenal baik oleh keluarga maupun oleh masyarakat umumnya). Dalam hal ini berlaku baik untuk si pemudi maupun untuk si pemuda yang bersangkutan. Sikap tersebut terutama dinyatakan oleh para siswa laki-laki. Sementara itu sebagian besar siswa wanita bersikap, bahwa perkawinan adalah pegangan utama untuk melakukan hubungan kelamin di dalam pergaulan antar jenis.

3. Kelompok muda-mudi ini terdiri dari:
   (1) mereka yang dilahirkan dan dibesarkan di Jakarta (38,5 %),
   (2) selebihnya berasal dari luar Jakarta, tetapi sebagian besar datang dari kota-kota propinsi seperti Bandung, Medan, Surabaya dan lain-lain serta telah berada kurang lebih 5 tahun lamanya di Jakarta,
   (3) sebagian besar dari mereka memeluk agama Islam (86%) dan berasal dari keluarga suku Jawa, Sunda dan Minangkabau (kira-kira 70%) dan beberapa suku-suku lain dengan penyebaran yang merata.

Hasil penyelidikan pendahuluan ini tidak menunjukkan bahwa perbedaan latar belakang kebudayaan maupun perbedaan pengalaman individual, memberi pengaruh yang berarti dalam membentuk sikap mereka atau menentukan batas-batas normatif dalam hubungan antar jenis.

4. Dalam menghadapi kesukaran-kesukaran dalam pergaulan, siswa-siswa ini memperlihatkan kecenderungan yang kuat untuk berpaling pada lingkungan rumahnya, sedikit untuk mencari pemecahan kesukaran-kesukaran itu. Dalam hal ini pilihan ditujukan kepada orang tua (52%), dan kepada kakak (21%). Hanya 10,4% dalam mencari pemecahan kesukaran-kesukaran itu membatasi diri pada pembicaraan dengan teman sendiri. Hampir seluruhnya (92,6%) menyatakan sikap, bahwa pemilihan kegiatan-kegiatan mereka lakukan seizin dan sepengetahuan orang tua.
5. Sikap para siswa mengenai persyaratan untuk memasuki sesuatu hubungan tertentu adalah sebagai berikut:
   (1) Untuk pria berpacaran boleh dilakukan sekurang-kurangnya bila ia telah berada di SLA (45,8%), atau di perguruan tinggi (40,6%). Untuk wanita, bila ia telah di SLA (70%).

(2) Bagi pria, pertunangan boleh ditempuh bila ia telah di perguruan tinggi atau telah bekerja; untuk wanita pertunangan boleh dilakukan sejak ia di SLA.

(3) Kelompok siswa pria menganggap sudah bekerja sebagai persyaratan utama (91,6%) untuk memasuki status perkawinan; untuk siswa perempuan perkawinan telah boleh dilakukan sejak ia di perguruan tinggi (63%) atau setelah ia bekerja (23%).

Terhadap persyaratan-persyaratan ini tidak ada perbedaan sikap yang berarti (significant) antara kelompok siswa laki-laki dan perempuan.

(3) Kesimpulan

Dengan meninjau pergaulan muda-mudi ke dalam 4 bentuk pola hubungan emosional (ialah: bertunangan, berpacaran, berteman akrab dan berteman biasa) dan empat jenis tingkah laku konkrit (ialah: pergi berduaan tanpa ditemani orang lain, bermesraan, bercumbuan dan berhubungan kelamin), maka dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan di bawah ini.

1. Dari kelompok siswa-siswa ini diperoleh gambaran bahwa mereka mengenal batas-batas normatif dalam pergaulan mereka sehari-hari.
2. Batas-batas normatif ini tidak menunjukkan perbedaan yang berarti (*significant*) bagi remaja laki dan remaja wanita, tidak tampak adanya *double standard.* . Dengan lain perkataan, tak tampak anggapan bahwa bagi remaja laki-laki dan bagi remaja wanita berlaku ukuran yang berbeda.
3. Sikap kelompok siswa laki-laki dan wanita mengenai hubungan antar jenis pada umumnya adalah: makin kuat keterlibatan emosional makin besar derajat *permissiveness* (yaitu banyak yang diterima sebagai boleh dilakukan dalam hubungan antar jenis).
4. Di dalam hubungan pertunangan (suatu ikatan emosional yang telah diresmikan) berhubungan kelamin, mereka anggap dapat diterima. Hal ini terutama dinyatakan oleh sebagian besar siswa laki-laki. Sebagai siswa putri memilih perkawinan sebagai persyaratan utama untuk melangsungkan hubungan kelamin.
5. Dalam mencari pedoman-pedoman tingkah laku, siswa-siswa ini cenderung untuk kembali ke dalam lingkungan keluarga. Dan khususnya mereka memilih orang tua dan kakak (sebagian orang-

orang dewasa atau orang yang lebih tua dari mereka sendiri) sebagai sumber yang biasa memberi nasehat-nasehat dalam menghadapi kesukaran-kesukaran ataupun dalam memilih kegiatan-kegiatan mereka pada umumnya.

6. Pada kelompok siswa-siswa ini perbedaan latar belakang kultural maupun perbedaan pengalaman-pengalaman individual tidak menyatakan diri di dalam pembentukan perbedaan sikap hubungan antar jenis.
7. Penyelidikan pendahuluan ini tidak mengukuhkan anggapan umum perihal terjadinya dekadensi moral pada generasi muda secara menyeluruh.
8. Salah satu gambaran yang diperbolehkan dari studi yang terbatas ini adalah bahwa memang terjadi pergeseran ukuran-ukuran normatif di kalangan generasi muda kota dibandingkan dengan ukuran yang telah berlaku sebelumnya.
9. Seperti disebutkan di atas, remaja kota kelompok penyelidikan ini terdiri atas mereka yang tergolong masih bersekolah dan dari mereka diperoleh gambaran bahwa ada kecenderungan untuk berpegang pada pedoman-pedoman normatif dari lingkungan keluarga. Mengingat hal ini maka dapat diterima kesimpulan lanjutan bahwa yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan bimbingan normatif terhadap para remaja adalah orang-orang dewasa dalam lingkungan sekolah dan keluarga pada remaja itu.

3. RINTANGAN-RINTANGAN MENTAL DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA*)

Mendefinisikan Faktor-Faktor Mental

(1) Sistem Nilai Budaya dan Sikap

Faktor-faktor mental itu adalah pengetahuan mengenai sistem nilai budaya atau *cultural value systems* dan mengenai sikap atau *attitudes*. Kedua hal itu menyebabkan timbulnya pola-pola cara berpikir tertentu pada warga suatu masyarakat dan sebaliknya pola-pola cara berpikir inilah yang mempengaruhi tindakan-tindakan dan kelakuan mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam hal membuat keputusan-keputusan yang penting dalam hidup.

Sistem nilai budaya itu merupakan suatu rangkaian dari konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat, mengenai apa yang harus dianggap penting dan berharga, tetapi juga mengenai apa yang dianggap remeh dan tak berharga dalam hidup. Dengan demikian sistem nilai budaya itu juga berfungsi sebagai suatu pedoman tapi juga sebagai pendorong kelakuan manusia dalam hidup, sehingga berfungsi juga sebagai suatu sistem tata kelakuan; malahan sebagai salah satu sistem tata-kelakuan yang tertinggi di antara yang lain, seperti hukum, hukum adat, aturan sopan santun dan sebagainya. Biasanya suatu sistem nilai budaya yang tertentu telah berkembang sejak lama, mencapai suatu kemantapan dan hidup langsung dari angkatan ke angkatan. Di dalam fungsinya sebagai pedoman kelakuan dan tata-kelakuan, maka sama halnya dengan hukum misalnya, suatu sistem nilai budaya itu seolah-olah berada di luar dan di atas diri pada individu dalam masyarakat yang bersangkutan.

---

*) Dikutip dari "Rintangan-rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia", oleh Koentjaraningrat, halaman-halaman: 19—22, 25, 27—37; Lembaga Research Kebudayaan Nasional, Terbitan Tak Berkala LIPI seri no. 1/2, Bhratara, 1969.

Pada individu sejak kecil telah diresapi dengan nilai-nilai budaya dari masyarakatnya, sehingga konsepsi-konsepsi itu telah menjadi berakar dalam mentalitet mereka dan sukar untuk diganti dengan nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu yang singkat.

Suatu contoh dari suatu unsur nilai budaya yang biasa merintangi pembangunan ekonomi adalah misalnya konsepsi yang menilai tinggi masa yang lampau saja, tetapi meremehkan peninjauan terhadap masa depan. Suatu nilai budaya serupa itu yang hanya akan merindukan saja masa kejayaan yang lampau, tanpa mencoba mencapai pengertian tentang masa kejayaan tadi, tak akan mendorong usaha perencanaan sampai sejauh mungkin ke depan berdasarkan atas data-data nyata yang dikumpulkan secara seksama.

Suatu sikap merupakan kecondongan yang berasal dari dalam diri si individu untuk berkelakuan dengan suatu pola tertentu, terhadap suatu obyek berupa manusia, hewan atau benda, akibat pendirian dan perasaannya terhadap obyek tersebut. Berbeda dengan nilai-budaya yang seolah-olah berada di luar dan di atas si individu, suatu sikap itu berasal dari dan berada di dalam diri si individu itu sendiri. Suatu sikap terhadap suatu obyek itu, bisa juga dipengaruhi oleh unsur-unsur nilai budaya, artinya pendirian dan perasaan orang terhadap suatu pekerjaan, terhadap manusia lain, terhadap hewan atau benda yang dihadapinya itu, bisa ditentukan oleh caranya pandangan umum dalam masyarakatnya menilai obyek-obyek tadi.

Suatu contoh dari suatu sikap yang bisa merintangi pembangunan ekonomi adalah misalnya sikap segan terhadap tiap-tiap tugas yang membutuhkan bekerja dengan tangan, oleh muda-mudi yang sudah mendapat pendidikan sekolah; dan karena itu lebih suka untuk bekerja sebagai pegawai di belakang meja tulis saja.

Suatu nilai-budaya, walaupun merupakan suatu konsepsi yang abstrak, juga bisa mempengaruhi tindakan manusia secara langsung. Kecuali itu suatu nilai-budaya bisa juga menyebabkan timbulnya pola-pola cara berpikir yang tertentu pada si individu yang bersangkutan. Untuk menyebut suatu contoh: ada nilai budaya yang menganggap penting konsepsi bahwa dalam kehidupan masyarakat itu orang amat tergantung kepada sesamanya, dan karena itu orang harus selalu ingat terhadap sesamanya. Nilai budaya serupa itu menyebabkan bahwa dalam tindakan-tindakan ia selalu memberi punjungan makanan kepada

tetangga atau kenalan-kenalannya, kalau ia sedang mempunyai hajat atau selalu memberi oleh-oleh kepada mereka kalau ia kembali dari suatu perjalanan jauh. Tindakan itu walaupun kadang-kadang dilakukan olehnya dengan pengeluaran-pengeluaran tambahan yang sebenarnya agak di luar batas kemampuannya toh dirasionalisasikan olehnya dengan suatu cara berpikir sebagai berikut: Biar saja keluarkan biaya tambahan ini karena nanti toh ada balasannya berupa kemauan baik dari tetangga saya, atau berupa pertolongan-pertolongan dari mereka kalau saya berada dalam keadaan kesusahan.

Serupa dengan itu, suatu sikap yang merupakan kecondongan untuk bereaksi bisa juga secara langsung mempengaruhi tindakan. Untuk menyebut suatu contoh: ada orang-orang yang mempunyai sikap segan terhadap pekerjaan yang sifatnya itu melayani orang lain. Sikap itu akan menyebabkan bahwa si individu yang bersangkutan tidak akan melakukan tugasnya secara baik, kalau ia diberi pekerjaan yang bersifat melayani umum. Kecuali itu suatu sikap tertentu juga bisa mempengaruhi cara berpikir si individu, sehingga ia mulai berpikir menurut suatu pola yang tertentu. Dengan itu ia merasionalisasikan perbuatannya, artinya ia mencari alasan-alasan kebenaran bagi tindakan-tindakannya. Ia akan berpikir misalnya: ''Teman-teman saya seangkatan banyak yang sudah mendapat pangkat-pangkat yang baik di kantor, masakan saya harus bekerja di lapangan''.

Dipandang dari sudut apa yang terurai di atas maka baik nilai-budaya, maupun sikap bisa mempengaruhi tindakan manusia baik secara langsung, maupun melalui pola-pola cara berpikir. Sungguhpun demikian, sebagai suatu sistem tata kelakuan yang abstrak, dalam kenyataan suatu sistem nilai budaya itu, terperinci lagi ke dalam apa yang disebut norma-norma dan norma-norma inilah yang merupakan tata kelakuan dan pedoman yang sesungguhnya untuk sebagian besar dari tindakan-tindakan manusia dalam masyarakat. Bentuk yang nyata dari norma-norma itu bermacam-macam; ada yang berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, aturan-aturan adat, aturan-aturan sopan-santun pergaulan dan sebagainya, masing-masing dengan fungsi-fungsinya sendiri guna mengatur kehidupan kemasyarakatan yang kompleks itu.
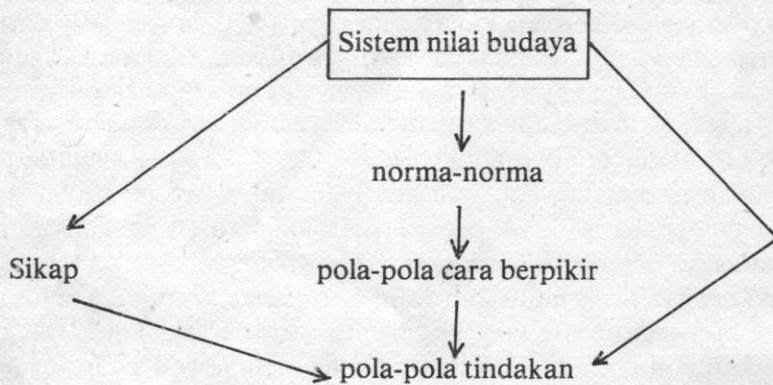
(2) Kerangka Untuk Meninjau Sistem Nilai Budaya

Sesudah uraian umum mengenai apa yang kami maksud dengan konsep sikap dan konsep nilai-budaya ini, maka sekarang akan kami uraikan suatu kerangka yang dapat kita pakai untuk meninjau secara menyeluruh apakah kemungkinan-kemungkinan isi dari sistem nilai budaya dalam suatu kebudayaan. Kerangka itu pernah diajukan oleh ahli antropologi F.R. Kluckhon dan ahli sosiologi F.L. Strodtbeck dalam buku mereka *Variation in Value Orientation* (1961) dan berpangkal kepada lima masalah pokok dalam kehidupan manusia yang bersifat universal dan yang berada dalam semua kebudayaan di manapun saja di dunia. Kelima masalah pokok itu adalah:

1. Masalah mengenai hakekat dan sifat hidup manusia
2. Masalah mengenai hakekat dari karya manusia
3. Masalah mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu
4. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
5. Masalah mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya.

Tabel 1. Kerangka Kluckhon mengenai lima Masalah Hidup yang menentukan Orientasi Nilai Budaya Manusia.

Masalah Hidup	Orientasi Nilai Budaya		
Hakekat dan sifat hidup	Hidup itu buruk	Hidup itu baik	Hidup itu buruk tetapi harus diperbaiki
Hakekat karya	Karya itu untuk hidup	Karya itu untuk kedudukan	Karya itu untuk menambah karya
Hakekat kedudukan manusia dalam ruang waktu	Masa lalu	Masa kini	Masa depan
Hakekat hubungan manusia dengan alam	Tunduk terhadap alam	Mencari keselarasan dengan alam	Menguasai alam
Hakekat hubungan manusia dengan manusia	Memandang ke tokoh-tokoh atasan	Mementingkan rasa ketergantungan kepada sesamanya (berjiwa gotong-royong)	Mementingkan rasa tak tergantung kepada sesamanya (berjiwa indivividualis).

(3) Ciri-ciri Mental Manusia Indonesia Asli

Rakyat Petani dan Mentalitasnya. Karena sebagian besar dari rakyat Indonesia itu adalah rakyat petani sejak berabad-abad lamanya, maka tak mengherankan bahwa cara berpikir yang paling asli itu adalah seperti cara berpikir rakyat petani. Serupa dengan beberapa ahli antropologi, terutama P. Redfield, kami menganggap petani atau *peasant* itu, rakyat pedesaan, yang hidup dari pertanian dengan teknologi lama, tetapi yang merasakan diri bagian bawah dari suatu kebudayaan yang lebih besar, dengan suatu bagian atas yang dianggap lebih halus dan

beradab di dalam masyarakat kota. Sistem ekonomi dalam masyarakat petani itu berdasarkan pertanian (bercocok tanam, peternakan,atau perikanan) yang menghasilkan pangan dengan teknologi yang sederhana dan dengan kesatuan-kesatuan produksi yang tidak berspesialisasi. Adapun watak dari petani yang hidup dalam masyarakat pedesaan itu, menurut para ahli dari abad ke-19 yang lalu, dijiwai oleh maksud serba rela, atau Wesenwille dalam pergaulan (Tonnies, 1887); sedangkan menurut ahli seperti Boeke, orang petani tidak suka bekerja, bersifat statis, tak mempunyai inisiatif, dan hanya suka membebek saja kepada orang-orang tinggi dari kota.

Pada masa sekarang, para ahli sosiologi telah mulai meninggalkan konsepsi bahwa masyarakat petani di daerah pedesaan itu merupakan suatu tipe masyarakat dengan sejumlah ciri-ciri pokok yang tertentu. Karena para ahli itu sekarang telah lebih banyak mempelajari dan memahami masyarakat pedesaan itu dari dalam, maka mereka sudah sadar bahwa struktur masyarakat dan sistem ekonomi desa itu tidak seragam menurut suatu tipe ideal yang tertentu dan bahwa bayangan orang kota mengenai masyarakat desa yang tenang tenteram, rela, rukun dan berjiwa gotong royong, sering tidak cocok dengan kenyataan. Mungkin satu abad yang lalu, kontras antara masyarakat pedesaan dan masyarakat kota itu masih amat menonjol, tetapi dalam jangka waktu itu masyarakat pedesaan tidak tinggal statis, sehingga banyak unsur-unsur masyarakat kota masuk ke daerah pedesaan, dan banyak orang desa yang berurbanisasi membawa ciri-ciri dan terutama mentalitet pedesaan ke kota. Maka dari itu, pada masa sekarang menjadi amat sukar untuk membedakan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat kota, kecuali hanya dalam hal-hal seperti jumlah penduduk, heterogenitas penduduk, dan tingkat teknologi modern.

Walaupun memang kita tak bisa menentukan dengan tepat ciri-ciri masyarakat petani dari sudut susunan dan sistem perekonomiannya yang biasanya telah berada pada berbagai macam taraf perobahan dan taraf pengaruh unsur-unsur masyarakat kota serta sistem ekonomi modern, namun menurut hemat kami, kita bisa menentukan ciri-ciri pokok yang dominant dari sistem nilai budaya petani pada umumnya. Paling sedikit kita bisa menentukan sistem nilai budaya dalam mentalitet petani di Indonesia, sebagai suatu daerah dengan kebudayaan yang beraneka warna wujudnya tetapi yang dasarnya sama. Pendirian kami ini juga

berdasarkan fakta, bahwa suatu sistem nilai budaya itu kalau tidak terpaksa, tidak akan berobah dengan kecepatan yang sama dengan susunan masyarakat ataupun sistem ekonomi. Demikian banyak orang petani yang sudah meninggalkan mata pencaharian hidupnya dalam pertanian dan telah mendapat kedudukan dalam sistem kehidupan kota, toh masih membawa pula sistem nilai budayanya, dalam alam pikirannya. Kemudian mentalitet dari anak-anaknya, walaupun sudah berbeda, toh masih akan mengandung pula banyak unsur-unsur nilai budaya dari orang tua, dan mungkin baru satu generasi kemudian lagi sistem nilai budaya itu mulai mewujudkan ciri-ciri yang lama. Sekali lagi, menurut hemat kami, sistem nilai budaya petani atau *peasant values* itu, suatu konsep yang nyata dan ada tidak hanya pada orang petani di desa, tetapi masih juga pada orang-orang yang sudah lama di kota. Untuk tidak menimbulkan salah faham, maka kita hindari kata masyarakat petani, tetapi bicara tentang sistem nilai budaya dalam "orde sosial" petani.

Sekarang timbul pertanyaan bagaimanakah sebenarnya ciri-ciri nilai budaya dalam mentalitas petani di Indonesia? Cara berpikir dan mentalitet rakyat petani di Indonesia itu telah sejak lama menjadi perhatian para ahli, terutama para ahli hukum adat Indonesia. Pertama-tama F.D.E. van Ossenbruggen (1911; 1916), kemudian J. Mallinckrodt (1928), Sukamto (1933) dan N.W. Lesquillier (1934), semuanya tertarik akan masalah itu, karena ingin memahami cara berpikir yang merupakan latar belakang dari hukum adat Indonesia, yang tampaknya amat berbeda dengan hukuman orang Eropa itu. Dalam analisa mereka, semua ahli tersebut bicara tentang adanya suatu sifat religiomagis yang menghinggapi cara berpikir rakyat petani di daerah pedesaan di Indonesia itu, dan beberapa di antara mereka telah menghubungkan mentalitet serupa itu dengan kelakuan ekonomis dari rakyat petani di beberapa tempat di Indonesia (Kruyt, 1923; Ossenbruggen, 1935). Teori tersebut memang mungkin berguna untuk menerangkan beberapa upacara adat, beberapa kepercayaan dan takhayul yang aneh pada rakyat pedesaan di beberapa tempat di Indonesia, tetapi akan memberikan pengertian yang salah kalau konsep mengenai alam pikiran religio-magis itu dibesarkan artinya, dan dipakai untuk menerangkan segala pola tindakan dan kelakuan mereka dalam kehidupan masyarakat. Harus diperhatikan bahwa orang petani di desa itu tidak selalu berbuat seaneh seperti apa yang dilukiskan oleh Kruyt dan

Ossenbruggen dulu, tetapi bisa juga berbuat berdasarkan cara berpikir yang rasional, dengan logika yang berdasarkan akal sehat; hanya hal yang harus diperhatikan adalah sistem nilai budaya, yang seperti apa yang telah terurai dalam Bab I di atas, mempengaruhi baik sikap maupun pola-pola tindakan mereka. Demikian untuk mengerti pola-pola tindakan orang tani, kita harus menyelami sistem nilai budaya.

Sudah tentu sistem nilai budaya dari semua rakyat petani di beberapa daerah di Indonesia tidak sama, tentu ada variasi-variasi antara sistem nilai budaya dari orang petani di Aceh, di tanah Batak, di tanah Minangkabau, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Kalimantan, di Makasar, di Timor atau di Irian jaya. Walaupun demikian, berdasarkan apa yang dapat kita baca dalam laporan-laporan mengenai kehidupan di dalam masyarakat pedesaan dan berdasarkan apa yang kita ketahui semua berdasarkan pengalaman kita mengenai kehidupan masyarakat pedesaan, kita bisa mencoba menyusun suatu perkiraan berdasarkan kesan mengenai sistem nilai budaya petani di Indonesia.

Untuk menyusun perkiraan itu secara sistematis dan menyeluruh, maka kita bisa memakai sebagai pegangan, kerangka Kluckhohn yang telah diuraikan dalam Bab I, seksi 2 di atas. Berdasarkan kerangka itu, maka dapat kita rumuskan sistem nilai budaya petani Indonesia itu sebagai berikut: Orang tani di Indonesia, terutama di Jawa, pada dasarnya menganggap hidupnya itu sebagai suatu hal yang buruk, penuh dosa dan kesengsaraan; tetapi itu tidak berarti bahwa ia harus demikian saja menghindari hidup yang nyata dan mengundurkan diri dengan bersembunyi di alam kebatinan atau dengan bertapa. Ia malahan wajib menyadari keburukan hidup itu dengan berlaku *prihatin* dan *ikhtiar*. Orang petani di Indonesia bekerja untuk hidup, kadang-kadang kalau mungkin untuk mencapai kedudukan. Ia hanya mempunyai perhatian untuk hari sekarang ini, bagaimana keadaan hari kemudiannya, ia tidak perduli; ia terlampau miskin untuk dapat memikirkan hal itu; hanya kadang-kadang ia rindu akan masa yang lampau, yang menurut dongeng-dongeng orang tua merupakan suatu masa kejayaan itu. Pada umumnya alam tidak mengerikan baginya. Kalau kadang-kadang ada bencana alam berupa gunung meletus, atau air bah besar, ia hanya menerimanya sebagai suatu nasib yang kebetulan buruk saja. Adapun hama-hama yang dapat merusak tanamannya, tidak ditakutinya; ia tahu cara-cara mengatasi bencana-bencana serupa itu, dan kalau sekali ia tak

dapat mengalahkan hama, ia toh tidak usah mati kelaparan, karena sistem bantu membantu dalam masyarakat memberikan kepadanya suatu perasaan keamanan yang cukup besar. Asal ia dapat menyelaraskan diri saja dengan alam sekitarnya, maka amanlah hidupnya. Itulah sebabnya ia harus menghadapi sesamanya dengan jiwa gotong royong, terutama ia harus sadar bahwa dalam hidupnya itu ia pada hakekatnya tergantung kepada sesamanya; maka dari itulah ia harus selalu berusaha untuk memelihara hubungan baik dengan sesamanya itu.

Begitulah kira-kira perkiraan kami berdasarkan kesan pengalaman sehari-hari mengenai mentalitas rakyat petani Indonesia di desa-desa terutama yang terletak di Jawa. Sampai di manakah perkiraan itu benar dan bagaimana variasi-variasinya terhadap profil pokok itu pada mentalitet penduduk dari beraneka warna daerah di Indonesia ini, memang masih harus diteliti secara ilmiah dengan meluas dan mendalam. Nanti juga akan tampak bahwa mentalitas rakyat pedesaan itu ada kemungkinan bisa berobah-robah, menurut keadaan dan menurut berbagai macam lapangan hidup yang berbeda-beda. Dalam lapangan ekonomi misalnya, mungkin ia menunjukkan suatu mentalitas yang tertentu dalam pergaulan sosial mungkin ia memperlihatkan suatu mentalitet yang berbeda, dan dalam kehidupan keagamaan ia mungkin akan bermentalitet lain lagi dan demikian seterusnya.

Sekarang kita sampai kepada salah satu pertanyaan pokok dari karangan ini, ialah: **Seandainya sebagian besar dari rakyat petani Indonesia, terutama petani Jawa itu, memang mempunyai mentalitas seperti terurai di atas, atau variasi-variasi dari mentalitas itu, apakah rakyat Indonesia cocok untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat serba ekonomis.** Apakah dengan demikian ia dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam usaha raksasa pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh negara kita sekarang ini. Cobalah hal ini kita analisa satu demi satu, dengan mempergunakan susunan urut yang dipakai di atas dan yang sebenarnya berdasarkan kerangka Kluckhohn.

Hakekat hidup. Mentalitas yang beranggapan bahwa hidup pada hakekatnya buruk, tetapi untuk diikhtiarkan menjadi suatu hal yang baik dan menyenangkan, adalah suatu hal yang cocok untuk pembangunan, karena ikhtiar dan usaha itu merupakan sendi-sendi penting dari segala aktivitas berproduksi dan membangun. Bahwa toh masih

juga banyak orang yang tidak sanggup melawan kesukaran hidup dan lebih suka lari dan menyembunyikan diri dalam lingkungan gerakan kebatinan, mungkin disebabkan karena kesukaran kehidupan masyarakat akhir-akhir ini menjadi terlampau berat, sehingga banyak orang memang tak mampu lagi untuk berikhtiar dan memberi perlawanan secara gigih.

Hakekat Karya. Nilai budaya yang menganggap bahwa manusia itu kerja untuk hidup saja, menurut hemat saya, tidak cocok untuk pembangunan ekonomi. Orang yang bernilai budaya serupa itu akan kerja keras sampai ia dapat menghasilkan apa yang dibutuhkannya untuk hidup, sedangkan kebutuhan untuk kerja lebih lanjut supaya bisa menghasilkan lebih banyak lagi, tidak akan ada. Suatu mentalitas yang lebih cocok untuk pembangunan sebenarnya harus mengandung pandangan yang menilai tinggi karya untuk mencapai suatu kedudukan yang dapat menghasilkan lebih banyak kerja lagi. Suatu pandangan serupa itu, akan memberi dorongan kepada si individu untuk selalu mempergiat karyanya tanpa batasnya; dan suatu pandangan serupa itu karena mementingkan karya untuk karya, dengan sendirinya akan memupuk rasa untuk kualitet dan kebutuhan untuk mencapai mutu dari karya dan daya kreativitas. Rasa untuk mencapai mutu yang tinggi dan daya kreativitas, menyebabkan bahwa orang itu selalu akan mencoba untuk memperbaiki hasil-hasil karyanya dan di dalam usaha itu pada suatu ketika ia akan mencapai hasil yang sebelumnya belum pernah tercapai oleh orang lain. Demikianlah telah terjadi suatu penemuan baru, suatu inovasi dan inovasi itu adalah sama dengan kemajuan.

Hakekat Kedudukan Manusia dalam Ruang Waktu. Mentalitas yang hanya berorientasi terhadap hari sekarang dan kurang memperhitungkan hari depan, tidak cocok juga untuk pembangunan ekonomi. Hal itu disebabkan karena pembangunan yang hendak berhasil baik dan sebenarnya tiap-tiap usaha ekonomi, sebenarnya membutuhkan perencanaan dan kemampuan untuk merencanakan itu, tidak lain dari suatu kemampuan untuk melihat setajam mungkin, apakah yang akan dapat terjadi di hari depan. Orientasi ke hari depan memberi juga pandangan yang luas, dan itulah menurut hemat kami juga merupakan salah satu motif dari sikap suka menghemat, memelihara dan berhati-hati terhadap peralatan, juga yang bukan milik sendiri. Hal itu karena orang akan merasakan bahwa sikap ceroboh terhadap

peralatan, walaupun peralatan itu bukan milik sendiri, tetapi milik umum, toh pada suatu ketika akan merugikan diri sendiri juga.

Hakekat Hubungan Manusia dengan Alam: Mentalitas yang berusaha mencari keselarasan dengan alam, menurut hemat kami tidak secara langsung menghambat pembangunan ekonomi, maka dari itu tidak perlu kita robah secara mendesak. Walaupun demikian mentalitas yang sebenarnya paling cocok dengan pembangunan ekonomi adalah mentalitas yang berusaha menguasai alam. Sebabnya adalah karena mentalitas serupa itu merupakan pangkal dari semua inovasi dan kemajuan teknologi, sedangkan kemajuan teknologi itu adalah salah satu dari syarat-syarat primer bagi pembangunan ekonomi. Sebaliknya suatu mentalitas serupa itu biasanya dengan sendirinya akan berkembang juga, justru kalau kemakmuran sudah tiba dan memberi perangsang untuk inovasi.

Hakekat Hubungan Manusia dengan Sesamanya. Orang petani di Indonesia, biasanya menghadapi sesamanya dengan jiwa gotong royong. Mentalitas yang berdasarkan jiwa gotong royong, menurut hemat kami bisa tidak mempunyai pengaruh terhadap pembangunan, bisa juga menghambat pembangunan, tetapi kadang-kadang bisa juga sedikit membantu dalam pembangunan. Coba hal ini kita tinjau sebentar dengan lebih mendalam. Sebenarnya jiwa gotong-royong itu mengandung tiga thema pemikiran, ialah: (1) orang itu harus sadar bahwa dalam hidupnya pada hakekatnya ia selalu tergantung kepada sesamanya maka dari itulah ia harus selalu berusaha untuk pemeliharaan hubungan baik dengan sesamanya; (2) orang itu harus selalu bersedia membantu sesamanya; (3) orang itu harus bersifat konform, artinya orang harus selalu ingat bahwa ia sebaiknya jangan berusaha untuk menonjol melebihi yang lain dalam masyarakatnya.

Tema pemikiran yang pertama menurut hemat kami tidak bersifat menghambat pembangunan. Malahan kami sendiri mengharap bahwa kita jangan sampai mengingkari akan hal itu, karena pikiran itulah yang memberikan suatu perasaan aman dalam hidup kita, suatu perasaan bahwa kita tidak berdiri sendiri dalam samudra kesulitan kehidupan di alam dunia ini. Sudah tentu pengetahuan bahwa orang itu tidak berdiri sendiri dalam hidupnya disadari oleh semua manusia di dunia, juga oleh mereka yang hidup dalam suatu sistem masyarakat yang bersifat amat individualistis. Namun dalam masyarakat individualistis

thema pemikiran itu tidak amat ditonjolkan dalam proses sosialisasi, seperti dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat orang Amerika yang bersifat individualistis misalnya, seorang anak sejak ia masih kecil sudah dilatih untuk sedapat mungkin tidak tergantung kepada orang lain, dan dilatih berusaha untuk berdiri sendiri dalam hal mencapai apa yang diingini. Kalau seorang anak kecil di Amerika jatuh, orang-orang tak akan buru-buru menolongnya; anak itu harus belajar berdiri kembali atas kekuatannya sendiri. Coba bandingkan hal itu dengan keadaan pada kita; kalau ada anak kecil jatuh dan menangis keras orang-orang terperanjat, buru-buru menghampirinya dan mengangkatnya.

Tema pemikiran yang kedua dalam kenyataan kehidupan masyarakat terwujud ke dalam paling sedikit dua macam pranata sosial, ialah: (a) sistem tolong menolong; (b) kewajiban kerja bakti. Sistem tolong menolong dalam masyarakat pedesaan itu bisa terwujud kalau ada kecelakaan atau kematian, kalau ada keperluan dalam kalangan rumah tangga. Kewajiban kerja bakti yang dulu sering dipakai oleh kerajaan-kerajaan pribumi sebagai suatu bentuk pajak, selalu dihidupkan kembali, tidak saja oleh pemerintah kolonial Belanda dan pemerintah kolonial Jepang, tetapi juga oleh pemerintah kita sendiri, untuk memelihara jalan-jalan dan jembatan-jembatan, dan untuk membangun bangunan-bangunan dan gedung-gedung umum. Sistem tolong menolong dalam hal kecelakaan atau kematian, kalau ada keperluan dalam kalangan rumah tangga dan kalau ada hajad, tak akan bertentangan dengan pembangunan.

Adat tolong menolong dalam kecelakaan dan kematian malahan sebaiknya dipelihara terus, demikian pula tak ada salahnya orang saling tolong menolong kalau ada hajad. Adat bantu membantu kalau ada keperluan dalam rumah tangga, akan hilang dengan sendirinya kalau nanti sejajar dengan modernisasi kehidupan rumah tangga telah lebih berdasarkan teknologi modern. Sebaliknya, mengenai tolong menolong dalam produksi pertanian dapat dikatakan bahwa sistem itu sejak lama dirasakan oleh para petani sebagai suatu metode pengerahan tenaga yang mempunyai banyak segi negatifnya. Dengan gejala bertambahnya penduduk dengan laju kenaikan yang makin tahun makin membanyak sekarang ini, gejala tolong menolong dalam produksi pertanian terang menjadi suatu penghambat untuk pembangunan dan perobahan dari sistem itu membutuhkan suatu pemikiran yang serius.

Akhirnya mengenai sistem kerja bakti dalam hubungan dengan pembangunan ekonomi dapat dikatakan di sini, bahwa sistem itu mungkin akan berguna dalam tahap-tahap pendahuluan, tenaga masa dapat dikerahkan untuk pekerjaan-pekerjaan kasar dalam pembangunan dan rehabilitasi prasarana, seperti jalan-jalan, jembatan-jembatan, terusan-terusan, lapangan-lapangan terbang, pelabuhan-pelabuhan, dan sebagainya. Dalam tahap-tahap selanjutnya, kalau sistem ekonominya lebih banyak membutuhkan tenaga ahli, maka sistem kerja bakti mungkin akan berobah sifatnya.

Tema pemikiran yang ketiga menurut hemat kami tidak cocok untuk pembangunan ekonomi, karena tidak memberikan perangsang untuk kemajuan. Dalam masyarakat di mana ada konformisme dan di mana ada suatu anggapan umum bahwa orang itu sebaiknya jangan berusaha untuk menonjol melebihi sesamanya dalam masyarakat, maka orang yang bisa menghasilkan prestasi yang lebih dari yang lain, tidak akan dipuji, tetapi malahan dicela. Padahal prestasi yang besar merupakan sendi dari pembangunan dan kemajuan. Demikian kalau thema pemikiran ini memang ada dalam mentalitas rakyat petani di daerah pedesaan, maka hal itu harus dirobah.

PROSES BELAJAR MENGAJAR DALAM PENDIDIKAN PENYULUHAN*

Peneliti-peneliti ilmu-ilmu perilaku, setelah penelitian bertahun-tahun, telah menemukan dan mencatat ciri-ciri proses belajar-mengajar. Beberapa pertentangan pendapat di antara para peneliti perilaku manusia belum sepenuhnya terselesaikan. Tapi kenyataan ini justru membina situasi yang sehat. Kenyataan ini mendorong para peneliti untuk terus bekerja mencari kejelasan atas ''seni-budaya'' yang paling rumit, yakni hubungan sebab dan akibat perobahan perilaku. Misteri ini menunjuk pada kenyataan bahwa kepustakaan ilmu sosial, termasuk psikhologi pendidikan, menyajikan gagasan-gagasan dalam bentuk asumsi yang masih memerlukan pembuktian ilmiah. Tapi banyak juga azas-azas ini dan implikasinya dalam pelaksanaan penyuluhan.

1. Belajar adalah proses yang tumbuh dan berkesinambungan.
2. Belajar haruslah mempunyai maksud-tujuan.
3. Belajar mencakup berbagai kegiatan orang dan melibatkan sebanyak mungkin inderanya.
4. Belajar harus menantang dan memuaskan.
5. Belajar harus menghasilkan pengertian yang fungsional.
6. Belajar dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan sosial.
7. Kemampuan belajar antara individu berbeda-beda.
8. Belajar adalah proses yang berjalan bertahap-tahap dan biasanya diperlukan beberapa kali peristiwa belajar selama jangka waktu tertentu sebelum sesuatu perobahan besar terjadi.
9. Kapasitas belajar tetap tinggi sepanjang kehidupan orang dewasa yang normal.

---

* dipetik dari J.P. Leagans ''Characteristics of Teaching and Learning in Extension Education'' dalam buku *Extension Education in Community Development,* Directorate of Extension, Ministry of Food and Agriculture, Government of India, New Delhi, 1961.

10. Belajar adalah proses aktif.
11. Belajar memerlukan komunikasi yang efektif.
12. Teori dan praktek harus dihubungkan.
13. Belajar dan mengajar adalah proses yang diniatkan, baik oleh fihak pengajar maupun oleh pihak yang belajar.
14. Perilaku yang dibentuk dalam proses belajar dapat dicapai dengan empat langkah pokok: mengembangkan minat, menciptakan keinginan, menjamin pelaksanaan dan membina kepuasan.

MEMBUAT EFEKTIF PENGALAMAN BELAJAR

Ada beberapa petunjuk yang berguna untuk membuat efektif pengalaman belajar, apapun cara yang digunakan oleh seseorang penyuluh. petunjuk ini bukanlah sekedar pendapat tetapi merupakan asas-asas yang mantap berdasar penemuan-penemuan penelitian dan pengalaman yang luas. Karena itu petunjuk ini perlu diperhatikan oleh semua penyuluh dalam usaha mereka menyusun pengalaman belajar.

1. Orang yang belajar harus memiliki pengalaman yang memberinya kesempatan untuk mempraktekkan jenis perilaku yang dikehendaki oleh tujuan belajar. Kalau tujuan belajar itu mengenai ketrampilan mental atau ketrampilan tangan, kesempatan haruslah disediakan bagi orang yang sedang belajar untuk mempraktekkan ketrampilan itu, karena praktek adalah satu-satunya cara yang efektif untuk mengembangkan ketrampilan.

2. Pengalaman belajar mengenai sesuatu tujuan belajar haruslah memuaskan orang yang belajar ketika ia melaksanakannya. Sesuatu keluarga tidak hanya perlu diberi kesempatan mengatasi masalah gizi dengan makan sayuran hijauan tambahan, tetapi keluarga itupun harus menjadi puas ketika makan sayuran hijauan tambahan itu. Kalau ketika mempraktekkan orang yang sedang belajar tidak merasa puas, maka proses belajar yang dikehendaki tidak terjadi, dengan perkataan lain praktek cenderung untuk tidak berlanjut.

3. Reaksi yang dikehendaki dalam pengalaman belajar harus

dalam batas-batas kesanggupan, baik mental maupun fisika, orang yang belajar. Jadi bukanlah ungkapan lama ''guru harus mulai dari tempat orang yang belajar''. Haruslah ada cukup waktu untuk bekerja, harus ada kesempatan bekerja, harus tersedia sarana finansial dan bahan yang diperlukan. Kalau pengalaman belajar mencakup juga kegiatan yang belum sanggup dilakukan oleh orang bersangkutan maka proses belajar akan gagal mencapai maksudnya. Untuk menghindarkan kegagalan, penyuluh harus banyak mengetahui keadaan para peserta penyuluhannya, termasuk keadaan ekonomi, sosial dan fisik mereka.

4. Terdapat banyak jenis pengalaman belajar yang dapat digunakan untuk mencapai sesuatu tujuan pendidikan. Mungkin pengalaman belajar tak terbilang jumlah jenisnya yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan belajar yang baik. Hal ini merupakan segi yang menguntungkan dalam penggunaan cara yang berbeda pada situasi yang berbeda-beda pula.
Ini tidak berarti bahwa pengajaran boleh dilakukan sembarang, melainkan bahwa pengajaran adalah pekerjaan ''tailor making'' (perlu dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada) dalam batas-batas asas dan pola pelaksanaan yang umum bagi pengajaran yang efektif.

5. Sesuatu pengalaman belajar biasanya dapat digunakan untuk mencapai lebih dari satu tujuan belajar. Kenyataan ini juga merupakan keuntungan bagi mereka yang ingin memajukan kegiatan belajar mislanya, apabila seseorang memecahkan persoalan kesehatan, ia memperoleh informasi tertentu dalam bidang kesehatan, ia juga mengembangkan minat yang lebih besar terhadap tindakan-tindakan yang menyangkut kesehatan.

6. Pengalaman belajar adalah sesuatu kegiatan yang harus dibuat efektif oleh penyuluh. Kalau seorang penyuluh tidak menguasai metoda, teknologi, atau perlengkapan pengajaran, ia secara profesional tidak kompeten untuk menyelenggarakan pengalaman belajar yang efektif. kalau, misalnya, ia menggunakan proyektor slide secara salah, ia tidak saja akan kehilangan kepercayaan dari para pendengar ceramahnya, tetapi iapun membuang-buang waktunya dan waktu para pendengarnya. Kalau seorang penyuluh berusaha menggunakan metoda diskusi dan

ternyata ia tidak berhasil dalam memimpin diskusi itu, maka sesungguhnya ia tidak menciptakan pengalaman belajar yang efektif bagi peserta-pesertanya.

Dengan mempelajari asas-asas atau kriteria dan definisi pengalaman belajar yang sudah diuraikan, jelaslah bahwa proses pemilihan jenis pengalaman belajar dan pelaksanaannya bukanlah sekedar proses yang mekanikal, tetapi proses kreatif yang memerlukan keahlian yang tinggi. Proses itu sebagian besar berupa pengambilan keputusan tentang kombinasi isi pelajaran dengan landasan pengetahuan yang cukup tentang keadaan orang-orang yang akan belajar dan aspek-aspek dasar proses pendidikan.

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

Ada beberapa langkah pelaksanaan yang harus diambil oleh penyuluh dalam menyusun kondisi agar di dalamnya orang dapat memperoleh pengalaman belajar yang efektif. Berikut ini adalah beberapa di antaranya.

1. Dengan cermat menganalisa tujuan dan menyusun daftar serangkaian pengalaman belajar yang mungkin dapat dipergunakan untuk mencapai tiap tujuan tersebut. Langkah ini meliputi:
   (a) mengambil keputusan tentang tipe-tipe bahan pelajaran dan isinya. Ini mungkin adalah bulletin tentang sesuatu pokok pelajaran, atau seperangkat slide berwarna yang menggambarkan topik-topik yang akan disajikan, atau satu set gambar dinding yang menampilkan data penting, atau suatu diagram yang melukiskan hal-hal yang perlu ditekankan sehubungan dengan tujuan pengajaran, dll. Daftar ini dapat panjang, kalau tujuan belajar dianalisa dengan cermat;
   (b) mengambil keputusan tentang jenis kegiatan yang dirancang bagi dan dilaksanakan oleh orang-orang yang akan belajar. kegiatan ini mungkin terdiri atas membaca sesuatu bagian atau seluruh buku, atau bulletin yang berkaitan dengan mata pelajaran, atau mendengarkan rekan-rekan yang menguraikan masalah-masalah mereka, atau berpartisipasi dalam demonstrasi cara-cara yang dianjurkan, atau memilih orang-orang tertentu untuk

melaksanakan sesuatu demonstrasi, atau mendengarkan petani berhasil yang menceriterakan tentang apa yang dilakukannya dan hasil yang dicapai sehubungan dengan mata pelajaran yang sedang dibahas.

2. Memeriksa kembali rancangan pengalaman belajar, menghubungkannya dengan tujuan yang dikehendaki untuk melihat apakah pengalaman belajar yang dirancangkan itu memenuhi kriteria berikut secara memuaskan:
   (a) apakah pengalaman belajar yang dirancangkan memberi kesempatan kepada orang-orang yang akan belajar untuk melakukan latihan praktek tentang perilaku yang tercantum dalam tujuan?
   (b) apakah pengalaman belajar itu merupakan bagian atau berkait dengan isi pelajaran yang tercantum dalam tujuan?
   (c) apakah tingkat kerumitan pengalaman belajar sesuai dengan kemampuan orang-orang yang akan belajar dan kesiapan mereka untuk melaksanakannya?
   (d) apakah pengalaman belajar akan memuaskan orang-orang yang akan belajar? Apakah pengalaman belajar akan menarik dan ada kecenderungan akan dinilai berharga oleh mereka yang akan belajar?

BAHAN UNTUK DISKUSI BAB I

1. ***Kerangka Pemikiran*** *(Robert Redfield, 1953)*):*
   pengertian ***pola kebudayaan*** *mencakup kesatuan antara:*
   (1.1) ***Pola bersikap,*** *yang mendapat isi dan pengarahan dari nilai-nilai budaya (pandangan hidup) dan pola berpikir (wujud kebudayaan yang ideel, juga disebut jiwanya).*
   (1.2) ***Pola bertindak dan kelakuan*** *dalam kegiatan bermasyarakat (wujud kebudayaan kelakuan, disebut juga organisasi).*
   (1.3) ***Pola sarana benda-benda*** *(wujud kebudayaan yang fisik, disebut juga teknologi).*

2. ***Pertanyaan:***
   (2.1) Tunjukkan ke-3 komponen dari pola kebudayaan itu dalam masing-masing bacaan!
   (2.2) Bandingkan masing-masing komponen dari ke-4 Bacaan Sosiologi Pedesaan (dalam hal ini: adakah persamaan dan perbedaannya; jika ada apakah persamaan dan perbedaan itu)!

---

*) Robert Redfield (1953): *The Primitive World and its Transformations''* Great Seal Books, Cornell University Press, N.Y.

II
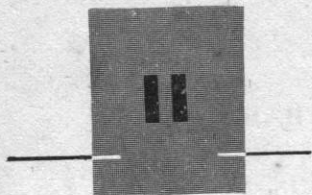
PROSES-PROSES SOSIAL

CIRI-CIRI DARI KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN DI INDONESIA*

Konflik dan persaingan. Apakah ciri-ciri yang sering dihubungkan dengan masyarakat pedesaan itu memang ada dalam desa-desa di Indonesia secara sepintas lalu dapat kita pelajari dalam bab-bab di atas. Pertama-tama orang kota suka membayangkan masyarakat desa itu sebagai tempat orang bergaul dengan rukun, tenang dan selaras. Pelukisan-pelukisan dalam bab-bab di atas, terutama dari desa-desa Celapar di Jawa Tengah, Telang di Kalimantan Tengah, Botoramba di Makasar dan Muremarew di Irian Barat (bab VII, XI, XII, XIV), menunjukkan bahwa sering juga di dalam masyarakat desa tempat orang hidup berdekatan dengan orang-orang tetangga secara terus menerus, kesempatan untuk pertengkaran amat banyak dan peristiwa peledakan dari keadaan-keadaan tegang rupa-rupanya sering terjadi. Kecuali pertengkaran-pertengkaran yang terjadi sekitar peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga yang membesar menjalar, menurut contoh-contoh dalam bab-bab di atas; sumber dari banyak pertengkaran dalam masyarakat pedesaan di Indonesia rupa-rupanya berkisar sekitar hal tanah, sekitar masalah kedudukan dan gengsi, sekitar hal perkawinan, sekitar hal perbedaan antara kaum tua dan kaum muda dan sekitar perbedaan antara pria dan wanita.

---

* Oleh Koentjaraningrat (editor) ''Isi Konsep Desa di Indonesia'' di dalam *Masyarakat Desa Indonesia*, Yayasan BPFE, Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 354-370.

Catatan: Bab-bab yang dimaksudkan dalam artikel ini adalah bab-bab dari buku *Masyarakat Desa Indonesia*.

Para ahli antropologi yang biasa meneliti masyarakat-masyarakat kecil memang telah banyak mengumpulkan bahan tentang pertengkaran-pertengkaran dalam masyarakat-masyarakat yang mereka teliti dan tidak hanya mengenai pertengkaran-pertengkaran (atau konflik), tetapi juga mengenai pertentangan (kontroversi) dan persaingan (kompetisi). Kecuali itu ada juga ahli-ahli antropologi yang pernah meneliti masalah pertengkaran dipandang dari beberapa sudut yang khusus, atau dalam hubungan dengan berbagai gejala sosial yang tertentu. Misalnya dipandang berdasarkan konsep-konsep perubahan kebudayaan, berdasarkan konsep-konsep psikologi atau dalam hubungan dengan guna-guna dan ilmu dukun; sedangkan suatu ikhtisar mengenai berbagai konsep yang dapat dipakai oleh para ahli ilmu-ilmu sosial guna menganalisa gejala persaingan berdasarkan bahan dari 13 masyarakat kecil yang diambil dari berbagai tempat di muka bumi pernah dibuat oleh para ahli antropologi terkenal M. Mead (1960). Adapun ahli-ahli hukum adat baik di Indonesia maupun di lain-lain tempat di dunia tidak lain hanya memperhatikan masalah-masalah pertengkaran dalam masyarakat kecil, terutama mengenai adat istiadat dan proses untuk memecahkan pertentangan-pertentangan dan pertengkaran-pertengkaran. Mengingat bahan yang terkumpul dari penelitian-penelitian seperti yang tersebut di atas, masyarakat desa itu sama sekali tidak rukun-tenang.

Kegiatan bekerja. Lain sifat yang seringkali diberikan oleh orang kota kepada masyarakat desa adalah sifat ketenteraman seperti apa yang dikatakan oleh Boeke: ''Desa itu bukan tempat untuk bekerja, tetapi tempat ketenteraman. Dan ketenteraman itu adalah pada hakekatnya hidup yang sebenarnya bagi orang timur''. Dalam kenyataan kehidupan masyarakat desa-desa yang terlukis dalam bab-bab di atas, seperti desa-desa di Kecamatan Kalireja Lampung, Jagakarsa dekat Jakarta, Celapar di Jawa Tengah, Tahingan di Bali, Rarak di Sumbawa, Sabu di Timor dan lain-lain, tampak bahwa justru bekerja keraslah merupakan syarat penting untuk dapat tahan hidup dalam masyarakat pedesaan di Indonesia. Seperti apa yang tertera dalam bab X di atas, di Sabu misalnya, orang yang bisa bekerja keras dan yang berhasil sedapat mungkin tanpa bantuan orang lain, malahan dinilai tinggi dalam masyarakat.

Kalau ada orang berpendirian bahwa supaya dapat maju orang desa itu harus didorong untuk bekerja lebih keras, maka kami tidak amat setuju dengan pendirian itu. Seorang ahli ekonomi, B.F. Hoselitz, dalam bukunya *Role of Incentives in Industrialization*, mengatakan bahwa untuk membangun suatu masyarakat yang ekonominya terbelakang itu kita harus bisa menyediakan suatu sistem perangsang yang dapat menarik aktivitas warga masyarakat. Sistem perangsang itu harus demikian rupa sehingga dapat memperbesar kegiatan orang bekerja, memperbesar keinginan orang untuk menghemat dan menabung, dan memperbesar keberanian orang untuk mengambil risiko dalam hal merobah secara revolusioner cara-cara yang lama (Hoselitz, 1963). Masyarakat desa di Indonesia itu memang dapat kita pandang juga sebagai suatu bentuk masyarakat yang ekonomis terbelakang dan yang harus dikembangkan dengan berbagai-bagai cara. Dalam hal itu mengadakan sistem-sistem perangsang yang akan menarik aktivitas warga desa adalah amat perlu. Konsepsi *Hoselitz* dalam prinsipnya memang benar, tetapi unsur pertama dalam konsepsi itu, ialah perangsang untuk menarik aktivitas orang bekerja membutuhkan suatu pertanyaan yang lebih teliti. Orang desa tidak usah ditarik atau didorong untuk bekerja keras, hanya cara-cara dan irama bekerjanya itu harus dirobah dan disesuaikan dengan cara-cara dan irama yang harus dipelihara dengan disiplin yang tegang, agar tenaga yang dikeluarkan itu dapat seirama dengan berjalannya mesin dan dapat memberi hasil seefektif-efektifnya. Demikian, walaupun orang desa itu bisa dan biasa bekerja keras, tetapi kalau ia harus bekerja dalam sistem-sistem produksi modern, ia tokh harus banyak merobah adat dan kebiasaan bekerjanya. Para pembangun masyarakat desa tidak menghadapi, seperti apa yang dikatakan oleh Hoselitz, soal menarik orang desa supaya bekerja, tetapi soal menarik, mendorong dan membina orang desa supaya bekerja secara disiplin dan efisiensi modern.

Di dalam masyarakat desa yang berdasarkan bercocok tanam, orang biasa bekerja keras dalam masa-masa yang tertentu, tetapi mengalami kelegaan bekerja dalam masa-masa yang lain dalam rangka satu lingkaran pertanian. Di dalam masa-masa yang paling sibuk tenaga keluarga batih atau keluarga luas biasanya juga tidak cukup untuk dapat menyelesaikan segala pekerjaan di ladang atau di sawah sendiri. Dalam masa-masa serupa itu orang dapat menyewa tenaga tambahan atau dapat meminta bantuan tenaga dari sesama warga desanya.

Mengenai menyewa tenaga bantuan, terutama di daerah-daerah di Indonesia yang sudah terlampau amat padat seperti di Jawa dan di beberapa tempat tertentu di Bali, cara mengenai itu sudah berkembang sejak lama. Jumlah buruh tani (baik yang tidak memiliki, tetapi juga yang sebenarnya masih memiliki tanah sendiri), di desa-desa di Jawa dan Bali rupa-rupanya bertambah tiap-tiap tahun dengan suatu kecepatan yang besar. Cara-cara untuk menyewa tenaga buruh tani yang banyak itu baik yang berdasarkan adat-adat lama seperti sistem bawon, maupun yang berdasarkan adat yang lebih baru, ialah upah dengan uang, telah disebut dalam Bab-bab VI, VII dan Bab VIII tentang desa-desa Situraja, Celapar dan Bali di atas.

Sistem tolong menolong. Tambahan tenaga bantuan dalam pekerjaan pertanian tidak disewa tetapi yang *diminta* dari sesama warga desa, ialah pertolongan pekerjaan yang di dalam bahasa Jerman disebut *Bitarbeit (bitten* = meminta) atau yang di dalam bahasa Jawa disebut *sambatan* (sambat = minta tolong), oleh umum di Indonesia disebut gotong royong. Dalam hal ini kompensasinya itu bukan bagian dari hasil pekerjaan, juga bukan upah, tetapi tenaga bantuan juga. Aktivitas-aktivitas tolong menolong itu hidup dalam berbagai macam bentuk masyarakat desa di Indonesia. Kecuali dalam pekerjaan pertanian, aktivitas tolong menolong itu tampak dalam banyak lapangan kehidupan masyarakat yang lain, misalnya dalam aktivitas kehidupan sekitar rumah tangga, dalam menyiapkan dan melaksanakan pesta dan upacara, dan di dalam hal kecelakaan dan kematian. Beberapa tipe bantu membantu tersebut di atas biasanya dibeda-bedakan dengan tajam oleh para warga desa. Beberapa tipe tolong menolong itu masing-masing juga mempunyai sebutan-sebutan yang berbeda-beda, sedangkan menurut observasi yang pernah kami lakukan sendiri di desa di Jawa Tengah bagian Selatan sikap dan kerelaan menolong dari orang-orang desa di dalam satu tipe tolong menolong berbeda dengan di dalam lain tipe (Koentjaraningrat, 1961). Dalam keadaan kecelakaan atau kematian, orang desa akan otomatis dan rela menolong sesamanya tanpa berfikir tentang kemungkinan untuk mendapat pertolongan balasan, tetapi misalnya dalam usaha-usaha pertanian orang akan bersifat lebih memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan untuk mendapat balasan tenaga. Kecuali itu, dalam bab-bab V, VI, VII, IX dan X tentang desa-desa Jagakarsa, Situraja, Celapar, Rarak dan Sabu di atas, dapat

kita baca bagaimana tidak semua tahap pekerjaan satu tipe tolong menolong saja. Di dalam praktek akan kita lihat bahwa menurut ketentuan-ketentuan adat, satu tahap pekerjaan dilakukan dengan satu tipe tolong-menolong dan lain tahap dengan lain tipe lagi, atau satu tahap pekerjaan dengan sistem tolong menolong dan lain tahap malahan tanpa sistem tolong menolong, tetapi dengan tambahan tenaga buruh bayaran. Lepas dari hal-hal tersebut di atas masih ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan mengenai hal tolong menolong ini, terutama untuk keperluan analisa sosial, ialah bahwa orang sesama warga desa yang ber-tolong menolong itu biasanya berbeda-beda, baik mengenai berbagai lapangan aktivitas sosial maupun mengenai tipe tolong menolong. Menurut observasi kami sendiri di desa-desa di daerah Kebumen di Jawa Tengah bagian Selatan misalnya, dalam hal aktivitas tolong menolong sekitar kebutuhan yang bersangkutan dengan rumahtangganya; dalam hal menyelenggarakan pesta-pesta tertentu, orang tolong-menolong dengan kaum kerabat, dalam hal pekerjaan pertanian, orang tolong menolong dengan warga desa yang letak tanahnya berdekatan atau dengan anggota dari organisasi kooperasi yang sama, dan sebagainya.

Gotong royong. Di samping adat istiadat tolong menolong antara warga desa dalam berbagai macam lapangan aktivitas-aktivitas sosial, baik yang berdasarkan hubungan tetangga, ataupun hubungan kerabatan atau lain-lain hubungan yang berdasarkan efisiensi dan sifat praktis, ada pula aktivitas-aktivitas bekerjasama yang lain, yang secara populer biasanya juga disebut gotong royong. Hal itu adalah aktivitas bekerjasama antara sejumlah besar warga-warga desa untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan umum. Untuk membedakan dari aktivitas-aktivitas tolong menolong itu, ada baiknya aktivitas-aktivitas sosial tersebut kita sebut *kerja bakti,* atau kalau kita toh mau memakai istilah ''gotong royong'', maka sebaiknya aktivitas-aktivitas yang lain itu disebut secara konsekuen ''tolong menolong'', seperti apa yang kami lakukan dalam uraian di atas itu. Mengenai gotong royong kerja bakti kita harus juga membedakan antara (1) kerjasama untuk proyek-proyek yang timbul dari inisiatif atau swadaya para warga desa sendiri dan (2) kerjasama untuk proyek-proyek yang *dipaksakan* dari atas. Kita bisa membayangkan bagaimana proyek-proyek macam pertama, yang asal keputusan-keputusan rapat-rapat desa sendiri dan yang dirasakan benar-benar

sebagai suatu proyek berguna, dikerjakan bersama dengan amat rela dan penuh semangat, sedangkan sebaliknya proyek-proyek macam kedua, yang seringkali tidak difahami gunanya, oleh warga desa dirasakan saja sebagai kewajiban-kewajiban rutin yang amat tidak bisa dihindari, kecuali dengan cara mewakilkan giliran mereka kepada orang lain dengan bayaran. Di dalam mengajukan proyek-proyek yang membutuhkan tenaga bersama dari sebagian besar warga desa, pihak atasan atau siapa saja yang mengajukan proyek itu, harus bisa meyakinkan warga desa akan guna dari proyek itu bagi umum sedemikian rupa sehingga warga desa akan merasakan proyek itu seolah-olah sebagai proyeknya sendiri, dan sedemikian rupa sehingga perasaan paksaan itu menghilang. Demikian orang desa akan bekerja serba rela dan bersemangat.

Jiwa gotong royong. Dasar-dasar dari aktivitas-aktivitas tolong menolong dan gotong royong sebagai suatu gejala sosial dalam masyarakat desa pertanian, telah beberapa kali dianalisa oleh ahli-ahli ilmu sosial. Sistem tolong menolong itu rupanya suatu teknik pengerahan tenaga yang mengenai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian atau spesialisasi khusus, atau mengenai pekerjaan yang tidak membutuhkan diferensiasi tenaga di mana semua orang dapat mengerjakan semua tahap dalam *penyelesaiannya*. Kecuali itu sistem tolong menolong itu rupa-rupanya terutama mungkin dengan dasar hubungan intensif, antara orang-orang yang hidup berhadapan muka yang saling kenal mengenal sebagai manusia konkrit dan tidak sebagai suatu nomor yang abstrak saja, artinya antara orang-orang yang hidup dalam masyarakat kecil yang berdasarkan prinsip-prinsip kelompok primer. Dipandang dari sudut itu, maka tolong menolong itu dapat kita harapkan akan merupakan suatu gejala sosial yang universal; artinya ada dalam semua masyarakat di mana ada kelompok-kelompok primer di dalamnya. Kelompok-kelompok primer itu terutama ada di dalam masyarakat pedesaan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara, di Asia umumnya, di Afrika, di Oceania, di Amerika Latin, bahkan di Eropa dan Amerika Utara juga. Hanya di dalam masyarakat kota yang kompleks, di mana arti dari kelompok-kelompok primer itu sudah terdesak ke hanya beberapa lapangan kehidupan yang khusus saja, sistem tolong menolong itu boleh dikatakan terdesak juga. Dalam perusahaan-perusahaan yang modern, dengan suatu diferensiasi dan

spesialisasi yang kompleks, dengan suatu organisasi yang luas, sistem tolong menolong rupa-rupanya tidak juga akan memberi hasil yang efektif.

Apakah dengan menghilangnya sistem-sistem tolong menolong itu, jiwa gotong royong yang ada dalam suatu masyarakat itu akan hilang juga: menurut hemat kami, aktivitas tolong menolong sebagai suatu cara bekerjasama dalam rangka kelompok primer, dengan jiwa gotong royong yang ada dalam suatu masyarakat sebagai keseluruhan, adalah dua hal yang tidak sama dan tidak harus dipisahkan satu dari yang lain. Demikian dalam organisasi-organisasi modern yang kompleks, sistem-sistem tolong menolong mungkin tidak akan amat efektif lagi, tetapi jiwa gotong royong tetap harus dipelihara.

Jiwa atau semangat gotong royong itu dapat kita artikan sebagai peranan rela terhadap sesama warga masyarakat, sikap yang mengandung pengertian atau dengan istilah Ferdinand Tonnies, *Verständnis*, terhadap kebutuhan sesama warga masyarakat. Dalam masyarakat serupa itu misalnya, kebutuhan umum akan dinilai lebih tinggi dari kebutuhan individu, bekerja bakti untuk umum adalah suatu hal yang terpuji, dalam sistem hukumnya hak-hak individu tidak diutamakan secara tajam dan sebagainya. Lawan dari jiwa gotong royong adalah jiwa individualis. Dalam masyarakat-masyarakat yang mementingkan jiwa individualis, kebutuhan umum akan dikalahkan dari kebutuhan-kebutuhan individu, kerja bakti untuk umum akan dianggap tak banyak berguna , dalam sistem hukumnya hak-hak individu dipertahankan secara tajam, hasil kerja individu dinilai amat tinggi dan sebagainya. Penilaian tinggi terhadap jiwa gotong royong berlawanan dengan penilaian tinggi terhadap jiwa individualis, tidak sejajar dengan dimensi masyarakat Afrika Asia, berlawanan dengan masyarakat Ero-Amerika; atau masyarakat kecil berlawanan dengan masyarakat kompleks, atau masyarakat pedesaan berlawanan dengan masyarakat kota. Memang masyarakat dengan sistem ekonomi yang berorientasi kepada suatu sistem pasaran, seperti yang telah berkembang sejak beberapa abad dalam negara-negara di Eropa dan Amerika Utara itu (ialah masyarakat berdasarkan sistem ''ekonomi liberal''), jiwa individualis amat diutamakan. Sebaliknya, rupa-rupanya ada pula masyarakat-masyarakat Afrika Asia, masyarakat kecil dan masyarakat pedesaan yang juga berjiwa individualis.

Mengenai hal tersebut terakhir itu, seorang antropolog terkenal, M. Mead, pernah menganalisa bahan dari 13 masyarakat yang tersebar di berbagai tempat di dunia untuk meneliti sampai di manakah ke-13 masyarakat itu menunjukkan dalam kebudayaan dan adat-istiadatnya, jiwa gotong royong, jiwa persaingan dan jiwa individualis. Terbukti bahwa lepas dari sifat terpencil atau terbuka dari lokasinya, lepas dari mata pencaharian hidupnya, lepas dari sifat sederhana atau kompleks dari masyarakatnya, dari antara ke-13 masyarakat itu ada enam yang menilai tinggi jiwa gotong-royong, tiga yang menilai tinggi jiwa persaingan, sedangkan empat yang menilai tinggi individualisme (M. Mead, 1961).

Demikian sistem pengerahan tenaga secara tolong menolong, terikat kepada struktur kelompok-kelompok primer dalam masyarakat, tetapi jiwa gotong-royong dan jiwa berbakti merupakan ciri watak atau kepribadian dari banyak bangsa di dunia dan tidak terikat kepada kelompok-kelompok primer itu. Struktur masyarakat macam manakah yang mendorong jiwa gotong royong itu adalah suatu soal lain yang tidak dapat kita analisa di sini tetapi terang sebagian besar dari masyarakat pedesaan di Indonesia memiliki jiwa gotong royong itu. Dalam bukunya *Patterns of Culture* (1947), ahli antropologi terkenal, Ruth Benedict, telah menunjukkan bahwa pengertian tentang prinsip-prinsip dasar yang mengintegrasikan seluruh kehidupan dari sudut masyarakat itu, adalah pengertian tentang jiwa kebudayaan. Memberi rumus tentang jiwa kebudayaan Indonesia itulah, rupa-rupanya maksud kata-kata: . . . . . jika Pancasila itu diperas, menjadilah Trisila, Ketuhanan — Sosionasionalisme — Sosiodemokrasi, dan jika Trisila ini diperas lagi menjadilah ia Ekasila, yaitu Gotong Royong (Manifesto, 1957: halaman 67).
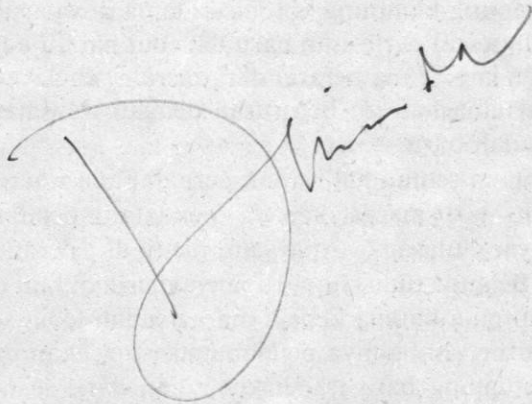
Musyawarah dan Jiwa Musyawarah. Musyawarah adalah satu gejala sosial yang ada dalam banyak masyarakat pedesaan umumnya dan khususnya di Indonesia. Artinya ialah, bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat tidak berdasarkan suatu mayoritas, yang menganut suatu pendirian yang tertentu, melainkan seluruh rapat, seolah-olah sebagai suatu badan. Hal ini tentu berarti bahwa baik pihak mayoritas maupun fihak minoritas mengurangi pendirian mereka masing-masing, sehingga bisa dekat-mendekati. Unsur ini rupa-rupanya

sudah ada sejak berabad-abad lamanya dalam masyarakat pedesaan di Indonesia, akan tetapi pengupasan secara ilmiah baru dibuat untuk pertama kalinya oleh para ahli hukum adat (lihat misalnya Ter Haar, 1915; Haga, 1924: halaman 27-34, 112-118). Dalam hal itu agaknya musyawarah itu dibicarakan terutama sebagai suatu cara berapat, tetapi dalam hal bicara tentang pranata sosial tersebut kita sebaiknya membedakan antara dua hal, ialah musyawarah sebagai suatu cara berapat dan musyawarah sebagai suatu semangat untuk menjiwai seluruh kebudayaan dan masyarakat.

Sebagai suatu cara berapat yang tertentu, musyawarah itu rupa-rupanya harus ada kekuatan atau tokoh-tokoh yang dapat mendorong proses mencocokkan dan mengintegrasikan pendapat itu. Mencocokkan berarti bahwa pendapat-pendapat yang berbeda itu masing-masingnya sedikit atau banyak diubah supaya bisa saling mendekati; sedangkan mengintegrasikan berarti bahwa pendapat-pendapat yang berbeda-beda itu dilebur seluruhnya ke dalam suatu konsepsi yang baru sehingga timbul suatu sintese.

Dalam contoh dari desa Merumarew di Irian Barat dalam bab XIV di atas, kita lihat bagaimana kadang-kadang terjadi bahwa dua pendirian yang berbeda-beda mengenai caranya suatu hal itu dijalankan, sukar disesuaikan. Berbulan-bulan lamanya tidak ada keputusan apa-apa karena tidak ada orang kuat atau tokoh-tokoh yang dapat mengambil inisiatif untuk mendekatkan kedua pendirian. Sebaliknya di dalam contoh dari desa Jawa Tengah dalam bab VII kita lihat bagaimana keputusan-keputusan secara bulat oleh rapat-rapat desa berbagai pendirian yang berbeda-beda itu dalam masyarakat desa menjadi suatu konsepsi yang dapat diterima oleh semuanya. Lain bahan konkrit yang dapat kita pakai sebagai contoh untuk mengilustrasikan pranata musyawarah sebagai suatu sistem rapat masyarakat pedesaan di Indonesia itu, bisa diambil dari karangan-karangan yang disebut sebagai referensi oleh hukum adat, Haga, dalam bukunya tersebut di atas (1924: halaman 27-34). Walaupun para ahli hukum adat memang telah banyak mengumpulkan bahan mengenai terjadinya keputusan-keputusan dalam peradilan-peradilan adat, namun sepanjang pengetahuan kami, masih kurang juga penelitian-penelitian yang secara khusus mengobservasikan dan menganalisa proses-proses sosial, mengenai pendekatan dan peleburan dari pendirian-pendirian yang bertentangan dalam masyarakat pedesaan di Indonesia.

Jiwa musyawarah itu menurut hemat kami merupakan suatu extensi dari jiwa gotong royong yang telah kami bicarakan di atas. Tidak hanya dalam rapat-rapat saja, tetapi terutama dalam seluruh kehidupan sosial, warga dari suatu masyarakat yang berjiwa gotong royong itu, diharapkan supaya sudi melepaskan sebagian dari pendapatnya agar bisa cocok atau paling sedikit mendekati pendapat umum dan supaya tidak ngotot membenarkan pendiriannya sendiri saja. Dalam sebuah masyarakat yang berjiwa gotong royong, ide musyawarah itu biasanya dilaksanakan dalam hal memecahkan pertengkaran-pertengkaran kecil atau besar, dan tampak dalam prinsip-prinsip dari hukum adatnya yang lebih bersifat mendamaikan semua fihak daripada mengalahkan atau memenangkan satu fihak (Vollenhoven, 1917). Contoh-contoh nyata dari pelaksanaan prinsip musyawarah dalam hukum adat di beberapa tempat di Indonesia, dapat dicari dalam karangan-karangan yang dipakai sebagai referensi dalam buku B.J. Ter Haar mengenai hukum adat acara perdata di Indonesia (1915).

6. TIMBULNYA "DESA JAWA" DARI MASYARAKAT TRANSMIGRAN SPONTAN*)

Sukoharjo merupakan kampung kolonisasi Jawa, pangkalan pertama di sebelah utara sungai W. Sekampung, yang dirintis sebelum perang, (1938) di bawah ikatan marga W. Semah.

Pengembangan daerah itu oleh transmigran spontan sudah dimulai sejak tahun 1950, dengan pemberian izin perintisan oleh 2 marga: marga W. Semah (pesirah di Gedongtataan) yang menghasilkan pusat perintisan Banyumas, di bagian hulu W. Waya dan marga Anak Tuha (pesirah di Hadujangratu) dengan pusat perintisan Kalirejo, di bagian lebih ke hilir dari W. Waya. Pusat perintisan baru Banyumas terletak di sebelah barat Sukoharjo, masih ikut kabupaten Lampung Selatan, sedangkan di sebelah utara Sukoharjo pusat perintisan baru Kalirejo ikut Kabupaten Lampung Tengah. Pelamar-pelamar untuk masing-masing perintisan baru berasal dari daerah kolonisasi (sekitar Pringsewu) atau dari kampung-kampung kolonisasi lama di wilayah marga. Bagi pelopor yang minta izin perintisan baru tersebut hal itu ada yang berarti: pindah ke marga lain. Yang berasal dari daerah "enclave kolonisasi", ada yang baru pertama kali itu berurusan dengan wewenang marga untuk mendapat tanah baru.

Dalam semua hal itu tak pernah pada waktu itu terdengar adanya tuntutan dari marga kepada pendatang-pendatang baru itu untuk membayar "ulasan". Apa yang menjadi "peraturan" dari pemerintah Hindia Belanda dulu, rupa-rupanya masih diikuti oleh pihak marga. Dan mungkin pula karena kepala marga sudah lebih senang, dalam membayangkan bertambahnya pendapatan yang akan diterima karena pendatang-pendatang baru itu di kemudian hari, seandainya peraturan-peraturan marga diikuti pula dalam hal itu: penghasilan dari uang tebusan wajib kerja marga, sebagian dari janggolan, dan upah memungut pajak. Jika dalam hal ini jaman Jepang dan tahun-tahun pertama revolusi

*) Dikutip dari karangan Kampto Utomo, Masyarakat Transmigran Spontan di Daerah W. Sekampung (Lampung), dalam *Teknik Pertanian*, Th. ke VII, 1958, hal. 347—357.

umumnya berarti tahun-tahun ''kurus'' bagi rata-rata seorang kepala marga di Lampung (sesuai dengan keadaan darurat pada waktu itu), agaknya dengan perintisan daerah baru oleh pendatang-pendatang Jawa itu, telah timbul pula harapan-harapan baru setidak-tidaknya pada pihak kepala marga.

Kelompok perintis-perintis pertama yang maju ke muka untuk membuka hutan, sudah mempunyai pemimpin, yaitu umumnya orang yang telah mendapat ''mandat perintisan'' itu. Pemimpin perintisan itu sering mendapat julukan: ''kepala tebang''. Pengikut (rakyat) yang dapat dikumpulkan oleh ''kepala tebang'' itu, dan wilayah penebangan (teritorial) yang mulai dapat direbut dari hutan, merupakan unsur gambaran suatu embrio ''desa Jawa'' yang tumbuh.

Daftar pengikut yang turut membuka hutan dan bertanam di ladang pertama kali, menjadi daftar cacah jiwa desa, di mana kecuali nama tiap kepala keluarga kemudian tercatat pula nama isteri dan anak-anaknya, sesuai dengan gambaran pemindahan anggota-anggota keluarga itu setelah menyusul. Pekerjaan administrasi itu, yang sering sejak semula sudah minta tenaga seorang pembantu ''kepala tebang'', kemudian menelorkan jabatan ''carik'' (juru tulis), sedangkan ''kepala tebang'' itu mulai menamakan diri ''lurah'' (kepala desa) atau memang karena umum mulai menyebut dengan nama itu. Dengan bertambah banyaknya rakyat, mulailah diadakan pembantu-pembantu lain dari lurah: ''Kebayan'', yang menjadi penyambung pimpinan lurah ke bawah. Jika ada lebih dari seorang ''kebayan'', maka hal itu berarti pembagian rakyat atas kelompok-kelompok, untuk keperluan melancarkan komunikasi antara ''rakyat'' (masing-masing kepala keluarga) dan ''lurah'', pucuk pimpinan desa. Pembagian atas kelompok-kelompok rakyat itu berarti pembagian atas bagian kampung, (teritorial), di mana menurut ide ''desa Jawa'' bagian yang mula-mula didirikan oleh ''lurah'' dan sekarang didiaminya disebut: ''krajan'', sedangkan bagian-bagian lain yang didirikan kemudian dinamakan ''pedukuhan''. Pedukuhan inilah yang dipimpin oleh seorang ''kamitua'', yang membawahi satu atau beberapa orang kebayan, menurut besar kecilnya pedukuhan. Di ''krajan'' sering tak ada kamitua, boleh dikata lurah yang langsung memimpinnya. Kadang-kadang ada ''congkok'', wakil lurah yang sehari-hari dapat juga diserahi pekerjaan kamitua krajan. Baru jika lurah sedang berhalangan congkok

itu benar-benar menjadi wakil lurah dalam soal- soal yang mengenai desa seluruhnya, tetapi hal ini jarang terjadi; dominasi lurah umumnya besar.

Unsur ''rakyat'' dari ide ''desa Jawa'' itu dengan nyata ditegaskan sebagai ''rakyat yang menetap''. Pada waktu mendaftarkan diri, rakyat baru itu diminta ''surat lolosan'' yang berasal dari lurah desa yang ditinggalkan olehnya. Pada waktu pendaftaran untuk perintisan pertama, syarat itu sama sekali tidak dikemukakan, sebab jadi-tidaknya perintisan masih belum diketahui. Syarat ''rakyat yang menetap'' karena itu boleh disebut: usaha konsolidasi. Tiap orang yang hendak ikut membuka tanah di wilayah desa yang sedang dibangun itu wajib mempertaruhkan dirinya dengan menjadi warga desa yang bertani dan berumah di situ pula. Pertimbangan *zakelijk* memang menuntut supaya usaha bertani itu benar-benar dipelihara dan dimajukan, dan ini tak dapat dilakukan jika orang yang menggarapnya tinggal jauh di desa lain. Hanya, seperti juga dalam hal kepala marga, yang oleh peraturan-peraturan marga dulu dijanjikan bertambahnya rakyat marga, unsur penghasilan sendiri itu berlaku pula bagi lurah: janggolan dapat diharapkan dari rakyat yang menetap.

Unsur ''rakyat yang menetap'' bagi desa Jawa itu bersambung pada ide ''wilayah teritorial'' desa yang tetap pula dengan batas-batas tertentu. Izin untuk merintis yang mula-mula diterima dari marga, umumnya tidak menyebut batas itu dengan tegas untuk masing-masing ''mandat'' penebangan. Angkatan perintis Kalirejo (1950) minta wilayah seluas 9 x 9 kilometer di batas kedua kabupaten di situ, yang kemudian menjadi 3 desa (Kalirejo, Kaliwungu, Sridadi). Wilayah ''mandat'' seluas itu tak pernah dipancangkan di tempat yang sebenarnya. Dalam hal izin perintisan Bandungbaru hanya batas-batas dua sungai yang disebut dengan terang sebagai batas utara dan selatan, batas-batas lainnya tak terang. Sangat berarti dalam hal Bandungbaru itu bahwa pengertian 'batas'' pada pihak marga ''tidak mengenai'' (tidak mengakui) batas hutan tutupan (Jawatan Kehutanan) yang ada di perbatasan itu. Wilayah hutan tutupan itu justru diizinkan dibuka oleh marga Anak Tuha tersebut, kepada golongan bekas pejuang asuhan B.R.N. yang karena perpecahan dari golongannya semula, berusaha sendiri mencari tanah di daerah Way Sekampung.

Pada prakteknya yang terjadi adalah bahwa perebutan wilayah antara desa-desa baru satu sama lain, yang menentukan batas-batas sesuatu

desa. Khususnya lembah-lembah sungai, yang diharap dapat dijadikan sawah, menjadi rebutan. Misalnya lembah sungai W. Waya, di mana Kalirejo, Kaliwungu dan Sridadi terlihat, dan Srimulyo lahir di lembah itu (sebelum itu merupakan bagian dari Kaliwungu).

Desa-desa di sebelah timur W. Waya, dari Wringinsari, di sebelah selatan sampai Poncowarno dan Sidodadi di ujung utara, semua berlomba-lomba meluaskan penebangan-penebangan baru ke arah timur. Aliran sungai-sungai di situ menuju (hampir sejajar) ke timur laut, maka tampak percobaan ''saling memotong jalan'' ke arah timur laut itu pula.

Perebutan ''wilayah'' untuk desa masing-masing itu berinti pada kehendak mempunyai ''rakyat'', yang perlu disediakan tanah untuk bertani menetap di atas wilayah desa. ''Rakyat'' itu merupakan masyarakat desa, yang perlu diatur: ini kewajiban ''pamong-desa'' dengan susunannya yang pada garis besarnya telah dikemukakan di atas.

Usaha mengatur masyarakat desa itu terwujud pula dalam rupa-rupa tatanan alam fisis sekeliling, di mana masyarakat desa itu menetap. Untuk usaha pertanian, pokok penghidupan di tempat baru itu pertama-tama diperlukan pembagian sebidang tanah untuk masing-masing. Kemudian sesudah perladangan pertama berhasil dan hasrat berkampung makin kuat, perlu menyusul tatanan yang membeda-bedakan bagian kampung dari bagian tanah pertanian. Di situ ternyata bahwa keperluan membuat jalan antara bagian-bagian itu, khususnya antara kampung-kampung satu sama lain, telah dipikirkan sebelumnya. Sebab di samping yang terlihat bahwa masing-masing ''desa dalam embrio'' itu ke dalam memperkuat susunan masyarakat desa masing-masing yang teratur, seluruh masyarakat perintis di daerah pembukaan baru itu merasakan diri sebagai satu kesatuan besar, di mana masing-masing desa mengambil bagian. Salah satu wujud yang nyata dari kebutuhan berhubungan satu sama lain ialah pembuatan jalan-jalan, yang dikerjakan oleh masing-masing desa dan dipersambungkan satu sama lain, termasuk jembatan-jembatan di atas jurang-jurang atau anak-anak sungai.

Usaha menggerakkan masyarakat desa untuk keperluan itu merupakan kegiatan kehidupan masyarakat yang tak kecil, di mana tampak suatu pimpinan berencana (*''planning''*). Jalan raya dibuat selebar 6 meter paling sedikit, sedang lorong-lorong (jalan kecil) di antara blok-blok pekarangan dalam kampung dibuat lebih sempit, tetapi teratur,

tegak lurus memotong ''jalan raya'' dan satu sama lain. Penanaman pagar hidup di tepi-tepi jalan itu menjadikan ''kesan rapi'' dari berbagai bagian kampung. Semua itu memerlukan pemeliharaan, yang dilakukan dengan gotong royong desa di mana kebayan-kebayan tampil ke muka memimpin ''regu'' yang sedang bekerja.

Disimpulkan, pada garis besarnya masyarakat ''desa Jawa'' yang tumbuh itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut (atau condong, di dalam tingkah lakunya kepada mengutamakan sifat-sifat itu);

1. mempunyai rakyat yang menetap
2. mempunyai wilayah desa yang tegas batas-batasnya.
3. mempunyai pamong desa dengan lurah sebagai pucuk pimpinan.
4. memperlihatkan kegiatan-kegiatan masyarakat sebagai kesatuan desa.

Khususnya dua pokok yang tersebut belakangan perlu ditinjau lebih lanjut: yaitu soal pimpinan desa dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang dapat dimajukan olehnya. Sampai di manakah kegiatan-kegiatan itu berarti suatu pertumbuhan ''dari dalam'' yang lahir sewajarnya dari kebudayaan dan adat yang dibawa oleh orang-orang itu, di dalam membentuk suatu desa? Dan sampai di mana ''pengaruh luar'' merasakan dirinya ke dalam susunan itu? Atau sebaliknya, sampai di mana pengaruh dari desa Jawa ada yang memancar keluar?

Untuk desa-desa baru di daerah Kalirejo dan sekitarnya, pengaruh ''luar'' yang kuat itu berasal dari hubungan ''ke atas', yaitu antara pimpinan desa-desa baru itu dan pihak ''pemerintahan atasan'', yang dalam hal ini tak tanggung-tanggung berarti: pimpinan pemerintahan kebudayaan di Metro, ibukota Lampung Tengah. Bupati Metro, seorang berpengalaman dalam memimpin ''kolonisasi'' sebelum perang, sejak semula menunjukkan simpati dan perhatiannya pada perintisan daerah baru Kalirejo. Sejak 1951 boleh dikatakan setahun sekali bupati memerlukan meninjau ke daerah tersebut, mula-mula dengan jalan kaki dari arah Padangratu (± 30 km, lewat belukar dan hutan), kemudian lewat Sukoharjo dari selatan. Tak ada wakil-wakil Jawatan lain yang lebih sering dari beliau meninjau Kalirejo, baik dari Padangratu (kecamatan yang membawahi daerah tersebut) maupun dari Gunungsugih (pusat Kewedanaan). Sesudah izin perintisan mula-mula diterima dari marga, pusat marga itu sendiri selanjutnya begitu jauh terasa dari kehidupan sehari-hari desa-desa Jawa yang sedang bangun di daerah Way Sekampung. Bukan saja dari desa Jawa yang paling utara

jarak fisis (berupa hutan dan belukar) ada 20 km lebih ke Haduyangratu, tempat pesirah marga Anak Tuha, melainkan hal ini berhubungan pula dengan suatu masa lesu dalam kehidupan marga pada umumnya. Sejak 1950 tak ada wajib kerja marga untuk ditebus, demikian pula janggolan secara resmi dihapuskan.

Walaupun ''janggolan'' itu ternyata tetap dikumpulkan oleh masing-masing ''desa Jawa'' perintis, untuk keperluan pamong desa, (kadang-kadang disebut ''bakti'', sumbangan sukarela), tetapi ''ke atas'' (kepala marga) tak ada lagi ''hubungan janggolan'' itu. Tinggallah hubungan pemungutan pajak penghasilan untuk pemerintah pusat dengan upah pungutan pajak uang tak berarti bagi kepala kampung dan kepala marga. Sesudah marga-marga digabungkan menjadi ''negeri'' marga-marga Pubian, Anak Tuha dan Nyerupa menjadi negeri Seputih Barat, tak ada perubahan apa-apa dalam hubungan yang hampa itu antara desa-desa baru itu dan ''negeri'' (pusatnya di Padangratu).

Dalam keadaan itu, walaupun hanya sekali setahun, peranan peninjauan bupati, pucuk pimpinan tertinggi dari pemerintahan yang dikenal, benar-benar berpengaruh. Pengakuan (pengesahan) yang telah dapat diberikan di bawah marga, yang di dalam masyarakat ''desa Jawa'' dirasakan sebagai pengakuan ''desa'' dengan lurahnya sekali, nyata telah menjadi cambuk untuk meniru teladan Kalirejo: pengakuan resmi diidam-idamkan oleh setiap ''lurah'' desa-desa baru itu. Dan di situlah agaknya telah disisipkan oleh pihak atasan itu pengertian ''syarat'' untuk sampai kepada pengakuan: rakyat yang cukup banyak dan bukti-bukti pembangunan desa. Di dalam hasrat yang besar untuk mendapat pengakuan itu, khususnya lurah yang belum resmi itu dengan pembantu-pembantunya, bergiat mengerahkan rakyatnya, sambil menjalankan ''siasatnya'' jika dapat menguntungkan desa sendiri. Akibatnya ialah: kegiatan yang dapat dipuji, maupun yang dapat menjadikan sengketa, lebih-lebih dalam soal perebutan batas-batas dari desa masing-masing yang sedang mengambang itu.

Contoh-contoh kegiatan membangun sebagian sudah disebut:

1) Perkampungan dibuat sampai kelihatan rapi, dengan pagar-pagar dan pekarangan yang terurus baik.
2) Tiap calon desa masing-masing berlomba-lomba mendirikan sekolah-sekolah rakyat. Baik gedung darurat maupun guru-gurunya semuanya diusahakan sendiri. Dengan pengumpulan uang atau bahan bangunan

gedung-gedung sekolah didirikan. Sedangkan pembayaran sekolah berupa uang setiap bulan ditambah dengan padi setahun sekali dari tiap keluarga yang menyekolahkan anaknya dimaksud untuk memberi nafkah kepada guru.

3) Dalam hal pembuatan dan pemeliharaan jalan-jalan ada wajib kerja desa dan kerjasama antara desa-desa. Lebih-lebih waktu Bupati berjanji akan datang ke Kalirejo dengan jeep dari arah Sukoharjo (Februari 1957), jika ''jalan telah mengizinkan'', maka desa-desa baru di situ makin giat menyelesaikan jalan raya itu dengan jembatan-jembatannya.

4). Lain-lain bukti ''pembangunan desa'' yang oleh pamong desa hendak ditunjukkan dengan: misalnya, pendirian balai desa (yang masih lazim: lurah sendiri memakai pendopo rumahnya untuk itu), pasar (tidak setiap desa mendirikannya, mengingat jarak antara pasar-pasar itu dan pembagian hari pasar), langgar atau mesjid, sedangkan ada pamong desa yang membanggakan klinik darurat (dengan mantri partikulir).

Mengingat pengaruh dorongan dan bimbingan dari pihak atasan (''pengaruh luar'') itu, dengan syarat-syaratnya, patutlah sekarang dipersoalkan apa yang memang hidup dan dapat dibangunkan di tengah-tengah masyarakat desa itu sendiri, sehingga teranglah penilaian hasil ''pembangunan desa'' yang terwujud[1]. Sampai di manakah dorongan dari luar itu mendapat jawaban murni dari tengah-tengah masyarakat desa itu? Manakah hasil yang wajar, manakah yang agak *geforceerd*, dipaksa-paksakan dan melampaui batas kekuatan sendiri?

Dalam hal struktur pimpinan ''desa Jawa'' yang timbul itu tampak gejala sebagai berikut. Sudah dikemukakan bahwa ''lurah desa yang sedang mencari pengakuan resmi atas desa itu, kebanyakan adalah tokoh ''kepala tebang'' pada awalnya, yang telah mendapat ''mandat'' perintisan dari marga. Dalam hal-hal perkecualian, selalu hal itu berarti bahwa kemudian telah ada pergantian lurah, dan kepala tebang dulu telah mengundurkan diri. Memang ada kesan bahwa hasrat merintis untuk mendirikan desa baru, dengan minta izin dari marga, antara lain juga didorong oleh hasrat ingin menjadi lurah di desa baru. Umumnya ''kepala tebang'' itu sudah lebih dari setengah umur dan adalah orang

---

1. Mempertentangkan ''struktur'' dan ''organisasi'' masyarakat, lihat R. Firth: *Elements of Social Organization,* Watts & Co. London, 1951), Bab II.

Jawa ''kolonis'' lama yang ''kenyang'' dengan ''pengalaman Lampung''. Asal-usul dan masa ujian ''truka'' (merintis) seorang ''kepala tebang'' dapat memberi gambaran akan watak pemimpin desa yang timbul dari tokoh semacam itu. Kepala tebang itu harus membuktikan kepandaian memilih tempat (hutan), dan memimpin penebangan hutan dan berladang. Dengan sekelompok kawan sepenebangan pertama, hal itu berarti: kepandaian berorganisasi, mengatur orang-orang untuk perbekalan dan penjagaan ladang. Dari bukti-bukti pimpinannya yang nyata itu, di bawah penanggungan yang sama-sama dilalui, ditambah dengan pandangan orang, perintis lain-lain, kepadanya sebagai seorang yang telah mendapat wewenang (''mandat'') dari pihak atasan (''pemerintah'') untuk membagikan tanah, tidak sukar untuk menerima pengakuan ''rakyat''nya terhadapnya sebagai pemimpin masyarakat desa yang sedang dibangun. Perintis-perintis Jawa yang hidup baru itu dengan bertani menamakan pemuka mereka itu ''lurah'' untuk memimpin kelompok masyarakat yang mereka bentuk, yang mereka beri nama ''desa''. (Seterusnya di sini lebih sering disebut ''desa Jawa'' untuk membedakan dari corak kelompok-kelompok masyarakat lain). Orang-orang Jawa itu dalam hal itu tidak berbuat lain daripada mengikuti adat yang dibawa dari desa-desa lama.

Bagaimanakah hubungan ''lurah'' dan ''rakyat''nya dilukiskan orang? Sepanjang menyangkut ideal dan norma-norma yang dikenakan dapat dikemukakan beberapa aspek daripadanya. Dengan tegas sifat demokratis dipentingkan benar dalam hubungan itu, bukan sifat memerintah (''seperti di jaman kolonial''). Pemimpin adalah ''rakyat'' biasa juga yang harus bekerjasama dan mengajak rakyat. Di dalam menemui rakyat ia berdiri sama tinggi, pertemuan dengan rakyat adalah sebagai orang-orang sederajat. Apakah arti pimpinan yang diharapkan daripadanya? Di sini sering diambil beberapa perumpamaan: sebagai ''orang tua'' terhadap ''anak''. Istilah ''pamong desa'' menggambarkan peranan ''momong'' itu (mendidik, menuntun). Rakyat yang umumnya ''bodoh'' yang dari hari ke hari memikirkan penghidupan masing-masing saja, perlu diberi didikan supaya mengerti (insyaf). Dalam memikirkan soal-soal kepentingan masyarakat, pemimpin wajib tampil ke muka dengan faham (ide) penyelesaian untuk kepentingan bersama. Lain daripada perumpamaan ''orang tua terhadap anak'', ada yang memakai pengertian, bahwa lurah itu ''bujang'', ''abdi'' dan ''jongos''

rakyat. Hubungan lain yang menggambarkan sebagai hubungan demokratis; ''harus ada teliti-meneliti''.

Di dalam memecahkan soal-soal masyarakat itu perlu bukti-bukti, karena itu cukuplah lurah terlebih dulu membatasi diri pada lingkungan kecil (desa) yang menjadi tanggung jawab bersama. Pemecahan soal itu pertama-tama dilakukan dengan kekuatan sendiri yang ada pada masyarakat desa (''self-help'', otonomi). Tidak patutlah jika ada kesukaran sedikit-sedikit, orang lari ke pihak atasan meminta bantuan, ''ini akan ditertawakan orang atasan saja''. Orang atasan itu hanya ''jalan sekali di sini'', sedangkan ''kita berada di tengah-tengah persoalan masyarakat kita sendiri, dari hari ke hari''. Pengertian ''merdeka'' sesuai dengan azas menolong diri sendiri itu diartikan: bukan akan tinggal menunggu segala-galanya diuruskan oleh pemerintah, lebih-lebih dalam mencari nafkah. ''Mencari nafkah adalah wajib dan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga; dari pemerintah hanyalah kesempatan untuk itu yang diharap'' (khususnya pertama-pertama: izin pembukaan hutan).

Adakah pengertian ''wakil'' pada diri tokoh pemimpin itu dirasakan oleh rakyat? Seorang pemimpin boleh mengaku ''pemimpin'' sesuka hatinya, tetapi rakyatlah yang pada dasarnya menentukan dan memberikan sebutan itu, karena menaruh kepercayaan padanya. Pemimpin itu orang yang ''faham'', mengerti akan kebutuhan orang dan tahu mengatur orang sesuai dengan itu. ''Lurah adalah untuk melangsungkan keinginan dan hasrat rakyat''. Nyata di sini kuatnya: dasar pemilihan lurah itu. Jika yang dimaksud ''turutlah lurahmu'', ada orang mengatakan: ''upahilah lurahmu itu''. Pimpinannya yang diikuti orang dianggap sebagai ''upah'' kepercayaan orang pada lurah itu.

Bagaimana hubungan sehari-hari yang erat dicapai antara lurah dan rakyat? tak lain: lewat susunan pamong desa yang sudah digambarkan lebih dulu: hirarki kamitua dan kebayan-kebayan. Adakah terwujud ''rapat-rapat desa'' di dalam susunan itu, di mana pemimpin-pemimpin langsung berhadapan dengan rakyat banyak? Sebaliknya dari ''rapat pamong desa'' yang lebih sering dapat berkumpul, karena mengenai orang-orang yang jumlahnya terbatas ''rapat desa'' jarang sekali diadakan. Mengingat luas daerahnya yang lebih kecil, ''rapat pedukuhan'' lebih banyak memenuhi harapan. Tak semua orang dari pedukuhan itu datang, akan tetapi rapat itupun tak mengenal sah

tidaknya mengingat jumlah yang datang. Yang diharap datang adalah pada umumnya laki-laki kepala keluarga dan mereka yang walaupun belum berkeluarga tetapi telah terdaftar sebagai seorang yang mendapat bagian tanah penebangan sendiri, yang dikenakan wajib kerja desa. Demikianlah, kaum wanita boleh dikata tak pernah menghadiri rapat-rapat itu: jika ada, mereka hanyalah sebagai penonton. Maka "rapat pamong desa" itulah yang boleh dikatakan berlaku sebagai "rapat desa terbatas", lebih-lebih di mana di pedukuhan-pedukuhan tertentu telah berlaku pemilihan bagi kedudukan kamitua dan kebayan-kebayan. Di mana pemilihan-pemilihan untuk itu (tanpa wanita) tidak atau belum ada dan orang-orang itu dipilih (ditunjuk) oleh lurah sendiri, memang tak dapat dikatakan adanya sifat "wakil yang dipilih" di dalam tokoh-tokoh itu, akan tetapi tetaplah kiranya kumpulan itu boleh bernama: "rapat desa terbatas". Juga di Jawa seringkali (dulu) orang-orang tua dan mereka yang berpengalaman dimasukkan ke dalam "rapat desa terbatas itu. Di desa-desa baru itu belum ada tokoh-tokoh "pinitua" semacam itu, yang dengan sendirinya diakui sebagai pemimpin atau orang yang patut didengar nasehatnya dalam urusan-urusan desa. Hanya orang-orang yang aktif dan giat dalam pamong desa (atau organisasi lain, partai misalnya) yang langsung memainkan peranan dalam susunan pimpinan desa: tua dan muda.

Umumnya tokoh lurah di desa-desa baru itu adalah orang tua yang lebih dari setengah umur (lebih dari 40 tahun), yang sudah "kenyang pengalaman Lampung" sejak sebelum perang, bahkan ada yang pernah merintis desa-desa kolonisasi lama di daerah Pringsewu, (sekitar tahun 1926). Bagi kebanyakan mereka pembukaan desa baru di daerah W. Sekampung adalah yang kesekian kalinya sebaliknya tokoh carik seringkali adalah orang muda, yang faham mengatur administrasi desa, berkat kemajuan bersekolah. Dengan pemilihan atau belum, dengan pemimpin-pemimpin kecil itu yang dapat dikumpulkan oleh lurah, nyata ada usaha: musyawarah. Jika di lain pihak dapat ditunjukkan suatu susunan hirarki dari padanya (lurah-kamitua-kebayan), hal itu tidak berarti bahwa tak ada norma-norma musyawarah dan tanggung jawab itu.

Di beberapa desa baru ada percobaan-percobaan lemah untuk merubah struktur pimpinan desa. Di desa Bandungbaru pernah diusulkan mengadakan "dewan perwakilan rakyat desa" antara lurah

di pucuk pimpinan dan hierarchie kamitua-kebayan di bawah. Tetapi ide itu tak diterima, apalagi dicoba. Di Sendangmulyo-pun ada cita-cita itu, yang sudah dicobakan: ''alat demokrasi'', semacam ''dewan perwakilan rakyat desa''. Mengingat pembagian badan itu atas ''seksi'' (tak kurang dari sebelas seksi) rupa-rupanya yang dicita-citakan adalah sesuatu yang mirip sebuah ''badan pekerja''. Melihat banyak macamnya seksi-seksi di situ, kiranya lebih besar kesan yang didapat bahwa hal itu tak lebih banyak daripada bersifat pembagian kerja yang berlaku di atas kertas saja! Pengertian ''seksi'' di situ agaknya melebihi pembagian kerja yang sederhana, dengan tokoh lurah yang sentral dalam susunan pamong desa asli. Usaha ke arah itu pernah dicoba di desa di Jawa Tengah, pada awal revolusi 1945: hasilnya umumnya nihil. Ternyata, yang mendorong kepada pembentukan badan tersebut di Sendangmulyo adalah seorang tua yang datang (1953) dari Jawa, yang mempunyai banyak pengalaman di lapangan politik sejak sebelum perang.

Apakah ada pula terjadi perebutan kedudukan lurah di desa-desa baru itu? Pada ''fase kepala tebang'', persaingan terjadi antara kepala-kepala tebang satu sama lain. Ini kemudian menjadi persaingan antara lurah-lurah dan desa-desa, terutama dalam hal wilayah tanah desa yang hendak diakui masing-masing. Dan di dalam susunan desa itu sendiri kemudian dapat pula timbul persaingan memperebutkan kedudukan calon lurah: suatu akibat dari adanya kelompok-kelompok di dalam embrio masyarakat desa itu. Para transmigran itu sebenarnya memang datang berkelompok-kelompok serta berkumpul di satu desa baru itu, dari belasan desa asal di Jawa maupun dari desa-desa kolonisasi lama. Bahwa kemudian atas kelompok-kelompok itu seorang ''kepala tebang'' dapat mewujudkan kewibawaan pimpinannya, dengan nama ''lurah'' dari desa baru itu, tak lain menunjukkan ''garis naik'' bagi satu orang itu. Akan tetapi, yang sebaliknya dapat pula terjadi, yaitu bahwa sesuai dengan adanya garis pemisahan antara kelompok-kelompok, terdapat perpecahan. Maka pengakuan ''lurah'' menjadi khayal, hanya dipertahankan karena ''mandat kepala tebang'' yang pernah diterima orang itu dulu, dari marga (negeri). ''Lurah'' yang menyadari kedudukan yang lemah itu, ada yang mengundurkan diri dengan sukarela. Tampillah orang lain ke muka, umumnya terdiri dari antara anggota-anggota pamong desa lainnya, carik atau kamitua.

Dalam hal itu pemerintah atasan bertindak mengesahkan penggan-

tian lurah, dan pada umumnya mempunyai kedudukan yang menentukan di dalam perebutan itu. Misalnya pernah kepala negeri dan camat mendapat tahu bahwa seorang lurah telah ''lalai'' dalam hal setoran pajak, ternyata ''dimakan'' sendiri. Akibatnya, dinasehatkan supaya mengundurkan diri. Atau pemerintah atasan itu bertindak langsung di dalam mengadakan pemilihan-pemilihan lurah. Ini sudah diadakan di beberapa desa baru, tak lain untuk menyelesaikan ketegangan yang timbul di situ. Pemilihan itu ada yang dilakukan dengan cara kuno: tidak rahasia, dengan berjongkok merupakan barisan di belakang masing-masing calon pilihan. Hanya di satu desa pernah ada pemilihan dengan ''bitingan'', yang rahasia. Pemilihan darurat itu tak menuruti peraturan-peraturan resmi, sebab peraturan-peraturan itu belum berlaku untuk desa-desa itu yang belum diakui resmi. Pemilihan itu pernah pula diselenggarakan oleh wakil dari pemerintah atasan itu. Sebagai wakil dari kepala negeri di daerah Kalirejo tampil ke muka seorang transmigran spontan, yang menjadi anggota dewan negeri, (Seputih-barat) berkat pencalonan desa-desa baru di situ (pemilihan dewan negeri 1954). Beberapa lurah dari desa-desa lain biasanya diminta menyaksikan dan membantu penyelenggaraan pemilihan lurah itu. Akan tetapi, ada juga terjadi, bahwa pemilihan darurat untuk lurah itu tak menolong menjernihkan suasana: perpecahan tetap dirasakan. Ini ternyata dari kampanye jelek-menjelekkan antara masing-masing ''pemimpin kecil'' itu.

Tak ada yang dapat menimbulkan kekhawatiran lebih besar pada ''lurah yang merasa sah'' daripada bahaya terjadi pemisahan dari desa yang dipimpinnya oleh sebuah ''pedukuhan'' sekaligus: sebagian ''rakyat''nya dan wilayah tanah desa akan ''hilang'' karenanya. Karena itu lurah berusaha supaya masing-masing kamitua pedukuhan tetap di pihaknya. Ada yang dari semula berhati-hati di dalam membagi-bagi daerah desa atas pedukuhan-pedukuhan. Dan jika toh dibuat pembagian itu (ini ternyata dari nama tersendiri bagi pedukuhan), ada lurah yang tak seketika mengadakan ''jabatan'' kamitua bagi pedukuhan itu, sementara cukuplah penempatan seorang ''kebayan kuasa''. Di satu desa, pihak lurah amat curiga terhadap satu pedukuhan, di mana kamitua mempunyai ''carik'', pembantu administrasi di situ. Hal itu tak dikenal oleh susunan pamong ''desa Jawa'' yang ''asli'', maka dicurigai sebagai permulaan gerakan memisahkan diri. Sering ternyata, bahwa lurah ''merangkul'' orang-orang aktif, untuk diajak membantunya di

pucuk pimpinan desa. Maka diadakanlah: bagian-bagian baru di situ, seperti ''Bagian penerangan'' atau ''Bagian Pemuda'' dan lain-lain. Orang-orang aktif yang dibiarkan beraksi di pedukuhan, dapat menjadi calon ''saingan'' bagi lurah. Siasat lurah lainnya untuk mengembangkan desa, ialah mengajak serta seorang ''kepala tebang'' baru yang dengan izin lurah sedang merintis di suatu bagian, dekat di situ, untuk menghadiri ''rapat-rapat pamong desa'', supaya ia tetap merasa bahwa daerah tebangnya adalah sebagian dari desa itu. Untuk bagian itu paling banyak ia boleh menjadi kamitua: status pedukuhan.

Sesudah 6 tahun lebih masa perintisan berlaku, pemisahan-pemisahan diri menjadi desa-desa baru tak seleluasa seperti tahun-tahun pertama, kecuali di daerah ujung dan pinggiran di mana perintisan masih berkembang (daerah perbatasan, garis *frontier* dari daerah *frontier* itu). Sebabnya tak lain, karena pengakuan pemerintah atasan ikut menentukan, sampai di mana hal itu dapat dibiarkan. Desa-desa baru yang namanya sudah sering disebut-sebut di atas itu, sedang dimintakan pengakuannya oleh negeri dan kabupaten kepada residen (di daerah Kalirejo, baru Kalirejo yang sah diakui). Maka sementara itu tentang batas-batas desa tak ada ketegasan, kecuali dari pengakuan masing-masing lurah.

Seorang lurah mengakui bahwa di dalam desa dengan banyak ''dongkol-dongkol'' (bekas) anggota pamong desa, persatuan rakyat lebih sulit diwujudkan, karena mereka itu, walaupun telah diganti, masih tetap bergiat, mengumpulkan kelompok masing-masing: semacam ''oposisi'' di luar susunan pamong desa. Gejala memperebutkan pimpinan desa itu (atau sebagian desa: pedukuhan) dapat juga dilihat dalam hubungannya dengan kemungkinan pemisahan diri atas desa-desa baru: jika ini tak segera mungkin, api persaingan berkecamuk ke dalam.

Di desa-desa campuran, dengan orang-orang Sunda dan Jawa yang berbahasa berlainan, ternyata tidak ada persoalan dalam susunan pamong desa, yang dapat dikembalikan pada perbedaan adat. Sistem ''desa Jawa'' juga yang dianut di situ. Di Bandungbaru memang unsur rakyat Jawa (dari Jawa Tengah dan Timur) yang berdominasi; kepala tebang orang Sunda disusul oleh lurah-lurah Jawa. Tetapi di Sukamulya pun (obyek B.R.N.) terlihat, bahwa orang yang mula-mula disebut ''kepala suku'' dan kemudian ''kepala kampung'', di dalam Sukamulya menuju kepada pengakuan kampung, akhirnya menamakan diri ''lurah

desa Sukamulya''. Rupa-rupanya dasarnya adat berpamong desa orang Sunda tak banyak berbeda dari orang Jawa, sehingga pola ''desa Jawa'' dengan mudah diikuti.

Keadaan Sukoharjo merupakan soal tersendiri, sesudah ''menggelembung'' menjadi desa besar dengan lebih dari 10.000 jiwa (1.900 keluarga), jika pencatatan angka-angka itu benar. Desa itu terdiri atas 6 pedukuhan, dengan 6 kamitua dan 15 kebayan. Awal 1957 ada usul suatu partai di dewan negeri Pringsewu, supaya diadakan plebisit dan memecah Sukoharjo menjadi beberapa bagian, desa-desa baru. Lurah Sukoharjo, dari partai lain, menganggap usul itu sebagai ''siasat'' memperkecil pengaruhnya di situ. (Usul itu tak dilanjutkan).

Pemerintah telah menyelesaikan pemilihan-pemilihan baru untuk kepala kampung di kampung-kampung lama (1956), tetapi di daerah baru itu tindakannya belum dapat lain daripada bersifat insidentil dan darurat. ''Negeri'' maupun pemerintah atasan belum mampu memecahkan soal penetapan batas wilayah desa-desa baru itu, (resmi: kampung-kampung), dengan lebih prinsipil. Misalnya, Sukoharjo, yang mengingat pertumbuhannya sebenarnya adalah suatu ''desa gaya baru''[1] dengan rakyat luar biasa banyaknya, resmi berstatus kampung, tak beda dengan kampung Lampung yang berpenduduk hanya 200 jiwa, misalnya. Prakteknya otonomi tingkat tiga di Lampung umumnya memang masih serba kabur.

1. Menurut model di Jawa.

7. PROSES PEMBAHARUAN ANTAR POLA KEBUDAYAAN (FAKTOR-FAKTOR POSITIF, NEGATIF DAN NETRAL)*)

MENUJU SUATU TEORI UMUM MENGENAI PERUBAHAN

Menurut hemat kami, jika data yang didasarkan pada penelitian-penelitian lapangan yang aktuil cukup banyak terkumpul dan dianalisa, maka sifat-sifat khusus dari proses perubahan ini dapat dipisah-pisahkan dan dinilai. Lebih penting lagi bahwa sebuah pola yang berulang dari sifat-sifat khas yang paling menonjol lalu muncul, sehingga dapat dirumuskan suatu teori umum mengenai proses perubahan. Kami telah membuat suatu usaha permulaan untuk melukiskan proses itu dengan menggunakan metoda yang berikut.

Mengumpulkan sejarah kasus yang telah diterbitkan yang melukiskan usaha-usaha tertentu untuk memasukkan pembaharuan-pembaharuan ke dalam kebudayaan lain. Ada beberapa kriteria untuk seleksi kasus, yang terutama ialah melukiskan sifat-sifat khas pembaharu dan golongan penerima unsur baru. Kasus-kasus ini dinilai berdasarkan jumlah dan mutu (kuantitas dan kualitas). Daerah yang dimaksudkan dicatat, jenis pembaharuan tertentu dikemukakan (perkembangan masyarakat, pembangunan jalan, pemboran sumur, dsb.), dan kerangka tertentu mengenai usaha perubahan diketengahkan. Kasus-kasus itu kemudian dinilai berdasarkan keberhasilan dan kegagalan, dan pembagian terakhir adalah mencatat faktor-faktor yang dianggap paling penting dalam mempengaruhi hasil.

Sesudah mengumpulkan, mengatur dan menghubungkan faktor-faktor yang menentukan penerimaan dan penolakan, suatu pola muncul dari seluruh proses itu. Sifat-sifat khasnya adalah sebagai berikut:

Adanya suatu tujuan *(goal),* yakni pemasukan idea atau teknik baru tertentu ke dalam masyarakat yang lain oleh pembawa unsur baru. Kita

---

*) Oleh A.H. Niehoff dan J. Charnel Anderson. Cetakan ulang A.D.C. (Sept. 1964) dan International Development Review, VI, No. 2, Juni 1964.

menyebutnya rencana *(plan)*, dan dalam pengertian proses hal ini disebut tindakan atau aksi..

Kemudian dalam seluruh proses itu, sampai dengan saat ditolak atau diterimanya pembaharuan itu ke dalam masyarakat setempat, terdapat sejumlah teknik yang digunakan oleh pembaharu. Hal-hal ini merupakan tindakan positif yang digunakan oleh pembaharu untuk memenuhi rencananya. Proses itu dapat dilihat hanya dari sudut tinjauan pembaharu, dan sebuah analisa yang layak dapat dibuat mengenai sifat-sifat khas itu saja. Jika hal ini dilaksanakan, kita bisa mengatakan tentang teknik-teknik mana yang cenderung diterima dan mana yang cenderung ditolak.

Ada segi lain dari proses itu yang merupakan tingkah laku dari para penerima pembaharuan. Segi ini dapat disebut sebagai reaksi yang disebabkan oleh tindakan perubahan. Hal itu dapat dibagi dalam dua sub kategori: motivasi untuk menerima ide baru itu, atau sebaliknya dan sifat-sifat khas dari pola kebudayaan lama yang memberi sanksi atau menentang pembaharuan yang direncanakan.

Dalam proses itu, tiap pembaharuan yang direncanakan akan termasuk dalam kategori ketiga pengaruh ini: tingkah laku pembaharu, motivasi penerima, dan tingkah laku yang berasal dari sifat pola kebudayaan lama. Pembaharuan itu akhirnya bisa berpadu dengan kebudayaan setempat jika memenuhi tuntutan-tuntutan kategori ini, atau juga bisa ditolak pada satu saat dalam proses itu karena bertentangan dengan salah satu daripadanya. Proses itu mungkin dapat dijelaskan secara garis besar dengan skema seperti pada gambar 1.

Dalam proses ini, kebanyakan faktor yang terdaftar atau gabungan daripadanya dapat merupakan perintang atau pendorong untuk menerima atau menolak suatu pembaharuan, atau tidak mempunyai pengaruh atas suatu hasil. Hal ini dapat dianggap sebagai pengaruh yang positif, negatif atau netral. Sebagai contoh, pengaruh positif dari partisipasi (pengikutsertaan) terjadi jika orang-orang dalam masyarakat setempat, yakni para penerima suatu unsur baru, terdorong ikut serta mengambil bagian dalam seluruh perencanaan dan pemenuhan proyek tersebut. Sebuah contoh pengaruh negatif terjadi jika unsur pembaharu tidak berhasil membuat rakyat setempat ikut serta baik dalam perencanaan maupun dalam pemenuhannya. Pengaruh yang netral terjadi jika pengikutsertaan rakyat setempat tidak relevan dengan hasil rencana tersebut.

Beberapa faktor hanya akan nampak sebagai pengaruh negatif dan tak pernah sebagai pengaruh positif, atau sebaliknya. Artinya, entah faktor itu, berdasarkan definisi, hanya dapat kelihatan sebagai faktor yang mempunyai efek negatif atau positif, atau kemungkinan lainnya yang bersifat kebalikan tidak diketahui oleh petugas-petugas lapangan. Kategori XI-C, usaha memperoleh gengsi, adalah sebuah contoh jenis yang pertama. Artinya, hal itu baru kelihatan kalau orang-orang berusaha meningkatkan posisi statusnya. Hal ini tak pernah kelihatan sebagai faktor negatif karena rupanya tak seorangpun yang suka membuat statusnya menjadi lebih rendah. Kategori XII-A-1, peranan pribadi, hanya kelihatan sebagai pengaruh negatif, karena peneliti biasanya melihat konflik (pertentangan) antara peranan tradisional seseorang dan bagaimana itu harus dirobah jika pembaharuan diterima. Hal-hal positif tidak akan jelas kelihatan karena tidak ada konflik.

Pada umumnya ada kecenderungan untuk menemukan lebih banyak contoh negatif, terutama karena ahli-ahli ilmu sosial biasanya baru menyadari adanya faktor-faktor yang berpengaruh, jika faktor-faktor itu merupakan perintang untuk menerima sesuatu. Juga, karena peranan yang paling sering dari ahli ilmu sosial ialah sebagai pemecahan masalah, dan oleh karena itu mereka mencari rintangan-rintangan pokok.

Tidak dapat disangsikan bahwa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses perubahan dan beberapa dari yang terdaftar ini mungkin perlu dibagi lagi atau disatukan. Tetapi berdasarkan 106 kasus yang sudah dianalisa, hal-hal ini yang agaknya paling penting. Berikut ini kami akan mencoba merumuskan komponen-komponen ini dan memberikan contoh-contoh penjelasan masing-masingnya yang diambil dari sejarah kasus yang telah diterbitkan.

TINGKAH LAKU PEMBAHARU

I. Komunikasi. Saling tukar menukar ide antara pembaharu dan penerima pembaharuan untuk perencanaan dan perwujudan pembaharuan. Pengaruh positif: seorang penasihat perkembangan masyarakat di Mesir mengiklankan proyeknya dan mengatasi prasangka

Gambar 1
Rencana (pembaharuan)

Tingkah laku → Pembaharuan — Tindakan/aksi | Reaksi ← Tingkah laku yang menerima pembaharuan

Pembaharuan — Tindakan/aksi	Reaksi
I Komunikasi (yang mantap)	XI Motivasi
II Peranan (image/gambaran yang diciptakan)	A. Keperluan yang dirasakan orang
III Demonstrasi/Peragaan (pembaharuan)	B. Manfaat Praktis
IV Partisipasi/Pengikut-sertaan (yang diperoleh)	C. Usaha memperoleh Gengsi
V Pola Kebudayaan Lama (penggunaannya)	D. Persaingan
VI Lingkungan (penggunaannya)	E. Imbalan
VII Waktu (penggunaannya)	F. Hal yang baru
VIII Fleksibilitas/Kelenturan (pelaksanaannya)	XII Kebudayaan Lama
IX Kelangsungan (pelaksanaannya)	A. Struktur Sosial
X Pemeliharaan (yang mantap)	1. Peranan (pribadi)
	2. Status (pribadi)
	3. Kekerabatan
	4. Tingkatan Kasta
	5. Etnis (suku bangsa)
	6. Politis
	7. Kewibawaan Pusat
	8. Kepentingan pribadi
	9. Kepemimpinan
	10. Kepercayaan Agama yang sama (orang-orang seiman)
	B. Pola Ekonomi
	C. Kepercayaan
	1. Keagamaan
	2. Magis
	3. Medis
	4. Fatalisme realistis (ketergantungan pada nasib)
	5. Penolakan terhadap rencana pembaharuan
	C. Pola Rekreasi
	E. Pola Konsumsi
	F. Sistem Nilai

↓ Perpaduan/Integrasi

desa lewat pertemuan-pertemuan dalam masyarakat, perdebatan, pelajaran-pelajaran kesehatan secara informal dan pertunjukan-pertunjukan (Shalaby, 1950: 16-38). Pengaruh negatif: seorang pembaharu kesehatan masyarakat di Ecuador tidak mendidik masyarakat setempat tentang teori mengenai kuman penyakit, sehingga mereka tidak melihat hubungan antara persediaan air yang bersih dan kesehatan, dan juga dia tidak memberi mereka alasan lain untuk menjaga daerah sekitar sumur agar tetap bersih, (Erasmus, 1961: 27—29).

II. Peranan Pembawa Perubahan. Gambaran mengenai seorang pembawa perubahan seperti yang dilihat oleh para penerima pembaharuan, bergantung pada kemampuannya dalam bahasa, pengertian budaya, kesanggupan teknis dan keanggotaan dalam masyarakat secara resmi. Pengaruh positif: seorang tokoh perkembangan masyarakat di Iran, seorang wanita muda Iran, memiliki motivasi yang tinggi dan perlengkapan yang baik untuk pekerjaan pembangunan masyarakat. Dia memperoleh respek dan kerja sama dari desa-desa (Najafi, 1958). *Pengaruh negatif:* para pembaharu dalam pembangunan masyarakat di desa-desa Filipina tidak dianggap sebagai ahli pertanian oleh para petani setempat, sehingga seluruh tahap pembangunan masyarakat dalam bidang pertanian gagal diterima (Sibley, 1960: 209—211).

III. Demonstrasi. Menunjukkan ide atau teknik baru kepada penerima pembaharuan sebagai sebuah metode yang meyakinkan mereka untuk menerimanya. Pengaruh positif: dalam sebuah proyek perintis di India Utara, ternak-ternak disuntik persis sebelum sebuah wabah mencapai daerah tertentu. Tak seekorpun dari ternak yang disuntik itu terkena wabah tersebut meski di daerah yang sama itu beberapa ekor ternak yang tidak disuntik mati sebagai akibat wabah tersebut (Mayer 1959: 255—259). Pengaruh negatif: pada sebuah proyek peternakan di Laos, meskipun jenis unggul dimasukkan ke desa-desa, mereka mati karena kekurangan makanan atau penyakit, atau gagal dikawinkan dengan jenis setempat (Niehoff: Pengamatan pribadi).

IV. Partisipasi. Partisipasi sukarela yang diterima dari para penerima pembaharuan dalam perencanaan dan perwujudan sebuah proyek. Pengaruh positif: dalam sebuah proyek kesehatan masyarakat di Libanon, untuk mendapatkan bantuan, para pembaharu mendesak agar

desa-desa menyumbang tenaga kerja, uang atau sejenisnya sebanyak mungkin. Orang-orang desa menyumbang sedikit uang, banyak hasil tanaman dan semua kerja tangan (Tannous 1944: 1-12). Pengaruh negatif: dalam sebuah usaha untuk membangun koperasi desa di India, para pembaharu beranggapan bahwa memperkembangkan pasar adalah pekerjaan yang sulit, dan para penerima pembaharuan setempat hanya sedikit tanggung jawabnya dan sedikit saja kesempatan untuk terlibat dalam urusan-urusan administrasi dari koperasi itu (Fraser 1963: 100—102).

V. Peranan Kebudayaan Lama. Usah-usaha dari pihak pembawa perubahan untuk menyesuaikan pembaharuan dengan pola-pola kebudayaan setempat, atau kurangnya usaha-usaha ke arah itu. Pengaruh positif: dalam suatu usaha untuk memasukkan ''pupuk hijau'' ke India Utara, para pembaharu mengerahkan kekuasaan menurut pola-pola kepemimpinan setempat. Pembaharuan itu diterima (Singh 1952: 55-67). Pengaruh negatif: dalam sebuah rumah sakit amal di Ecuador, para pembaharu biasanya menghilangkan semua peraturan tradisional bagi ibu-ibu yang habis melahirkan. Tetapi karena mereka mau mengalah kalau seorang ibu berkeras dan karena pengobatannya gratis, program itu tidak gagal (Erasmus 1961: 29-31).

VI. Peranan Lingkungan. Penggunaan positif atau negatif dari lingkungan setempat jika relevan dengan penerima pembaharuan. Pengaruh positif: dalam sebuah proyek erosi tanah di Chili selatan, pembaharu hanya bekerja di daerah-daerah yang sedikit saja erosinya agar bisa membawa hasil yang tidak terlalu sulit dan sedikit saja kemungkinan gagal. Proyeknya berhasil (Erasmus 1961: 17—21). Pengaruh negatif: dalam sebuah proyek peternakan di Laos, ayam dan babi unggul yang dimasukkan ke desa-desa tidak sanggup bertahan atau tidak bisa dipelihara dalam lingkungan itu dan kalah dalam persaingannya dengan ternak jenis desa (Niehoff: pengamatan pribadi).

VII. Ketepatan Waktu. Suatu pembaharuan yang dimasukkan pada waktu yang menguntungkan atau tidak menguntungkan sehubungan dengan kebudayaan setempat atau suatu peristiwa setempat. Pengaruh positif: dalam sebuah proyek perbaikan jalan di India Utara,

pekerjaan itu direncanakan bertepatan dengan musim senggang sehingga pekerja-pekerja desa bisa bebas (Mayer 1959: 166—169). Pengaruh negatif: dalam sebuah proyek pengembangan ternak di Filipina, dimasukkan jenis baru ternak babi tepat pada saat yang sama dengan terjadinya wabah babi. Kebanyakan ternak baru itu mati seperti halnya juga dengan jenis ternak setempat. Orang-orang desa mencela para pembaharu karena kerugian itu (Einseidel 1960: 34—38).

VIII. Fleksibilitas. Kesediaan dari pihak pembawa perubahan untuk merobah proyeknya agar sesuai dengan kondisi yang tidak dilihat seelumnya dalam rencana semula. Pengaruh positif: dalam program Sri Lanka untuk memasukkan pengobatan cacing tambang secara besar-besaran, para dokter menemukan bahwa mereka dapat memperoleh popularitas dengan mengobati penyakit yang lain dari cacing tambang, meskipun sebelumnya mereka telah diperingatkan untuk memberantas penyakit tersebut oleh pimpinan lembaganya (Philips 1955: 267-302). Pengaruh negatif: dalam sebuah proyek irigasi di Laos Selatan, pembaharu akhirnya mengetahui bahwa penduduk setempat tidak menggunakan saluran-saluran itu untuk pengairan tetapi untuk mencuci pakai an mereka dan mengambil air dari sana. Namun si pembaharu tidak membuat perubahan dalam rencananya sehingga proyek itu terbengkelai (Niehoff: pengamatan pribadi).

IX. Kelangsungan. Kelangsungan yang konsisten dari sebuah rencana dalam suatu unit masyarakat tertentu, meskipun kadang-kadang diperbaiki. Pengaruh positif: dalam sebuah proyek pembangunan masyarakat di Iran, badan-badan pemerintah dan swasta secara teratur melengkapi persediaan dan memberi nasihat kepada penduduk sebaik-baiknya (Najafi: 1958). Pengaruh negatif: dalam sebuah program pembangunan masyarakat di Laos, kepada desa-desa dijanjikan bahan-bahan bangunan tetapi bahan yang rusak tidak segera dapat diatasi karena kesulitan administrasi dengan AID. Orang-orang desa menjadi tidak bersemangat terhadap proyek-proyek pembangunan masyarakat (Niehoff: pengamatan pribadi).

X. Sarana Pemeliharaan. Daya-daya untuk memelihara pembaha-

ruan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas budaya dari para penerima pembaharuan. Pengaruh positif: dalam sebuah program di Cook Islands, Pasifik Selatan, untuk mendirikan pusat-pusat rekreasi orang dewasa, para pembaharu mengusahakan agar penduduk setempat memelihara dan mengatur pusat-pusat tersebut dan pemerintah terus memberikan nasihat dan bantuan jika diminta dan juga memeriksa buku-buku (King 1958: 93—102). Pengaruh negatif: dalam sebuah program untuk memasukkan jenis-jenis unggas yang lebih baik di Jordania, ternak itu merosot karena pengawasan di desa-desa diabaikan. Juga program-program pelengkap yang perlu mengenai perumahan dan makanan unggas itu tidak dimasukkan (American Friends 1958).

TINGKAH LAKU PENERIMA (PEMBAHARUAN)

XI. Motivasi

A. Keperluan yang dirasakan orang. Kebutuhan akan perubahan yang diketahui oleh para penerima sebelum adanya pengaruh dari pembawa perubahan. Pengaruh positif: dalam sebuah program perluasan pertanian di India, di mana diusahakan untuk memasukkan perlengkapan dan alat-alat pertanian yang baru ke dalam kompleks desa, orang-orang desa sudah menunjukkan kecenderungan menerima alat-alat baru tersebut (Mayer 1959: 248—254). Pengaruh negatif: dalam sebuah usaha untuk memasukkan jamban sehat ke sebuah kompleks pedesaan yang terdiri dari 67 desa di India, orang-orang desa tidak menginginkan jamban sama sekali. Alat itu adalah ide si pembaharu dan tidak berhasil diterima (Fraser 1963: 96—98).

B. Manfaat praktis. Suatu manfaat yang menghasilkan keuntungan nyata untuk masing-masing penerima dalam hidupnya ini. Pengaruh positif: suatu usaha untuk memasukkan jenis kopi Arabika yang tahan penyakit ke Laos, didasarkan pada pengetahuan bahwa mereka akan dibayar dengan harga yang lebih pantas di pasar setempat (Niehoff: pengamatan pribadi). Pengaruh negatif: dalam sebuah proyek kesehatan masyarakat di India, jamban dianggap menyusahkan saja. Wanita-wanita harus mengambil air ekstra untuk mengguyurnya dan kaum pria akan pulang dari ladang dan memakai jamban tersebut (Fraser 1963: 96—98).

C. Usaha memperoleh gengsi. Penerimaan secara pribadi suatu pembaharuan dalam mengikuti langkah orang-orang atau kelompok yang lebih tinggi statusnya agar supaya menaikkan posisi statusnya sendiri. Pengaruh positif: dalam sebuah program kesehatan masyarakat di Peru, beberapa orang yang menerima ide memasak air minumnya dipengaruhi oleh sanak saudaranya yang berdiam di kota dan ide bahwa dengan demikian mereka termasuk maju. Mereka juga dipengaruhi oleh omongan dan cara pengucapan dokter proyek tersebut, terutama karena posisi gengsinya dalam masyarakat (Wellin 1955: 71—102). Pengaruh negatif: tidak ada.

D. Persaingan. Usaha-usaha bersaing dari kelompok masyarakat untuk memelihara atau meningkatkan posisi statusnya terhadap kelompok-kelompok lain. Pengaruh positif: dalam sebuah proyek pembangunan masyarakat di Pasifik Selatan, persaingan kelompok dalam klub, team, distrik dan keluarga digunakan untuk kompetisi (persaingan) yang sehat (Bernett 1956: 143—150). Pengaruh negatif: tidak ada.

E. Imbalan. Imbalan langsung yang diberikan oleh pembaharu atau pemerintah untuk mendorong penerima pembaharuan agar menerima suatu ide atau teknik baru. Pengaruh positif: dalam sebuah proyek pendidikan ibu di Indonesia, ibu-ibu yang melaporkan kehamilannya ke klinik diberi berbagai macam barang — sabun, perlengkapan bersalin dan gulungan kapas (Textor 1954: 110—123). Pengaruh negatif: tidak ada.

F. Hal yang baru. Penerimaan atau penolakan suatu pembaharuan disebabkan atau karena mengesankan atau karena mencurigakan dan menakutkan. Pengaruh positif: penerimaan ayam merah Rhode Island dalam sebuah proyek pengembangan peternakan unggas di desa-desa Laos disebabkan karena ayam-ayam itu jauh lebih besar daripada ayam-ayam setempat. (Niehoff: pengamatan pribadi). Pengaruh negatif: ketakutan akan pompa dan pipa besi dalam sebuah program pemboran sumur di Libanon. Ketakutan akan pompa tersebut disebabkan karena benda itu belum pernah dilihat sebelumnya dan perasaan was-was akan pipa besi karena dikira pipa besi akan mencemarkan rasa air sumur bor itu (Tannous 1944: 1—12).

XII. Pola Kebudayaan Lama

A. Struktur Sosial

1. Peranan (pribadi). Pertentangan atau sanksi yang ditimbulkan oleh pembaharuan disebabkan oleh peranan tradisional dalam masyarakat. Pengaruh positif: tidak ada. Pengaruh negatif: sebuah koperasi di sebuah desa Mesir diselenggarakan tanpa mengikutsertakan wanita-wanita karena kurangnya partisipasi tradisional mereka dalam lembaga-lembaga desa. Kaum wanita merasa kepentingan mereka diabaikan dan mencoba mengorganisir sebuah koperasi tersendiri, sehingga menyebabkan pertentangan dalam desa itu. Akhirnya mereka diijinkan turut serta dalam koperasi yang didirikan oleh pembaharu (Shalaby 1950: 16—38).

2. Status. Kedudukan seseorang dalam suatu hubungan hirarkis yang lazim. Pengaruh positif: tidak ada. Pengaruh negatif: dalam proyek-proyek pembangunan masyarakat di desa-desa Filipina, para penyelenggara biasanya terdiri dari petugas-petugas pilihan yang biasanya masih muda dan bujangan. Mereka biasanya tidak mengetahui respek tradisional terhadap orang yang lebih tua umurnya sehingga orang-orang tua merasa terhina. Dan orang-orang tua itu tidak mau bekerja sama (Sibley 1960: 209—211).

3. Kelompok Kerabat. Suatu kelompok resmi (adat) orang-orang dengan nenek moyang yang sama, entah nenek moyang itu dapat ditelusuri asalnya atau hanya dianggap ada. Bentuk yang terbesar dari kelompok itu disebut suku (*clan*). Pengaruh positif: dalam sebuah proyek koperasi traktor di Pakistan, orang-orang desa enggan masuk dalam kelompok koperasi karena tidak adanya saling kepercayaan antara mereka. Akhirnya, seorang pemimpin desa meyakinkan sanak saudaranya untuk turut serta bersama dia dalam sebuah kelompok dan keberhasilan mereka merupakan contoh bagi yang lain (Khan 1962: 1—63). Pengaruh negatif: dalam sebuah proyek pertanian dan kesehatan masyarakat di Afrika Selatan, pemakaian susu erat terikat dengan kebiasaan kekerabatan yang luas sehingga sebuah keluarga tidak dapat menambah persediaan susunya jika mereka tidak bisa mendapat susu dari sapi ternak mereka sendiri (Cassel 1955: 26—29).

4. Kasta dan Klas. Kelompok-kelompok dengan posisi status yang biasanya mempunyai hubungan hirarkis dengan kelompok lain dan

kadang mempunyai identitas rasial yang berbeda. Pengaruh positif: dalam sebuah usaha untuk mendirikan koperasi di kalangan buruh penyamakan kulit di India, kegiatan dalam koperasi disesuaikan dengan pekerjaan tradisional dari anggota-anggota kasta. Rasa persatuan kasta yang mendalam membuat fungsi koperasi berjalan lancar (Fraser 1963: 100—102). Pengaruh negatif: dalam proyek yang sama, usaha untuk mendirikan koperasi di kalangan penenun pakaian gagal karena penenun-penenun itu berasal dari kasta yang berbeda-beda yang mengakibatkan perbedaan dalam mengambil keputusan, melumpuhkan kegiatan sehingga menghambat jalannya koperasi (Fraser 1963: 100—102).

5. Kelompok Etnis. Tiap kelompok dengan pola budaya atau subbudaya yang khas dan berdiri sendiri. Kelompok itu tidak perlu, tetapi bisa juga, terdiri dari ras tertentu. Pengaruh positif: tidak ada. Pengaruh negatif: dalam sebuah program pembangunan masyarakat di Israel, tiga dari empat belas pemukiman tidak termasuk dalam gerakan keagamaan. Mereka juga tidak dapat disertakan dalam seluruh program (State of Israel 1955: 9—14).

6. Kelompok Politik. Bagian-bagian dari kelompok politik pusat yang diorganisasikan secara setempat dan berfungsi sebagai unit-unit dalam lingkup sebuah desa, distrik atau kota. Pengaruh positif: tidak ada. Pengaruh negatif: dalam sebuah proyek pembangunan masyarakat di Brasil, masyarakat desa dibiasakan dengan pola di mana orang tunduk pada pengaruh pribadi penguasa oleh anggota-anggota partai yang berkuasa. Para pembawa perubahan berusaha dan bekerja lewat dewan masyarakat yang bersifat non politis yang anggota-anggotanya dipilih tanpa memperhatikan kecenderungan-kecenderungan politik. Pengertian mereka yang tidak berkuasa dan umumnya tidak mempunyai hak pilih, merusakkan keseimbangan politik. Ketika melihat kewibawaannya dirongrong, partai yang berkuasa menentang seluruh proyek tersebut (Oberg dan Rios 1955: 349—375).

7. Kewibawaan Pusat. Sikap dan reaksi penduduk setempat terhadap pengendalian pusat dari pemerintah nasional mereka sendiri. Pengaruh positif: secara keseluruhan, orang-orang golongan bawah di Puerto Rico percaya bahwa program-program yang dijalankan oleh pemerintah mereka akan bermanfaat bagi mereka dan harus dibantu oleh mereka. Dengan demikian sebuah proyek pembaharuan kota yang disponsori oleh pemerintah di San Juan mendapat kerjasama sukarela dari penduduk setempat sejak saat permulaan (Meier 1960: 18—47).

Pengaruh negatif: dalam sebuah proyek perluasan pertanian di Jordania, ketika tokoh-tokoh pembaharu mencoba mencatat bidang tanah dan jumlah petak tanah untuk memasukkan tanaman anggur unggul, orang-orang desa curiga bahwa pemerintah bermaksud mengambil alih tanah mereka sehingga mereka tidak mau bekerja sama (American Friends 1958).

8. Kepentingan pribadi. Reaksi orang-orang atau kelompok terhadap suatu pembaharuan yang akan mempengaruhi kepentingan mereka yang sudah berakar secara positif atau negatif. Pengaruh positif: dalam sebuah program pembaharuan tanah dan pembangunan masyarakat desa di Bolivia, para tuan tanah memberikan suatu wilayah tanah kepada proyek itu untuk kepentingan percobaan pertanian dan bekerja sama dengan orang-orang dari proyek. Tindakan mereka itu disebabkan oleh perasaan takut bahwa akan terjadi penyitaan oleh pemerintah dan berharap agar dengan ikut mengerjakan proyek itu mereka dapat mempertahankan sebagian dari tanahnya (Schweng 1963: 13—19). Pengaruh negatif: sebuah usaha untuk membangun koperasi dalam sebuah daerah yang terdiri dari enampuluh tujuh desa di India mengancam golongan menengah yang memperoleh keuntungannya dari buruh kulit. Koperasi itu akan membatasi keuntungan mereka sehingga mereka menentang pelaksanaannya. (Fraser 1963: 100—102).

9. Kepemimpinan. Sistem tradisional mengenai pemimpin dan penguasa tertib masyarakat. Pengaruh positif: dalam sebuah proyek pembangunan masyarakat di Mesir, tokoh pembawa unsur baru mencari pemimpin-pemimpin setempat dan mengorganisir mereka dalam sebuah dewan desa yang resmi. Proyek itu berhasil (Shalaby 1950: 16—38). Pengaruh negatif: dalam sebuah proyek pembangunan masyarakat di Filipina, tak seorang pun dari keenam pemimpin utama dalam sebuah desa menyokong proyek itu karena pertentangan dengan si pembawa unsur baru. Proyek itu berakhir dengan kegagalan (Sibley 1960: 209—214).

10. Persaudaraan kaum seagama. Kelompok yang terhimpun di bawah golongan pendeta atau pemimpin-pemimpin keagamaan yang resmi. Pengaruh positif: dalam sebuah program pemberantasan cacing tambang secara besar-besaran di Sri Lanka, pendeta-pendeta Budha dan pemimpin-pemimpin agama Islam seperti juga pemimpin-pemimpin masyarakat di luar agama, memberikan bantuannya untuk menyebarkan informasi mengenai cara membebaskan orang-orang desa dari penyakit cacing tambang (Philips 1955: 267—302). Pengaruh negatif: dalam

sebuah program penyediaan air di sebuah daerah pedesaan Peru, pendeta-pendeta dan unsur konservatif mengatakan kepada penduduk bahwa kekurangan air itu disebabkan oleh orang mengutamakan urusan keduniawian dan modernisasi, dan bahwa sumur-sumur bor akan mempunyai akibat negatif terhadap persediaan air. Tak ada usaha yang dijalankan untuk mengerahkan pendeta agar membantu proyek itu. Dan proyek tersebut gagal (Holmberg 1952: 113—124).

B. Pola Ekonomi. Sistem hubungan ekonomi setempat. Pengaruh positif: dalam sebuah proyek untuk membangun koperasi industri bata di sebuah daerah pedesaan India, musim mencetak batu-bata ternyata berlangsung pada waktu kegiatan pertanian telah selesai. Jadi usaha itu merupakan industri pembantu/penopang yang sungguh tepat. Juga, hampir semua bahan mentah mudah diperoleh di tempat itu dengan harga yang murah dan terdapat permintaan yang ajeg untuk batu-bata di daerah tersebut (Mayer 1959: 272—277). Pengaruh negatif: dalam sebuah proyek pengembangan unggas di Afrika Selatan, ternyata suku-suku setempat beranggapan bahwa memakan telur adalah tidak ekonomis karena telur kemudian akan menetas dan menjadi ayam. Bagi mereka, makan telur adalah tanda ketamakan (Cassel 1955: 22—29).

C. Kepercayaan

1. Keagamaan. Kepercayaan yang berasal dari keyakinan keagamaan yang resmi dari masyarakat setempat. Pengaruh positif: tidak ada. Pengaruh negatif: dalam sebuah usaha untuk meningkatkan teknik-teknik peternakan di India Utara, penghormatan kepada lembu merintangi program peternakan dan melarang pembunuhan lembu yang tidak berguna yang mengurangi manfaat program pemberian makan (Mayer 1959: 255-259).

2. Magis. Kepercayaan yang berasal dari pemikiran-pemikiran gaib di luar kepercayaan agama yang utama dan resmi dari masyarakat setempat. Pengaruh positif: tidak ada. Pengaruh negatif: dalam sebuah program di Angola untuk menempatkan kembali penduduk desa dari dataran tinggi yang telah tandus ke dataran rendah yang masih utuh, ternyata suku-suku setempat percaya bahwa istri mereka akan mati jika mereka bekerja di lembah-lembah. Lembah-lembah digunakan sebagai daerah pekuburan untuk anak-anak dan tidak boleh diganggu (Richardson 1943: 44—48).

3. Medis. Kepercayaan mengenai sifat tubuh manusia dan penyakit badani, yang tidak berasal dari praduga gaib. Pengaruh positif: tidak ada. Pengaruh negatif: dalam usaha untuk membangun sebuah rumah sakit bersalin atas dasar sosial untuk ibu-ibu dari golongan bawah di Quito, Ecuador, ternyata kaum wanita menganut keyakinan bahwa tembuni harus dikuburkan, ibu harus berada di tempat tidur selama dua minggu dan selama empat puluh hari harus dijaga agar ibu itu jangan mandi, jangan memotong kukunya atau jangan terkena udara segar. Menurut praktek rumah sakit, si ibu pulang ke rumah sesudah lima hari. Juga semua kepercayaan medis setempat lainnya ''dilanggar'' sehingga mengakibatkan pertentangan (Erasmus 1961: 29—31).

4. Fatalisme Realistis (Ketergantungan pada nasib). Sikap masa bodoh yang disebabkan oleh keadaan dulu atau sekarang, yang menghalangi atau merintangi kemungkinan peningkatan diri. Pengaruh positif: tidak ada. Pengaruh negatif: dalam sebuah usaha untuk menempatkan kembali sejumlah keluarga di Sardinia, ternyata orang-orang yang telah berdiam di kemah-kemah dalam waktu yang cukup lama, sudah kehilangan kepercayaan diri dan keinginan untuk bekerja. Mereka bersikap tak acuh terhadap janji-janji pemerintah dan para pembawa pembaharuan (Paulsen 1960: 19—22).

5. Penolakan terhadap Rencana Pembaharuan. Sikap tak acuh terhadap pembaharuan yang disebabkan oleh kegagalan proyek-proyek sebelumnya. Pengaruh positif: tidak ada. Pengaruh negatif: dalam sebuah usaha untuk memperkenalkan koperasi traktor di Pakistan Timur, reaksi pertama dari orang-orang desa adalah negatif karena mereka telah melihat sejumlah proyek serupa yang gagal sebelumnya, di mana terjadi pemborosan dan penyalahgunaan uang (Khan 1962: 1—63).

D. Pola Rekreasi. Pola-pola rekreasi atau tindakan yang menyenangkan. Pengaruh positif: tidak ada. Pengaruh negatif: wanita-wanita ternyata tidak setuju dengan usaha untuk memasukkan kakus yang sehat ke sebuah daerah pedesaan di India karena mereka biasa pergi ke waduk desa dan sekitarnya di mana mereka dapat bertemu dengan wanita-wanita lain untuk bergunjing, melepaskan lelah dsb. Adanya kakus akan mempersulit atau tidak memungkinkan interaksi ini (Fraser 1963: 96—98).

E. Pola konsumsi. Barang-barang tradisional yang dikonsumsi terutama makanan dan minuman. Pengaruh positif: dalam sebuah usaha untuk meningkatkan makanan di Zulu, Afrika Selatan, para pembaharu memasukkan susu bubuk, yang diterima karena penduduk setempat biasa menggunakan susu dalam makanannya (Cassel 1955: 26—29). Pengaruh negatif: sebuah usaha untuk meningkatkan usaha kebun sayur di pedesaan Costa Rica gagal karena secara tradisional sayur-sayuran tidak dianggap sebagai makanan pokok. Orang-orang desa sudah merasa puas dengan konsumsi sayur mereka yang rendah tingkatannya (Alers-Montalvo 1957: 4—5).

F. Sistem Nilai. Sistem kepercayaan mengenai apa yang benar dan tepat serta apa yang salah dan tidak tepat. Pengaruh positif: tidak ada. Pengaruh negatif: dalam program keluarga berencana di Puerto Rico ternyata kaum pria berkeberatan terhadap penggunaan alat-alat kontrasepsi karena alat-alat itu mengurangi perasaan nikmat. Kaum pria itu beranggapan bahwa kenikmatan seksual adalah hak mereka. Mereka juga merasa bahwa alat-alat kontrasepsi itu jelek atau jorok karena alat-alat itu biasanya digunakan dalam hubungan dengan pelacur. Juga mereka merasa takut bahwa penggunaan alat-alat kontrasepsi akan menambah ketidaksetiaan terhadap isteri mereka. (Stycos 1955: 189—210).

BAHAN DISKUSI UNTUK BAB II

1. ***Kerangka Pemikiran (J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers 1959)*)***

(1.1) Dalam sosiologi "satuan analisa" adalah kejadian sosial yang disebut "INTERAKSI SOSIAL" antara dua orang atau lebih.

(1.2) Dalam interaksi sosial perlu membedakan 3 hal yaitu:

a. Orang-orang yang bertindak.

b. Masyarakat yaitu, semua orang yang berinteraksi satu sama lain yang membina hubungan-hubungan sosial dalam beragam proses.

c. Kebudayaan: seluruh arti berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang dihayati bersama serta sarana yang menjadi penyalur arti yang disampaikan dalam kejadian interaksi itu.

(1.3) Sejumlah interaksi sosial dapat digolongkan dalam beragam jenis "HUBUNGAN SOSIAL" yang dibina oleh sejumlah orang, pelaku dari satu atau dua grup/organisasi.

(1.4) Beragam hubungan sosial itu antar orang-orang dari satu atau dua grup yang disebut "Hubungan Sosial Antar-Grup" menurut ciri-cirinya dapat digolongkan dalam beragam "PROSES SOSIAL": ada proses sosial yang mendekatkan orang (membina solidaritas) dan ada proses sosial yang menjauhkan orang (antagonistik).

(1.5) Tiga jenis proses sosial yang bersifat mempersatukan adalah: proses KERJA SAMA; proses AKOMODASI dan proses ASIMILASI; sedangkan tiga jenis proses sosial lain yang arahnya sebaliknya adalah proses KONFLIK; proses KONTRAVENSI dan proses PERSAINGAN.

(1.6) AKULTURASI sebagai suatu proses kebudayaan mencakup kejadian-kejadian sebagai hasil KONTAK antara orang-orang beragam Kelompok/Pola kebudayaan yang membawa perobahan-perobahan pada pola masing-masing pihak.

) J.A. van Doorn & C.J. Lammers (1959):* ***Modern Sosiologie,* *een sijstematische inleiding; uitgeverij Het Spectrum Utreacht/Antwerpen.*

(Perhatikan: INTEGRASI sebagai suatu proses sosiologi lebih mudah terjadi antara dua kelompok dengan pola kebudayaan homogen/serupa; misalnya pada integrasi politik atau ekonomi, suatu kelompok dapat tetap bertahan pada kebudayaan yang sama).

2. Pertanyaan:

(2.1) Bandingkan interaksi yang mempunyai ARTI bagi para pelakunya dalam bacaan 1, bacaan 2 dan bacaan 3, dengan menunjuk pada:
a. Orang-orangnya yang bertindak.
b. Masyarakat.
c. Kebudayaan.

(2.2) Proses-proses Sosial manakah, mengingat sifatnya yang berbeda, yang Saudara temukan dalam bacaan 1, bacaan 2 dan bacaan 3.
Perincilah dan bandingkan!!

(2.3) Perincilah fenomena-fenomena yang Saudara temukan pada pertanyaan no. 2:
AKULTURASI atau INTEGRASI!

LEMBAGA-LEMBAGA KEMASYARAKATAN

8. KEHIDUPAN PEMUDA DI KOTA BESAR*)

PENGANTAR

Permasalahan pemuda di Indonesia bukan saja penting karena tantangan jumlahnya yang sedemikian besar, tetapi pertanyaan di mana tantangan itu berlangsung, membutuhkan perhatian tersendiri. Di Indonesia perkembangan penduduk yang cukup pesat diikuti pula oleh tingkat urbanisasi yang tinggi. Kota Jakarta mengalami pertumbuhan mendekati enam persen per tahun, yang berarti lebih dari dua kali tingkat pertambahan penduduk Indonesia. Ini berarti bahwa tekanan penduduk akan semakin terarah pada kota-kota besar yang dengan demikian harus mempersiapkan fasilitas pendidikan, lapangan kerja, perumahan, sarana transportasi dan aneka ragam kebutuhan hidup dalam sebuah kota besar. Permasalahan pemuda di kota besar semakin rumit lagi jika diingat bahwa kapasitas yang bisa menampung sangat

---

*) Dikutip dari ''Peranan Komunikasi dan Pemanfaatan waktu Luang dalam Kehidupan. Pemuda di Jakarta'' oleh Amir Karamoy dalam *Pemuda dan Perobahan Sosial* (ed. Dr. Taufik Abdullah), Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1974, hal. 71—89.
Tulisan ini adalah hasil revisi dan penyempurnaan karya Amir Karamoy dan Achmad Sablie berjudul ''Aspek dan Peranan Komunikasi pada Pemuda di Kampung Miskin di Jakarta'', dalam Prisma No. 3 Tahun ke III, Juni 1974. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Drs. Achmad Sablie yang membantu memperlengkapi bahan-bahan.

terbatas karena berbagai tantangan lain yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia di satu pihak, sedang di pihak lain kaum muda yang membanjiri kota-kota besar tersebut pada umumnya terdiri dari mereka yang belum cukup memenuhi persyaratan sebagai tenaga kerja yang cakap. Berbeda dengan urbanisasi di Barat pada masa Revolusi Industri yang terutama ditarik oleh lapangan kerja yang luas di bidang industri, urbanisasi di Indonesia terutama didorong oleh tekanan hidup di daerah pedesaan terutama di Pulau Jawa — karena kurangnya lapangan kerja. Tingginya tingkat urbanisasi di satu pihak dan kurang tersedianya lapangan kerja di pihak lain, telah menjadikan kota-kota besar Indonesia, terutama Jakarta, sebagai semacam ''tangkai penampung'' berbentuk ''kantong-kantong'' daerah miskin dalam kota berupa perkampungan liar dengan gubuk-gubuk dan daerah gelandangan. Sudah tentu, semua ini bukan saja menantang para perencana pembangunan kota, akan tetapi juga mempunyai implikasi di bidang ekonomi, sosial dan politik, yang tentu saja memerlukan pemecahan yang menyeluruh pula.

Dibalik tantangan pemuda yang semakin mendesak kota-kota besar itu, ternyata tidak banyak informasi dan hasil penelitian mengenai hakekat permasalahan yang sesungguhnya. Pada umumnya penelitian hanya ditujukan pada beberapa aspek saja, misalnya kenakalan remaja yang juga dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kesulitan memperoleh data membatasi pula luas dan dalamnya bahasan mengenai kehidupan para pemuda di kampung miskin Jakarta. Tulisan ini tidak terlepas dari kekurangan tersebut. Penulis hanya ingin menggambarkan peri kehidupan pemuda yang hidup di kampung miskin terutama yang menyangkut peranan komunikasi dan pemanfaatan waktu luang di kalangan kaum usia muda, dengan beberapa catatan: *Pertama,* pemilihan aspek ini terutama terdorong oleh sedikitnya pembahasan mengenai segi-segi tersebut. Aspek komunikasi sangat penting terutama karena komunikasi langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan dan usaha pengembangan pemuda. *Kedua,* pemanfaatan waktu luang mungkin dapat mengungkapkan sampai berapa banyak *waktu yang terluang* dan dapat juga dipergunakan sebagai indikator ''pengangguran tidak kentara'' dalam kehidupan pada kota besar. Perlu kiranya diketahui bahwa apa yang disajikan di sini sesungguhnya lebih merupakan suatu usaha menyusun fragmen-fragmen informasi berdasar-

kan penelitian dan pengamatan yang dilakukan dalam waktu yang berlainan. Bagaimana juga tulisan ini berguna sebagai rekaman sesaat: bahwa pada suatu saat, telah berlangsung peristiwa-peristiwa yang kira-kira seperti yang dituturkan. Bagian pertama tulisan ini mencoba menguraikan keadaan umum di daerah perkampungan miskin berdasarkan beberapa sampel penelitian serta pengaruh lingkungan fisik dan sosial dalam pembentukan aspirasi para pemuda kota. Pada beberapa bagian digambarkan pula sekedar perbandingan antara kehidupan pemuda miskin dengan kelompok pemuda yang lebih berada. Bagian berikutnya akan membahas kehidupan dan lingkungan sosial yang diakibatkannya. Bagian akhir terutama membahas aspek dan peranan komunikasi bagi pengembangan sumber-sumber kaum usia muda.

SITUASI UMUM KAMPUNG MISKIN

Dari jumlah penduduk Jakarta sekitar 4,5 juta jiwa[1] lebih kurang 60% tinggal di daerah perkampungan. Dari jumlah ini, sebanyak 47% berasal dari kelompok usia 0—14 tahun dan 20% terdiri atas kelompok umur 15—34 tahun. Sebagian dari mereka adalah ''penduduk asli'' Jakarta, sedang sisanya adalah pendatang baru dari pedesaan di Pulau Jawa maupun dari daerah seberang. Sudah tentu keadaan sosial ekonomi serta kebudayaan pendatang ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan daerah asal mereka, baik sebagai ''orang desa'', ''orang seberang''. Pada umumnya ditandai oleh ciri masyarakat tradisional agraris yang berbeda dengan lingkungan modern di Jakarta. Karena motivasi urbanisasi sering disebabkan oleh tekanan sosial ekonomi dari daerah asal, maka para pendatang baru ini kebanyakan hidup dalam keadaan yang tak banyak berbeda dengan daerah asal, terutama jika aspirasi dan harapan mereka, semula menemui kegagalan. Dalam kedudukan ekonomi seperti ini, mereka menetap di daerah dengan kondisi lingkungan yang serba kekurangan, baik secara berkelompok dalam daerah yang luas, maupun berserakan di sana sini di tengah-tengah kelompok yang situasi sosial ekonominya relatif lebih baik.

---

1. Sensus Penduduk 1971, Biro Pusat Statistik, Jakarta.

Dalam pembicaraan kita, yang dimaksud dengan kampung miskin adalah bagian dari daerah kelurahan dengan kondisi lingkungan yang serba kekurangan: keadaan prasarana, kesehatan dan kebersihan sanitasi yang buruk dengan sampah yang menumpuk dan membusuk: saluran pembuangan air yang jelek dengan selokan yang tersumbat dan becek; prasarana jalan yang tidak teratur dan kotor dan gang-gang yang becek; perumahan yang sempit, padat dan berdesak-desakan dengan para penghuni yang hidup miskin atau melarat. Acapkali, bangunan dan pemukiman ini berlokasi di daerah-daerah ''terlarang'' karena gangguan keamanan, keselamatan seperti di sepanjang jalan kereta api, kali atau sekitar jembatan. Kombinasi keadaan yang serba kurang menjadikan daerah ini sebagai perkampungan liar, miskin dan lingkungan yang buruk.[2]

Suatu penelitian berdasarkan sampel di 14 wilayah kelurahan (n = 223) yang tergolong miskin memberikan gambaran bahwa 40% dari penduduk hidup sebagai buruh kasar, pelayan toko, pembantu rumah tangga, pencari beling, kertas dan kaleng bekas, pengemis, pelacur dan jenis pekerjaan kasar lainnya. Sebanyak 23% penduduk bekerja sebagai pegawai negeri yang berarti kelompok terbesar dengan jenis pekerjaan yang homogen dibandingkan dengan kelompok pertama. Kalau jenis pekerjaan tersebut dibagi dalam bidang jasa dan produksi maka kentara bahwa yang disebut pertama meliputi jumlah 37% dan terdiri atas tukang becak, pedagang kecil, calo dan pelacur. Yang bekerja di bidang produksi sebanyak 20% dan terdiri atas kuli bangunan, buruh pabrik dan pekerja kasar lainnya. Lebih separuh menyatakan memperoleh pendapatan antara Rp 100,- sampai Rp 300,- per hari, untuk kebutuhan satu keluarga dengan anggota rata-rata lima jiwa. Sejumlah 56% tinggal dalam rumah darurat, 38% setengah permanen, rumah permanen

---

2. Dalam Laporan Sementara Hasil Penelitian Golongan Berpenghasilan Rendah di Jakarta (LP3ES, 1972), golongan berpenghasilan rendah harus memenuhi tiga dari lima kriteria. (1) mereka yang berdiam di daerah yang status bangunannya ''liar''; (2) yang diam di daerah pengamanan seperti sepanjang rel kereta api, tanggul, kolong jembatan dan lain-lain; (3) yang tidak memiliki tempat tinggal tetap seperti gelandangan dan lain-lain; (4) yang tinggal di bagian kota dengan fasilitas minim dengan rumah padat berdesakan dan jalan serta selokan yang tidak teratur dan kotor dan (5) para penganggur, tanpa memperhitungkan apakah ia ditanggung orang lain atau tidak.

ditemukan dalam dua kasus dan rumah "liar" 10 kasus.[3] Kebanyakan mereka menyadari bahwa kondisi kehidupan mereka adalah buruk tetapi tak kuasa merubah dan "tidak ada tempat lain yang lebih baik". Tanggapan negatif juga diberikan terhadap prasarana jalan, fasilitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Dalam suasana seperti ini, maka sumber kemungkinan yang diharapkan dapat merubah nasib mereka adalah "pemerintah". Terutama mengenai program perbaikan kampung yang terkenal dengan nama Proyek M.H. Thamrin, sambutan masyarakat setempat sangat positif. Sedikitnya, program seperti ini secara langsung dirasakan manfaatnya dalam bentuk tersedianya jalanan kampung yang semakin baik dan teratur, pembangunan fasilitas sekolah, rumah ibadah dan bangunan fisik lain yang konkrit wujudnya dan langsung terasa faedahnya. Pada umumnya, penghuni kampung miskin merasakan dan menilai adanya pembangunan berdasarkan adanya bangunan-bangunan fisik, bertambahnya kendaraan bermotor atau gedung bertingkat atau pelebaran jalan. Sedikit yang memahami makna pembangunan sosial, suatu hal yang agaknya berhubungan dengan tingkat pendidikan atau karena mereka tidak langsung dapat menikmati adanya pembangunan non fisik tersebut. Atas pertanyaan apakah pemerintah telah menolong memperbaiki kehidupan mereka, 35% menjawab "ya", walaupun sebanyak 24% di antara jumlah ini tidak dapat menyebutkan secara konkrit bentuk pertolongan yang mereka peroleh.

Tanggapan atas pelaksanaan pembangunan pada umumnya didasarkan pada pertimbangan sampai di mana hal itu mempengaruhi kelangsungan hidup dan mata pencaharian mereka. Misalnya saja, seluruh responden tukang becak tidak menyetujui pelaksanaan "daerah bebas becak" karena hal tersebut menyangkut soal mata pencaharian mereka sehari-hari. Responden pedagang kaki lima umumnya kurang setuju atas pembangunan pusat perbelanjaan, karena dengan itu tersingkir dari tempat-tempat perdagangan di kaki lima, ataupun pengaruh persaingan, daya tarik pusat perbelanjaan karena variasi barang dagangan ataupun

3. *Ibid.* Perlu disebut bahwa tidak semua penduduk daerah kelurahan terdiri atas golongan berpenghasilan rendah. Dalam satu kelurahan juga terdapat golongan pertengahan atau malahan kaya. Dalam tulisan ini daerah kelurahan hanya mencakup pengertian beberapa Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang kebanyakan penduduknya digolongkan sebagai "berpenghasilan rendah" dalam kelurahan yang disebut.

kualitasnya. Lebih fundamental lagi adalah merubah cara berdagang yang masih tradisional—kalau besok bisa makan sudah cukup—dengan cara yang lebih rasional ekonomis, serta kewajiban membayar pajak yang sudah ditentukan pemerintah. Akibatnya, ada kecenderungan menaikkan harga-harga yang umumnya dirasakan penduduk umum bahwa harga-harga di pusat perbelanjaan jauh lebih mahal, jauh letaknya, terlalu mewah, ataupun belum adanya relasi seperti langganan penjual dan lain-lain. Hampir semua responden (90%) mengaku bahwa mereka berpartisipasi dalam pembangunan dalam bentuk kegiatan gotong royong — terutama dalam hal perayaan, kematian, menolong orang sakit, mempersiapkan pemakaman, menjaga dan membersihkan kampung. Kegiatan gotong royong ini terutama berasal dari daerah asal mereka, tetapi lebih banyak diterapkan dalam pengertian kepentingan umum seperti sekolah, jalan dan lain-lain. Ini berarti bahwa terdapat sedikit perubahan dengan bentuk kegiatan gotong royong di daerah pedesaan, walaupun dalam kehidupan kota kegiatan ini memperoleh corak dan warna baru akibat pengalaman hidup bersama yang lama dalam keadaan kesulitan. Apakah ''gotong royong'' semacam ini akan dapat bertahan di tengah-tengah kehidupan kota dengan pola kebudayaan, aspirasi, cara berpikir yang jauh berlainan dengan kehidupan desa, masih merupakan tanda tanya. Sehubungan dengan ini, hendaknya diingat bahwa hubungan yang bersifat kekeluargaan bukan saja dibina di kalangan sesama golongan ''senasib'', akan tetapi juga dalam hubungan dengan pemimpin kelompok, baik formal maupun informal. Hubungan formal dengan Ketua Rukun Tetangga (RT) misalnya, sering dikokohkan pula dengan hubungan informal dan dalam hal semacam ini, Ketua RT menjadi sumber informasi, penasehat atau tempat bertanya atau memecahkan persoalan. Dalam beberapa hal, kegiatan gotong royong juga dipengaruhi oleh pola hubungan ''patron-klien'' ini. Bentuk gotong royong yang sifatnya spontan, seperti kematian atau kedukaan lainnya mungkin lepas dari pola hubungan ini. Tetapi dalam hubungan proyek umum, perbaikan jalan atau pembangunan gedung yang melibatkan birokrasi dan pemimpin formal, kegiatan gotong royong mungkin saja diselewengkan, bahkan tidak mustahil dapat dimanipulasi menjadi sumber korupsi.

HUBUNGAN SOSIAL

Nampaknya ada pengaruh tingkat pendidikan dan macam pekerjaan terhadap jumlah dan kualitas hubungan sosial. Kalangan pemuda di kampung miskin mempunyai relasi sosial dan pergaulan yang sangat terbatas dengan masyarakat sekitarnya. Dalam mengatasi kesulitan pribadi, para pemuda umumnya meminta jasa dan nasehat berturut-turut dari orang lebih tua (20%), dari Ketua RT (18%), namun sebagian besar (54%) tidak mengetahui kepada siapa harus meminta pertimbangan. Hubungan dengan kalangan lebih tua nampaknya tidak banyak tergantung dari apa peranan yang dominan dari orang ''tua'' tersebut. Dengan kata lain, meminta bantuan tidak banyak membedakan apakah ia seorang dari kalangan pemerintah, seperti Ketua RT, tokoh agama atau guru. Seorang ulama yang berpengaruh misalnya, dianggap dapat pula memberikan saran dan nasehat di luar bidang agama. Bahkan ada yang datang dan meminta bantuan untuk memperbaiki kerusakan lampu petromaknya. Kasus lain terjadi selama penulis ikut dalam proyek pengabdian masyarakat dan para peserta mahasiswa sangat sering diminta bantuan dalam bidang konsultasi, bahkan mengatasi sengketa di dalam keluarga penduduk. Bagaimanapun juga, mengingat keterbatasan pendidikan, nampaknya penduduk belum bisa memahami adanya diferensiasi pekerjaan bahwa seseorang yang menguasai suatu cabang pengetahuan atau keahlian, cenderung tidak dapat menguasai masalah di bidang lain. Hubungan kekeluargaan yang disebut di atas tidak saja terbatas pada pola pergaulan masyarakat pemimpin, tetapi juga di antara sesama para ''pemimpin''. Ini terlihat dalam pola pengambilan keputusan. Rapat diselenggarakan di antara tokoh masyarakat mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, dalam bentuk yang sering disebut ''musyawarah''. Dengan cara ini, umumnya rapat tidak dapat berlangsung tanpa kehadiran seorang tokoh, karena bentuk ''satu orang satu suara'' tidak dapat diterapkan di sini. Pendeknya, segera kelihatan bahwa pola musyawarah dan mufakat yang lazim berlaku di daerah pedesaan, diusahakan untuk dilaksanakan secara konsekuen dalam konteks kehidupan kota. Sudah tentu hal semacam ini tidak terlalu sering terjadi dan dalam beberapa hal, status atau jabatan formal turut berperan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pengamatan penulis kelihatannya keputusan berlangsung cepat bila pimpinan formal seperti

RT juga menduduki status sosial yang tinggi, apalagi kalau ia militer.

Mobilitas interen yakni perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dalam kota nampaknya kecil saja, terkecuali pengaruh dari luar seperti tindakan-tindakan hukum yang memaksa pemindahan daerah pemukiman: baik dalam bentuk sesama kelompok atau bersifat individual. Karena sebagian kecil saja penduduk yang menjabat pegawai negeri dan bagian terbesar adalah buruh berpenghasilan rendah, maka dapat diduga bahwa kepergian keluar tempat tinggal terbatas pada urusan pekerjaan atau urusan keluarga, kecuali para pencari beling ,kertas dan kaleng bekas yang dapat dikatakan mempunyai mobilitas cukup besar karena daerah operasinya yang cukup luas dan seringkali tidak tertentu.'

Adalah menarik bahwa di kalangan kelompok yang disebut terakhir ini telah terdapat ''aturan permainan'' yang telah ditentukan bersama, dengan ''kode'' dan ''etik'' yang mengatur hubungan antara sesama profesi ini. Dengan demikian jarang terjadi persaingan tidak jujur karena perebutan daerah operasi kerja karena masing-masing nampaknya berkecenderungan menjunjung tinggi tertib permainan yang telah disepakati bersama. Di beberapa wilayah, misalnya di sepanjang Kali Malang, Bongkaran atau Tanah Abang, tata tertib ini malahan telah dikukuhkan dengan semacam organisasi yang mengatur aktivitas dan kelancaran pekerjaan, mencegah pertikaian dan menghindarkan adanya ''overlapping'' dalam daerah operasi atau pemasaran. Sengketa yang kadang-kadang terjadi juga pada umumnya bukan menyangkut hal yang fundamental yang dapat meretakkan ikatan yang ada, apalagi harmonisasi sistem ini ditunjang pula oleh pengelompokan yang kuat, terutama dalam menghadapi kelompok luar. Hubungan lain dengan kelompok luar adalah dengan kalangan yang relatif kaya yang acapkali memberikan sumbangan penting bagi kelangsungan atau perbaikan hidup kelompok yang relatif miskin ini. Bantuan itu kadang-kadang berupa usaha mencarikan lapangan pekerjaan, apakah itu sebagai pembantu rumah tangga ataupun buruh bangunan. Karena jasa ini, kelompok lebih kaya yang pada umumnya menduduki status sosial cukup tinggi, diangkat sebagai pemimpin, baik formal atau informal. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa dalam kota internasional Jakarta, juga ditemukan pola hubungan sosial yang lebih mendekati hubungan di daerah asal kelompok miskin, baik di daerah seberang maupun

daerah pedesaan. Pola hubungan dan relasi sosial diterapkan dalam bentuk sebagaimana di desa walaupun harus mengalami modifikasi, adaptasi dan penyesuaian dengan lingkungan kota. Mengingat tingkat urbanisasi cukup tinggi, perubahan polá relasi sosial ini akan berlangsung sangat perlahan-lahan, karena pendatang baru cenderung mengambil alih dan menyesuaikan diri dengan pola yang tak banyak berbeda dari yang dimilikinya.

LINGKUNGAN KELUARGA DAN ORGANISASI

Kebanyakan pemuda miskin, tinggal bersama keluarga, orang tua atau kerabat dekat berdasarkan hubungan darah, daerah dan etnik. Karena cukup banyak pemuda adalah pendatang baru maka bagian terbesar di antaranya tinggal dengan famili atau kerabat yang sudah lama menetap di Jakarta. Akibatnya, terjadi pula pengelompokan berdasarkan hubungan keluarga, daerah atau hubungan etnik. Keadaan ini nampaknya berhubungan sangat erat dengan kelangsungan hidup di kota besar dan dalam banyak hal, juga menyangkut lapangan pekerjaan. Kecenderungan ini membawa pula pengelompokan baru berdasarkan jenis pekerjaan. Demikianlah maka di Jakarta secara kasar orang dapat mengasosiasikan para pedagang sate dan soto dari Madura, para kondektur bis banyak yang berasal dari Sumatera Utara, pedagang kaki lima dari Sumatera Barat, sedang kelompok buruh di daerah pelabuhan berasal dari daerah Banten, Bugis, dan Makasar. Hal semacam ini terlihat pula dalam bidang pekerjaan pembantu rumah tangga, dan lain-lain. Tampaknya gejala ini dapat diterangkan karena komunikasi pendatang dan rekannya di daerah asal terus berlangsung dan informasi mengenai apa yang dapat dikerjakan rekannya di Jakarta nanti, rupanya disampaikan kepada calon pendatang. Sekalipun pola hubungan kedaerahan, kekeluargaan dan kesukuan berpengaruh besar terhadap jenis dan bidang pekerjaan di kota besar, tampaknya pengelompokan ini mengalami transformasi pula sesuai dengan kehidupan kota besar di Jakarta. Pandangan dan orientasi pemuda pendatang nampaknya cepat berubah walaupun di daerah baru ini mereka masih sering tergabung dalam organisasi kedaerahan. Bentuk organisasi semacam ini kemudian mengalami peralihan menjadi semacam perkumpulan kelompok senasib

dalam menghadapi tantangan hidup di Jakarta, sementara organisasi berlandaskan keagamaan cenderung mempertumpul sentimen-sentimen dari daerah asal.

Bentuk organisasi di kalangan pemuda kampung miskin juga masih memperlihatkan pola lama. Misalnya saja, walaupun beberapa waktu lalu di kalangan pemuda telah ''digolkarkan'', namun pengelompokkan ideologi nampaknya tidak dapat hilang demikian cepat. Pengalaman dalam pembentukan organisasi pemuda Karang Taruna memperkuat pernyataan ini. Pembentukan organisasi pemuda berdasarkan kepentingan profesi atau lapangan kerja, sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka sebelumnya sebagai pengemban misi keagamaan, organisasi ideologi atau partai. Pengalaman dalam Proyek Kelurahan Guntur dan Bidaracina memperlihatkan bahwa beberapa organisasi sangat sukar dibentuk atau kepengurusan organisasi silih berganti sebanyak tiga kali hanya dalam masa satu bulan, terutama disebabkan oleh kelompok yang merasa tidak disertakan.
Peranan kelompok tua nampaknya masih cukup berpengaruh dan walaupun sepintas lalu mungkin tidak kentara, dalam pengamatan kelihatan jelas bahwa peranan kelompok tua bagaikan telah ditentukan untuk menduduki jabatan kepemimpinan. Hal ini jelas terlihat dalam proses pengambilan keputusan di mana orang tua memainkan peranan yang cukup dominan.

Kasus lain memperlihatkan pula ketergantungan pemuda atas orang yang lebih tua. Walaupun hampir semua dari 74 responden menyatakan tidak tertarik pada politik, namun kebanyakan tidak menyebutkan contoh kegiatan politik. Kalau politik kita kaitkan dengan pengertian kekuatan sosial seperti partai politik, maka kentara bahwa para pemuda tersebut sebenarnya tidak menyadari dan hanya dikendalikan oleh kelompok lebih tua dan diarahkan untuk kegiatan sosial kekuatan politik tersebut. Dari sini terasa bahwa anggapan yang menyatakan kaum muda itu bersifat independen, tidak sepenuhnya benar. Karena sikap dan nilai, tingkat pendidikan atau ketidaktahuan,

para pemuda cenderung mengikuti bimbingan kalangan lebih tua. Ciri paternalistik dalam organisasi tampaknya cukup kukuh. Seorang ketua organisasi pemuda pada umumnya bertahan cukup lama walaupun kegiatannya sangat kecil. Beberapa ''ketua'' yang telah memegang jabatan sangat lama menyatakan bahwa tidak ada tokoh lain yang bersedia menggantikannya. Proses regenerasi kepemimpinan organisasi berjalan lamban. Ada kemungkinan ini disebabkan oleh keterbatasan ekonomi para pemuda, status sosialnya sebagai penganggur atau mungkin pula ketiadaan ketrampilan ataupun sebaliknya, karena kesibukan pekerjaan dan masalah pribadi. Dari keterangan ini kita dapat menyimpulkan bahwa sedikit kecenderungan untuk mengadakan perubahan, lebih suka mempertahankan keadaan yang ada dan enggan mengadakan perombakan atas kelembagaan sosial yang ada.

KEGIATAN WAKTU LUANG

Aspek kehidupan ini nampaknya agak sulit dibicarakan karena banyak di antara pemuda adalah penganggur yang memiliki waktu luang hampir sepanjang hari. Pada pihak lain, karena kedudukan ekonomi, fasilitas untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan produktif nampaknya dirasakan kurang. Dengan demikian maka kebanyakan pemuda mengisi waktu luang dengan menyetel dan mendengarkan acara hiburan radio atau membaca buku komik yang dipinjam atau disewa di ''taman bacaan''. Waktu luang relatif terisi agak padat selama perayaan nasional, perayaan agama atau perayaan dalam kampung. Pada kesempatan yang jarang, para pemuda bergerombol mengikuti acara hiburan di tempat gratis. Fasilitas Gelanggang Remaja yang tersedia dirasakan terlalu mewah atau tidak menarik. Penelitian di Kelurahan Kebun Melati membuktikan bahwa 87,67% pemuda (n= 336) tidak pernah mengunjungi Gelanggang Remaja. Sebanyak 85,87% mengaku mengetahui adanya perpustakaan setempat, tetapi hanya 47,37% dari jumlah ini yang mengatakan sering meminjam buku dari sana.[4] Secara teoretis, minat para pemuda atas kegiatan untuk menambah ketrampilan atau

4. Laporan Penelitian Pemanfaatan Waktu Luang di Luar Jam Sekolah pada Siswa SLA di Jakarta, (LP3ES, 1974, tidak diterbitkan).

pekerjaan produktif adalah cukup besar, sebagaimana terlihat dari keinginan untuk mengikuti kursus, seperti menjahit: bahkan sebagian besar mengatakan akan mengikuti kursus apa saja yang ada di daerahnya. Harapan yang besar ini tidak disertai oleh adanya fasilitas. Agaknya faktor jarak turut mempengaruhi minat yang ada. Jarang sekali pemuda mengadakan perjalanan jauh untuk mengikuti kursus, apalagi untuk kegiatan rekreasi semata.

Minat terhadap olah raga cukup besar dan cabang yang digemari antara lain sepak bola dan bulu tangkis. Karena kurangnya fasilitas, pekarangan sekolah atau jalan raya dapat berubah menjadi lapangan hijau sementara gang dan jalan sempit dapat pula dijadikan daerah sekedar untuk ruang penampungan tendangan-tendangan. Maka golongan pemuda yang relatif kaya dengan fasilitas atau kendaraan cenderung menguasai bidang-bidang olah raga di kampung. Dari 835 responden pelajar, hampir separuh aktif dalam kegiatan olah raga. Agaknya kegiatan ini sangat dibatasi oleh tersedianya fasilitas atau kemampuan ekonomi.

KOMUNIKASI DAN RADIO DI KAMPUNG MISKIN

Aspek komunikasi di daerah kampung miskin pada umumnya memperlihatkan pola komunikasi yang paternalistik: kedudukan pemberi informasi berada lebih tinggi (superior) dibandingkan dengan penerima informasi, penghormatan kepada golongan yang lebih tua sebagai pemberi wejangan atau nasehat, pengukuhan hubungan formal menjadi informal terhadap RT yang acapkali bertindak sebagai ''konsultan'' dalam menghadapi masalah pribadi, penghormatan terhadap penduduk kaya yang dianggap ikut membantu memperbaiki tingkat kesejahteraan anggota masyarakat, dan sebenarnya. Khusus mengenai yang terakhir ini kurang kentara adanya kecenderungan rasa sentimen, iri ataupun kebencian terhadap masyarakat berpenghasilan relatif tinggi, sedikitnya tidak tercermin dari jawaban mereka.

Radio adalah sarana komunikasi yang paling banyak dipergunakan untuk hiburan, sumber informasi dan media pendidikan bagi kebanyakan kelompok pemuda. Dari penelitian pelajar sembilan SLA[5]

---

5. *Ibid.*

yang dianggap mewakili kelompok masyarakat tingkat ekonomi rendah, menengah dan tinggi, 77,02% (n = 835) menyatakan mendengar radio dan menyukai siaran hiburan terutama musik untuk mengisi waktu senggang (Tabel 1). Penemuan teknologi radio transistor tampaknya berpengaruh terhadap jumlah pemilik radio jenis ini karena harganya relatif murah dibandingkan dengan radio listrik. Tetapi jelas perkembangan jumlah radio transistor ini berhubungan erat dengan munculnya pemancar-pemancar radio non RRI yang dimulai oleh mahasiswa ketika lahirnya Orde Baru (1966). Acara yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan diikuti sebanyak 6,46%, acara santapan rohani 3,4% dan siaran warta berita 22,75%. Dari laporan sementara hasil penelitian golongan berpendidikan rendah dilihat persamaan-persamaan motivasi secara umum dalam mendengarkan radio. Sebanyak 63% dari responden mendengar radio untuk menghibur diri dengan mendengar lagu, 15,5% untuk menambah pengetahuan, sisanya untuk informasi pendidikan atau sekedar iseng saja. Mengingat kedudukan ekonomi penghuni kampung miskin hal ini dapat dipahami karena radio merupakan fasilitas hiburan termurah dibandingkan dengan hiburan lainnya.

Tabel 1. Acara-acara Radio yang digemari (n = 385)

Acara	Jenis kelamin					
	Pria	%	Wanita	%	Total	%
Warta berita	131	29,24	59	15,25	190	22,75
Lagu-lagu	325	72,54	318	82,17	643	77,02
Siaran Remaja	16	3,57	20	5,17	36	9,31
Ruang Kesehatan	10	2,23	15	3,87	25	2,29
Ruang Wanita	—	—	10	2,58	10	1,19
Olah Raga	23	15,13	15	3,87	38	4,55
Sandiwara	36	8,04	41	10,59	77	9,22
Santapan Rohani	19	4,24	10	2,58	29	3,47
Ruang Ilmu Pengetahuan	20	4,46	34	8,78	54	6,46
Tidak Isi	87	19,41	47	12,14	134	16,04
Total	667	100	569	100	835	100

Dari suatu penelitian di lima kelurahan[6] mengenai pendengar radio di daerah yang dikategorikan sebagai ''kampung miskin'', ternyata bahwa dari 491 orang pemuda responden (usia 12—24 tahun), sekitar 50% mempunyai pesawat radio sendiri di rumahnya dan sebagian besar menganggap bahwa radio adalah sumber berita yang penting; dari penelitian lainnya, persentase ini hampir tidak berbeda. Ditunjukkan pula bahwa bagi para responden, yang dimaksud berita ''penting'' adalah berturut-turut kejadian-kejadian seperti pembongkaran dan pengusiran, penggusuran kampung, kebakaran, perbaikan kampung; pembangunan kampung DKI, walaupun sebagian besar responden (65%) tidak mendengar berita penting apapun juga dalam beberapa bulan yang terakhir. Nampaknya tanggapan dan penilaian mengenai ''penting'' dan ''tidak pentingnya'' berita itu bertalian erat dengan eksistensi penghuni kampung miskin yang acapkali harus memikul berbagai akibat pembangunan di atas. Rasa solidaritas ini diperlihatkan oleh hubungan ketetanggaan yang merupakan sumber berita setelah radio. Pertalian kekeluargaan dan komunikasi dari mulut ke mulut ini berhubungan erat dengan pengalaman hidup bersama dalam situasi melarat yang menimbulkan hubungan akrab, perasaan senasib terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan, kelangsungan hidup dan eksistensi bersama. Sikap ini tidak saja terbentuk karena asal sosial mereka, melainkan juga karena pengalaman bersama yang kemudian membentuk suatu ''subkultur'' golongan berpenghasilan rendah. Seperti disinggung di atas, ternyata responden yang mendengarkan siaran non RRI menempati persentase tertinggi dari semua kelompok lapisan. Teristimewa untuk masyarakat Jakarta, radio non RRI tampaknya mendapat tempat lebih dekat ke hati mereka. Di kelurahan Kebon Melati, responden yang menyetel siaran non RRI (n= 140) sebanyak 86%. Jumlah yang tak banyak berbeda juga terlihat di kalangan pemuda pelajar. Radio siaran non Pemerintah ini memberikan alternatif lebih banyak dan jam siaran yang lebih lama serta acara penyajian yang lebih cocok untuk selera kaum muda. Sekalipun demikian, ada dorongan untuk memaksakan lebih banyak informasi serius terhadap para pendengar siaran radio''. Pada jam-jam tertentu, semua pemancar sekaligus

6. Laporan Sementara Survey mengenai Media Habit dari Golongan yang tinggal di Kampung Miskin di Jakarta, (LP3ES, 1974, tidak diterbitkan).

menyiarkan warta berita dari RRI dan tidak ada alternatif lain kecuali mendengarkan warta berita atau mematikan radionya. Juga berbagai acara, Radio Siaran non Pemerintah menyiarkan sendiri berita-berita pembangunan dan olah raga yang dinikmati oleh sebagian besar pendengarnya (25%). Sedikit sekali (4,5%) yang mengikuti acara kursus lewat radio secara teratur walaupun persentase yang pernah mengikutinya cukup menyolok (35%). Tanggapan pada penyiaran kursus ini pada umumnya cukup positif. Namun ada keterbatasan teknis dalam penyiaran kursus lewat pemancar radio, misalnya hanya mengenai pengetahuan bahasa dan memasak saja.

Acara-acara siaran yang mengandung materi pendidikan seperti sandiwara radio dan obrolan, cukup mendapat perhatian. Banyak juga acara pendidikan budi pekerti, siaran keagamaan, khotbah-khotbah — terutama agama Islam didengar oleh penduduk, tua dan muda. Situasi ini kelihatan hampir merata di kampung-kampung miskin di Jakarta. Mungkin siaran keagamaan ini banyak didengar karena ''kemiskinan'' material ingin diimbangi dengan ''kekayaan'' akhlak dan rohaniah. Tidak jelas apakah acara yang banyak didengarkan ini secara positif mempengaruhi tingkah laku para pendengar, ataukah sebaliknya. Iklan-iklan mengenai obat tertentu dengan catatan ''Awas, dapat menyebabkan keguguran pada wanita hamil'', atau ungkapan-ungkapan kata yang kurang sopan bagi kebanyakan orang luar, acapkali menjadi bahan olok-olok dan senda gurau di kalangan pemuda kampung — satu hal yang lebih bersifat negatif daripada positif. Demikian pula, waktu mendengarkan radio pada umumnya adalah sore dan malam hari. Di Kelurahan Guntur, jam berkomunikasi dengan rekan atau radio ini berlangsung dari sore hari sampai larut malam, malahan sampai pagi hari. Frekuensi menyetel radio pada pagi hari jauh berkurang karena mereka bangun sampai siang hari. Kelihatan ada korelasi antara kegiatan pengisian waktu luang dari pelajar SLA dengan aktivitas-aktivitas yang dijalankan pemuda di kampung-kampung miskin. Perbedaannya mungkin karena para pelajar masih bersekolah dan punya kegiatan tetap, sedangkan pemuda di kampung tidak. Di Kelurahan Guntur tingkat pengangguran mencapai 42% (n = 140), sisanya bekerja dan sebagian bersekolah (34%). Juga terdapat korelasi antara frekuensi mendengar radio dengan usia: lebih banyak pendengar radio di kalangan pemuda yang berusia relatif lebih tua. Korelasi ini berhubungan pula

dengan frekuensi membaca media lain yang akan dibahas kemudian. Hambatan media radio ini terhadap pendengar antara lain bersifat teknis — jelasnya mutu siaran, dekatnya dengan tempat kediaman atau faktor hubungan pribadi dengan para penyiar, dan ada pula pertimbangan-pertimbangan pribadi mengenai selera dan mutu acara yang disiarkan. Sulit diambil kesimpulan bahwa pada umumnya para pemuda di kampung tidak mengikuti informasi secara teratur lewat radio ataupun sebagai sarana untuk pendidikan. Proses mendengarkan radio biasanya dilakukan secara selektif, sesuai dengan tingkat pendidikan, pengetahuan, nilai-nilai budaya yang membatasi kemampuan imajinasi dan kreativitas. Minat mendengarkan radio juga selalu dihubungkan dengan ''kepentingan'' para pemuda tersebut. Program siaran pendidikan atau ilmu pengetahuan — sebagai bahan informasi untuk pemuda — kurang dapat dicerna dengan baik. Alasannya karena memang dianggap untuk ''konsumsi'' orang terpelajar. Mungkin pula keadaan lingkungan yang padat dan bising menyebabkan konsentrasi mendengar sangat terganggu.

MEDIA MASA DAN PEMUDA

Sebagaimana dikatakan di muka, sebagian besar responden adalah mereka yang pernah menempuh pendidikan formal dengan mayoritas tertumpuk pada tingkat pendidikan menengah pertama (di antara responden, hanya satu orang buta huruf dan satu orang bergelar sarjana). Banyak di antara mereka (40%) menyatakan sering membaca, sebagian (38,81%) menyatakan membaca ''kadang-kadang'' dan sedikit (4%) saja yang menyatakan tidak pernah membaca koran ataupun majalah dan yang terakhir ini kebanyakan adalah yang berusia relatif lebih muda. Media surat kabar yang paling sering dibaca adalah harian *Pos Kota* (67,8%) disusul dengan koran *Kompas* (36,46%) dan Merdeka (28,31%), *Berita Buana* (17,72%), *Sinar Harapan* (17,31%). Dapat diduga bahwa dasar pemilihan ini disebabkan karena *Pos Kota* dapat dikatakan cermin diri bagi kalangan berpenghasilan rendah ini; di sinilah ditemukan berita dan informasi yang menyangkut kehidupan golongan ini. Misalnya pemberitahuan mengenai penggusuran, perbaikan kampung — lengkap dengan peta daerah gusuran — kebakaran,

pencurian yang berlangsung dan dengan cara yang sesuai dengan selera pemuda di kampung miskin ataupun hal ihwal mengenai rekan mereka yang senasib di tempat lain. Dalam harian ini juga bisa ditemukan berbagai bentuk berita-berita yang mengasyikkan, seks dan kejahatan dan kekerasan yang terutama terjadi di kalangan golongan berpenghasilan rendah, dengan cara-cara yang sesuai dengan selera pemuda di kampung miskin. Penelitian mengenai pembaca harian Kompas sendiri mengungkapkan bahwa pembacanya berasal dari golongan pertengahan dan bahwa pada umumnya harian tersebut dipinjamkan paling sedikit oleh lima orang, sehingga dapat dikatakan bahwa pembaca koran adalah lebih dari yang membeli. Banyak yang membaca koran karena kepentingan untuk memperoleh pekerjaan (tingkat pengangguran 20%) yang dapat diketahui pada iklan mengenai lowongan pekerjaan terutama dalam harian Kompas. Hal ini berbeda dengan minat mendengar siaran radio yang biasanya melulu pada acara-acara hiburan. Informasi yang lebih serius dicari dari koran misalnya adalah mengenai ''lapangan kerja''. Bagi pelajar SLA, selain untuk mengisi waktu luang, koran dianggap membawa manfaat sebagai sumber informasi penting untuk menambah pengetahuan mengenai kejadian di dalam negeri dan di luar negeri. Beberapa koran seperti Merdeka antara lain dibaca karena banyak tulisan mengenai olah raga — yang cukup digemari — sedang koran Berita Buana lebih banyak dibaca oleh kalangan wanita.

Di antara pembaca majalah, Varia Nada mendapat tempat yang besar di kalangan pemuda (36,05%) yang antara lain karena berisi tulisan mengenai pemuda, lagu-lagu hiburan, serta cerita-cerita dan gambar-gambar eksotik, film dan lain-lain. Majalah Femina dan Gadis mendapat perhatian di kalangan wanita walaupun hanya dalam beberapa kasus kecil. Majalah mingguan Tempo nampaknya lebih mendapat tempat di kalangan pemuda kampung berpendidikan SLA ke atas,[7] mungkin karena mereka yang berpendidikan rendah sukar untuk memahami dan menghayati isinya, ataupun dirasakan kurang relevan dengan persoalan sehari-hari yang mereka hadapi. Dari sini kelihatan bahwa minat pada umumnya tertuju pada jenis bacaan hiburan, cerita pendek, komik dan iklan-iklan lowongan pekerjaan. Sehubungan

---

7. Laporan Penelitian Pembaca Majalah Berita Mingguan *Tempo* ''In Search Data,'' Jakarta, 1973.

dengan jenis atau materi bacaan yang disenangi (lihat Tabel 2) pada umumnya adalah bentuk hiburan, walaupun bacaan mengenai humor dan kartun mendapatkan perhatian yang kecil sekali. Kebanyakan mereka membaca majalah karena rubrik khusus, misalnya "cerpen". Makin kaya orang tua mereka, makin banyak tersedia surat kabar atau majalah yang mempengaruhi frekuensi membaca. Pemuda dari golongan ekonomi cukup tinggi menyatakan membaca majalah setiap hari (7,78%), tidak pernah membaca majalah (2,15%) dan hanya kalau ingin saja (38,47%).

Tabel 2. Tulisan dan Kolom yang paling digemari (N = 491)

Pertanian	3,87%
Ekonomi/Keuangan	8,76%
Perbaikan perkampungan	8,15%
Pendidikan	24,85%
Industri	4,28%
Iklan-iklan kerja	17,11%
Cerita-cerita pendek/bersambung	60,49%
Politik	13,01%
Komik	26,48%
Feature	10,39%
Olah raga	12,22%
Agama	3,26%
Kriminalitas	3,87%
Humor karton	3,87%

Catatan: Jawaban lebih dari satu.
Sumber: Laporan Survey Media Habit, *Op. Cit.*

FILM DAN TELEVISI

Karena status ekonomi, pemilikan televisi merupakan suatu kemustahilan di kalangan penduduk kampung miskin. Sekalipun begitu di kampung banyak pesawat TV yang diikuti bersama oleh gerombolan

anak-anak dan pemuda kampung. Acara-acara TV tidak diikuti secara kontinu dan hanya dipilih acara yang cocok dengan minat dan selera mereka. Demikian pula, terlihat adanya korelasi antara frekuensi nonton TV dengan tinggi rendahnya usia. Di Kelurahan Kebun Melati misalnya, kebanyakan orang tua (70%) tidak pernah menikmati atau nonton TV, kebanyakan pemuda berminat pada acara film serial televisi dan olah raga dan hampir semua anak-anak menyenangi dan menonton film-film seri kanak-kanak yang terutama ditujukan kepada mereka. Pada jam-jam acara siaran yang disenangi, para pemuda umumnya mendatangi beramai-ramai rumah yang memiliki TV. Acapkali malahan sampai penuh sesak sementara sebagian lainnya menonton dari jendela yang terbuka atau bahkan dari luar pagar rumah. Sebaliknya, acara-acara serius seperti warta berita, laporan pembangunan, peresmian-peresmian oleh pembesar ataupun pidato-pidato tidak mendapat perhatian mereka. Hal ini nampak ketika film usai: para pemuda dan kanak-kanak akan bubar serta merta. Menurut pengamatan, ini berlangsung secara umum pada semua kampung miskin, dengan hampir tanpa kecuali. Iklan-iklan yang berulang-ulang dengan irama bunyi-bunyian, suara atau lagu yang kocak, nampaknya cepat ditiru kadang-kadang secara beramai-ramai pada saat lagu ''jingle'' iklan tersebut diperdengarkan.

Pengenalan terhadap ''dunia luar'' melalui media audio visual kadangkala dapat dinilai positif. Kunjungan tamu negara, pertandingan tinju, bulutangkis, sepak bola dan cabang olah raga lainnya mendapat perhatian besar. Tidak jarang bintang-bintang dunia olah raga diidentifikasikan sebagai diri mereka, pada saat mereka bermain olah raga yang sama. Hal ini tidak hanya kelihatan di kalangan pemuda di kampung miskin, tetapi juga pada mereka yang berasal dari keluarga mampu. Masih kurang penelitian mengenai frekuensi nonton TV ataupun bioskop yang disukai atau pengaruh film terhadap pemuda ini. Kelurahan Guntur adalah satu-satunya daerah pengamatan yang memiliki bioskop rakyat tanpa atap, dengan karcis cukup murah, dan film-film yang cukup tua. Dari pengamatan ternyata ada hubungan antara usia dengan jenis film yang digemari: kalangan tua dan wanita biasanya menyenangi film-film bertema cucuran air mata atau gambaran kemewahan di negeri antah berantah, sementara film nasional dengan tema apapun merupakan kegemaran dari semua kelompok umur, mungkin karena bahasa dan identitas yang dimengerti. Pemuda nampak-

nya lebih menyukai film-film koboi, mata-mata ataupun film perang yang penuh dengan cerita kepahlawanan, kejantanan, seks, ataupun kekerasan. Batas-batas umur nampaknya kurang diperhatikan sehingga ''Untuk 17 Tahun ke Atas'' atau ''Untuk 13 Tahun ke Atas'' secara otomatis berlaku untuk semua umur. Frekuensi nonton bioskop antara kelompok pemuda lebih mampu dengan kurang mampu, juga berbeda. Mereka yang uang sakunya sebulan Rp 2.000,- sampai dengan Rp 6.000,-(1,62%) nonton dua kali seminggu, sedangkan mereka yang uang sakunya di atas Rp 6.000,- (6,25%), sebagian besar (62,18%) menonton kalau filmnya baik. Dari pengamatan ini dapat diambil beberapa kesimpulan: terdapat konsistensi antara kegemaran terhadap acara siaran radio, bahan bacaan, film dan televisi yang terutama semata-mata sebagai sarana hiburan, dan kecenderungan untuk apatis atau kurang menyenangi acara-acara yang serius atau yang mungkin berfungsi pendidikan. Selanjutnya tampak bahwa pengaruh film dan televisi terhadap sikap dan tingkah laku lebih besar daripada pengaruh media lain seperti radio dan surat kabar, dan bacaan. Untuk sebagian, ini mungkin disebabkan oleh teknik film yang audio visual: berbeda dengan radio yang hanya memperdengarkan suara biduan, musik dalam acara sandiwara, misalnya—film dan televisi justru memperlihatkan bagaimana biduan bernyanyi, gayanya, model pakaiannya, rambutnya dan sikapnya, ataupun bagaimana perkelahian tembak menembak terjadi, bagaimana sang pahlawan menyiksa atau menghabisi bajingan dan bandit — kadang-kadang sebaliknya — bagaimana cara berpakaian dan beraksi.

Akan tetapi nampak bahwa sarana komunikasi ini belum atau tidak berakar dalam kebudayaan pemuda di kampung miskin. Pemilikan televisi hanya oleh kalangan yang berada, yang pada umumnya juga memiliki tingkat pendidikan dan relasi sosial yang luas dan sikap yang luwes. Sebaliknya, seperti dikatakan sebelumnya, kebanyakan orang tua miskin malahan tidak pernah nonton televisi. Kalau benar dugaan bahwa pengaruh televisi relatif lebih besar dari media lainnya terhadap kalangan pemuda atau bahwa tingkah laku pemuda dipengaruhi oleh sumber informasi seperti film dan televisi maka ada alasan untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan kultural yang semakin menjarak antara kalangan pemuda pada satu pihak dengan golongan berada dan orang tua di lain pihak. Mungkin perkembangan budaya yang tidak paralel ini dapat menerangkan semakin terlepasnya pemuda dan pembentukan

kelompok tersendiri dan makin munculnya jurang dan konflik generasi. Keterlepasan pemuda ini dapat pula dilihat dari partisipasi dan pandangan mereka terhadap kegiatan agama. Pada umumnya pemuda relatif jarang berada di mesjid atau langgar bersama orang-orang lebih tua, terkecuali upacara beramai-ramai suatu perayaan agama.

Sehubungan dengan pengelompokan pemuda terlihat beberapa hal yang menarik. Umumnya mereka bergerombol di warung, ujung gang atau tempat ''strategis'' lainnya, acapkali sambil mendengar radio. Pembicaraan dalam kelompok agak intensif dan aktif — berbeda dengan media massa dan film yang hanya memungkinkan komunikasi mendengar atau melihat secara pasif — dan para pemuda peserta mendiskusikan berbagai informasi yang mereka terima dari luar. Pengelompokan pemuda-pemuda mampu, biasanya di tempat seperti ''kelab malam'' atau tempat olah raga yang umumnya dikunjungi golongan ''atas'. Pembicaraan berkisar pada cinta, seks, mode pakaian, ganja, persahabatan maupun perkelahian di dalam atau dengan kelompok lain ataupun tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Dari gaya, cara dan tingkah laku, dapat diduga pengaruh film dan majalah-majalah ''luks'' yang sekarang banyak beredar yang memuat gambar-gambar yang merangsang atau model pakaian mutakhir, cerita-cerita ''gossip'' yang ditulis sangat eksklusif dan lain-lain. Pemuda miskin yang berdekatan dengan pelabuhan, agak terpengaruh (jelek) oleh suasana pelabuhan, misalnya pelacuran, keributan-keributan dan gangguan keamanan. Ada pula yang mulai menggunakan narkotika. Mereka mengisap secara berkelompok di warung-warung pinggir jalan. Pengaruh film dan televisi dan lingkungan berperanan besar dalam tindakan kejantanan atau tingkah laku sadis mereka yang kadang-kadang berlebihan dan menjurus ke apa yang dinamakan sebagai dasar-dasar ''kenakalan remaja''. Sudah tentu sukar memisahkan mana di antaranya yang berasal dari pengaruh media massa, radio dan televisi — walaupun bisa dikatakan bahwa hampir semuanya adalah pengaruh komunikasi — pemanfaatan waktu luang, dan pergaulan dalam pengertian yang luas dengan unsur ''kebudayaan'' dari luar kampungnya. Fenomena yang kentara adalah bahwa imitasi yang dilakukan acapkali hanya dari luarnya saja dalam bentuk bagaimana adanya, tanpa dicernakan ataupun malahan di luar konteks media yang dianggap mempengaruhinya. Dalam pengamatan pada kelompok pemuda yang agak terbatas jumlahnya itu, memang

tampak ada semacam jurang antara komunikan dan komunikator — dalam hal ini antara penonton acara film dan televisi. Pada umumnya film-film menampilkan tokoh dan konteks cerita yang jauh dari capaian pemuda kampung: film umumnya berbahasa asing (Inggris) yang tidak dimengerti pemuda kampung. Pengantar oleh penyiar mengenai jalannya cerita, umumnya tidak diikuti ataupun tidak terdengar karena — dalam kasus gerombolan penonton yang diamati — jarak yang cukup jauh dari televisi. Sudah tentu lebih sulit lagi menangkap tema ''kebenaran akan menang'' yang sering dikandung film itu. Yang mereka saksikan adalah bagaimana perkelahian terjadi, bagaimana perkosaan berlangsung, bagaimana bajingan merampok atau menyiksa dan nampaknya sedikit tanggapan — antara lain karena jalannya cerita film sendiri — pada akhirnya kebenaran menang. Dalam film-film koboi Italia dan Amerika yang cukup laris itu, memang moralnya adalah unggulnya kebenaran atas kejahatan, tetapi terjadi baru pada saat-saat akhir, setelah kebengisan-kebengisan merajai hampir sepanjang film. Mungkin ini berpengaruh atas timbulnya bentuk-bentuk kekerasan baru di kalangan pemuda. Agak sukar membandingkan hal ini dengan yang terjadi atas kelompok pemuda mampu — yang kenakalannya bersangkutan erat dengan pemilikan harta benda dan kekuasaan — namun dalam kelompok yang diamati kelihatan bahwa ada kecenderungan terpisahnya kedua kelompok pemuda. Mungkin ini disebabkan oleh status ekonomi, pergaulan, aspirasi atau tanggapan mereka yang berbeda terhadap unsur-unsur dari luar, karena tingkat pendidikan mereka yang juga berbeda. Keutuhan dalam keluarga juga memainkan peranan menentukan. Misalnya seperti terlihat dari kenyataan bahwa 62,22% siswa yang tidak lengkap orang tuanya, belum mempunyai cita-cita, dan 28,57% yang sama sekali tidak ada kedua orang tuanya belum mempunyai cita-cita, hanya 59,82% mereka yang memiliki cita-cita. Besarnya pengaruh orang tua, ditunjukkan oleh angka-angka (99,42%) yang menyatakan terima kasih mereka pada ayah ibu, karena dorongan moral maupun material yang mereka berikan.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi

ekonomi dan lingkungan sosial memainkan peranan komunikasi maupun pengenaan (exposure) media masa seperti radio, surat kabar, bahan bacaan, televisi dan film. Tingkatan sosial ekonomi yang rendah cenderung menghambat komunikasi para pemuda dengan masyarakat luar. Media massa mempunyai pengaruh terhadap para pemuda penghuni kampung miskin, masing-masing dalam kadar yang berbeda-beda. Tumbuh pesatnya kota metropolitan Jakarta cenderung membuat pengelompokan baru pemuda-pemuda. Relasi sosial dan interaksi cenderung berlangsung pada kelompok itu saja. Segelintir saja yang mencurahkan perhatiannya pada lingkungan sekelilingnya. Kalau ini benar maka yang terjadi akhirnya adalah ''jurang'' antara pemuda kaya dengan miskin yang melebar. Keintiman pada kelompok pemuda ini dilengkapi pula dengan ''simbol'' atau ''kode'' sendiri, merupakan ciri khas yang membedakan satu kelompok dengan kelompok lain. Pengaruh komunikasi dengan pusat metropolitan di sekitar kampung miskin yang paling kentara adalah munculnya suatu bentuk pola konsumtif di kalangan para pemuda miskin ini. Diskrepansi antara harapan-harapan yang semakin meningkat pada satu pihak dengan kenyataan buruk sehari-hari pemuda ini nampaknya dijembatani oleh berbagai bentuk peniruan terhadap suasana serba mewah yang disaksikan di tetangganya: pusat metropolitan modern. Manifestasi pola komunikasi ini terlihat dari peniruan terhadap mode pakaian terbaru, pembicaraan-pembicaraan mengenai hal-hal atau barang-barang yang serba mewah dan peniruan tingkah laku yang disaksikan di sekitarnya. Acapkali peniruan ini dilakukan secara berlebih-lebihan dan lebih merupakan suatu pamer atau efek demonstrasi daripada pencerminan realitas hidup mereka sehari-hari. Misalnya saja peniruan mode pakaian dengan warna yang demikian menyolok, bedak dan kosmetik yang lebih tebal, rambut gondrong yang lebih panjang, penggunaan simbol-simbol kepemudaan seperti kalung, gelang, rantai atau tulisan-tulisan dan gambar-gambar maupun sikap-sikap yang suka berlebihan. Meluasnya penggunaan ganja dan narkotika di kalangan pemuda kampung miskin misalnya, lebih merupakan suatu bentuk peniruan dan efek demonstratif daripada pencerminan keinginan secara sadar. Kondisi ini kelihatannya tidak hanya berlaku pada pemuda miskin, juga pada pemuda mampu. Gesekan kebudayaan negara-negara industri, perkembangan komunikasi dan elektronika yang sangat pesat, situasi ''internasional'' kota

''metropolitan'', tidak membawa pengaruh menyolok ke arah tingkah laku modern, seperti penghargaan atas waktu, perencanaan mengisi waktu luang, dan sebagainya. Misalnya saja, sebanyak 54,68% responden siswa SLA di Jakarta yang mendapat uang saku Rp 6.000,- ke atas tidak mempunyai rencana mengisi waktu liburan panjangnya, dan sisanya 35,93% tidak tahu sama sekali dan hanya 9,37% yang merencanakan. Padahal kalau diukur dari tingkat ekonomi, mereka hidup dengan pola konsumsi yang relatif sangat tinggi. Kelompok ini juga dikatakan sebagai barisan terdepan yang menerima ''teknologi bekas'' (*second hand technology*) dan meneruskan kepada pemuda-pemuda di kampung miskin sebagai penerima ''teknologi loakan''. Sebagai ilustrasi, ''mata rantai pewarisan'' ini terutama terlihat dari gejala peniruan yang berlebihan dan efek demonstratif — terutama dalam mode terhadap kebudayaan yang datang dari luar negeri. Pada tahap pertama peniruan dilakukan oleh pemuda yang mampu karena mereka memang mempunyai cukup uang dan peralatan lainnya yang diperlukan dalam proses peniruan tersebut, kemudian baru menjalar kepada kelompok pemuda yang kurang mampu. Pada saat suatu mode pakaian mulai menyentuh dan ditiru secara berlebihan oleh pemuda miskin, maka golongan pemuda mampu ''mengganti'' mode pakaiannya, karena mungkin sudah tidak *up-to-date,* atau tidak ingin disamakan. Dan proses ini berlangsung terus.

Perencanaan menghadapi urbanisasi di masa mendatang seyogyanya berpedoman pada konsep perkembangan selektif dengan perumusan berbagai program taktis yang diserasikan pada perencanaan strategis yang ditujukan untuk mengangkat golongan-golongan yang ketinggalan ke dalam masyarakat urban sekarang ini. Sebagai potensi, media massa dapat dikembangkan untuk kepentingan sumber daya dan kegiatan pengembangan kaum muda sesuai dengan aspirasi dan lingkungannya.

Apa yang disajikan di atas lebih merupakan suatu proses daripada suatu fosil mati yang tidak berubah; segala sesuatu berubah, terkecuali perubahan itu sendiri. Demikian pula dengan situasi dan pengaruh komunikasi di kalangan pemuda di kampung-kampung miskin di Jakarta. Di Jakarta, perubahan nampaknya berlangsung demikian cepat dan apa yang berlaku di hari kemarin mungkin saja lenyap di hari ini atau besok dan wajah pemuda di kampung miskin sudah tentu berubah bersama itu.

Perbaikan kampung dengan Proyek M. Husni Thamrin misalnya, dapat menyebabkan kontak fisik dengan dunia luas semakin intensif, dan selanjutnya komunikasi semakin pesat dan perumahan semakin membaik. Sudah tentu terlihat pula pergeseran-pergeseran sosial dan perpindahan di kalangan penghuni kampung miskin. Misalnya saja, karena bagian atau seluruh rumahnya tergusur akibat perbaikan kampung, mereka terpaksa pindah sementara penghuni baru berdatangan. Kerapkali perbaikan kampung diikuti pula oleh persyaratan baru kondisi kehidupan semakin mahal — penyediaan bak sampah, perawatan gang dan kampung dan sumbangan-sumbangan dan pajak. Persyaratan hidup baru ini ditambah dorongan ''psikologis'' akan merangsang penghuni kampung untuk pindah, terutama kalau pendapatan sehari-hari tetap rendah sementara tantangan hidup di kota semakin berat. Maka potret pemuda, pengaruh komunikasi dan pemanfaatan media massa untuk pengembangan pemuda di kampung miskin kini berpindah ke tempat lain, sementara tantangan dan permasalahannya tetap tidak beranjak.

9. POLA PERDAGANGAN DAN KEUANGAN DALAM PEMASARAN TANI DI JAWA

POLA PERDAGANGAN DAN JENIS PEDAGANG

Sesudah mempermasalahkan pemasaran tani sebagai sistem umum, maka bab ini mempersoalkan pola perdagangan dan jenis pedagang yang bersangkutan. Pola perdagangan berbeda sesuai dengan hal apakah barang-barang dihasilkan dengan cara kecil-kecilan tetapi tersebar, atau oleh banyak produsen secara besar-besaran. Dan pola itu juga berbeda apakah yang dihasilkan hanya untuk konsumsi lokal atau untuk diangkut ke kota-kota besar. Dan pola perdagangan itu tergantung dari mudah rusaknya barang-barang, maupun dari hubungan antara jumlah yang dihasilkan dengan kapasitas absorbsi pasar lokal terhadap barang-barang itu. Pola perdagangan juga berbeda sesuai dengan hal apakah barang-barang itu dijual eceran kepada pemakai ataukah secara besar-besaran kepada pedagang lain.

Pada umumnya, barang yang mudah rusak, dari produsen-produsen kecil yang tersebar, dikerjakan dengan cara yang disebut teknik ''perdagangan besar secara kecil-kecilan'', sedangkan barang yang tidak begitu mudah rusak, yang besar permintaannya di kota-kota, dikerjakan dengan teknik ''perdagangan besar''. Beberapa jenis hasil bumi dan banyak hasil industri rumah melahirkan beberapa masalah khusus, sebagaimana juga hasil pabrik dan barang-barang impor dan tidak tergolong pada kategori tersebut di atas.

Para pedagang digolongkan sesuai dengan fungsi yang dilakukannya: transpor, pengumpulan barang, penyimpanan dan pemecahan jumlah-jumlah yang besar untuk perdagangan eceran. Kebanyakan pedagang-pedagang itu melakukan lebih dari satu fungsi tersebut di atas, tetapi ada juga yang melakukan semua hal itu sekaligus. Sebagaimana bisa dilihat, taraf spesialisasi menurut fungsi dan menurut hasil dari para

---

1. A.G. Dewey, dikutip dari buku, *''Peasant marketing in Java''*.

pedagang itu, berhubungan erat dengan sifat-sifat pasaran barang-barang dan dengan volume yang diperjual-belikan.

SPESIALISASI DAN PEMBAGIAN PEKERJAAN

Hampir semua pedagang perantara dan tukang-tukang dan hampir seluruh penjaja makanan jadi adalah penghuni kota yang memiliki spesialisasi khusus dalam perdagangannya dan jarang mereka memiliki tanah pertanian. Sebaliknya, laki-laki dan perempuan yang merupakan pedagang keliling kurang memiliki spesialisasi, sekalipun beberapa dari mereka, khususnya kaum lelaki, yang mengangkut hasil-hasilnya dengan sepeda, kelihatan mengerjakan secara tetap selama waktu tertentu. Para pedagang keliling lainnya, adalah orang-orang tani yang berdagang hanya untuk menambah pendapatan di kala terdapat kekendoran dalam kegiatan-kegiatan pertanian. Wanita yang membawa sayur dan buah-buahan, dari desanya sendiri atau desa tetangganya ke pasar terdekat, atas dasar sambilan (*part-time*), adalah orang yang paling tidak memiliki suatu spesialisasi dari semua orang yang berhubungan dengan pasaran. Pedagang-pedagang besar yang mengerjakan barang-barang dalam jumlah ribuan kilogram, merupakan spesialis dan pedagang-pedagang tetap (*full time traders*).

Pada umumnya, pedagang-pedagang tetap ini mengkhususkan diri dalam satu macam barang atau satu kelas barang. Karena masing-masing menghendaki prosedure dan ketrampilan yang berbeda-beda dalam hal pemasaran. Dan tidak ada orang yang bisa diharapkan akan mampu mengikuti keadaan harga yang berlaku, harapan-harapan panen, dan hal kemungkinan permintaan konsumen untuk lebih dari satu atau dua hasil utama. Keuntungannya adalah demikian tipisnya, hingga setiap orang yang berkecimpung dalam perdagangan tanpa memiliki pengertian dalam hasil produksinya dan prosedure pasaran yang khas, maupun pengetahuan yang mendalam tentang keadaan pasar yang berlaku, akan menemui kesulitan-kesulitan. Spesialisasi yang ketat juga berarti, bahwa barang-barang hampir selalu melalui paling sedikit dua tangan antara produsen dan konsumen; dalam perdagangan besar, di mana barang-barang sering diangkut lewat jarak-jarak yang cukup jauh, mungkin sekali lima atau enam orang bisa terlibat di dalamnya, sebelum barang-barang itu mencapai sasarannya dalam rantai penjualan dan penjualan kembali.

Spesialisasi fungsi di antara para pedagang lahir dari kebutuhan pembagian pekerjaan dalam satu usaha yang demikian besar dan kompleksnya, sebagaimana terdapat dalam sistem pemasaran tani di Jawa. Ada terdapat bermacam pola perdagangan yang disebabkan oleh sifat barang-barang itu, volume yang harus diusahakan, tingkat konsentrasi pada hasil produksi dan sifat mudah rusaknya barang-barang itu. Tetapi ada terdapat persamaan yang dasar dalam pembagian pekerjaan dan dalam fungsi yang dilakukan para ahlinya, apapun dan bagaimanapun hasil produksinya. Pada taraf ini saya hanya ingin menggambarkan pola-pola dasar secara ringkas, hingga para pembaca dapat memperhatikan sebelum memulai analisa terperinci.

Jika para petani atau produsen-produsen lainnya ingin mendapatkan harga yang setinggi mungkin untuk barang jualannya, mereka harus memasarkannya di tempat di mana terdapat permintaan yang paling besar, yaitu pada umumnya di kota-kota atau di daerah pedesaan yang jauh letaknya, di mana barang dagangan itu tidak dihasilkan. Pengetahuan tentang keadaan persediaan dan permintaan perlu sekali dalam memilih daerah pemasaran yang paling menguntungkan dan harus disediakan buruh untuk mengangkut barang dagangan itu. Tingkat pertama dari proses ini (dari petani ke pasar setempat), kadang-kadang dijalankan oleh produsen, tetapi karena umumnya ia tak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, maka sering dilakukan oleh pedagang-pedagang pengangkut tingkat pertama. Tetapi, jika perlu mencapai konsumen di pasar yang lebih jauh, maka hal itu biasanya dilakukan oleh pedagang-pedagang pengangkut tingkat kedua.

Pedagang tingkat pertama membeli barang-barang itu dari produsen, diangkut ke pasar, umumnya dengan jalan kaki, dan dijual secara eceran ke konsumen atau juga sering secara keseluruhannya ke seorang tengkulak (bakul, Jawa), atau juga kepada pedagang pengangkut kedua. Pedagang pengangkut tingkat dua itu umumnya membeli barang-barang dari tengkulak-tengkulak di suatu pasar dan menjualnya kepada tengkulak-tengkulak di lain tempat, dan karena jarak yang ditempuhnya lebih jauh dan jumlah yang diusahakannya lebih besar daripada yang diusahakan oleh pedagang tingkat pertama, maka mereka sering mempergunakan sepeda atau alat-alat pengangkutan lain untuk mengangkutnya. Kedua jenis pedagang pengangkut ini mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga yang terdapat antara harga di daerah

produsen dan harga pasar setempat, atau perbedaan harga di pasar setempat dan pasar lain, di mana terdapat permintaan lebih besar. Keduanya juga tergantung daripada tengkulak-tengkulak untuk menyesuaikan harga-harga mencapai tingkat yang wajar. Karena pedagang-pedagang pengangkut tingkat pertama mungkin sekali orang dari daerah di mana barang-barang itu dihasilkan, maka mereka mempunyai pengetahuan yang cukup baik tentang keadaan persediaan setempat, tetapi mereka mungkin tidak mengetahui keadaan di luar daerah mereka dan dengan demikian tidak bisa menilai keadaan permintaan yang lebih luas. Karena pedagang-pedagang pengangkut tingkat kedua sering mengadakan perjalanan, maka mereka memiliki gambaran yang lebih luas dan bisa menilai keadaan di lain-lain daerah, tetapi tidak mempunyai pengetahuan tentang keadaan setempat. Tengkulak-tengkulak yang memiliki kedudukan sentral dapat mengadakan perimbangan tentang keadaan setempat dan keadaan yang lebih luas hingga bisa menetapkan harga-harga yang wajar.

Para tengkulak umumnya beroperasi di pasar, membeli dari pedagang pengangkut tingkat pertama (yang dalam beberapa hal juga merupakan produsen barang-barang itu), umumnya membeli seluruh persediaan pedagang pengangkut itu. Mereka menjualnya secara eceran kepada konsumen-konsumen setempat atau secara keseluruhan ke lain-lain tengkulak atau kepada pedagang pengangkut tingkat kedua. Tengkulak-tengkulak umumnya mengkhususkan diri untuk menjual secara eceran atau secara keseluruhan, tetapi mereka juga mungkin menjalankan kedua jenis pekerjaan itu secara bergilir atau sekaligus. Mereka juga bisa menaikkan harga barang-barang itu dengan jalan mengadakan beberapa pengolahan, tetapi sumbangan utama mereka dalam proses pemasaran adalah dalam pembelian besar-besaran, penyimpanan, pemecahan ke dalam jumlah yang kecil, penentuan mutu dan penentuan satuan standar untuk memudahkan cara bekerja dan menetapkan harga.

Tengkulak-tengkulak adalah penting bagi pedagang-pedagang pengangkut tingkat pertama, karena mereka bisa diandalkan untuk membeli barang-barang dalam jumlah besar dan dengan demikian menjamin para pedagang itu untuk menghabiskan seluruh barangnya dengan cepat dalam satu transaksi dan tidak membuang-buang waktu dan tenaga untuk mencari dan berjual beli dengan konsumen-konsumen perorangan, yang masing-masing hanya ingin membeli sebagian daripada

persediaannya. Selain itu, sebagai dinyatakan di atas, bakul-bakul yang secara terus menerus mengamat-amati fluktuasi dari persediaan dan permintaan dan oleh karena itu mempunyai pengetahuan yang lebih luas tentang keadaan umum pasar, berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk menilai harga yang wajar bagi setiap jenis bahan atau barang pada suatu ketika. Persaingan yang sama sekali bebas dan sering malahan sengit antara para tengkulak (juga antara lain-lain kelas pedagang), teristimewa dewasa ini di mana banyak orang memasuki bidang perdagangan, menjamin para pedagang pengangkut, bahwa tengkulak-tengkulak akan senantiasa mempergunakan pengetahuannya tentang keadaan pasar dalam bentuk memberikan harga-harga wajar bagi para pedagang keliling. Jika para pedagang keliling ini mencurigai tengkulak-tengkulak dalam menentukan harga, atau tidak mempercayai penilaian harganya, maka mereka bebas untuk menolak harga yang ditetapkan dan bebas untuk menjual sendiri barang-barangnya secara eceran. Sebaliknya, senantiasa ada pedagang-pedagang pengangkut yang lebih trampil mengenai pasaran atau lebih gesit menjalankan hal ini.

Oleh karena mudahnya memasuki bidang perdagangan, maka persaingan bebas terjamin dan pedagang-pedagang pengangkut sendiri dapat menyerahkan soal penyelidikan keadaan pasar kepada para tengkulak dan menerima penilaian harganya sebagai realistis dan wajar. Hal ini adalah penting karena para pedagang pengangkut sering merobah barang dagangannya dari yang satu ke yang lain dan mereka membutuhkan waktu yang lama untuk mengenal keadaan pasar untuk barang-barang, setiap kali mereka merobah barang dagangannya. Dengan sistem yang ada sekarang ini, maka penyelidikan adalah pekerjaan para tengkulak yang merupakan ahli-ahli *full-time* dalam suatu bahan tertentu. Di pasar yang sebesar pasar Mojokerto misalnya, di mana banyak ragam dan macam barang diperjualbelikan dalam jumlah yang besar, pembagian pekerjaan seperti ini adalah mutlak untuk beroperasi secara efisien dan cepat. Fungsi menyelidiki keadaan pasar dan menentukan harga oleh para tengkulak, juga merupakan jasa bagi mereka yang membeli dari para tengkulak itu, apakah ia seorang konsumen ibu rumah tangga atau pedagang pengangkut tingkat kedua. Pembelian besar-besaran, penyimpanan, penentuan mutu dan standardisasi yang dilakukan oleh para tengkulak, juga membantu para langganan. Ibu rumah tangga yang ingin membeli sejumlah besar dari suatu

jenis barang, akan merasakan lebih mudah membeli dari para tengkulak daripada pergi mencari pedagang pengangkut tingkat pertama untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk setiap jenis barang terdapat seorang tengkulak yang sanggup mengadakan sembarang jumlah yang dibutuhkan, mengaturnya dalam satuan-satuan yang diseragamkan dan siap untuk dijual setiap waktu. Oleh karena itu, sekalipun para tengkulak sama sekali tidak mengurus pengangkutan dan juga tidak mengadakan pengolahan, mereka memberikan jasa-jasa penting dalam sistem pasaran seluruhnya.

CARA-CARA ORANG JAWA MENGGAMBARKAN ARTI SISTEM

Umumnya orang Jawa tidak menggambarkan arti sistem itu sebagai jasa-jasa yang diberikan oleh beberapa kelas pedagang sebagaimana yang dilakukan di sini. Juga mereka tidak melihat, bahwa keuntungan yang diterima merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Pedagang-pedagang pengangkut yang membawa barang-barangnya dari daerah, dianggap sebagai seorang yang mengambil keuntungan dari kelebihan di desa dan dari ketidakberanian dan kekurangan ketrampilan serta pengetahuan produsen. Mereka dianggap mempergunakan pengetahuan itu untuk memilih satu pasar yang memberikan harga tertinggi, agar mendapat keuntungan sebesar mungkin. Mudah dapat dimengerti, bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah banyak, tetapi penghasilan para pedagang keliling sekalipun untuk sebagian, tidak dianggap sebagai upah untuk pekerjaan itu. Ia adalah hasil keuntungan dari suatu transaksi, di mana pedagang keliling mengambil untung dari perbedaan-perbedaan harga jenis bahan tertentu di dua daerah, karena ketrampilan, pengetahuan dan kewiraswastaannya serta kesediaannya mengambil risiko.

Demikian juga seorang tengkulak tidak dianggap sebagai seorang yang memberikan jasa-jasanya kepada konsumen dan pedagang pengangkut, tetapi baik karena kesediaannya untuk mengambil risiko, maupun karena pengetahuannya yang lebih luas sebagai seorang yang dapat mengambil keuntungan dari ketidakmampuan orang lain untuk berdagang. Menurut pandangan orang Jawa, adalah suatu hal yang realistis, bahwa jika para pedagang tidak menilai keadaan pasar dengan wajar, mereka tidak akan beruntung, sekalipun mereka mengangkut

barang-barangnya ke tempat-tempat yang jauh letaknya atau berapa lamapun mereka menyimpannya atau betapa mudahnya mereka membeli secara besar-besaran, menyusun sesuai dengan mutu atau menstandardisasi dan memecahnya dalam satuan-satuan yang kecil untuk dijual.

SAHNYA KEUNTUNGAN PERDAGANGAN

Suatu segi yang menarik yang dapat dilihat dari mempersoalkan keuntungan perdagangan adalah, bahwa perdagangan merupakan cara mencari penghidupan yang sah. Sikap ini diambil oleh pedagang, maupun bukan pedagang, dan masyarakat mengakui hak dari mereka yang ingin mencari uang dengan jalan manipulasi persediaan dan permintaan. Setiap orang mengakui bahwa pengangkutan dan perdagangan harus dilakukan, jika hasil usaha mereka hendak dijual dan barang-barang konsumen disediakan. Bahwasanya orang menghayati pentingnya jasa-jasa yang diberikan oleh pedagang, melahirkan suatu dasar untuk mengakui perdagangan sebagai kedudukan yang sah, sekalipun keuntungan dari itu tidak dianggap sebagai upah untuk pekerjaan yang dilakukan.

Para produsen mengerti bahwa untuk mendapatkan harga yang paling menguntungkan bagi barang-barang yang mereka hasilkan, barang-barang juga harus dijual di daerah atau tempat di mana terdapat permintaan yang terbesar. Karena itu maka barang-barang harus diangkut sejauh 100 km atau lebih, dan mereka sadar bahwa mereka tidak akan dapat mengerjakannya sendiri. Kecuali tidak bisa mengerjakannya sendiri, mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan bisa menilai faktor-faktor persediaan dan permintaan di daerah sekeliling mereka. Sebaliknya para pedagang tahu di mana terdapat hasil bumi yang terbaik, daerah mana yang akan panen, dan pasar mana yang memiliki fasilitas pengangkutan yang murah yang dapat menghubungkan mereka dengan kota-kota lain; dan mereka bisa menilai di mana mereka akan mendapatkan harga tertinggi untuk hasil bumi tertentu dan pada waktu tertentu. Dengan membiarkan para pedagang yang memiliki pengetahuan yang tinggi untuk melakukan penjualan, maka para petani tahu bahwa hasilnya akan mendapatkan harga yang

tertinggi. Dan oleh karena adanya persaingan bebas antara para pedagang, maka harga-harga yang paling baik akan diteruskan kepada mereka. Para petani mungkin tidak akan mengerti liku-likunya persaingan, tetapi mereka telah belajar selama bertahun-tahun bahwa lebih baik menyuruh orang lain melakukan pemasaran barang-barangnya.

Para produsen tahu bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan kalau barang-barangnya diurus secara lebih efisien. Demikian juga para konsumen akan menghargai keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari adanya sistem pasar, karena tanpa itu mereka akan sukar memperoleh barang-barang yang bermacam-ragam dan dalam jumlah yang mereka inginkan pada waktu tertentu. Para pedagang mengangkut serta mengadakan keseimbangan antara persediaan dan permintaan, membebaskan produsen dan konsumen dari risiko dan kerja berat dan menjamin persediaan barang-barang yang tetap kepada para konsumen dan pasar yang tetap untuk para produsen. Orang Jawa pada umumnya tidak memberi arti yang demikian pada sistem ini, tetapi tahu bahwa mereka akan sukar hidup tanpa adanya pasar.

Di mana masalah ekonomi menjadi lebih kompleks, maka spesialisasi yang lebih ketat, baik untuk penduduk di desa-desa, maupun di kota-kota akan membuat fungsi yang dilakukan oleh pasar lebih mutlak. Kemungkinan bahwa para produsen dan konsumen akan bisa menilai situasi dan bekerja dengan efisiensi yang maksimum, akan menurun, apalagi pada buruh yang bersangkutan. Kekuatan-kekuatan yang memperkokoh kedudukan para pedagang perantara dan membuat perdagangan menjadi kedudukan yang sah di mata orang yang bukan pedagang, akan menjadi lebih berat, karena produsen dan konsumen terpisah oleh mekanisme pembagian yang kian bertambah kuat.

Cara hidup yang bersifat mistik dan menarik diri dari keduniawian cenderung untuk lebih mengurangi penghargaan terhadap kedudukan para pedagang daripada terhadap kedudukan petani dan lain-lain produsen. Yang terakhir ini dianggap sebagai melakukan fungsi yang bermanfaat. Agama yang mendasarkan cara hidup yang demikian itu, adalah populer di Jawa. Sebaliknya, karena orang Jawa tidak suka kepada ekstremitas, maka cita-cita mereka umumnya diselubungi oleh penglihatan yang praktis. Oleh karena itu, maka mungkin sekali bahwa perdagangan akan selalu dianggap sebagai kedudukan yang sah, kecuali kalau sikap orang Jawa tidak mengalami perobahan-perobahan yang drastis.

MUDAHNYA MASUK BIDANG PERDAGANGAN

Mudahnya masuk bidang perdagangan juga membentuk pandangan orang awam terhadap pedagang-pedagang Jawa (tetapi tidak terhadap pedagang Cina). Banyak orang yang mempunyai kedudukan-kedudukan lain, bisa saja dan sering melakukan kegiatan perdagangan. Karena sukar membedakan antara pedagang dan bukan pedagang, maka hampir tidak terdapat sifat permusuhan. Jika seorang petani merasa tidak mendapatkan harga yang wajar untuk barangnya dari pedagang pengangkut, maka ia akan menjalankan dagangannya sendiri. Demikian juga para pedagang pengangkut bisa berfungsi sebagai seorang tengkulak. Dengan demikian, maka dengan mudahnya masuk bidang perdagangan dapat menjamin mereka yang bersangkutan, bahwa tidak akan ada pihak yang mengambil keuntungan yang luar biasa. Hal itu juga tidak memungkinkan untuk terbentuknya anggapan umum, bahwa para pedagang bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa, karena setiap orang yang beranggapan demikian, dengan sendirinya akan menjadi pedagang.

Karena orang Cina mendominasi perdagangan tertentu dan tidak membiarkan orang Jawa memasuki bidang ini, maka permusuhan dan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan sering terjadi. Kejengkelan semacam itu juga dirasakan terhadap pedagang India dan Arab, tetapi golongan ini tidak cukup besar untuk menarik perhatian atau untuk mendominasi suatu jenis perdagangan secara efektif untuk mengisolasi orang Jawa. Permusuhan yang sering dirasakan terhadap pedagang-pedagang oleh banyak masyarakat petani di Jawa, pada umumnya, dirasakan terhadap pedagang-pedagang yang bukan orang Jawa.

Sudah barang tentu terdapat keluhan-keluhan mengenai harga, tetapi para pedagang tidak dapat disalahkan dalam hal itu. Kadangkala ada juga tuduhan-tuduhan tentang praktek-praktek yang tidak benar, tetapi hal ini kelihatannya tidak pernah menjadi hangat, karena pada umumnya tidak terdapat perbedaan yang menyolok antara pedagang dan bukan pedagang. Dengan demikian maka hak seorang pedagang untuk mengambil keuntungan dari perusahaannya dapat dimengerti, bukan semata-mata karena perdagangan adalah suatu kedudukan yang telah diakui dan terhormat, tetapi karena tidak terdapat perbedaan yang jelas antara golongan orang-orang yang terlibat di dalamnya.

MODAL DAGANG

Penghasilan yang tidak dipergunakan untuk membeli barang berharga atau untuk memenuhi pengeluaran kebutuhan rumah tangga, biasanya segera diputarkan kembali ke dalam perdagangan dan merupakan sumber terpenting bagi modal dagang. Para petani menyimpan uangnya lebih lama karena biasanya mereka harus menunggu musim pertanian yang tepat. Jika sumber ini tidak ada, maka modal untuk perdagangan diperoleh dari sumber-sumber lain.

Salah satu sumber ialah pinjaman pribadi, tetapi pentingnya hal ini sukar dinilai karena orang umumnya tidak suka membicarakan soal-soal keuangan pribadi di luar lingkungan keluarganya. Keterangan spesifik tentang keadaan pinjaman pribadi ini lebih sukar lagi diperoleh. Tidak ada pengawasan hukum atas pinjaman demikian itu dan umumnya tidak ada persetujuan tertulis. Dan bahwasanya bunga ditarik atas pinjaman itu, adalah soal yang sangat dirahasiakan. Hukum Islam secara eksplisit melarang menarik bunga. Sekalipun peraturan ini sering diabaikan atau dihindari, ia masih mempunyai kekuatan moral dan membuat orang malu melanggarnya dan mereka jarang mengakui melakukannya. Bunga yang ditarik itu dalam beberapa hal adalah sangat tinggi. Umpamanya, saya pernah mendengar bahwa untuk pinjaman 1 rupiah orang harus membayar bunga 100% esok harinya. (Dengan beberapa alasan orang tidak mengecam begitu keras penarikan bunga oleh bank-bank resmi pemerintah dan rumah-rumah gadai yang mungkin dapat disamakan dengan sumbangan pasar atau pajak, dan dianggap sebagai penarikan yang sah untuk membantu organisasi pemerintah). Bagaimanapun juga, pinjaman-pinjaman pribadi itu, sebagaimana yang sering dibuktikan, tidak merupakan sumber modal yang penting untuk para pedagang. Pinjaman antara para pedagang jarang kelihatan, mungkin karena mereka merasa, bahwa modal mereka lebih menguntungkan dan lebih terjamin pengembaliannya, jika ditanam dalam perdagangan daripada dipinjamkan.

ARISAN

Arisan yang umumnya dilakukan oleh para pedagang yang miskin
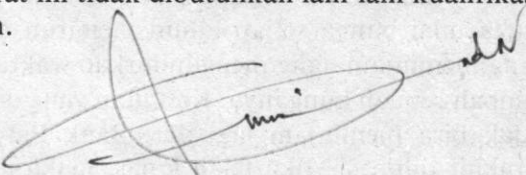
khususnya untuk tujuan dagang, pada umumnya, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing menaruh setiap hari sejumlah uang, umumnya dalam jumlah kecil, di dalam satu ''celengan''. Setiap peserta mendapat satu nomor dengan jalan undian dan jika nomornya keluar, maka ia akan menerima seluruh uang yang disumbangkan oleh setiap peserta tadi. Ini adalah suatu cara menabung yang sederhana yang secara luas tersebar dalam masyarakat timur. Di dalam sistem arisan di Jawa tidak dibayar bunga dan pada waktunya setiap orang akan mendapat kembali jumlah uang yang disumbangkannya. Karena masa peredaran terus menerus, dan pesertanya sama, maka tidak perlu untuk melihat untung ruginya, dalam jumlah pesertanya kecil dan dengan demikian uang yang ditanam itu lebih lekas kembali daripada jika jumlah pesertanya lebih besar.

Besarnya *arisan* yang dijalankan di pasar berbeda-beda, yang terbesar yang saya catat berjalan selama 187 hari dengan iuran sebesar Rp 1,- sehari untuk setiap peserta, sedangkan terkecil berlangsung selama 35 hari dengan iuran sebesar masing-masing Rp 2,-. Mereka mulai lagi setelah satu putaran selesai (tidak seperti kelompok-kelompok lain di daerah lain di kawasan Timur, yang biasanya dimulai oleh seorang untuk mencari dana bagi tujuan tertentu dan arisannya diakhiri setelah setiap orang menerima pembayarannya). Jumlah orang yang ikut serta juga berbeda, karena dua orang atau lebih membagi satu saham antara mereka dan akhirnya mereka membagi hasil arisan itu sesuai dengan besarnya saham mereka. Beberapa orang ikut dalam tiga atau empat arisan sekaligus, sedangkan juga banyak orang yang tidak ikut sama sekali.

Arisan itu diatur dan dijalankan oleh seseorang yang ingin bertanggung jawab. Buku-buku catatan disediakan dan seorang petugas berkeliling untuk menagih pembayaran dari anggota-anggotanya dan memberikan jumlah uang itu kepada peserta yang menarik pada hari itu. Oleh karena buku disediakan, maka hal itu berarti bahwa setiap orang yang ingin menjalankan arisan itu seharusnya bisa membaca dan menulis. Sebelum perang orang yang umumnya memiliki pendidikan yang cukup untuk dapat dikatakan melek huruf, rata-rata adalah lebih berada, dan mungkin orang yang dewasa ini menjalankan arisan tergolong para pedagang yang lebih berada. Mereka mungkin juga memiliki jiwa

wiraswasta, karena untuk mengurus arisan dibutuhkan usaha dan ketrampilan. Kecuali sifat-sifat ini tidak dibutuhkan lain-lain kualifikasi untuk mengatur suatu arisan.

BANK-BANK PASAR

Sumber penting untuk mendapatkan pinjaman bagi para pedagang adalah Bank Pasar milik Pemerintah. (Pinjaman ini hanya untuk para pedagang). Bank pasar ini meminjamkan uang kepada para pedagang dengan hanya meminta tanda tangannya (jika buta huruf, cap jempolnya) bersama tanda tangan dua orang saksi. Di tahun 1953, pinjaman diberikan sebanyak Rp 40,- tetapi setahun kemudian jumlah itu dinaikkan menjadi Rp 50,-, mungkin berkenaan dengan inflasi yang terus meningkat setiap tahun. Pinjaman itu harus dibayar kembali dalam limapuluh hari, yaitu cicilan sebesar 1/10 jumlah sisa pinjaman ditambah dengan 1% bunga dari pinjaman pokok setiap lima hari sekali (dengan lain kata sekali setiap minggu pasaran). Dengan demikian, maka pada akhir lima puluh hari itu, para peminjam telah membayar kembali jumlah pokok ditambah 10%.

Jika hal itu diperhitungkan dalam satu tahun, maka bunganya akan menjadi seratus persen, yang menurut taraf Barat adalah terlalu tinggi, tetapi dua faktor harus diingat sebelum menilainya. Furnivall mengatakan, bahwa di Birma bunga pinjaman dari para ceti (*money lenders*) dan juga dari para pedagang yang cukup besar di Rangoon sering mencapai lebih dari seratus persen setiap tahun[2]. Mungkin angka-angka itu agak dibesar-besarkan karena pandangan orang terhadap para ceti adalah tidak baik, tetapi karena angka-angka itu serupa dengan angka-angka yang terdapat di Jawa, kelihatannya pendapat Furnivall tersebut bisa diterima. Faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam keadaan itu adalah faktor yang melalaikan pelunasan hutang. Jika yang meminjam uang tidak dapat membayar kembali hutangnya dalam waktu yang telah ditentukan, maka tambahan bunganya tidak akan ditagih (yaitu, kalau ia meminjam dari bank pemerintah, dan mungkin tidak demikian halnya jika ia meminjam dari seorang ceti). Oleh karena itu berapa lamapun hutang itu tidak dilunasi, bunganya tidak akan naik lebih dari 1/10 dari jumlah pinjaman pokok, yang berarti bahwa jika

2. Ibid., hal. 14.

seorang pedagang menemui kesulitan ia hanya mengundurkan waktu pembayaran tanpa memperbesar hutang. Dengan rencana demikian, maka nilai bunga setiap tahun menurun dengan cepat dan kian lama yang meminjam uang mengundurkan waktu untuk membayar, kian bertambah rendah bunganya. Kesulitan yang dideritanya hanyalah bahwa ia tidak bisa meminjam lagi dari Bank Pasar sebelum hutangnya yang terakhir dilunasi. Jika telah lunas, maka ia diperbolehkan lagi meminjam.

Dalam beberapa hal seorang pedagang bisa mendapatkan lebih dari satu pinjaman pada satu waktu dari Bank Pasar. Salah seorang ibu, informan saya, sering meminjam uang dari bank sejumlah Rp 120,-(kemudian menjadi Rp 150,-) dengan cara berikut: ia mengambil 3 jumlah pinjaman standar sebesar Rp 40,- yang satu ditandatanganinya sendiri dan 2 orang anaknya menandatangani sebagai saksi; lantas ia dan puteranya yang tertua menandatangani sebagai saksi dan menamakan puteranya yang termuda sebagai peminjam utama. Dan sesudah itu ia dan puteranya yang termuda menandatangani sebagai saksi pinjaman puteranya yang tertua. Dan ia menerima seluruh uang itu dan mengambil tanggung jawab untuk membayarnya kembali. Secara teknis pinjaman itu bisa dianggap sebagai satu rentetan pinjaman dengan setiap puteranya meminjamkan kepadanya tanpa bunga, tetapi pada dasarnya setiap orang menganggap dialah yang meminjam sedangkan peminjaman kembali merupakan hanya suatu formalitas saja. Sistem ini tergantung pada 2 puteranya yang tidak mau mempergunakan jasa Bank Pasar dan mempercayakan ibu mereka untuk membayar kembali hutang itu dan tidak membiarkan mereka bertanggung jawab atasnya. Dari ibu itu saya mendengar bahwa dengan jalan demikian seseorang hanya bisa meminjam sekaligus 3 unit dan tidak boleh lebih dari tiga. Untuk setiap unit yang dipinjam itu, ia membayar kembali Rp 4,40, (kemudian Rp 5,50) kepada Bank, yang berarti 1/10 dari pinjaman pokok dan 1/10 dari bunganya pada setiap hari kelima, dalam hal ini setiap hari Kliwon.

Saya tanyakan apakah bunganya menjadi berkurang jika pinjaman itu dibayar kembali seluruhnya sebelum 50 hari berselang. Sukar bagi saya untuk membuat dia mengerti pertanyaan saya ini dan akhirnya setelah dia mengerti ternyata bahwa ide itu tidak pernah dipikirkannya.

Pada umumnya orang berusaha membayar hutang pada waktunya; jika ia tidak mampu memenuhinya, maka pembayaran diundurkan saja dan mereka tidak pernah membayar sebelum waktunya habis. Jumlah yang ditagih sebagai bunga akan tetap sama, tanpa mengindahkan lamanya waktu pembayaran. Saya tahu bahwa bunga tidak naik, jika pembayaran ditangguhkan dan saya kira bunga juga tidak akan berkurang, sekalipun dalam teori, untuk pembayaran sebelum waktunya.

Sepengetahuan saya uang pinjaman itu selalu dipergunakan untuk membiayai perdagangan. Bank pasar didirikan khusus untuk merangsang investasi dan pegawai-pegawai Bank itu mungkin mendesak dan menekan para peminjam uang untuk tidak mempergunakan pinjaman untuk tujuan-tujuan lain, tetapi saya tidak dapat membuktikan ucapan saya itu. Karena bunganya tinggi jika pembayaran dilakukan seperti semestinya dan karena uang yang dikeluarkan hanya sejumlah kecil untuk waktu yang singkat, maka pinjaman itu tidak mudah digunakan untuk investasi yang tetap, malahan juga bukan untuk investasi jangka panjang. Dewasa ini pinjaman-pinjaman itu digunakan untuk modal perdagangan. Apakah penggunaan itu bisa dirobah atau tidak, jika bunga dan lamanya waktu pinjaman dirobah, sukar untuk diketahui. Mungkin dengan sistem seperti sekarang ini, pinjaman yang besar dan berjangka panjang, tidak ada gunanya untuk para pedagang.

CETI-CETI (*MONEY LENDERS*)

Ceti-ceti bangsa Cina dan Arab yang tradisional merupakan sumber utama bagi pinjaman di banyak daerah di kawasan Timur, kelihatannya tidak begitu penting di daerah Mojokerto di tahun-tahun 1953-1954. Inflasi yang berjangkit selama perang dan revolusi memberi kesempatan kepada orang Jawa untuk membayar hutang-hutangnya, dan tidak adanya keamanan dan terdapatnya suatu sikap permusuhan, khususnya terhadap orang Cina, membuat penagihan hutang-hutang yang belum dilunasi menjadi sukar untuk selama beberapa tahun. Hal ini membuat ceti-ceti enggan untuk bangkit kembali.[3]

---

3. George McT. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia,* Cornell University Press, Ithaca, hal. 327.

Selama beberapa tahun pemerintah mencoba mendesak para ceti, khususnya bangsa Cina dan bangsa asing lainnya, untuk mengHentikan kegiatan-kegiatannya. Di waktu gerakan ethis di bawah pemerintah Belanda, terdengar banyak kecaman terhadap penyalahgunaan yang dilakukan oleh rumah-rumah gadai milik orang Cina. Sikap umum dikemukakan oleh Furnivall: pemilik rumah-rumah gadai adalah licik dalam praktek-praktek mereka. Syarat-syarat untuk mendapatkan pinjaman adalah luar biasa dan pengaturan mengenai keselamatan penjagaan barang-barang gadai tidak memuaskan, sedangkan rumah-rumah gadai itu diketahui umum sebagai tempat minum candu[4]. Apakah tuduhan-tuduhan itu benar atau tidak, pendeknya umum mengetahuinya demikian, sehingga pemerintah mendirikan bank-bank dan rumah-rumah gadai, khususnya untuk menggantikan rumah-rumah gadai dan ceti-ceti bangsa Cina itu. Rencananya adalah untuk mematahkan kehidupan perdagangan bangsa Cina di Indonesia dan menempatkan orang-orang Indonesia sebagai gantinya. Politik ini kelihatannya memperoleh beberapa kemajuan, karena di tahun-tahun 1953—1954 para ceti tidak lagi merupakan sumber kredit yang penting, khususnya untuk mendapatkan modal perdagangan bagi pedagang Jawa di daerah Mojokerto[5].

---

4. Furnivall, *Colonial Policy and Practice, op. cit.,* hal. 339.
5. Sebelum mengakhiri diskusi ini, beberapa faktor yang berhubungan dengan bunga yang tinggi yang umumnya terdapat di kawasan Timur, harus mendapat perhatian. Salah satu alasan yang diberikan untuk menarik bunga yang tinggi oleh seorang ceti, kecuali karena kerakusan, adalah karena banyaknya orang yang tidak melunasi hutangnya, untuk mana mereka harus mendapatkan ganti kerugian. Pemerintah Belanda berpendapat, bahwa bank-bank pemerintahpun yang dianggap sebagai *''non-profit organization'',* terpaksa menarik bunga yang tinggi, jika mereka hendak berdikari. Sebaliknya, dari sudut para peminjam, nilai bunga tergantung dari jumlah hutang yang dibiarkan tidak dilunasi. Sekalipun ia selalu dalam keadaan berhutang, jumlah yang sudah dibayar kembali dalam waktu tertentu, menentukan betapa beratnya beban hutang itu. Bunga itu mungkin bisa terkumpul hingga mencapai jumlah yang jauh lebih besar daripada jumlah yang sebenarnya dibayar, yang mempengaruhi keadaan keuangannya. Ada terdapat praktek-praktek lain yang bersangkutan dengan hutangnya yang dianggap tidak baik. Di Serawak toko-toko Cina menjual barang atas dasar pinjaman kepada pribumi Malanau, yang sebagai balasannya harus menjual sagu mereka kepada toko Cina tempat ia berhutang. Harga sagu itu dikurangi dengan hutangnya. Jika seseorang dikenal karena tidak membayar kembali sebagian dari hutangnya, maka tidak ada toko Cina yang sudi memberikan kredit untuk barang-barang konsumennya. Orang-orang Cina menguasai baik perdagangan tanaman perdagangan

PINJAMAN PERDAGANGAN

Pinjaman perdagangan adalah salah satu sumber modal yang penting bagi para tengkulak. Suatu perbedaan harus dibuat antara pinjaman yang diberikan kepada langganan yang bukan pedagang dan yang bukan sumber modal bagi pedagang yang memberinya, tetapi hanya merupakan suatu pengeringan sumber-sumbernya, dan pinjaman yang diberikan baik oleh seorang pedagang kepada pedagang lain, maupun oleh seorang produsen kepada seorang pedagang. Jenis terakhir ini menambah modal pedagang dan memungkinkan ia membeli barang-barang yang pada hakekatnya tidak bisa dibelinya, tetapi hal itu tidak membantunya untuk memenuhi biaya-biaya lain. Selama musim pemasaran bawang di tahun 1954 jenis pinjaman demikian itu ternyata penting artinya.

Penjualan secara pinjaman oleh para pedagang kepada para langganannya, apakah mereka itu pedagang ataukah para pemakai biasanya dilakukan secara sistematis hanya oleh orang-orang Cina, Arab atau orang Jawa yang sudah mengalami pendidikan Barat. Jika menjual barang-barang secara demikian itu, maka suatu persentase ditagih untuk pelayanan dan bunga. Penagihan bunga yang lebih tinggi dan barang-barang yang dibeli secara kredit jarang kelihatan pada pedagang-pedagang kecil di pasar, karena mungkin pembukuan yang harus dijalankan di dalamnya terlalu sukar untuk dimengerti oleh orang-orang yang buta huruf dan sebagian lagi pasti karena perasaan bahwa menagih bunga adalah menyalahi kesusilaan.

Kebanyakan pinjaman yang diberikan oleh para pedagang kepada langganannya adalah bebas dari bunga. Dalam taraf yang sederhana umpamanya, jika seorang langganan membeli semangkok kopi, ternyata tidak mempunyai cukup uang tunai, orang bersangkutan membayar sebagian dari harga semangkok kopi itu dan berjanji akan membayar sisanya di lain waktu. Menagih bunga atas jumlah yang demikian kecil

---

secara besar-besaran dan perdagangan barang-barang konsumsi secara eceran. Adalah mungkin bagi seorang pemberi pinjaman untuk memaksa yang berhutang untuk menjual tanaman dagangnya melalui dia sendiri dan mungkin ia akan membayar dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga pasaran. Dengan demikian maka terdapat penyalahgunaan yang potensial yang bersangkutan dengan peminjaman uang, tetapi hal itu terpisah dari masalah nilai bunga.

itu (mungkin sebesar lima atau sepuluh sen), adalah cukup aneh, tetapi yang lebih penting lagi ialah bahwa langganan pasti akan menjauhkan diri dari pedagang bersangkutan, jika disarankan agar ia membayar bunga. Dengan demikian pedagang itu tidak hanya akan kehilangan langganannya, tetapi mungkin juga ia tidak akan menerima kembali sisa uangnya karena langganan itu pasti akan menghindari warung kopi tersebut.

BAHAN UNTUK DISKUSI BAB III

1. *Kerangka Pemikiran (Koentjaraningrat, 1974)*)*
   - (1.1) *Lembaga Kemasyarakatan atau Lembaga Sosial (oleh Koentjaraningrat disebut sebagai Pranata Sosial) meliputi serangkaian kegiatan tertentu, berpusat pada suatu KELAKUAN BERPOLA yang mantap, bersama-sama dengan SISTEM NORMA & TATA KELAKUAN serta PERALATAN fisiknya yang dipakai dan juga orang-orang yang mendukungnya.*
   - (1.2) *Sistem Norma-norma atau secara lengkap disebut ADAT TATA KELAKUAN dari masyarakat selalu perlu dibagi pada setiap Lembaga Kemasyarakatan, karena adat itu berfungsi sebagai PENGATUR Kelakuan.*
2. *Kerangka Pemikiran (Gillin & Gillin, 1954)**)*
   - (2.1) *Mengingat kuat atau lemahnya ikatan yang dipunyai Norma-norma, maka norma dapat dibedakan sebagai berikut:*
     - a. ***Cara** (''usage''): suatu bentuk perbuatan.*
     - b. ***Kebiasaan** (''folk ways''): bentuk perbuatan yang diulang-ulang dalam suatu bentuk yang sama.*
     - c. ***Tata-Kelakuan** (''mores''): kebiasaan yang tidak semata-mata dianggap sebagai cara berperikelakuan saja, tetapi bahkan diterima sebagai norma pengatur.*
     - d. ***Adat** (''customs''): tata-kelakuan yang berintegrasi secara kekal dan kuat dengan pola-pola perilaku masyarakat.*
3. *Kerangka Pemikiran (van Doorn & Lammers, 1959)***)*
   - (3.1) *Selain memberi PEDOMAN pada masyarakat dan menjaga KEUTUHAN masyarakat, lembaga sosial berfungsi pula dalam memberi pegangan untuk mengadakan PENGENDALIAN SOSIAL atau KONTROL SOSIAL. Cara atau proses melakukan kontrol sosial dapat dengan:*

**) Koentjaraningrat (1974): ''Kebudayaan Mentalitet dan pembangunan'' P.T. Gramedia, Jakarta, 1974.*

***) J.L. Gillin & J.P. Gillin (1954): ''Cultural Sociology'' 3th printing, The Macmillon Comp., N.Y., 1954.*

****) J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers (1959): ''Moderne Sosiologie'', een sijstematiek inleiding; untgevery Het Spectrum Utrecht/Antwerpen.*

a. proses ajar, didik, atau pewarisan (adat/pola kebudayaan)
b. dengan sanksi (hukuman/pahala)
c. dalam ritus kolektif
d. dengan alokasi posisi-posisi.

4. *Pertanyaan*

(4.1) Lembaga-lembaga sosial apakah dapat Saudara gali dari Bacaan 1 dan 2, sesuai dengan kebutuhan kebutuhan warga masyarakat yang dipenuhinya!
Adakah persamaan atau perbedaannya?

(4.2) Sebutkan norma-norma yang mengatur perilaku orang-orang itu sesuai dengan kuat atau lemah ikatan norma itu: apakah itu berupa cara atau kebiasaan, tata laku atau adat?

(4.3) Dapatkah Saudara tunjukkan dari Bacaan 1 dan 2 bahwa lembaga-lembaga sosial yang Saudara temukan berfungsi sebagai Kontrol Sosial? Proses atau cara apa yang berlaku?

GRUP SOSIAL

10. JAGAKARSA; DESA KEBUN BUAH-BUAHAN DEKAT JAKARTA *)

(1). FASE-FASE DALAM LINGKUNGAN KEHIDUPAN INDIVIDU

Memperoleh keturunan merupakan harapan setiap pasangan yang baru membangun rumah tangganya. Harapan ini tidak saja karena keturunan itu dapat memperkekal perkawinan, tetapi juga karena keturunan inilah yang diharapkan akan mewarisi kekayaan dan menjamin hidup mereka di hari tua. Karena itu, kelahiran seorang anak, terutama anak pertama dan seorang laki-laki, merupakan peristiwa yang sangat penting. Berbagai upacara dan pesta kecil dilakukan menjelang dan pada waktu kelahiran seorang anak. Salah satu upacara yang penting ialah upacara kekeba yang diadakan pada waktu si wanita telah hamil tujuh bulan. Upacara ini terutama dilakukan bagi ibu yang pertama kali mengandung. Si calon ibu dimandikan dengan air bunga untuk menolak roh-roh jahat, hal mana biasanya disertai pemberian makanan kepada para tetangga.

Walaupun seorang wanita mengandung untuk pertama kalinya, si calon ibu itu akan tetap menunaikan kewajiban dalam rumah tangganya hingga dekat waktu melahirkan. Seringkali menjelang kelahiran bayinya si wanita menetap di rumah orang tuanya agar mendapat perawatan

---

*) Oleh Soeboer Boedhisantoso; dikutip dari karangan: *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini,* Yayasan Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta 1964, halaman 102—110.

yang baik. Pada waktu melahirkan,si wanita itu didampingi oleh ibunya atau ibu dari suaminya serta kerabat-kerabat wanita yang sudah berpengalaman, di samping dukun beranak yang akan menolong kelahiran tersebut. Juga kalau si wanita itu melahirkan di rumah sendiri, maka ibunya atau ibu suaminya akan mendampinginya hingga ia mampu melakukan kewajibannya kembali. Setelah si bayi lahir, biasanya diadakan selamatan kecil dengan membagi-bagi nasi beserta lauk-pauknya kepada para tetangga sebagai pemberitahuan maupun sebagai pernyataan rasa gembira. Selamatan yang lebih besar dilakukan pada waktu bayi itu berumur 40 hari, yaitu selamatan yang dikenal sebagai upacara turun tanah. Pada upacara ini si bayi untuk pertama kalinya menginjak tanah dan mengalami pengguntingan kuku; oleh sebab itu, upacara tersebut disebut juga kerik tangan. Jikalau si bayi itu perempuan ia disunat pada upacara ini.

Penyapihan umumnya dilakukan mulai bayi berumur satu atau satu setengah tahun, walaupun tak ada ketentuan yang pasti. Seringkali kalau si ibu ternyata mengandung lagi penyapihan dilakukan lebih awal. Perawatan dan pengasuhan bayi, selain dilakukan oleh si ibu, biasanya juga oleh kakak-kakaknya yang sudah besar. Bayi-bayi itu lebih banyak digendong daripada dibiarkan bermain sendiri sehingga waktu mereka mulai merangkak. Kebebasan untuk bermain dengan kawan-kawan yang sebaya diperoleh pada waktu sudah pandai berjalan.

Masa anak-anak merupakan waktu bermain di pekarangan-pekarangan dan kadang-kadang bermain mengikuti kakak-kakaknya mengembala ternak atau bekerja di kebun. Setelah fasih berbicara, anak-anak tersebut biasanya mengikuti kakak-kakaknya belajar mengaji di waktu malam. Menginjak umur enam sampai tujuh tahun mereka mulai dikirim ke sekolah dasar setempat. Masa bebas dari kewajiban bekerja ini bagi anak-anak laki-laki diakhiri dengan pengkhitanan yang biasanya dilakukan pada umur enam atau tujuh tahun. Pengkhitanan itu biasanya disertai dengan pesta atau hajat pada malam harinya dengan mengadakan tontotan. Pesta ini merupakan kesempatan bagi si penyelenggara untuk giliran menerima paketan, uang dari perkumpulan penabungan untuk keperluan hajat. Anak-anak dari orang yang tidak mampu, dapat ikut dikhitankan pada khitanan umum yang diadakan oleh kampung maupun desa tanpa biaya. Sejak itu, walaupun belum mampu bekerja sepenuhnya, anak-anak Jagakarsa sudah mulai diajar bekerja di kebun buah-buahan maupun di rumah. Seringkali anak-anak

laki-laki diikutsertakan dalam usaha penanaman buah-buahan, memetik dan menimbun buah-buahan di kebun serta ikut mengurus pengangkutan dan penjualan buah-buahan ke kota. Cara mendidik anak-anak, dengan memperlihatkan bagaimana mereka itu harus bekerja, lebih mudah meresap dan mempertebal rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Demikianlah anak-anak yang mulai masa muda sudah terlihat dalam perusahaan buah-buahan itu lebih mudah meninggalkan bangku sekolah, daripada meninggalkan pekerjaan mencari nafkah. Dalam pada itu, anak-anak wanita tidak terlepas dari tanggung jawab meringankan beban keluarga masing-masing, walaupun mereka tidak ikut serta dalam pekerjaan di kebun. Mereka membantu pekerjaan ibu di rumah atau memburuhkan tenaga pada perusahaan industri yang tak jauh dari desa.

Tanggung jawab atas kesejahteraan keluarga itu, rupa-rupanya mempercepat kedewasaan anak-anak. Baik pemuda maupun pemudi sudah mulai saling menaruh perhatian sejak berumur 13—15 tahun. Pemuda-pemuda secara berkelompok mengadakan ''pemburuan'' gadis di waktu malam, yaitu dengan mengunjungi tempat-tempat keramaian atau tontonan di mana ada banyak gadis yang datang. Mereka tak segan-segan mengunjungi keramaian-keramaian di luar desa, malah sampai ke tempat-tempat yang jauh letaknya. Dalam keramaian-keramaian itulah, kebanyakan pemuda maupun pemudi memperoleh kenalan. Para pemuda yang beruntung akan mengantarkan gadis kenalan barunya ke rumah, di mana mereka dapat melanjutkan percakapan sambil bersendagurau. Kalau si pemuda terpikat oleh si gadis yang diantarkan pulang itu, maka ia akan mengunjunginya lagi pada malam berikutnya. Kunjungan pemuda ke rumah gadis di waktu malam sering dengan disertai kawan-kawannya itu disebut nglancong. Pada waktu nglancong si pemuda dan si pemudi bebas bercakap-cakap dan bergurau sampai pagi. Sering juga kalau waktu sudah larut malam, si gadis masuk rumah, tetapi dapat meneruskan berbicara dari dalam kamarnya melalui jendela dengan si pemuda yang duduk atau tiduran di balai-balai di serambi luar. Pergaulan antara pemuda pemudi serupa itu mungkin dapat menuju ke arah suatu keputusan untuk kawin.

Bagi gadis desa, umur 15—17 tahun adalah waktu yang dianggap telah matang untuk kawin, sedang para pemuda baru dianggap telah matang pada umur 18 atau 20 tahun. Selisih waktu ini disebabkan karena para pemuda harus mempersiapkan biaya perkawinan, serta kebutuhan-

kebutuhan lain untuk membentuk rumahtangga. Dalam mencari jodoh baik pemuda maupun pemudi bebas untuk memilih kawan hidup mereka sendiri, dan karena kesempatan untuk bertemu dengan calon kawan hidup itu tidak terbatas di dalam desa, maka banyak pula perkawinan pemuda pemudi desa tersebut dengan orang dari lain desa. Walaupun mereka itu bebas memilih, persetujuan orang tua kedua belah pihak sangat penting terutama karena orang tua itulah yang akan membantu terlaksananya perkawinan tersebut.

Pemuda yang hendak kawin dengan gadis pilihannya segera memberitahukan keinginannya secara resmi kepada orang tuanya agar mereka melakukan pelamaran gadis itu. Pelamaran umumnya hanya dilakukan untuk memenuhi syarat formal saja, karena pihak orang tua gadis biasanya menyetujui rencana perkawinan anak mereka, sehingga lamaran ini hanya merupakan perundingan penetapan waktu pernikahan akan dilangsungkan serta biaya yang akan diperlukan untuk pesta tersebut. Pada waktu melamar pihak laki-laki biasanya akan menyerahkan sesuatu yang berharga untuk anak gadis yang dilamar, sebagai pengikat atau, sesuai dengan istilah yang mereka gunakan, paningset. Sejak si gadis dilamar, ia dianggap telah bertunangan. Pembatalan pertunangan mewajibkan pihak gadis mengembalikan paningset yang telah diterima itu. Masa pertunangan itu biasanya dipergunakan oleh pihak laki-laki untuk menambah biaya yang telah dikumpulkan serta kalau mungkin mendirikan rumah. Orang tua pihak laki-laki biasanya membantu mengumpulkan biaya yang dibutuhkan untuk perkawinan dan untuk membuat rumah.

Menjelang hari pernikahan yang ditetapkan, biaya perkawinan yang dijanjikan oleh pihak laki-laki diantarkan oleh kaum kerabatnya yang membawa serta benda-benda sumbangan perkawinan secara terbuka, sehingga dapat dilihat oleh umum. Banyaknya macam dan jumlah sumbangan yang dibawa, serta banyaknya kerabat yang mengantarkan, menambah kebanggaan dan gengsi baik keluarga wanita maupun laki-laki.

Peresmian perkawinan, dilakukan di hadapan penghulu, baik di kantornya maupun di rumah mempelai wanita. Pesta pernikahan diadakan di rumah mempelai wanita, di mana kedua penganten dipertemukan. Setelah upacara mempertemukan itu, kerabat-kerabat pihak laki-laki datang berkunjung bersama-sama, hal mana disebut besanin. Pada

pesta yang merayakan peristiwa ini, para tamu dihibur dengan pertunjukan-pertunjukan kesenian rakyat. Setelah upacara dan pesta berakhir, mempelai baru untuk sementara tinggal di rumah orang tua pihak wanita; baru beberapa hari sesudah itu mereka diboyong atau dipindahkan ke rumah orang tua laki-laki, di mana diadakan pesta penyambutan. Kalau penganten laki-laki sudah mempunyai rumah sendiri, maka pasangan itu segera akan tinggal dalam rumah baru secara neolokal. Walaupun pihak laki-laki biasanya berusaha melengkapi kebutuhan rumahtangga yang menikah, tidak jarang terjadi bahwa pihak wanitalah yang menyediakan rumah beserta kebunnya. Hal yang akhir ini terjadi terutama apabila wanita tersebut adalah anak tunggal atau anak bungsu yang diharapkan oleh orang tuanya akan merawat mereka di hari tua.

Perkawinan seorang laki-laki dengan isteri lebih dari satu, dianggap sebagai suatu hal yang biasa, sungguhpun poligami itu di Jagakarsa dilakukan oleh tidak lebih dari 5% jumlah kepala keluarga. Seorang suami yang beristeri lebih dari satu terpaksa mendirikan rumah tangga sebanyak jumlah isterinya, sebab para isteri itu sulit hidup secara damai dalam satu rumah. Beristeri lebih dari satu itu terutama dilakukan oleh petani-petani kaya maupun pejabat-pejabat desa yang mampu. Dengan demikian poligini itu dapat digunakan sebagai ukuran kemampuan laki-laki dan memang kenyataan menunjukkan bahwa mereka yang berhasil mempertinggi penghasilan, berusaha pula memperbanyak isteri agar gengsinya naik dalam masyarakat.

Walaupun setiap pasangan yang baru menikah mengharapkan keturunan, yang akan dapat menjamin hidup mereka di hari tua, namun kebanyakan orang-orang desa itu tidak menghendaki membebani anak-anaknya. Mereka tetap berusaha dan bekerja di kebun masing-masing sesuai dengan kemampuan mereka, walaupun segala kebutuhan telah dicukupi oleh anak-anak mereka. Perawatan orang-orang tua biasanya dilakukan oleh anak-anak yang belum berkeluarga dengan bantuan saudara-saudaranya. Kalau semua anak-anak telah menikah, maka orang-orang tua itu terpaksa hidup di rumah salah satu anaknya, atau meminta kepada salah satu anaknya yang telah berkeluarga untuk menetap di rumahnya. Pada umumnya para orang tua lebih suka menetap bersama anak perempuan mereka. Karena itu mungkin terjadi bahwa seorang laki-laki terpaksa menetap di rumah orang tua isterinya dan mengerjakan tanah orang tua isterinya itu.

(2). RUMAH KELUARGA BATIH DAN RUMAHTANGGA

Suatu keluarga batih di Jagakarsa, biasanya tinggal dalam satu rumah, sungguhpun ada kecondongan bahwa beberapa keluarga tinggal bersama akibat gejala kekurangan rumah. Dalam tahun 1957 ada 963 keluarga yang tinggal dalam 845 rumah; dalam tahun 1961, jumlah keluarga menjadi 1027, sedangkan jumlah rumah masih tetap. Rumah itu umumnya terbuat dari papan kayu, anyaman bambu, tetapi sekarang telah banyak rumah yang didirikan dengan menggunakan batu bata. Walaupun rumah-rumah batu sudah banyak mulai dibuat orang, namun pola bagan rumah lama masih menguasai adat membangun rumah. Pada pokoknya rumah-rumah penduduk desa tersebut selalu terdiri dari tiga bagian penting, yaitu serambi depan, bagian dalam dan bagian belakang. Serambi depan dari rumah itu tidak mempunyai pintu, karena hanya berdinding di kedua sampingnya di mana terletak dua balai-balai tempat menerima tamu atau tempat duduk-duduk anggauta rumah sebelum pergi tidur. Salah satu dari kedua balai-balai itu telah banyak yang diganti dengan meja kursi untuk menerima tamu. Bagian dalam rumah, merupakan bagian pokok dari rumah, yang dipisahkan dari serambi depan dengan dinding yang berpintu tepat di tengah dan berjendela di kedua samping pintu. Bagian pokok rumah itu terbagi dalam kamar-kamar tidur, pendaringan (gudang) dan kadang-kadang kamar makan. Kamar terdepan yang langsung berbatasan dengan serambi biasanya ditempati oleh anak gadis dalam rumah yang bersangkutan, agar gadis tersebut dapat dengan leluasa bercakap-cakap dengan tamu pemudanya dengan duduk atau tiduran di balai-balai serambi depan. Kamar orang tua biasanya terletak di sebelah kamar anak gadisnya ataupun di bagian lebih dalam. Di samping kamar-kamar tidur, terdapat pula pendaringan, yaitu kamar yang khusus tersedia untuk menyimpan barang-barang keluarga yang berharga, benih-benih padi dan beras. Bagian belakang merupakan tempat masak dan tempat penyimpanan alat-alat pertanian, serta persediaan kayu bakar. Kadang-kadang di bagian ini juga terletak balai-balai untuk makan bersama. Kamar khusus untuk anak-anak laki-laki kurang mendapat perhatian. Mereka itu bebas tidur di mana saja, kadang-kadang di atas balai-balai di beranda depan, di dapur atau tempat makan, atau kalau mereka telah dewasa biasanya tidur di beranda rumah gadisnya.

Laki-laki dan wanita yang telah kawin digolongkan sebagai orang

yang telah berkeluarga, karena mereka akan membentuk keluarga batih baru yang terpisah dari keluarga batih masing-masing orang tuanya, walaupun keluarga baru itu kadang-kadang masih menumpang di rumah orang tua. Penggolongan ini berarti bahwa orang yang bersangkutan telah dianggap sejajar kedudukannya dalam masyarakat dengan orang-orang tua lainnya. Bagi laki-laki, selain memperoleh hak-hak tertentu sebagai kepala keluarga, kedudukan tersebut berarti juga bertambah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarganya. Kepala-kepala keluarga itu berhak mewakili keluarga dalam peristiwa-peristiwa penting dalam desa, seperti pada rapat-rapat ataupun dalam pemilihan lurah di mana mereka berhak memilih maupun dipilih.

Keluarga-keluarga batih baru yang telah mampu, biasanya akan segera mendirikan rumah tangganya dalam sebuah rumah tersendiri, di mana biasanya ikut serta beberapa orang kerabat, baik dari pihak isteri maupun suami. Pengikut-pengikut yang sudah besar biasanya akan membantu meringankan pekerjaan suami mencari nafkah, atau membantu pekerjaan rumah tangga isteri seperti menyediakan makanan ataupun mengasuh anak-anak. Karena kesukaran perumahan dan karena tingginya biaya mendirikan rumah, mulai tampak gejala pengelompokan dari beberapa keluarga batih dalam satu rumah.

Keluarga batih maupun rumahtangga di desa Jagakarsa biasanya tidak besar. Hal ini dapat terlihat dari perincian mengenai empat kampung yang termaktub dalam Tabel I.

Tabel I

Nama kampung	Jumlah keluarga dengan 0 sampai 9 anak										Total
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Jagakarsa	15	61	66	54	42	50	20	9	6	2	325
Babakan	26	46	41	51	40	16	24	10	3	—	257
Klapatiga	8	32	36	17	21	15	66	8	5	1	149
Kendang	25	40	53	60	43	36	22	14	3	—	296
Jumlah	74	179	216	182	146	137	772	41	17	3	1027

(3). RUKUN TETANGGA, RUKUN KAMPUNG DAN LAIN ORGANISASI

Karena letak rumah di Jagakarsa bersebaran di seluruh desa, kadang-kadang berjauhan satu sama lain, maka sesuai pula dengan anjuran Pemerintah, yang terutama datang dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial dan Departemen Penerangan,, maka di antara rumah tangga yang bertempat tinggal saling berdekatan dibentuk organisasi kerjasama Rukun Tetangga (RT). Di Jagakarsa ada 26 RT yang masing-masing dipimpin oleh salah seorang anggota yang dipilih dalam rapat anggota yang diwakili oleh kepala-kepala keluarga RT yang bersangkutan. Adapun tujuan dari RT itu terutama ialah mencapai kemakmuran, kecerdasan serta kesejahteraan bersama antara anggota-anggotanya. Dalam kegiatan RT-RT itu mengatur kerjasama dalam membangun atau memperbaiki saluran-saluran air dan jalan-jalan setempat, mengadakan perondaan bersama, serta menolong sesama anggota yang ditimpa kesusahan.

Rukun Kampung (RK) dibentuk dengan maksud mengatur kerjasama antara sekalian anggota atau penghuni dari tiap-tiap kampung. Sesuai dengan jumlah kampung yang ada, maka disanapun terdapat empat RK yang meliputi 26 RT Pimpinan RK sebagaimana pimpinan RT dipegang oleh salah seorang anggota RK yang dipilih dalam rapat anggota. Pimpinan RK menjalankan tugas tanpa gaji, di samping kepala kampung atau mandor. Adapun maksud dan tujuan RK itupun tak berbeda dengan RT hanya lingkungan daerah serta keanggotaannya saja yang lebih luas. Kegiatannya adalah membetulkan saluran, memperbaiki jalan-jalan dan lain-lain pekerjaan yang membutuhkan tenaga bersama. Pada awal tahun 1962, sesuai dengan anjuran Pemerintah (Jawatan Koperasi), maka di tiap-tiap RK itu didirikan Koperasi Konsumsi Kampung sebagai hasil pemecahan Koperasi Desa yang pernah ada. Adapun Koperasi Konsumsi Kampung itu dimaksud untuk memperlancar penyaluran barang-barang sandang pangan dari pemerintah kepada rakyat desa. Adapun lain usaha dari R.K. akhir-akhir ini adalah usaha pemberantasan buta huruf yang memang amat berhasil.

Organisasi Rukun Kampung, tidak membataskan aktivitas-aktivitasnya pada masalah yang timbul dalam batas kampung saja, tetapi mempunyai kewajiban-kewajibannya juga dalam hal proyek-proyek

perkembangan masyarakat desa seluruhnya. Hal ini tidak hanya berarti memberi sumbangan tenaga pembangunan, tetapi juga sumbangan-sumbangan berupa uang atau bahan untuk proyek-proyek seperti pembuatan jalan, membangun gedung-gedung pemerintahan dan jawatan-jawatan di desa, membangun langgar atau mesjid, membangun sekolahan dan sebagainya. Beberapa proyek memang berhasil dengan sistem gotong royong ini. Di antaranya yang dikerjakan dengan semangat kerelaan yang paling besar oleh para penduduk desa adalah pembangunan langgar dan mesjid. Sebagian dari biaya yang dibutuhkan untuk membangun mesjid Jagakarsa asal dari sumbangan semua penduduk yang dikumpulkan dengan melalui organisasi RK, dan sebagian dari dana-dana orang kaya di desa. Demikian juga sekolah dasar 6 tahun dari desa, selesai dibangun dalam tahun 1961 dengan usaha gotong royong penduduk, dana-dana penduduk yang kaya ditambah dengan subsidi dari pemerintah.

Bentuk gotong royong yang kuno, telah berkurang di Jagakarsa, sejak masa peralihan dari pertanian persawahan ke pertanian buah-buahan. Kebun-kebun buah-buahan yang kecil tidak membutuhkan tambahan tenaga, sedangkan kebun-kebun yang besar memakai tenaga buruh bayaran.

Sistem paketan, sebenarnya juga merupakan suatu cara bergotong-royong. Sistem ini sebenarnya tidak banyak berbeda dengan sistem pengumpulan uang yang di kota-kota besar dikenal sebagai arisan, di mana setiap anggota dari perkumpulan pada gilirannya berhak menerima uang yang dikumpulkan oleh anggota-anggota lainnya. Perbedaan paketan dengan arisan hanya terletak pada ketentuan jumlah uang yang harus diserahkan oleh setiap anggota dan penetapan giliran anggota mendapat giliran menerima uang paketan itu. Dalam paketan tidak ada ketentuan berapa besar uang yang harus diserahkan oleh setiap anggota pada waktu kawannya menarik giliran, dengan demikian anggota-anggota itu bebas menyerahkan uangnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau giliran anggota perkumpulan arisan menerima uang ditentukan tanggalnya terlebih dahulu maka giliran pada perkumpulan paketan itu hanya dapat diperoleh kalau si anggota mengadakan pesta. Dalam pesta itulah para anggota perkumpulan datang dan menyerahkan uang itu kepada pengurusnya yang kemudian menyerahkan uang itu kepada anggota yang berpesta itu. Karena

kebebasan jumlah uang yang harus diserahkan setiap waktu ada penarikan paketan itu, maka keanggotaan perkumpulan itupun terbuka bagi semua golongan penduduk. Anggota-anggota yang kaya dapat menyerahkan uang dalam jumlah yang besar setiap waktu ada lain anggota yang menarik giliran, sehingga pada waktu gilirannya menarik uang itu tiba, ia akan memperoleh uang dalam jumlah yang besar pula sesuai dengan uang yang pernah diserahkan olehnya kepada perkumpulan. Sebaliknya orang yang kurang mampu akan menerima uang paketan yang tidak besar, karena setiap waktu ia menyerahkan uang yang tidak banyak jumlahnya juga. Dengan demikian jelaslah bahwa perkumpulan paketan itu merupakan alat penabung yang diselenggarakan oleh orang banyak secara bersama. Mereka yang menarik belakangan mendapat dari perkumpulan uang yang pernah ditabung, sedangkan mereka yang menarik dahulu mendapat uang pinjaman yang harus dibayar secara berangsur tanpa bunga. Uang tersebut selain dipakai untuk menutupi ongkos-ongkos peralatan atau pesta yang diadakan, seringkali juga dipergunakan untuk modal berdagang, pembeli tanah atau ternak dan kadang-kadang untuk pembeli bahan-bahan bangunan. Karena giliran menarik uang paketan dari perkumpulan itu hanya dapat diperoleh dengan mengadakan pesta, maka tidak jarang anggota-anggota yang memerlukan uang tersebut terpaksa ''meminjam'' anak saudaranya untuk dikhitankan ataupun dikawinkan, kalau mereka tak mempunyai anak yang telah cukup umur untuk dikhitankan ataupun dikawinkan.

Selain perkumpulan paketan tersebut di atas, di desa itu banyak terdapat ''perkumpulan dagang'', yaitu perkumpulan yang bertujuan untuk membeli kerbau atau lembu yang dagingnya akan dibagi-bagikan kepada para anggota pada hari-hari penting terutama pada hari raya Idul Fitri. Anggota-anggota perkumpulan tersebut wajib menabung setiap waktu dan uang tabungan itu akan dibelikan kerbau atau lembu. Seringkali perkumpulan ini ditumpangkan pada perkumpulan paketan, di mana setiap anggota yang mendapat giliran menarik uang paketan harus menyerahkan sebagian uang tersebut sebagai tabungan pembeli kerbau atau lembu.

Ada juga perkumpulan gotong royong yang khusus meringankan penderitaan sesama anggota yang kematian dan perkumpulan itu biasa nya disebut perkumpulan kematian. Setiap anggota perkumpulan ini

wajib memberikan bantuan material maupun tenaga kepada anggota yang sedang berduka cita. Perkumpulan ini tidak banyak dan rupa-rupa nya tidak begitu mendapat perhatian penduduk, karena setiap orang sudah merasa mempunyai kewajiban untuk menolong tetangga yang ditimpa kematian.

11. SISTEM PENGAIRAN DI DAERAH JEMBRANA *)

PERKUMPULAN PENGAIRAN

Suatu perkumpulan pengairan, atau subak, terdiri dari sejumlah pemilik sawah yang membentuk suatu kompleks persawahan, bertujuan untuk memajukan kepentingan pengairan bersama. Biasanya sawah-sawah yang terdapat di dalam suatu daerah subak mendapat pengairan dari satu sumber/bendungan tertentu. Dengan alasan itu, maka secara hukum subak ditentukan sebagai suatu kelompok sawah-sawah yang diairi melalui saluran yang sama atau melalui saluran cabang dan merupakan suatu perkumpulan pengairan. Ini adalah suatu gambaran yang diterima baik oleh beberapa peneliti. Sebaliknya terdapat beberapa macam pengecualian terhadap definisi itu. Suatu contoh adalah subak di Kaliakan; pengairan sawah-sawah yang terletak di sebelah barat tergantung dari kali Daya (di Negara), sedangkan sisa dari sawah-sawah itu diairi oleh Kaliakan. Kedua bagian yang merupakan satu subak itu, pada hakekatnya tidak mempunyai kepentingan pengairan yang sama, tetapi karena masing-masing mereka adalah terlalu kecil untuk dapat berfungsi secara efektif sendiri-sendiri, maka mereka bersatu dalam satu perkumpulan pengairan .Dengan demikian pengurusnya bisa diberi tugas yang lebih luas dan bersama-sama akan lebih mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih luas dan bisa diorganisir secara lebih memuaskan. Adalah suatu kebiasaan bahwa hanya anggota-anggota . dari satu subak yang mendapatkan keuntungan dari suatu tindakan mengenai biaya. Suatu naskah (monograf) yang tidak diterbitkan mengenai pajak tanah di Jembrana sejak tahun 1932 melukiskan beberapa hal lainnya yang hampir mendekati keadaan di subak Kaliakan. Dalam beberapa hal subak mempunyai kepentingan bersama yang dapat dilihat misalnya dari pemilikan bersama atas bendungan dan saluran air, subak juga memiliki

---

*) Oleh C.J. Grader: The Irrigation System in the Region of Jembrana, dikutip dari buku: *Bali Studies in Life, Thouht and Ritual* (editor: J.L. Swellen Grebel, W. van Hoeve Ltd. The Hague, 1960 hal. 269—274, 278—283.

candi secara bersama. Biasanya pengeluaran atau biaya dibagi menurut jumlah pemilik sawah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan setiap pengalapan membayar jumlah yang sama. Yang dimaksudkan dengan pengalapan ialah suatu kesit sawah-sawah yang diairi oleh air yang masuk dari satu saluran. Suatu kesit terdiri dari satu seri sawah yang berjejeran letaknya dan dimiliki oleh satu orang. Jika di belakang suatu kesit terdapat satu kesit milik orang lain, maka yang terakhir ini tidak akan menerima kelebihan air irigasi dari kesit yang terletak di sebelah hulu, sebagaimana halnya untuk sawah-sawah dalam satu kesit. Sebaliknya dibuat suatu cabang saluran yang khusus dari saluran utama di sepanjang tanggul-tanggul sawah dari kesit sebelah hulu ke kesit yang lain tadi. Pemilik sawah yang letaknya di samping saluran ini tidak bisa mengambil air; kalau ia mengambilnya ia akan dituduh mencuri air oleh subak.

Para Pengurus subak mengatur pemasukan air ke suatu kesit dan memberikan jumlah air secara tepat untuk irigasi yang wajar. Dalam hal ini pemilik sawah memberi bantuan yang penuh karena sadar bahwa hal itu adalah untuk kepentingannya sendiri, sebab jumlah air yang berlebihan akan merusak tanamannya. Oleh karena hal itulah, maka sering kelihatan para petani berada di sawah pada waktu hujan lebat untuk mencegah terlalu banyak air masuk ke dalam kesit. Gotong-royong antar subak atau kelompok subak sering terjadi; seringkali dengan dukungan atau pengawasan pejabat-pejabat pertanian daerah, sedahan agung atau sedahan.

(2). PENGURUS SUBAK

Ketua perkumpulan subak adalah klian subak dan ia diangkat oleh sedahan dan sedahan agung berdasarkan saran-saran dan pandangan para anggota subak. Klian memilih beberapa pembantu, juga dengan memperhatikan keinginan para anggota subak. Mereka terdiri dari pembantu klian dan beberapa juru arah serta pembantu juru arah. Jumlah juru arah tergantung dari luasnya subak, lokasi tanah serta jumlah anggota subak dan luasnya daerah tempat mereka tersebar. Wewenang juru arah disebut arahan. Istilah umum untuk seorang pejabat subak adalah penyarikan subak, artinya, seseorang yang membuat catatan-catatan. Para anggota pengurus subak dibebaskan dari tugas-

tugas subak, tetapi tidak dari pajak perorangan. Seorang bekas pejabat kadang kala dibebaskan dari tugas-tugas kesit, tetapi hanya untuk waktu tertentu dan lamanya tergantung dari taraf bantuan yang telah diberikannya kepada subak.

Organisasi subak kelihatan mencerminkan kehidupan keagamaan; hal itu harus dijamin oleh para pemangku tugas keagamaan. Lazimnya setiap subak diserahi menjaga tempat suci dan pemeliharaan candi adalah tugas seorang pemangku agama dibantu oleh satu orang atau lebih (tergantung daripada besar tugasnya) yang dipilih dari anggota subak. Mereka itu, sebagaimana juga pemimpinnya, dibebaskan daripada tugas-tugas subak. Seperti halnya dengan pejabat-pejabat subak lainnya, kebebasan itu tidak menyangkut kebebasan dalam pembayaran pajak uang atau pajak lainnya.
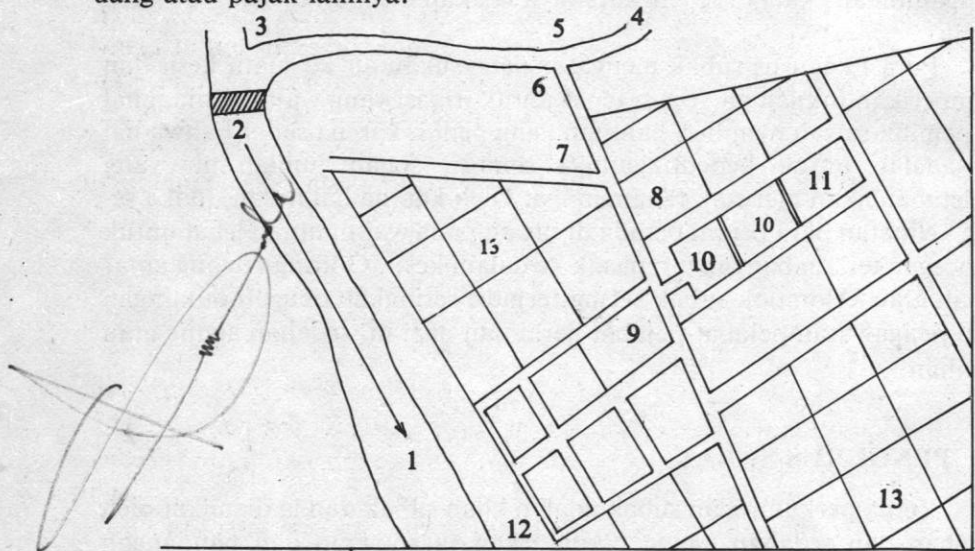
SISTEM PEMBAGIAN AIR DI SUATU SUBAK

1. Sungai
2. Bendungan
3. Subak
4. Saluran
5. Pembagian blok
6. Jalan air masuk tingkat dua
7. Saluran cabang
8. Pembagian blok yang kedua
9. Tempat air masuk ke kesit
10. Saluran antara sawah-sawah di dalam suatu kesit
11. Genangan
12. Tanggung sawah
13. Sebidang sawah

Seorang pemangku, jika ia seorang pemilik sawah, harus juga membayar bagiannya dalam pajak itu. Pemangku itu mengurus pemberian persembahan (*offering*), termasuk pula di dalamnya suatu persembahan khusus dalam rerainan. Dia berhak meminta air suci kepada Tuhan dan memimpin upacara pemberian persembahan itu. Para pemangku dari candi-candi di Tilarnegari, Bakung, Maospait dan Pegubugan menerima sebagian panen dari setiap anggota subak yang ikut dalam upacara-upacara keagamaan sebagai kompensasi atas jasa-jasanya. Kompensasi ini disebut pelaba dan terdiri dari segenggam padi untuk setiap kesit. Suatu bagian spiritual dari panen tahun itu ialah padi yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan agama dan disebut pantun sari n taun. Mula-mula sari n taun itu ditukar dengan uang dan hasilnya digunakan untuk melakukan upacara-upacara pemurnian, jika tanaman dirusak oleh tikus, cacing, serangga atau hama dan juga dipergunakan untuk membayar ongkos pembawaan air suci dan neduh. Pada waktu pemerintah menghapuskan pembayaran kepada para pemangku di tahun 1922, maka sari n taun itu dijadikan pengganti pembayaran itu. Sebagai imbalan untuk jasa-jasa mereka, para pemangku juga mempunyai hak atas uang yang ditempatkan dalam persembahan.

(3). TUGAS-TUGAS SUBAK DAN PAJAK-PAJAK

Kewajiban-kewajiban subak dibagi dalam dua golongan, pekaryan dan penyubaktian; pelaksanaan kewajiban itu tergantung pada apakah karena meliputi kegiatan-kegiatan yang mencemarkan atau karena masalah-masalah keagamaan. Pekaryan adalah tugas-tugas yang berhubungan dengan konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan tanggul-tanggul, terowongan-terowongan air, saluran-saluran air, pembagian kelompok-kelompok distribusi dan jalan-jalan di subak. Kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam *penyubaktian* erat hubungannya dengan kegiatan beribadah di-pelbagai candi di subak yang meliputi pesta-pesta sesajen dan upacara-upacara pemurnian. Seperti halnya *paon,* suatu tungku, yang menjadi ciri penting dalam suatu rumahtangga atau dalam unit fiskal; demikian pula halnya dengan *pengalapan,* suatu saluran pemasukan air ke dalam kesit, yang menjadi ciri penting dalam subak. Kepada setiap kesit, sama seperti juga halnya kepada setiap

subak, harus diberikan jasa-jasa dan pajak perorangan. Sebaliknya, jika suatu kesit dikerjakan oleh lebih dari satu orang (misalnya, oleh si pemilik serta penyakapnya atau oleh beberapa orang ahli warisnya), artinya, sejumlah orang-orang tertentu bekerja pada kesit itu dan jumlah yang sama itu muncul pula pada pekerjaan subak; maka hal ini berarti bahwa konsepsi kesit sebagai suatu kompleks bidang-bidang sawah yang dimiliki satu orang telah dilanggar. Akibatnya, peraturan yang menyatakan, bahwa pemilik suatu kesit dibantu oleh seorang yang digaji atau mendapat imbalan lainnya, tidak bisa diterapkan. Sebaliknya, pajak perorangan berarti pajak atas tanah dan dibayar per kesit tanpa menghiraukan berapa luasnya atau berapa orang yang bekerja di dalamnya.

Orang tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan subak untuk lebih dari satu kesit; mereka yang melanggar peraturan ini didenda sebesar 2500 duit. Seseorang yang memiliki dua kesit di dalam daerah wewenang ''Crier'', harus melakukan pekerjaan subak hanya untuk satu kesit. Untuk kesit lainnya ia harus membayar sejumlah uang untuk pembayaran air irigasi; jumlah itu relatif kecil sebagai ganti rugi dan dinamakan ngampel. Jika dua kesit itu berada di dua daerah yang mempunyai batas hukum yang berlainan, maka berlakulah penagihan atas ganti rugi yang lebih besar yang dinamakan *penumbas toya*. Ganti rugi yang lebih besar akan diminta jika seseorang mempunyai lebih dari dua kesit; untuk kesit ketiga dan berikutnya penumbas toya selalu harus dibayar. Pembayaran itu mempunyai batas maksimum, baik untuk penggantian air dengan harga yang murah, maupun dengan harga yang mahal: pembayaran untuk ngampel ditentukan oleh jumlah uang yang sama dengan separuh pajak tanah dan untuk penumbas toya yaitu sejumlah 20 ''gulden''. Jika seseorang mengambil seorang penyakat (yang mengerjakan tanah orang itu atas dasar bagi hasil) pada pertengahan musim, hal ini disebut ''menghindari kewajiban''. Dendanya adalah 5.000 duit, ditambah dengan curahan tenaga untuk pekerjaan-pekerjaan subak yang tidak dilakukan. Tergantung dari persetujuan klian subak atau dari ''crier'', seorang pengganti bisa diangkat untuk pekerjaan subak, sedangkan pemilik kesit tetap bertanggung jawab. Khususnya pejabat-pejabat dan pedandas memanfaatkan kemungkinan ini. Pemilik sawah juga bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang dilakukan

oleh penyakap; sebaliknya penyakap yang telah melakukan tugas-tugas subak tidak bisa lagi diperhatikan. Tugas-tugas subak tidak bisa dipindah-pindahkan kepada seorang yang belum dewasa.

Menurut pendapat umum, pemerintah Belanda juga mempunyai hak untuk menagih jasa-jasa dari anggota subak. Dewasa ini prinsip itu tidak lagi dipakai, kecuali dalam perayaan hari nasional dan diwaktu kunjungan-kunjungan Gubernur Jenderal. Dengan bekerjasama dengan desa, subak membantu menempatkan hiasan-hiasan, mendirikan bangunan-bangunan untuk pesta dan menyapu jalan-jalan. Anggota-anggota subak harus juga hadir untuk membentuk suatu barisan kehormatan dan juga bisa diminta memberi pajak dalam bentuk barang-barang dan uang yang digunakan untuk biaya perjalanan bagi orang-orang yang dalam menjalankan tugas harus menginap di luar. Kewajiban-kewajiban terhadap para pejabat ini seluruhnya dinamakan karya pengadalem.

(4). PERATURAN-PERATURAN SUBAK

Peraturan-peraturan subak dibagi dalam *sima* dan *awig-awig,* yang tergantung dari apakah ia dianggap sebagai lahir dari pemerintahan feodal yang lama atau direncanakan dalam subak sendiri. *Awig-awig* terdiri dari hukum adat yang diturunkan secara lisan dari mulut ke mulut dan hanya secara sporadis dicatat di bawah pengaruh pejabat-pejabat pertanian dan kepala-kepala kampung setempat. Sebaliknya salinan dari *sima* dipegang oleh pejabat-pejabat pertanian daerah atau pejabat di bawahnya dan sekarang juga oleh klian subak yang bisa membaca dan menulis. Yang dijalankan sebagai *sima* adalah suatu peraturan yang dibuat oleh Sultan Buleleng, yang kata pembukaannya adalah sebagai berikut:

Peraturan Gusti Gede Ngurah, yang berkedudukan dan memerintah di Buleleng, undang-undang ini berlaku untuk semua penduduk sebelah timur Ponjok Batu sejauh Petemon dan daerah pegunungan sekelilingnya, dan juga berlaku untuk orang-orang Brahman, Ksatria dan Sudra, untuk semua yang harus membayar pajak atas tanah-tanah yang mendapat air serta membayar pajak

atas kebun-kebun kelapa dan ladang-ladang sesuai dengan penagihan atas pajak oleh pejabat-pejabat pertanian di daerah tersebut di atas.

Sekarang naskah itu beredar di Jembrana, didatangkan dari Buleleng dan memberi kesan seolah-olah disusun dari berbagai sumber seperti ternyata dari ulangan-ulangan yang terdapat dalam pembahasan pokok-pokok persoalan yang sama. Dalam salah satu fasal pada akhirnya terdapat tanggal yang meragukan ''Anggara-klion, Waratambir, i Caka 1805'' (jadi tahun 1823 dalam tahun Kristen). Perundang-undangan ini menentukan peraturan dari pajak, penjualan dan penggadaian, penggembalaan ternak dan mengambil ternak yang kesasar. Mencuri air, bibit atau padi serta merusak tumbuh-tumbuhan dan pengairan, akan dihukum dengan denda. Hal tersebut menyebutkan pula tindakan-tindakan yang akan diambil jika orang tidak hati-hati membakar ladangnya dan menimbulkan kerusakan pada pihak ketiga dan cara-cara yang akan dipakai dalam mengangkat pejabat-pejabat subak serta pengaturan irigasi setempat.

Suatu hal yang penting adalah, bahwa *sima* mengadakan sanksi atas pelanggaran terhadap *awig-awig*. Peraturan terakhir ini yang lahir di dalam subak itu sendiri, berkaitan dengan jasa-jasa subak dan uang iuran. Di dalamnya terdaftar hukuman-hukuman bagi mereka yang tidak mengindahkan pandangan yang umum dianut terhadap kegiatan-kegiatan pertanian secara periodik, yang pemeliharaannya mempunyai arti yang penting untuk rotasi irigasi yang wajar dan pemberantasan penyakit-penyakit tanaman serta hama secara efektif. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan subak dilaporkan kepada klian subak yang mempertimbangkannya dan menentukan hukuman-hukuman pada pertemuan subak berikutnya. Pada umumnya, tindakan-tindakan disipliner oleh subak kelihatannya cukup efisien, dan jarang terjadi campur tangan dari pejabat-pejabat pertanian. Dalam keadaan yang ekstrim suatu pertikaian dapat dibawa ke depan pengadilan *Kerta*.

Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dan denda-denda yang diminta adalah sebagai berikut: Datang terlambat ke pekerjaan proyek dihukum denda dengan 50 duit; jika seorang tanpa alasan dan tanpa pamitan sama sekali tidak muncul, maka ia didenda secara maksimal sebanyak 2.500 duit. Jika seorang datang ke pekerjaan tanpa

membawa alat-alat yang harus dibawanya, ia didenda sebanyak 250 duit; jika alat-alat yang dibawanya tidak cukup atau mutunya tidak memuaskan, maka dendanya adalah 150 duit. Denda untuk mencuri air adalah 2.500 duit. Jika waktu yang ditetapkan untuk membayar denda dilampaui, maka dendanya menjadi dua kali lipat, dan jika seorang menghindarkan pembayaran denda yang harus ditagih darinya, maka denda khusus atau *sawen* dipasang di sawahnya. Di Jembrana sawen hanya menunjukkan, bahwa catatan resmi telah diberikan untuk pembayaran dalam 10 hari; dan tidak sebagai indikasi, bahwa pemilik sawah tidak berhak untuk bekerja atau menerima air irigasi sebelum hutangnya dilunasi, seperti halnya di tempat lain. Sawen tidak ditarik kembali sebelum denda tambahan sebanyak 250 duit dibayar. Jika penempatan sawen masih belum berhasil, maka diambil jalan lain, yaitu dengan prosedure *gade galur,* dalam mana hak untuk bekerja di sawah yang bersangkutan dijual untuk satu panen kepada pihak ketiga sebagai pembayaran denda yang telah ditetapkan. Sawah itu hanya didapatkan kembali setelah panen satu tahun penuh; jika pada waktu itu masih belum dilunasi, maka periode baru berikutnya selama satu tahun dikerjakan secara otomatis. Gade galur juga sering diterapkan dalam hal penunggakan pajak tanah.

Penolakan secara sistematis terhadap perintah-perintah yang dikeluarkan oleh pengurus subak, mendapat hukuman berat. Denda minimum atas pelanggaran ini adalah 20 ''gulden'' dan dibayar sebelum waktu panen. Jika seseorang membangkang dan berkeras kepala, maka tanamannya bisa disita, dan dia bisa dikeluarkan dari perkumpulan subak serta dimasukkan ke dalam daftar hitam semua subak. Sebaliknya, sepanjang ingatan orang, tindakan yang begitu drastis belum pernah diambil.

Adanya suatu kebiasaan yang menarik perhatian ialah bahwa jika seseorang dituduh melanggar peraturan (umpamanya mencuri air) dan ternyata tidak cukup buktinya, maka tertuduh diharuskan mengucapkan sumpah pemurnian di dalam candi subak. Sumpah ini juga diucapkan jika kedapatan bahwa pelanggaran dilakukan, tetapi tidak diketahui siapa yang bersalah. Para pemilik sawah di sekitar peristiwa itu diberi waktu tertentu untuk menemukan orang yang salah dan jika masih tetap tidak diketahui orangnya, maka mereka semua juga diharuskan untuk bersumpah.

(5) DANA-DANA SUBAK

Dana subak dikelola oleh klian subak, di mana pejabat pertanian yang bersangkutan meneliti tata usahanya. Dana yang masuk dalam kas subak terdiri dari imbalan uang atas pengairan, uang pangkal dan iuran-iuran atau pajak yang ditarik secara insidentil.

Uang pangkal dibayar pada waktu pendirian suatu subak baru atau pada perluasan daerah subak dengan jalan mengolah tanah kering menjadi tanah sawah dan berjumlah maksimal 10 ringgit setiap hektar. Dana milik subak dipergunakan untuk mendirikan dan memelihara pekerjaan irigasi dan untuk tujuan-tujuan agama. Sekali setahun, sebagaimana kebiasaan umum, uang yang diterima dari denda dan uang penggantian air juga dibagi antara para anggota.

Jumlah yang cukup besar terkumpul dari iuran atau pajak. Risalah mengenai pajak tanah tersebut di atas menyebut persoalan dari Yeh Embang, yang selama periode 1921 — 1928 dan 1930 — 1931 mengeluarkan uang masing-masing sejumlah 28.335 gulden dan 20.450 gulden, secara tunai untuk membuat terowongan yang dikerjakan oleh tidak kurang dari 134 orang tanpa memperhitungkan biaya makan dan material yang menurut kebiasaan harus diberikan kepada penggali-penggali terowongan selama bekerja. Biaya pembuatan terowongan itu berjumlah seluruhnya 60.000 gulden; daerah subaknya adalah 230 ha atau sama dengan 575 *acre*.

(6). RAPAT-RAPAT SUBAK

Rapat-rapat subak diadakan secara teratur pada suatu hari, diambil dari bulan Jawa atau Bali. Kecuali itu diadakan pula rapat-rapat lain, jika dianggap perlu. Rapat-rapat lain itu diadakan umpamanya di waktu mengerjakan proyek, bila para pekerja berkumpul selesainya pekerjaan sehari untuk menerima instruksi-instruksi selanjutnya dan untuk mengambil keputusan-keputusan. Rapat-rapat yang periodik itu diadakan di pura *ulun charik* atau di salah satu tempat suci subak. Dalam rapat tersebut dibicarakan organisasi tugas-tugas subak serta proyek-proyek yang akan dikerjakan. Peraturan-peraturan subak kadangkala harus dirobah atau diganti dengan peraturan-peraturan yang baru. Juga diumumkan tanggal-tanggal untuk bertanam dan waktu untuk mengadakan

upacara yang akan datang. Mereka yang melanggar peraturan-peraturan dihukum serta diberitahukan pula perintah-perintah yang berwajib. Rapat-rapat bulanan itu dihadiri secara khusus oleh pejabat-pejabat pertanian daerah atau pejabat-pejabat lainnya.

PERATURAN-PERATURAN MENGENAI PENGELOLAAN SAWAH

Jika waktunya sudah datang untuk memulai menanam bibit, maka salah seorang dari anggota subak diangkat menjadi pemimpin langkah *pengewiwit,* yaitu seorang yang memulai pekerjaan itu. Subak-subak yang di bawah pengawasan klian yang sama atau yang terletak berdekatan sering mengangkat seorang pengewiwit yang sama. Pengewiwit berhak mendapat bantuan dari para anggota subak. Sebaliknya hanya satu kesit yang ditanami dan sebelum pekerjaan bertanam di kesit tersebut selesai dan setelah dipenuhi semua peraturan-peraturan upacara, tidak dibenarkan menanami kesit-kesit lain, pun tidak yang dimiliki oleh pengewiwit. Penanaman kembali bibit-bibit itu dilakukan dengan upacara yang biayanya didukung oleh para anggota subak.

Esok harinya, yaitu pada hari *Nyepi,* tidak dibenarkan bekerja di sawah. Pelanggaran terhadap larangan ini dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya 2.500 duit. Selanjutnya diberi waktu selama 20 hari kepada setiap anggota subak untuk menyelesaikan penanamannya. Bertanam sebelum atau sesudah periode yang resmi itu dapat didenda dengan 5000 duit serta penghapusan hak untuk kemungkinan pembebasan pajak tanah dikala terdapat kerusakan tanaman. Setiap orang yang membantu pelanggar peraturan ini, dihukum dengan denda sebesar 2.500 duit. Penentuan periode untuk bertanam adalah penting mengingat pengawasan air yang wajar, pembagian pekerjaan yang efisien dan untuk mengambil tindakan-tindakan sehubungan dengan pemberantasan penyakit tumbuh-tumbuhan dan hama. Pengangkatan seorang pengewiwit adalah juga bermanfaat ditinjau dari sudut disiplin dan mengumumkan tanggal mulai bertanam, sedangkan asosiasi mistik tradisional, kepercayaan-kepercayaan agama, yang ditunjukkan oleh upacara-upacara persembahan dan hari Nyepi, juga penting artinya.

Jika sawah tidak dikerjakan dengan alasan yang tidak meyakinkan, maka akan didenda sebanyak 2.500 duit, sedangkan pajak tanah harus dibayar penuh. Jika yang bersalah adalah seorang petani penyakap, dia harus juga membayar pemilik tanah sebagai ganti rugi, karena kehilangan penghasilan. Subak tidak ingin melihat sawah-sawah yang tidak ditanami. Hal itu tidak hanya membuat dia menjadi ekonomis lemah, tetapi juga merongrong disiplin, dan sawah-sawah yang penuh dengan rumput liar adalah tempat subur untuk segala macam hama. Tidak terdapat kewajiban-kewajiban agama atau pelarangan dengan adanya pengaruh-pengaruh yang menghambat pertumbuhan persoalan-persoalan pertanian. Upacara persembahan dan upacara candi tidak menuntut waktu yang berlebihan dan sering diminta dan dilakukan oleh kelompok-kelompok orang secara bergiliran. Orang menemukan cara untuk menyesuaikan biaya untuk hal-hal yang bertujuan keagamaan dengan keadaan dan waktu dalam sistem perayaan pesta-pesta menurut beberapa tingkat: nista, madia dan utama, artinya yang miskin, yang sedang dan yang baik.

BAHAN UNTUK DISKUSI BAB IV

1. Kerangka Pemikiran)*

(1.1) Pengertian ''Kelompok'', jika diperinci menurut ukuran langsung tidak langsungnya RELASI SOSIAL (''Social Relationship'') antara anggota-anggota ''Kelompok'' dapat dipertegas atas:

*(1.11) **GRUP:** ada relasi sosial yang bersifat langsung antara anggota-anggotanya dalam soal-soal yang pokok/penting (umumnya kelompok kecil; menurut Berelson **) maksimal dapat berjumlah 20 orang).*

*(1.12) **KOLEKTIFITAS:** relasi sosial bersifat tidak langsung dalam soal-soal yang pokok/penting; tetapi melalui orang-orang perantara atau alat-alat penghubung bukan orang (umumnya kelompok besar).*

(1.13) ***KATEGORI SOSIAL:*** *tidak ada atau sedikit sekali relasi sosial, misalnya pemuda dari golongan umur 18—25 tahun dalam hal ini istilah ''anggota'' kurang kena!*

(1.2) Seperti dilihat, dalam GRUP sosial pengertian-pengertian RELASI SOSIAL dan HUBUNGAN SOSIAL amat penting. Menelaah hubungan antara orang-orang, antara orang-orang dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok, kita memperhatikan:

(1.21) Hubungan menurut STATUS para pelakunya.

(1.22) Hubungan menurut PERANAN mereka.

(1.23) PROSES SOSIAL (yang dinyatakan dalam hubungan tersebut).

Catatan:

*a. **Status** menunjuk pada kedudukan dalam arti kata sebagai tempat/**posisi** seseorang dalam suatu kelompok sosial dihubungkan dengan orang-orang lainnya dalam kelompok itu; demikian pula berlaku bagi posisi kelompok dalam kelompok lebih besar!*

**) J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers (1959): ''Modern Sosiologie'', een sijstematiek Unleiding, Uitgeverij Het Spectrum Utrecht/Atwerpen.*

***) Bernard Berelson & Gary A. Steiner (1964): ''Human Behavior'', Shoterr Edition: Harcourt, Brase & World, 1964.*

b. ***Posisi sosial*** *menggambarkan titik-titik pusat/pertemuan relasi dan hubungan sosial yang berpusat/bertemu pada diri pelaku tertentu yang berinteraksi atau berkomunikasi.*

c. ***Peranan sosial*** *menunjuk kepada keseluruhan norma dan banyak harapan yang ditujukan orang banyak kepada orang-orang tertentu dalam posisi tertentu, apa yang seharusnya dan apa yang akan dia lakukan dalam posisi tertentu itu oleh pola kebudayaan masyarakatnya).*

2. *Pertanyaan*

(2.1) Sebutkan grup-grup sosial yang ada pada bacaan 1 dan bacaan 2.

(2.2) Perincian grup-grup sosial tersebut dengan memperhatikan hubungan sosial para pelakunya. Dalam hal ini berarti memperhatikan ***status, peranan*** *dan* ***proses sosial*** *yang menyertainya.*

(2.3) Bandingkan grup-grup sosial pada bacaan 1 dan bacaan 2! Adakah persamaan dan perbedaan?
Jelaskan
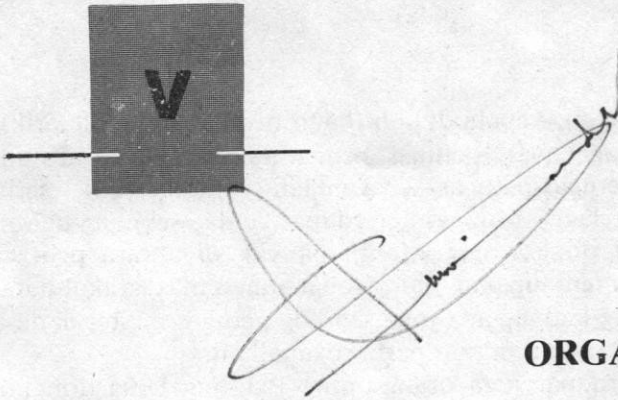
ORGANISASI SOSIAL

12. INVENTARISASI GOLONGAN-GOLONGAN, KELOMPOK-KELOMPOK DAN ORANG-ORANG TERKEMUKA*)

Teknik inventarisasi akan diuraikan tersendiri, tetapi dengan mendahului uraian itu, kini akan disajikan beberapa petunjuk untuk inventarisasi golongan-golongan dan kelompok-kelompok dalam desa, beserta petugas-petugas dan orang-orang terkemuka lainnya yang terdapat di dalam golongan-golongan dan kelompok-kelompok itu.

A. GOLONGAN-GOLONGAN TERPENTING

Golongan-golongan terpenting yang dijumpai dalam desa adalah golongan-golongan *fungsional,* golongan-golongan menurut *umur* dan *kelamin* serta golongan-golongan menurut *keturunan*.

Di antara golongan-golongan fungsional terdapatlah pertama-tama:

1. Pemerintahan

Pemerintahan di desa dijalankan oleh Pamong Desa, ialah Kepala

---

*) Oleh Dr. P. Janssen, dikutip dari buku: *Teknik-Teknik Pengembangan Masyarakat,* Institut Pembangunan Masyarakat Malang, 1970, halaman 26—37.

Desa (lurah atau petinggi), kepala dukuh (kami tuwa), panitera (carik), petugas kepolisian (jagabaya), petugas pengairan (kuwawa), utusan-utusan (kebayan) petugas-petugas keagamaan (modin, dll). serta petugas-petugas lain lagi. Mungkin terdapat pula sebuah dewan penasehat resmi atau tidak resmi. Makin banyak di antara petugas-petugas ini diyakinkan tentang manfaat pembangunan masyarakat desa, makin baiklah. Kadang-kadang ada juga seorang petugas militer di desa yang berpangkat Bintara dan inipun perlu dikenalkan.

Tidak jarang terdapat juga orang-orang Pamong Desa dongkol dan pegawai-pegawai Pamong Praja atau anggota-anggota Tentara pensiunan di desa yang tak dapat diabaikan pula pengaruhnya.

Kadang-kadang desa memiliki sebuah pasar, sebuah lumbung, sebuah koperasi dan dalam hal demikian perlu dipertimbangkan pula apakah petugas-petugas pada badan-badan desa itu perlu dikenalkan juga.

2. Organisasi-organisasi Keamanan

Dekat pada golongan pemerintahan adalah organisasi-organisasi keamanan seperti Hansip atau Hanra dan mungkin lain-lain lagi. Pemimpin-pemimpin organisasi demikian hendaknya janganlah diabaikan.

3. Para Penghantar Agama

Di samping para petugas keamanan dalam Pamong Desa terdapatlah selalu pula penghantar-penghantar Agama-Agama, lain-lain sebagai alim-ulama, kyai, pendeta, guru agama dan lain-lain.

Penghantar-penghantar agama ini sering mempunyai pengaruh besar di antara murid-murid mereka dan karena itu memerlukan perhatian khusus.

4. Pegawai-Pegawai lain

Selain Pamong Desa terdapatlah tidak jarang pula pegawai-

pegawai-pegawai dari pelbagai jawatan di dalam desa. Dimaksudkan misalnya pegawai-pegawai pertanian, kehewanan, koperasi, kesehatan. Pekerjaan pegawai-pegawai ini mendekatkan mereka pada banyak orang-orang desa dan hal ini berlaku khusus misalnya untuk Mantri Poliklinik, Bidan dan lain-lain. Biasanya pegawai-pegawai ini mempunyai juga suatu pendirian yang agak modern dan bebas dari ikatan-ikatan dan permusuhan-permusuhan intern di dalam desa.

5. Para Guru

Golongan ini bergaul dengan banyak orang tua murid. Mereka tidak jarang berjasa pula dalam bidang pendidikan kepada orang-orang dewasa. Mereka adalah kaum terpelajar di dalam desa dan nasehat mereka sering diminta informil untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam bidang tatausaha pembacaan dan penulisan surat-surat, penafsiran berita-berita, dan pengumuman-pengumuman, pemberian nasehat dalam pelbagai kesulitan. Maka dari itu bantuan mereka berharga untuk pembangunan masyarakat.

6. Para Pengusaha

Biasanya terdapat pengusaha-pengusaha dalam bidang perdagangan, perindustrian dan pengangkutan. Kadang-kadang ada bidang lain lagi, seperti perahan susu, perusahaan-perusahaan telur ayam dan itik dan lain-lain.

Di antara pengusaha-pengusaha ini ada banyak lagi yang mempunyai macam-macam perusahaan-perusahaan. Demikianlah di antara para pedagang terdapatlah pedagang-pedagang pasar, pedagang-pedagang toko dan warung. Ada pedagang-pedagang hasil-hasil bumi biasa seperti padi, beras dan palawija. Ada pula yang berspesialisasi dalam hasil-hasil bumi khusus seperti sayur-mayur, tembakau, bawang, lombok, buah-buahan, bunga-bunga dan lain-lain.

Para pengusaha perindustrian dapat pula digolongkan menurut hasil-hasil yang diproduksikan, entah bata dan genting, pisau, garpu dan sendok, tempayan, barang pecah belah, penyamakan kulit, pertenunan,

pembuatan payung, alat-alat mainan, alat-alat dapur, dan lain-lain.

Para pengusaha pengangkutan kadang-kadang mengusahakan taksi, demo, oplet, prahoto, cikar, dokar, dan lain-lain.

Baiklah dari semua sub-golongan-sub-golongan ini dikenalkan salah seorang atau beberapa orang yang dapat dipandang sebagai agak terkemuka dan berpengaruh dalam kalangan-kalangan teman-teman seusahanya. Suatu kategori tersendiri adalah orang-orang yang menjalankan salah satu pertukangan sebagai pengusaha yang berdiri sendiri, misalnya tukang kayu, tukang besi, tukang sepatu atau selop, tukang arloji, pemborong bangunan, dan sebagainya. Eksponen-eksponen dari golongan-golongan demikian hendaknya jangan ketinggalan.

Kadang-kadang terdapat perusahaan-perusahaan besar di dalam desa. Lingkungan aktivitasnya jauh melampaui batas-batas dan daerah di sekitarnya, misalnya pabrik gula, pemintalan, pertenunan, pabrik-pabrik keramik, pabrik semen, pabrik kertas dan sebagainya.

Adalah perlu untuk berkenalan pula dengan pimpinan perusahaan-perusahaan besar demikian, karena mereka mempunyai pandangan-pandangan modern dan dapat memberikan banyak bantuan material, teknis dan finansial.

7. Penghuni-penghuni dari luar

Dengan golongan ini dimaksudkan orang-orang yang mempunyai sebuah rumah atau tempat peristirahatan di dalam desa, tetapi yang bekerja di luar suasana desa (misalnya di dalam kota atau pada sebuah perusahaan besar) dan yang mencari pergalan dan kesenangan mereka di luar suasana desa pula. Desa bagi mereka sering hanya sebuah tempat untuk mendirikan rumah dan lain tidak.

Dengan orang-orang demikian perlu diadakan perkenalan juga, pertama-tama untuk mengubah sikap mereka yang asosial dan acuh tak acuh, kedua untuk menggunakan pandangan-pandangan mereka yang modern, serta bantuan yang mereka dapat memberikan dalam bidang teknis, material dan finansial.

8. Para Petani

Kini kita sampai pada golongan besar dari para petani yang dapat

pertama-tama dibedakan dalam golongan-golongan petani besar, menengah dan kecil. Golongan petani kecil dapat dibedakan lebih lanjut di antara mereka yang mengerjakan tanah sendiri atau menyewa dan memaro tanah-tanah orang lain.

Di samping itu dapatlah dibedakan lebih lanjut para petani yang berspesialisasi pada barang khusus untuk pasaran, seperti sayur-mayur, kentang, bunga, tembakau, bawang, lombok dan lain-lain serta hasil-hasil perkebunan sebagai kopi, karet, teh, panili, coklat dan belakangan ini pula cengkeh dan lain-lain lagi.

Adalah baik pula untuk membedakan mereka yang sudah memakai metode-metode modernisasi dan intensifikasi (memakai pupuk, obat-obatan, bibit unggul, penggarapan intensif, menanam dalam larikan dan sebagainya). Bantuan orang-orang demikian amat diperlukan.

Peternakan biasanya dirangkap dengan pertanian, tetapi bilamana ada orang-orang yang amat mementingkan peternakan, misalnya peternakan sapi dan kerbau, maka ada baiknya mereka dipandang sebagai kategori tersendiri dan dalam hal ini tertariklah perhatian siapa di antara mereka memelihara hewan kepunyaan sendiri dan/atau hewan kepunyaan orang lain.

Dari semua kategori tersebut di atas hendaknya diadakan perkenalan dengan seorang atau beberapa orang yang dipandang paling banyak bergaul dan dihargai dalam kalangannya masing-masing.

9. Kaum Buruh

Golongan ini biasanya adalah terbesar di desa, terutama bilamana kita ikut sertakan kaum buruh tani dengan golongan ini. Kita dapat membedakan kaum buruh, pertama menurut bidang perusahaan di mana mereka bekerja. Kemudian kita dapat membedakan di antara buruh berkeahlian, berspesialisasi atau buruh kasar.

Yang terakhir dapat dibedakan lagi di antara mereka yang mempunyai pekerjaan tetap dan mereka yang tidak bekerja pada satu tempat, tetapi di mana saja ada kesempatan bekerja bagi mereka.
Hendaknya dengan semua eksponen dari semua kategori buruh itu diadakan perkenalan, dengan tidak mengecualikan mereka yang

menganggur sementara atau agak lama, karena tidak berhasil memperoleh suatu pekerjaan.

Selanjutnya terdapatlah di dalam desa pelbagai golongan menurut *umur* dan *kelamin;* kadang-kadang pula menurut *keturunan*.

10. Para Sesepuh

Dengan para sesepuh dimaksudkan orang-orang tua yang tidak bekerja lagi. Di antara mereka terdapatlah yang disegani karena pengetahuan mereka tentang adat-istiadat dan riwayat desa, karena sikap dan kelakuan mereka yang arif bijaksana, karena pengetahuan mereka tentang ilmu-ilmu gaib, dan karena alasan-alasan lain lagi. Di antara kaum wanita yang berusia tinggi terdapat pula orang-orang yang banyak dimintai nasehat-nasehat, misalnya dalam hal pengobatan tradisional dengan jamu-jamu, pijat, dan lain-lain.

Maka dari itu ada baiknya diadakan pula perkenalan dengan beberapa di antara orang-orang tua, baik pria maupun wanita.

11. Kaum Wanita

Di dalam golongan-golongan yang tersebut di atas sudah dengan sendirinya terdapatlah bukan sedikit kaum wanita, sebagai misalnya di antara para pedagang di pasar dan pemilik-pemilik toko dan warung-warung.

Tetapi kaum wanita memerlukan juga perhatian sebagai golongan tersendiri, karena pengaruh mereka besar sekali, walaupun tidak selalu kelihatan dengan jelas. Maka dari itu, bilamana mengadakan perkenalan dengan eksponen dari golongan manapun, hendaknya janganlah diabaikan pengaruh isterinya terhadap orang itu. Jadi hendaknya diusahakan pula antar hubungan baik dengan isteri-isteri orang-orang tersebut.

Orang-orang desa dan terutama orang-orang tani, sangat memerlukan bantuan isteri-isteri mereka, bukan saja dalam urusan rumahtangga, tetapi juga dalam pekerjaan sehari-hari dan pencarian rezeki. Di antara suami dan isteri terdapat suatu pembagian pekerjaan-

pekerjaan, yang satu memperlengkap pekerjaan yang lain, dan sebaliknya. Seorang isteri adalah tangan kanan suaminya, malahan kadang-kadang otaknya.

Maka dari itu perlulah diadakan perkenalan juga dengan kaum ibu yang kiranya menaruh minat atas pembangunan masyarakat desa dan yang bersedia membantunya secara langsung maupun tidak langsung, ialah dengan mendorong suaminya.

12. Golongan Pemuda/Pemudi

Orang muda mempunyai cita-cita tinggi dan gaya hidup yang masih kuat. Mereka harus diberikan suatu tujuan mulia yang dapat mengisi otak dan hati mereka dan mereka harus diberikan suatu lapangan untuk menyalurkan gaya hidup mereka berupa aktivitas-aktivitas konstruktif.

Bila tidak demikian, maka mereka akan melakukan pelbagai perbuatan nakal, atau mereka akan merasa jemu dan mengalir ke kota-kota untuk mengadu keuntungan. Pembangunan masyarakat dapat merubah keadaan demikian, ialah dengan memberikan kepada kaum muda suatu perspektif yang riil serta suatu lapangan luas untuk belajar, bekerja dan berjasa.

Hendaknya oleh para pemimpin sosial diberikan perhatian khusus kepada kaum muda, baik pria maupun wanita, karena entusiasma dan dinamika mereka sangat dibutuhkan.

13. Golongan-golongan Keturunan

Kadang-kadang terdapatlah di dalam desa orang-orang dari berbagai suku atau keturunan yang harus diintegrasikan dalam pembangunan masyarakat. Tiap negara merdeka terdiri atas berbagai-bagai suku dan orang-orang berbagai-bagai keturunan. Semua unsur itu harus diintegrasikan demi keselamatan dan kekuatan negara ke luar dan ke dalam.

Suatu cara mengajak semua golongan-golongan demikian untuk ikut serta memikirkan masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan

bersama, serta cara-cara untuk mengatasinya dengan kerjasama atas inisiatif sendiri.

Kadang-kadang terdapatlah golongan-golongan yang sedikit banyak mempunyai kedudukan istimewa, karena mereka disegani sebagai keturunan para cikal-bakal dan para gogol yang asli. Golongan-golongan tradisional demikian harus diajak pula untuk bersama-sama menghadapi tantangan jaman modern.

B. KELOMPOK-KELOMPOK

Kini sampailah kita pada inventarisasi kelompok-kelompok yang terdapat di dalam desa. Kebanyakan di antaranya mempunyai tujuan-tujuan sosial, tetapi ada juga yang bertujuan ekonomis dan politik.

Kelompok-kelompok merupakan satuan-satuan kolektif yang lebih padat daripada golongan-golongan. Maka dari itu sering akan ada kecenderungan pada kelompok-kelompok untuk maju dalam usaha pembangunan masyarakat sebagai satuan-satuan khusus.

Kadang-kadang sikap ini tidak menimbulkan keberatan, misalnya bilamana suatu perkumpulan kesenian atau olahraga memberikan bantuannya untuk memeriahkan suatu pertemuan atau membantu suatu usaha pengumpulan dana dengan jalan mengadakan pertandingan atau pertunjukan.

Juga tidak ada keberatan, bilamana perkumpulan-perkumpulan gotong royong lokal, sebagai rukun kampung, rukun tetangga, dan lain-lain memobilisasikan para anggotanya untuk melakukan suatu pekerjaan.

Tetapi bahaya-bahaya timbul, bilamana kelompok-kelompok politik memajukan diri dalam usaha pembangunan masyarakat, sebagai kesatuan-kesatuan khusus dengan dukungan serikat-serikat buruh dan tani yang berafiliasi dengan mereka.

Adapun sebabnya hal ini dapat membahayakan usaha pembangunan masyarakat, ialah karena di antara kelompok-kelompok demikian selalu ada sedikit banyak persaingan, dan bahkan ketegangan atau permusuhan. Antagonisme-antagonisme demikian harus dienyahkan sejauh mungkin dari pengembangan masyarakat pedesaan. Itulah sebabnya tadi didahulukan dengan sengaja golongan-golongan

yang bersifat selalu lebih cair dan kurang eksklusif, sedangkan golongan fungsional selalu bersifat lebih *"zakelijk"*, yaitu lebih mementingkan soal-soal konkrit mengenai pekerjaan sehari-hari, daripada doktrin-doktrin (ajaran-ajaran politik) dan semboyan-semboyan yang sangat terikat pada perasaan-perasaan dan prasangka-prasangka. Satu dan lain tentu tidak berarti bahwa kelompok-kelompok dapat dianggap sepi. Tidak satupun di antaranya diabaikan atau dianaktirikan.

Setelah uraian umum ini, marilah kini kita melanjutkan inventarisasi kita dengan *perkumpulan-perkumpulan dengan tujuan-tujuan sosial.*

1. Perkumpulan-perkumpulan Kesenian

Di sini dimaksudkan perkumpulan-perkumpulan penggemar pelbagai kesenian, seperti misalnya seni-suara, tari-tarian, sandiwara, pedalangan dan sebagainya.

Adalah perlu sekali untuk menarik perkumpulan-perkumpulan demikian dalam usaha pembangunan masyarakat, karena mereka dapat membaktikan kesenian mereka, bukan saja untuk memeriahkan suasana pesta-pesta pertemuan dan perayaan-perayaan, melainkan pula untuk memberi penerangan dan mengadakan propaganda melalui kreasi kesenian mereka masing-masing.

2. Perkumpulan-perkumpulan Olahraga

Olahraga biasanya digemari oleh orang-orang muda dan inilah suatu bidang yang tepat sekali bagi para pemimpin sosial untuk berkenalan dengan mereka dan meyakinkan mereka tentang keharusan pembangunan masyarakat desa untuk memajukan segenap Nusa dan Bangsa dan bagaimana sangat dibutuhkan tenaga dan pikiran mereka untuk menggerakkan dan mensukseskan pengembangan masyarakat pedesaan itu.

3. Perkumpulan Gotong-royong

Di desa terdapat berbagai-bagai perkumpulan gotong-royong,

misalnya dalam hal kematian, perkawinan, kelahiran dan lain-lain, ataupun dalam hal pemeliharaan jalan-jalan, kampung-kampung dan saluran-saluran irigasi, pembuatan rumah dan lain-lain. Di antaranya ada juga yang bersifat lokal, sebagai rukun-rukun kampung dan rukun-rukun tetangga.

Eksponen-eksponen perkumpulan-perkumpulan demikian, memerlukan perhatian, karena mereka telah bekerja dalam bidang sosial, sehingga dapatlah diharapkan banyak bantuan dari pihak mereka.

4. Serikat-serikat Tani dan Buruh

Sering terdapat juga di desa pelbagai serikat-serikat buruh dan tani yang berusaha dengan cara-cara mereka sendiri dalam bidangnya masing-masing untuk memelihara dan memperbaiki kesejahteraan anggotanya.

Usaha-usaha demikian bersifat khusus, tetapi berjalan sejajar dengan pembangunan masyarakat. Maka dari itu hendaknya diadakan pula perkenalan dengan eksponen-eksponen dari perkumpulan-perkumpulan demikian.

Di antara perkumpulan-perkumpulan *ekonomis* tertariklah lebih khusus perhatian kita kepada koperasi-koperasi dari bermacam-macam jenis.

5. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi

Koperasi-koperasi dan khususnya koperasi-koperasi pertanian, harus menjalankan peranan penting di masa depan untuk mempertinggi taraf perekonomian rakyat. Di negara-negara yang sudah maju, telah terbukti kepentingan koperasi-koperasi kaum tani untuk mempertinggi produksi, memperbaiki penjualan hasil-hasil bumi, pengolahan hasil-hasil bumi menjadi barang jadi atau separuh jadi, dan sebagainya. Sampai sekarang perkembangan koperasi-koperasi di desa-desa mendapat banyak rintangan-rintangan yang bersifat organisatoris dan teknis, dan di samping itu juga mental dan politik.

Untuk dapat memenuhi fungsinya yang semestinya maka koperasi-koperasi itu harus diresapi oleh semangat dan cita-cita pembangunan masyarakat dan dibersihkan dari korupsi, persaingan politik dan bermacam-macam sektarisme lain.

Maka dari itu ada baiknya untuk menarik eksponen-eksponen dari koperasi-koperasi itu ke dalam usaha pembangunan masyarakat. Akhirnya sampailah kita pada kelompok-kelompok politik, yang sudah beberapa kali disinggung di atas.

6. Kelompok-kelompok Politik

Kiranya tidak perlulah untuk menyebut partai-partai satu per satu karena orang sudah mengenalnya. Tadi telah dikatakan bahwa adalah perlu sekali untuk menghindarkan bahwa pembangunan masyarakat akan diperkuda oleh atau disamakan dengan salah satu partai politik, tidak perduli partai manapun. Hal ini tidak dikatakan, karena pembangunan masyarakat menentang salah satu partai politik, tetapi karena perlunya untuk mencegah jangan sampai ketegangan-ketegangan yang selalu terdapat di antara partai-partai politik dibawa-bawa juga ke dalam usaha-usaha pembangunan masyarakat. Justru perlawanan-perlawanan dan permusuhan-permusuhan politik itu merupakan maut bagi pembangunan masyarakat yang mutlak memerlukan persaudaraan dan kerjasama, mutlaknya sebagai tumbuh-tumbuhan memerlukan sinar-sinar matahari. Tetapi pembangunan masyarakat tidak menentang partai-partai politik dan sama sekali tidak menghendaki pertentangan-pertentangan dengan partai-partai politik, atau dengan aliran dan ideologi manapun yang menerima Pancasila sebagai dasarnya yang pokok. Hal ini hendaknya dijelaskan kepada orang-orang terkemuka dari partai-partai dalam usaha perkenalan dengan mereka.

Dalam tiap-tiap partai terdapat orang-orang yang berpendirian moderat dan yang berpandangan luas. Pada orang-orang demikian dapatlah dibangkitkan simpati dan pengertian untuk pengembangan masyarakat pedesaan.

Dengan ini selesailah perincian kita tentang golongan-golongan dan kelompok-kelompok di dalam desa. Perincian ini tidak lengkap dan juga tidak dimaksudkan selalu demikian, melainkan untuk memberi

suatu gambaran tentang susunan intern Desa; jadi bilamana masih ada golongan-golongan lain yang dipandang penting, maka hendaknya ditambahkannya.

Sebaliknya, dari golongan-golongan, kelompok-kelompok dan orang-orang terkemuka di dalamnya masing-masing, dibuat sebuah daftar yang modelnya disarankan seperti di bawah ini.

Daftar Usaha Perkenalan

I	II	III	IV	V	VI
No. Urut	Golongan Kelompok	Nama petugas/ orang-orang termuka anggota pengurus dari Gol./Kelompok/tsb. dalam ruang II	Kedudukan/ Fungsi/Pekerjaan dari orang yang tersebut dalam ruang III	Alamat orang-orang yang tsb. dalam ruang III	Keterangan lain

Catatan: Dalam kolom VI ''keterangan-keterangan lain'' dapatlah dicatat hal-hal yang dipandang penting untuk perkenalan.

13. KERJA SAMA DAN STRUKTUR MASYARAKAT DI DESA CIBODAS*)

Penelitian ini adalah hasil pendahuluan dari suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam tahun-tahun 1950—1954 di sebuah desa Sunda yang bernama Cibodas yang termasuk ke dalam kecamatan Lembang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terletak kira-kira dua belas setengah mil di sebelah utara kota Bandung, pada suatu ketinggian hampir empat ribu kaki di atas permukaan laut. Jumlah penduduk desa itu kira-kira lima ribu orang, dan di dalam kawasannya terdapat kira-kira empat mil persegi tanah pertanian. Iklim, jenis tanah dan letaknya dekat sebuah pasar, semuanya itu telah menimbulkan situasi yang amat cocok untuk bertanam kentang dan sayur-mayur seperti kubis dan bawang, guna dijual di pasar.

Penelitian untuk proyek Cibodas ini dilakukan oleh penulis sendiri, bekerjasama dengan ahli pertanian Kampto Utomo dan dengan bantuan para mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Indonesia, di Bogor.

BAGIAN PERTAMA: STRUKTUR MASYARAKAT PERTANIAN DI CIBODAS

Seorang ahli sosiologi mencoba memahami struktur sosial dari suatu masyarakat dengan memperhatikan ciri-ciri pokoknya. Mungkin orang bertanya, apakah ciri-ciri pokok desa Cibodas?

Menurut pendapat saya ada dua prinsip yang saling melengkapi yang membagi masyarakat desa Cibodas ke dalam dua kelompok sosial yang pada dasarnya berbeda. Kedua prinsip itu adalah di satu pihak ''mengabdi'' dan di lain pihak ''memerintah'' atau ''memperabdi''. Dalam hubungan ini, kata-kata ''mengabdi'' dipergunakan dengan

---

*) Oleh H. ten Dam, dikutip dari *Selected Studies by Dutch Scholars*, vol. VI, W. van Hoeve Publishers Ltd. — The Hague, 1961, halaman 347, 348—367.

pengertian ''menyerah'' atau ''menyerahkan diri'' kepada seseorang yang memberikan perintah dan suruhan, memberikan pekerjaan, mempunyai orang lain untuk melayaninya, dan dalam beberapa keadaan memberikan perlindungan. Kedua prinsip pokok ini dapat ditelusuri dalam setiap segi kehidupan kemasyarakatan di desa Cibodas dalam hubungan ekonomi pada umumnya, dalam masalah ekonomi desa dan usahatani dan demikian pula dalam hubungan-hubungan sosial.

Atas dasar kedua prinsip ini, masyarakat desa dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok: kelompok buruhtani dan kelompok petani bebas. Wujud sesungguhnya dari kedua prinsip itu tidak perlu dibicarakan panjang lebar dalam tulisan ini. Tetapi perbedaan pokok antara kedua kelompok sosial itu adalah penting sekali untuk pembicaraan-pembicaraan dalam halaman-halaman berikut, di mana perhatian akan dipusatkan pada ''implikasi-implikasi praktisnya''.

1. Buruh tani

Sebagai akibat dari ''pengabdiannya'' atau posisinya yang lebih rendah, maka buruh tani bukanlah orang yang bebas. Ia tidak mempunyai alat materi atau kecerdasan untuk menjadi bebas. Dalam suatu masyarakat pedesaan, ini berarti bahwa ia sama sekali tidak mempunyai tanah atau tidak mempunyai cukup tanah yang berkualitas baik guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Tetapi hal itu juga berarti bahwa ia tidak mempunyai latar-belakang kecerdasan yang diperlukan untuk mengurus suatu usaha pertanian.

Untuk memberikan sedikit pandangan tentang berapa besarnya, kira-kira jumlah buruh tani ini di desa Cibodas, baiklah dikemukakan sejumlah data tentang hak-milik tanah. (Penyebaran hak-milik tanah dipergunakan sebagai ukuran satu-satunya dalam menentukan besarnya kelompok ini, karena tidak adanya informasi yang lain. Tetapi harus ditekankan di sini bahwa ciri-terpenting dari buruh tani bukanlah tidak adanya atau tidak cukupnya tanah yang dimilikinya, tetapi sikapnya yang menyerahkan diri kepada orang yang dilayaninya.)

Empat puluh empat persen keluarga yang terdapat di Cibodas sama sekali tidak memiliki tanah. (Dalam kelompok ini termasuk sejumlah kecil anak-anak yang telah dewasa dari para tuan tanah besar,

tetapi belum memperoleh bagian dari harta-benda orang-tuanya dan juga belum membeli tanah mereka sendiri, dan jumlah mereka kecil sekali dibandingkan dengan keseluruhan.) Tempat kediaman buruh tani yang tidak memiliki tanah itu terletak di atas tanah milik orang lain; kadang-kadang tanah milik orang-tua atau kerabat yang lain; kadang-kadang tanah milik orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Dalam keadaan yang terakhir ini buruh tani itu mungkin membayar sewa kepada si pemilik tanah atau mungkin pula memberikan jasa yang tidak diimbali baik dengan uang maupun dengan benda. Di sini buruh tani itu sekali lagi memperlihatkan dirinya dalam peranan ''mengabdi''.

Dua puluh lima persen dari keluarga di Cibodas itu hanya memiliki tanah pekarangan, di mana terdapat tempat kediaman mereka, bersama dengan tempat kediaman kerabat terdekat. Setelah itu ada juga sekelompok keluarga yang mempunyai tanah garapan berupa sebidang tanah yang tidak begitu besar, yang luasnya antara seperempat *acre* (satu *acre* kira-kira sama dengan 4072 meter persegi) dan setengah *acre* tanah tegalan (karena sebahagian besar dari desa itu terdiri dari tanah tegalan yang berjenis vulkanis baru). Dua puluh tiga persen dari para penduduk termasuk ke dalam kelompok pemilik tanah sempit ini. Sebahagian besar dari tanah mereka berkualitas rendah, sering terdapat di lereng bukit atau di bagian desa yang jauh terpencil. Tanah milik mereka itu tidak cukup untuk menghidupi para pemiliknya. Jadi dalam keseluruhannya, kelompok buruh tani itu terdiri dari kira-kira sembilan puluh persen dari jumlah penduduk desa (walaupun angka itu harus dilihat hanya sebagai perkiraan yang amat kasar saja.).

Setelah mengadakan pembedaan yang penting antara buruh tani dan petani bebas di Cibodas, maka ''praktis''lah kiranya untuk selanjutnya membagi buruh-buruh pertanian itu ke dalam dua sub-kelompok. Kriteria yang dipergunakan dalam mengadakan sub-bagian ini bukanlah sesuatu yang fundamental, dan hanya ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Tetapi untuk menganalisa masalah kerjasama dipandang dari segi struktur sosial, mengadakan pembagian lebih lanjut ini terasa penting.

Untuk tujuan ini, buruh tani yang tidak memiliki tanah sama sekali atau memiliki tanah pekarangan sajalah yang dinamakan buruh tani dalam pengertian yang sesungguhnya. Orang-orang yang memiliki

sejumlah kecil tanah pertanian (tidak lebih dari dua setengah *acre* tanah tegalan yang rendah mutunya atau jauh tempatnya) dinamakan petani tidak tetap (*part-time farmers*). Jadi ukuran yang dipergunakan dalam pembagian ini adalah kenyataan sama-sama menguasai sebidang kecil tanah. Sebagaimana telah dikemukakan, pembagian ini tidak begitu fundamental.

BURUH TANI DALAM ARTI SESUNGGUHNYA

Buruh tani dalam pengertian yang sesungguhnya memperoleh penghasilan terutama dari bekerja dengan mengambil upah untuk para pemilik tanah atau para petani penyewa tanah. Sebahagian besar dari mereka bekerja atas dasar jangka pendek, dipekerjakan dan dilepas dari hari ke hari. Sebahagian kecil dari mereka adalah buruh upahan yang menetap, di mana biasanya mereka dipekerjakan untuk jangka waktu setahun atau lebih lama lagi. Di samping melakukan pekerjaan yang diupah, buruh harian itu juga melakukan perdagangan kecil-kecilan, menjual pisang, rokok dan hasil pertanian secara kecil-kecilan, menjualnya berdasarkan komisi, dan kadang-kadang sekali ada juga dari mereka yang menanami sebidang tanah kehutanan dengan perjanjian.

Buruh tani itu hidup di tingkat terbawah lapisan masyarakat, biasanya dalam keadaan yang amat miskin dan merupakan kelompok yang paling banyak berpindah dalam masyarakat desa. Karena mereka tidak memiliki harta benda milik sendiri dan selalu berusaha mencari kerja yang paling banyak upahnya atau paling ringan, banyak dari buruh pertanian itu yang berpindah-pindah dari suatu daerah ke daerah lain. Sampai sekarang belum jelas apa yang menyebabkan mereka keluar dari suatu daerah dan pindah ke tempat lain pada suatu saat tertentu. Tetapi perpindahan yang agak tidak jelas maksudnya dan tidak bertujuan ini (yang agaknya merupakan sisa-sisa dari perpindahan penduduk di Priangan dalam abad kedelapan belas dan kesembilan belas) telah memberikan keterangan khas kepada tuduhan bukan "penduduk desa" biasanya amat terikat kepada desanya—suatu tuduhan yang sering sekali terdapat dalam buku-buku. Sebentar lagi kita akan kembali kepada masalah ini.

Dalam tingkah-lakunya terhadap orang-orang yang di luar dari

kelompoknya, buruh tani biasanya menyerah saja kepada nasibnya, ia ingin memperbaiki keadaannya, tetapi ia tidak tahu caranya, karena itu ia menyerah saja. Ia memang cenderung memberikan perhatian kepada gerakan-gerakan politik yang banyak memberikan janji-janji dan gerakan-gerakan keselamatan dari jenis gerakan ratu adil, tetapi perhatiannya ini biasanya cepat hilang; dalam jangka lama gerakan-gerakan seperti itu tidak ada hasilnya. Kelompok ini biasanya curiga terhadap segala sesuatu yang datang dari luar lingkungannya. Akan tetapi sekalipun kedengarannya bertentangan, pada akhirnya buruh tani itu paling percaya kepada pertimbangan para majikan mereka. Tentu saja kepercayaan itu ada batasnya, tetapi dalam berhubungan dengan mereka, sekurang-kurangnya buruh itu tahu di mana mereka berdiri. Inilah satu-satunya kenyataan (yang sering merupakan kenyataan yang amat pahit} yang dapat mereka pegang, sedangkan yang lain daripada itu bagi mereka hanya khayal yang tidak mungkin dicapai. Dalam beberapa keadaan, menurut pengalaman kami, pendapat para majikan itu amat menentukan, sedangkan pendapat orang-orang yang berusaha menjadi pemimpin buruh tani dalam perjuangan mereka untuk memperbaiki kondisi hidup, tidak diterima. Terbukti bahwa pendapat mereka kurang diperhatikan dibandingkan dengan pendapat majikan.

Tidak ada jawatan atau badan pemerintahan yang benar-benar memberikan perhatiannya, baik langsung maupun tidak langsung, kepada buruh tani dan nasibnya. Buruh tani hidup dari hari ke hari saja dan tidak memperhatikan rencana masa depan (dengan menabung, misalnya) maupun untuk kebaikan bersama (umpamanya seandainya kebaikan bersama itu menyangkut langkah-langkah untuk mencegah di dudukinya tanah-tanah hutan atau menebang kayu secara liar, yang mana kedua praktek itu sering dilakukan oleh penduduk desa Cibodas).

Banyak buruh tani menanam atas dasar bagi hasil (maro) di atas tanah tegalan milik tuan-tanah besar, setelah hasil utama (kentang atau kubis) dipungut. Sebagai petani bagi-hasil, mereka hanya diperbolehkan menanam padi huma, jagung dan ketela rambat. Biasanya buruh tani diberi sebidang tanah yang sempit, yang terdiri dari kira-kira seperempat *acre* tanah pertanian kentang, oleh majikan tetapnya.

Untuk maksud-maksud penelitian ini ciri-ciri buruh tani yang sesungguhnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kegiatan Ekonomi

(a) Buruh tani biasanya dipekerjakan oleh tuan tanah besar dengan digaji sebagai pekerja harian.
(b) Setelah hasil kentang dan kubis dipungut dari tanah pertanian petani bebas, buruh tani diperbolehkan menanami tanah-tanah itu selama enam bulan atas dasar bagi hasil, dan menanaminya dengan padi huma, jagung dan ketela rambat. Sedikit di antara mereka juga menggarap sawah di desa itu atas dasar bagi hasil (daerah tegalan jauh lebih luas di desa itu dibandingkan dengan sawah).
(c) Di waktu mereka tidak dipekerjakan sebagai tenaga buruh, para buruh tani melakukan perdagangan kecil-kecilan yang menghasilkan laba kira-kira sama besarnya dengan gaji mereka (yaitu antara tiga dan enam rupiah setiap hari).

Kedudukan Sosial

(a) Para buruh tani berada di tingkat terendah dalam lapisan masyarakat. Mereka tidak mungkin jatuh lebih rendah lagi: mereka tidak mempunyai ''kedudukan'' yang akan dipertahankan atau yang akan hilang. Tentu saja posisi seperti ini mempunyai pengaruh besar terhadap nilai-nilai normal kelompok itu. Salah satu akibatnya adalah terdapatnya perasaan hukum dan ketentraman yang amat berbeda dari perasaan para pemilik tanah umpamanya.
(b) Buruh tani hidup untuk menyambung nyawa saja, karena tidak ada benda atau orang yang menjamin kelanjutan hidup mereka di masa depan. Kenyataan ini mempunyai implikasi penting terhadap rencana-rencana untuk memperbaiki kesejahteraan umum: rencana-rencana pembangunan yang telah dipertimbangkan sebaik-baiknya berada di luar pengertian buruh tani. Karena dihadapkan kepada gagasan-gagasan seperti itu yang benar-benar asing bagi situasi mereka, maka mereka kehilangan daya berpikir dan bertindak. Dan pada saat-saat yang jarang terjadi di mana mereka berpikir dan bertindak, maka kepala dan tangan mereka tidak mampu mencari bidang kegiatan, dan sebagai akibatnya timbullah ketegangan sosial. Pada umumnya, tindakan-tindakan untuk memberantas buta huruf dan gagasan-gagasan (barangkali juga tindakan-tindakan) untuk memperbaiki kesejahteraan, sama sekali tidak mempengaruhi para

buruh tani itu, karena tindakan-tindakan dan gagasan seperti itu tidak diseiramakan dengan keadaan mental mereka; mereka masih terlalu cenderung untuk menerima nasib saja, tunduk dan berserah diri.

(c) Sebagaimana dapat diduga berdasarkan apa yang tersebut di atas, maka buruh tani yang sesungguhnya tidak mempunyai latar belakang kecerdasan, juga tidak mempunyai pengalaman untuk mengelola pertanian. Mereka telah terbiasa bekerja sebagai buruh tani sepanjang hidup; karena itu mereka tahu sedikit mengenai pekerjaan pertanian, seperti mencangkul, bertanam, menyiang dan menuai, dan dalam tahun-tahun terakhir ini mereka telah mempergunakan alat-alat sederhana untuk memakai bahan-bahan kimia dan sebagainya (untuk melawan penyakit kentang dan ulat kubis, misalnya). Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikitpun tentang usahatani (perencanaan kerja, pembiayaan, dan pemasaran dan seterusnya).

Dalam suasana seperti ini, sedikit sekali yang dapat diharapkan dari dibagi-bagikannya tanah-tanah bekas perkebunan kepada para penduduk desa yang tidak memiliki tanah. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam waktu yang tidak lama, tanah-tanah yang telah dibagikan itu kembali terkumpul di tangan sejumlah kecil orang, dan kebanyakan dari orang-orang tidak bertanah itu kembali tidak mempunyai tanah. Ini kelihatannya merupakan jawaban yang wajar dari masyarakat terhadap suatu tindakan pemerintah yang tidak mempunyai dasar pengetahuan tentang situasi sesungguhnya. Bagi banyak pegawai pemerintah, setiap orang yang tinggal di daerah pertanian adalah petani dan tidak diadakan pembedaan. Penyamarataan berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda seperti ini sudah pasti menjadi bumerang yang menggagalkan kebijaksanaan pemerintah.

(d) Buruh tani sebagai suatu kelompok sama sekali tidak terikat kepada desa mereka. Banyak dari mereka berasal dari tempat lain, dan kalau telah datang waktunya, mereka pindah ke tempat yang baru lagi di mana mereka berharap menemukan kesempatan untuk berhasil atau gaji yang lebih besar, atau di mana kedengaran kerja lebih ringan. Pada umumnya, mereka tidak akan menjawab secara sukarela seruan untuk bekerja keras demi kepentingan desa sebagai

keseluruhan (umpamanya melakukan tugas ronda menjaga desa terhadap orang-orang dan kelompok-kelompok bersenjata, atau menjaga hasil-hasil pertanian dari para pencuri atau menjaga kebun jagung). Mereka tidak merasa berkepentingan dengan desa (baik dalam hal tanahnya, maupun jalan-jalannya, keamanannya dan seterusnya), tetapi pada pokoknya pemikiran mereka terbatas kepada satu hal saja, yaitu: Apakah yang akan dimakan keluarga saya besok pagi? Perhatian mereka pada setiap saat adalah mengenai di mana dapat memperoleh makanan di saat itu. Akibatnya timbul suatu sikap yang oportunistik terhadap kehidupan, suatu sikap yang juga kelihatan dalam hubungan mereka dengan orang-orang yang datang dari luar kelompok mereka. Prinsip, gagasan dan janji tidak dapat dipegang lagi. ''Bagaimana nanti saja, sih!'' (Artinya, nanti kita lihat saja kalau waktunya telah datang!) adalah suatu ungkapan yang terdiri dari beberapa kata dan menggambarkan sikap buruh tani, baik terhadap masa kini maupun masa mendatang. Akan amat sukarlah kiranya menarik anggota kelompok itu untuk masuk gerakan koperasi dan membuat mereka menaruh perhatian pribadi dalam koperasi itu. Mereka hanya akan tertarik kepada koperasi, sebagaimana juga kepada hal-hal lainnya, hanya sampai ke tingkat di mana koperasi itu dapat memuaskan kebutuhannya untuk saat itu, umpamanya dengan memberikan pinjaman kepada mereka. Baru kemudianlah mereka mulai memikirkan masalah bagaimana membayar kembali pinjaman itu, atau kalau tidak begitu mereka malah tidak memandang masalah itu sebagai suatu persoalan, dan hanya membiarkan saja bagaimana jadinya nanti. Mereka tidak mempunyai perhatian sedikitpun atas kelanjutan adanya koperasi itu, dan mereka juga tidak mampu berbuat begitu: perhatian seperti itu berada di luar dari apa yang mereka ketahui.

PETANI TIDAK TETAP

Anggota sub-bagian kedua dari buruh pertanian, yaitu para petani tidak tetap memiliki tanah yang luasnya berada antara seperempat *acre* sampai dua setengah *acre,* tetapi pada umumnya mereka memiliki kurang dari satu seperempat *acre*. Pendapatan yang diperoleh

dari sebidang tanah yang dikerjakannya itu tidak cukup untuk memberi makan satu keluarga sepanjang tahun, dan sebagai akibatnya anggota kelompok ini harus bekerja untuk tuan-tanah besar sebagai tenaga buruh, dan juga melakukan perdagangan kecil-kecilan dan yang sepertinya, untuk menyambung napas mereka. Mereka tidak mempunyai dana yang cukup untuk membiayai jenis tanaman yang memerlukan persediaan modal yang besar (seperti kentang dan kubis), dan seandainya mereka sanggup meminjam modal (hampir selalu dari teman-teman sedesa dan biasanya senasib dengan mereka), keadaanya dalam kebanyakan hal lebih gawat. Akibatnya jenis tanaman itu hanya menghasilkan sedikit untung, dan biasanya mereka menanam padi huma, jagung, ketela rambat, bawang dan/atau tembakau sebagai gantinya. Seperti buruh tani yang sesungguhnya, petani tidak tetap juga sering menanam tanaman sampingan atas dasar maro (bagi hasil) di atas tanah-tanah di mana kentang dan kubis telah dipungut para pemiliknya.

Ciri khas utama dari sub-kelompok ini dapat diringkaskan sebagai berikut:

Kegiatan Ekonomi:

(a) Petani tidak tetap dipekerjakan oleh tuan tanah yang lebih besar dengan digaji sebagai tenaga harian.

(b) Mereka menanam padi huma, jagung, ketela rambat, dan bawang di atas tanah mereka sendiri atau di atas tanah kering yang untuk sementara disewakan kepada mereka atas dasar bagi hasil, setelah kentang dan kubis dipungut dari tanah itu. Mereka juga mengerjakan sebagian dari sawah desa atas dasar bagi hasil. Amat jarang mereka menanam tanam-tanaman yang memerlukan persiapan modal yang besar; dan sedikit sekali terjadi mereka menanam kentang di atas tanah kehutanan dengan pembagian hasil dengan suatu kontrak dengan pemilik tanah yang lebih besar. Syarat-syarat jenis bagi hasil ini (bibit kentang, pupuk buatan dan bahan-bahan kimia semuanya disediakan oleh pemilik tanah) adalah amat berat dibandingkan dengan keuntungan yang dapat dihasilkan perjanjian ini untuk yang meminjamkan modal (yang biasanya adalah teman sedesa). Hasil yang diperoleh dari hubungan perjanjian seperti ini biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan para tuan tanah besar yang lebih

banyak pengalamannya dan lebih besar pula modalnya.

(c) Perdagangan yang dilakukan para petani tidak tetap kadang-kadang mengambil bentuk yang sedikit lebih luas dan lebih teratur dari yang dilakukan oleh buruh tani tidak bertanah. Pernah juga kadang-kadang hasil pertanian itu dijual ke pasar Bandung dengan bis kecil, tetapi biasanya dibawa dengan dipikul.

Kedudukan sosial

(a) Kendatipun beberapa petani tidak tetap itu mempunyai harga diri yang lebih besar, tetapi kebanyakan anggota kelompok itu amat serupa dengan kelompok buruhtani yang tidak bertanah dalam sikap mental dan kecerdasannya.

(b) Karena petani tidak tetap mempunyai sumber uang masuk yang lain di samping upah kerjanya (yaitu dari bagi hasil sawah, dari hasil pertanian yang ditanam di atas tanah mereka sendiri umpamanya) maka mereka menjadi sedikit kurang terpengaruh dibandingkan dengan buruh tani saja terhadap perubahan-perubahan musim dan perubahan lainnya yang terjadi di pasar tenaga kerja. Rumah mereka dibangun dalam bentuk yang sedikit lebih kokoh, dan lebih terbagi-bagi, dengan kapur dan kamar tidur; sedangkan buruh tani sesungguhnya sering hanya mempunyai sebuah gubuk yang terdiri dari satu ruang yang serba-guna yang kelihatannya lebih mirip dengan kandang kambing dari tempat tinggal manusia. Baik petani tidak tetap maupun buruh tani tidak mendapat perhatian sedikitpun oleh badan-badan pemerintah kecuali dalam keadaan di mana mereka melakukan tindakan melanggar hukum. Sesuai dengan kedudukan mereka yang tidak takut kehilangan apapun (karena mereka berada di tingkat terendah lapisan sosial), maka kesadaran mereka akan perlunya penegakan hukum juga amat kurang. Karena itu nilai-nilai moral mereka amat berbeda dari nilai-nilai petani besar dan tuan tanah besar yang memerlukan dukungan hukum untuk mempertahankan apa yang mereka miliki dan untuk memperoleh lebih banyak lagi.

(c) Kesan umum yang diperoleh adalah bahwa petani tidak tetap sebagai suatu kelompok secara kemasyarakatan bertambah menurun keadaannya dan bukan bertambah meningkat. Modal dan tanah semakin

lama semakin terkumpul di tangan para petani bebas. Kebutuhan untuk berhutang di musim paceklik, yaitu bulan-bulan sebelum panen, dan ketika musim pengangguran (yang karena jumlah penduduk semakin bertambah banyak, maka jumlah pengangguran juga semakin besar), telah memaksa sebagian para petani tidak tetap untuk menggadaikan atau menjual tanah mereka, dan setelah itu mereka terus menanaminya sebagai buruh tani dan/atau bagi hasil. Menjual atau menggadaikan tanah itu selalu dilakukan di lingkungan desa, kepada teman-teman sedesa sendiri. Orang yang berasal dari luar desa sama sekali tidak mempunyai peranan dalam transaksi ini, baik secara langsung maupun dengan mempergunakan perantara. Di zaman dahulu kala terutama, para petani tidak tetap sering menjadi korban dari tindakan-tindakan yang tidak pantas dari pihak teman-teman sedesa yang memberikan gadai atau hutang kepada mereka.

(d) Hubungan kekeluargaan dari petani tidak tetap, sebagaimana halnya dengan hubungan keluarga buruh tani yang sesungguhnya, tidak menolong memperkuat kedudukan ekonomi dan sosialnya. Hubungan seperti itu hanya berguna bagi tuan tanah besar yang berkuasa bukan hanya karena kekayaan yang mereka miliki, tetapi juga karena tanah yang dimiliki para keluarga mereka yang terdekat dan karena kesadaran berkelompok mereka.

2. Para Petani Bebas

Para permulaan karangan ini, masyarakat pertanian desa Cibodas telah dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu buruh tani dan petani bebas, atas dasar dua prinsip yang saling melengkapi: ''mengabdi'' dan ''menerima pengabdian''. Bagi kelompok terakhir ini, para petani bebas, ''menerima pengabdian'' memainkan peranan yang menonjol baik dalam kehidupan sosial, dan membicarakan kelompok ini akan menolong menjelaskan peranan-peranan yang dimainkan kedua kelompok dalam masyarakat desa pada waktu peranan ini berkembang dari ciri-ciri khas yang merupakan hal yang pokok bagi masing-masingnya.

Sekali lagi, karena alasan-alasan ''praktis'' saja, harus diadakan

perbedaan antara kedua sub-kelompok: petani bebas kecil dan tuan tanah besar. Jumlah tanah yang dimiliki serta kegiatan ekonomi dan pengaruh yang selalu menyertainya — telah dipergunakan sebagai ukuran dari pembedaan ini, yaitu pembedaan yang lebih bersifat gradasi daripada pembagian yang berbatas jelas. Para petani yang mempunyai tanah seluas antara dua setengah *acre* dan dua belas *acre* dalam hak-milik mereka telah digolongkan sebagai petani bebas kecil, sedangkan mereka yang mempunyai lebih dari dua belas *acre* dianggap sebagai tuan tanah besar. Di bawah nanti akan diperlihatkan bahwa mungkin juga dipakai ukuran lain dengan alasan yang sama kuat pula.

PETANI BEBAS KECIL

Diperhitungkan secara amat kasar, kelompok petani bebas kecil dapat dianggap terdiri dari enam sampai delapan persen dari keluarga yang ada di Cibodas. Kelompok itu memperlihatkan tanda-tanda kemakmuran tertentu. Para petani itu mampu menanam kentang dan kubis, baik secara sendiri atau berkongsi dengan penduduk desa yang lebih kaya; juga mereka terlibat dalam perdagangan dalam ukuran yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan kedua kelompok buruh tani itu.

Lagi pula, cara berpikir mereka amat berbeda dengan para buruh tani. Perbedaan yang terbesar adalah dalam soal perasaan mereka bahwa mereka mempunyai suatu pegangan dan yang lebih penting lagi, mereka memiliki baik keinginan maupun kemungkinan untuk memperbaiki keadaan. Para pekerja pertanian hidup hanya sekedar menyambung nyawa dan tidak mempunyai kemungkinan membuat rencana jauh ke depan, mereka cukup sibuk memikirkan bagaimana mencari sesuatu untuk dimakan keesokan harinya, dan tidak mempunyai kemungkinan untuk memperbaiki nasib. Sebaliknya kelompok petani bebas kecil cukup dewasa dipandang dari segi sosiologis untuk mempunyai kepentingan dalam memperbaiki nasib dan memainkan peranan yang aktif dalam melakukan itu.

Ciri-ciri khas kelompok ini adalah sebagai berikut:

Kegiatan Ekonomi:

(a) Anggota kelompok petani bebas kecil tidak melakukan pekerjaan untuk mencari upah.
(b) Mereka mengerjakan tanah sendiri dan kadang-kadang mengerjakan sawah atas dasar bagi hasil. Mereka tidak melakukan pekerjaan bagi hasil pada tanah tegalan karena tanah tegalan itu hanya dikerjakan oleh buruh tani. Jenis tanaman yang mereka tanam sama dengan jenis yang ditanam tuan tanah besar, walaupun sering kubis dan kentang tidak begitu dipentingkan. Lagi pula, laba bersih mereka dari kentang dan kubis sering lebih rendah karena kondisi pertanian biasanya kurang menguntungkan, yaitu: kontrak kerjasama dengan tuan tanah besar, syarat-syarat memperoleh bibit yang tidak menguntungkan, bibit yang telah terlalu tua, serta harga pupuk dan bahan kimia yang terlalu tinggi.

Petani-petani bebas kecil membayar harga yang amat tinggi untuk pupuk dan bahan kimia karena mereka memperolehnya dari tuan tanah besar, yang selanjutnya membelinya langsung dari perwakilan jawatan pertanian atau dari agen-agen di Lembang dan Bandung. Demikian pula mereka sedikit sekali atau tidak pernah mempergunakan bibit impor, tetapi biasanya membeli bibit dari tuan tanah besar, yang memang memasukkan bibit baru untuk diri mereka sendiri, lalu kemudian menjual sebahagian dari kentang-kentang angkatan pertama atau kedua kepada rekan-rekan mereka yang kurang kaya sebagai bibit. Syarat-syarat untuk memperoleh bibit, pupuk dan sebagainya lebih menguntungkan petani bebas kecil yang ada hubungan keluarganya dengan tuan tanah besar.

Terdapat pengetahuan yang semakin meyakinkan pada petani bebas kecil tentang pengelolaan pengurusan usaha pertanian. Mereka cenderung banyak meniru dari tuan tanah yang besar, dengan jalan mengikuti praktek-praktek mereka sejauh mungkin dalam batas kemungkinan keuangan mereka.

Para petani bebas kecil juga mempunyai buruh tani yang bekerja untuk mereka dengan diupah—ini tentu saja berbeda sekali dari petani tidak tetap. Biasanya para petani itu sama-sama bekerja dengan buruh tani, dan dalam pada itu mengawasi mereka. Kadang-kadang mereka sewakan tanah-tanah tegalan kepada buruh tani atas

dasar bagi hasil setelah dipungut hasil kentang dan kubis.

(c) Perdagangan yang dilakukan oleh anggota kelompok petani bebas kecil selalu ada hubungannya dengan hasil pertanian yang mereka tanam dan ditanam orang lain (kentang dan kubis).

Perdagangan ini lebih banyak merupakan pemasaran hasil pertanian sendiri daripada usaha mencari uang masuk lebih banyak. Jadi ini merupakan suatu jenis perdagangan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan petanian mereka dan berbeda sekali dengan usaha dagang kecil-kecilan yang dilakukan buruh-buruh tani (yaitu menjual untuk memperoleh komisi atau barangnya dibayar kemudian).

(d) Dengan sedikitnya tersedia modal, anggota kelompok ini berusaha mencari penggunaannya yang paling menguntungkan. Menanam tanam-tanaman palawija (padi huma, jagung dan yang sepertinya) diserahkan kepada buruh-buruh tani dengan syarat-syarat bagi hasil dengan memperhatikan pola pergiliran tanaman sekarang ini, maka para petani bebas kecil tidak dapat membenarkan menanamkan modal dan membayar upah untuk hasil tanaman palawija.

Kedudukan Sosial

(a) Antara tuan tanah besar dan buruh tani tidak terdapat hubungan kekeluargaan, tetapi hubungan seperti itu memang terdapat antara kedua kelompok petani bebas, dan petani bebas kecil biasanya amat sadar akan kedudukan ini. Perbedaan status sosial yang membedakan mereka dari buruh tani juga terlihat dalam kenyataan bahwa petani bebas kecil itu tidak bekerja untuk mendapatkan gaji, tetapi tenaga bayaranlah yang bekerja untuk mereka.

Dari segi pandangan sosiologis, sedikit perbedaan antara kedudukan petani bebas kecil dan kedudukan tuan tanah besar. Kelompok petani kecil merupakan inti dari mana sejumlah kecil orang berhasil membebaskan diri dan memperoleh kekuasaan ekonomi yang lebih besar — sekarang ini sering mereka berhasil memperoleh latihan yang lebih baik (di sekolah atau di sekolah hidup) atau memperoleh bakat yang pasti untuk mengorganisir. Terdapat juga keadaan di mana beberapa orang telah berhasil karena mereka sedikit sekali mempunyai rasa tidak segan-segan terhadap teman-teman sesama manusia, orang-orang yang lebih kejam dari

orang lain dan dengan demikian sanggup mencapai suatu kedudukan yang hanya merupakan impian orang lain.

(b) Dibandingkan dengan kelompok buruh tani, kelompok ini memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan anak-anak. Setelah sekolah dasar (sekolah rakyat) anak-anak kelompok ini kadang-kadang melanjutkan pendidikannya (ke sekolah kejuruan, sekolah guru, sekolah menengah atau kursus pendidikan dasar untuk orang dewasa). Latihan dan pendidikan di rumah untuk anak-anak petani bebas kecil juga berbeda sekali dari yang dialami anak-anak buruh tani. Rumah mereka lebih tertutup rapat dan lebih besar ukurannya (sering mereka tinggal di rumah berlantai batu dan sering juga mempunyai dinding tembok), sehingga kehidupan kekeluargaan mempunyai nada yang lebih intim. Untuk buruhtani rumah pada pokoknya adalah tempat untuk tidur, memasak dan makan, tetapi untuk kedua kelompok petani bebas, rumah juga merupakan tempat kediaman atau suatu *home*. Denah rumah mereka, perabotnya, serta hiasan kamar-kamarnya, semuanya menunjukkan hal ini. Anak-anak buruh tani menghabiskan waktu mereka di luar rumah, di sekeliling rumah atau mengembara di tanah-tanah pertanian. Di sana mereka berkelompok-kelompok mengumpulkan rumput dan daun-daunan untuk makanan kambing, kelinci dan marmot. Mereka bermain di padang rumput di sepanjang sungai atau mereka menolong orang tua di usaha pertaniannya. Sedikitpun tidak terdapat rasa disiplin dan kerja rutin. Orang tua sedikit sekali mendapat kesempatan merawat anak-anak, dan di waktu musim-musim sibuk banyak rumah-rumah buruh yang kosong dan terkunci sepanjang hari. Kadang-kadang anak yang tertua diberi tanggung jawab memperhatikan adik-adiknya. Anak-anak memperoleh pengetahuan di luar rumah, dari teman-teman yang sebaya dengan mereka. Sedikit sekali waktu yang dipergunakan orang tua untuk memindahkan warisan kebudayaan mereka kepada anak-anak, karena warisan itu sendiri tidak berapa banyak di kalangan kelompok buruhtani. Barangkali kenyataan inilah yang telah menimbulkan pendapat bahwa ''orang kecil'' mempunyai mentalitas kekanak-kanakan. Mungkin pendapat ini ada benarnya kalau istilah itu dibatasi penggunaannya kepada suatu kelompok yang amat khas dalam masyarakat, tetapi sebagai suatu merek umum

kata-kata "kekanak-kanakan" itu kelihatannya sangat tidak tepat.

Di kalangan petani bebas kecil, dan lebih-lebih lagi di kalangan tuan tanah besar, ibu biasanya tinggal di rumah untuk mengurus dapur dan mencurahkan perhatiannya kepada anak-anak. Ia mempunyai pembantu-pembantu untuk menolongnya dengan tugas rumah tangganya, dan di sini telah kelihatan bahwa anak-anak mulai memainkan peranan menerima pengabdian; sedangkan anak buruh tani sampai ke suatu batas yang jauh harus merawat diri sendiri. Peranan ibu yang lebih intim serta pandangan ayah yang lebih luas telah memberikan pengaruhnya kepada anak-anak semenjak masa kecil mereka. Dalam pemindahan kebudayaan, rumah menjalankan fungsi yang penting. Perbedaan latihan ini setelah dewasa nanti menyebabkan timbulnya sikap yang berbeda terhadap kehidupan. Perbedaan itu dapat diamati dengan jelas sekali dalam tingkahlaku serta sikap sehari-hari para remaja, bahkan pada waktu mereka berumur lima belas tahun atau lebih muda lagi.

Setiap usaha untuk mempersatukan orang-orang dari kelompok buruh tani dan kelompok petani bebas dalam suatu kerangka organisasi bersama sudah pasti menimbulkan ketegangan yang telah pernah terjadi di Koperasi di Cibodas. Anggota kedua kelompok itu tidak setara dalam hal kecerdasan intelek dan kebudayaan. Menarik sekali bahwa para pemuda yang memainkan peranan dalam organisasi-organisasi desa Cibodas hampir tanpa kecuali berasal dari lingkungan petani bebas kecil dan (sampai ke suatu batas serta kurang berhasil) tuan tanah besar. Mereka termasuk pemuda-pemuda yang memberikan pimpinan, sedangkan yang lainnya mengikuti: yaitu menerima pengabdian dan mengabdi. Setiap kali, pola itu berulang kembali.

(c) Anggota kelompok petani bebas kecil (yang mereka sendiri kadang-kadang adalah anak atau keluarga jauh dari tuan tanah besar) mampu memainkan peranan yang dapat dikatakan penting dalam kehidupan desa, tergantung dari kepribadian orang yang bersangkutan. Mereka juga berada dalam posisi yang baik untuk memperoleh rasa hormat para penduduk desa, dari kelompok manapun juga. Kedudukan mereka dalam struktur kemasyarakatan adalah sedemikian rupa sehingga mereka harus mengadakan perjuangan

terus-menerus untuk menjaga diri jangan sampai meluncur ke dalam golongan buruh tani. Mereka harus mempertahankan sesuatu, dan dalam pada itu mempunyai kesempatan pula untuk beroleh lebih banyak lagi. Seandainya rasa curiga mereka dapat dihilangkan, orang-orang dari kelompok itu pada umumnya dapat diajak ikut serta dalam suatu organisasi yang dimaksudkan untuk memperbaiki kepentingan ekonomi dan pertanian mereka. Sampai sekarang ini, badan-badan pemerintah hanya sekali-kali saja berhubungan dengan kelompok ini. Tetapi karena anggotanya dapat dikatakan mempunyai hubungan yang rapat dengan orang-orang dari kelompok tuan tanah besar, mereka masih mendapat perhatian pemerintah dibandingkan dengan kelompok buruh tani.

(d) Dalam kelompok petani kecil, ikatan keluarga memainkan peranan yang penting dalam kegiatan dan kesempatan ekonomi. Tanah biasanya dipindahkan kepada anak-anak di waktu orang tua masih hidup. Hutang dan bantuan yang tidak ada bunganya untuk tujuan-tujuan produksi, seperti uang muka untuk jangka pendek, lebih mudah diperoleh dari keluarga. Pada hakekatnya hal ini berlaku juga bahkan untuk batas yang jauh lebih luas di kalangan tuan tanah besar, yang kekuatan ekonomi dan posisi sosialnya tidak begitu ditentukan oleh jumlah tanah dan uang yang dimilikinya secara pribadi tetapi lebih banyak ditentukan oleh jumlah keseluruhan yang dimiliki keluarganya, dan juga oleh hubungan-hubungan yang diadakannya di luar desa sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan keluarga, seperti hubungan dengan orang-orang penting, baik swasta maupun pejabat pemerintah, di Lembang, Bandung, Pangalengan, bahkan di Jakarta. Hal yang tersebut belakangan ini khususnya dapat menjelaskan posisi ekonomi dan sosial khusus yang dipunyai tuan tanah besar di Cibodas.

TUAN TANAH BESAR

Sub-kelompok petani bebas yang termasuk tuan tanah besar secara kasar hanya merupakan satu setengah persen dari penduduk Cibodas. Masing-masingnya memiliki dua belas *acre* atau lebih, yang kebanyakannya adalah tanah tegalan. Secara bersama-sama sub-kelompok ini

memiliki kira-kira setengah dari tanah yang terdapat di desa itu; dan hampir semua tanah yang dapat digolongkan mempunyai kualitas kelas satu atau kelas dua (menurut peraturan sewa tanah kepada petani) berada di tangan mereka. Kelompok ini terdiri dari sejumlah kecil keluarga yang berhubungan rapat dengan perkawinan, dan lima kelompok keluarga yang terpisah-pisah memainkan peranan yang amat menonjol dalam kehidupan ekonomi di desa itu. Satu dari keluarga ini terdapat di masing-masing kampung Cigalukguk, Cibeunying dan Kosambi, dan dua keluarga di kampung Dago. Mereka itu adalah kalangan bangsawan desa itu. Merekalah yang menentukan jenis kegiatan kemasyarakatan dan memainkan peranan penting, baik positif maupun negatif, dalam setiap kegiatan di desa itu, dalam arti bahwa mereka selalu terlibat dalam kegiatan itu, sebagai pendukung atau sebagai lawan, baik secara terbuka maupun tersembunyi. Mereka mempunyai sumber modal terbesar dan mendapat kepercayaan dari para tengkulak uang. Berkat laba yang besar yang mereka tarik dari menanam kentang dan kubis untuk dipasarkan, mereka sanggup mendirikan bungalow-bungalow baru di desa itu atau di Bandung. Beberapa anggota kelompok itu juga memiliki sawah di luar desa, di Ujungberung, Cisalak (Subang) dan Citarum (Lembang). Anggota-anggota kelompok ini sedikit banyaknya mempergunakan cara-cara dan teknik-teknik modern yang dikembangkan dengan penelitian untuk menjadikan pertanian lebih menguntungkan. Pandangan mereka terentang jauh melampaui desa. Kehidupan kota di Bandung bukanlah di luar ruang pengetahuan mereka.

Dengan tuan tanah besar inilah, para wakil jawatan pemerintah mengadakan hubungan-hubungan pribadi, dan sampai saat ini dari merekalah para pejabat itu memperoleh informasi tentang keadaan masalah-masalah desa. Dari apa yang telah dikemukakan jelaslah bahwa gambaran yang mereka peroleh tidak selalu sesuai dengan kenyataan, walaupun mereka itu mempunyai iktikad baik. Para pemimpin desa biasanya berasal dari kelompok ini dan kelompok petani bebas yang lain; juga orang-orang yang memainkan peranan dalam politik lokal (terkecuali para pemimpin Partai Permai yang bersifat proletar, yang di Cibodas seluruhnya di bawah pimpinan buruh-buruh tani), orang-orang yang mengumpulkan sebahagian besar modal untuk koperasi desa dan orang-orang yang bekerja keras untuk gerakan koperasi pada umumnya.

Mencoba memahami struktur desa berdasarkan pernyataan dan ucapan yang dikemukakan para anggota kelompok petani bebas hanya akan menimbulkan pandangan yang tidak tepat dan kesimpulan yang tidak benar. Hal ini harus menjadi jelas bagi setiap orang yang menganalisa perbedaan pokok antara kedua kelompok dalam desa itu.

Kegiatan Ekonomi

(a) Di dalam usaha pertanian, para tuan tanah besar menjalankan fungsi pengelola, baik dengan gaya baru maupun dengan gaya lama. Mereka jarang sekali mengerjakan sendiri pekerjaan kasar, walaupun mereka memang tahu bagaimana melakukannya. Mereka bertanam tanam-tanaman yang hasilnya untuk dijual (yang terpenting adalah kentang dan kubis) dan sering terdapat bahwa mereka telah mengubah tanah tegalan menjadi kebun buah-buahan yang terawat dengan baik (terutama ditanami jeruk). Kira-kira enam bulan dalam setahun, setelah hasil kentang dan kubis dipungut, mereka menyewakan tanah itu kepada para buruh tani atas dasar maro (bagi hasil) yaitu buruh yang bekerja dengan mereka secara teratur, untuk menanam tanam-tanaman tambahan. Masing-masing buruh tani mendapat seperdelapan sampai seperempat *acre* dari tanah yang tadinya ditanami kentang untuk diusahakan atas dasar bagi hasil. Seandainya mereka mempunyai sawah di dalam atau di luar desa, maka sawah itu juga dipersewakan atas dasar bagi hasil, dengan begitu mereka tidak mengeluarkan biaya untuk penanaman modalnya. Banyak dari mereka mempergunakan hasil sawah untuk menutupi ongkos makanan, dan mempergunakan laba pertanian kentang dan kubis untuk menutupi kebutuhan kemewahan mereka, untuk membangun rumah di Cibodas atau di Bandung, untuk pendidikan anak-anak mereka (di sekolah menengah atau di perguruan tinggi), dan untuk ditanamkan dalam usaha dagang terutama dalam usaha pengangkutan. Biaya pendidikan anak-anak mereka sering amat mahal. Berlainan dengan keadaan sebelum tahun 1940, tidak terdapat mobil di desa itu, tetapi ada truk, bis kecil dan sepeda motor.

(c) Keperluan para tuan tanah besar untuk memperoleh kredit untuk

menutupi kekurangan-kekurangan musiman pada umumnya dipenuhi oleh para pedagang di Lembang dan Bandung yang menyediakan pupuk dan kemasan-kemasan kimia. Untuk sebagiannya ini dilaksanakan dengan melalui dinas pertanian. Para pedagang itu tidak mewajibkan bunga untuk sarana produksi pertanian yang diberikan dengan pinjaman, tetapi harga itu sendiri mahal, dan terdapat kewajiban moral bahwa hasil pertanian yang diperoleh dengan bantuan bahan-bahan mereka hendaknya dijual kepada mereka dengan harga yang lebih murah dari harga yang terdapat di pasar pada waktu penyerahan dilaksanakan. Jadi syarat-syarat pinjaman mereka tidak ideal. Tetapi ini tidak mengubah kenyataan bahwa sistem pinjaman itu pasti telah menguntungkan para tuan tanah besar di Cibodas. Kita dapat mengetahuinya hanya dengan memperhatikan gaya hidup dan rumah-rumah mereka. Benar, syarat-syarat itu dapat lebih baik, tetapi untuk mengatakan bahwa syarat-syarat itu sangat merugikan pihak peminjam, juga tidak benar.

Juga menarik sekali cepatnya tuan tanah besar itu memulihkan diri setelah kemunduran yang dialami ketika dan setelah pengungsian dari daerah itu ketika Belanda melakukan ''aksi polisionil'' mulai pertengahan tahun 1947 sampai permulaan tahun 1949. Saya dapat menelusuri proses pemulihan yang cepat ini dari musim ke musim selama empat tahun saya tinggal di Cibodas. Menurut pendapat saya adalah tidak adil menyalahkan para pedagang yang memberikan pinjaman karena keuntungan mereka amat besar. Sebaliknya, bila mungkin mengurangi keuntungan ini (umpamanya dengan perantaraan pinjaman koperasi) maka tentulah wajar kalau kemungkinan itu dipergunakan, agar uang masuk petani sebagai orang-seorang dan uang masuk desa sebagai keseluruhan dapat ditingkatkan. Tanpa pinjaman dari para pedagang, tuan tanah besar — dan dengan melalui mereka, para petani bebas kecil — tidak akan dapat mencapai tingkat kemakmuran seperti yang sekarang ini.

Kendatipun demikian, para tuan tanah besar di Cibodas mengeluh tentang praktek-praktek ''Cina'' (para pedagang yang memberikan pinjaman). Hal ini harus diterangkan bahwa artinya adalah mereka sendiri telah terlibat dalam agitasi menentang kelompok penduduk khusus itu. Dengan ikut serta dalam agitasi itu, dan dengan menyatakan bahwa ''rakyat jelata'' diperas oleh Cina, maka

tuan tanah besar itu telah mampu menciptakan kesan di kalangan badan kredit pemerintah bahwa mereka sendiri adalah juga korban dari pemerasan seperti itu. Pinjaman yang pada waktu itu disalurkan melalui koperasi desa tidak menguntungkan ''rakyat jelata'' tetapi pada pokoknya menguntungkan para tuan tanah besar itu sendiri. Adalah penting sekali bahwa badan-badan pemerintah yang bersangkutan merasa yakin tentang keadaan ini. Pinjaman koperasi di Cibodas melaksanakan fungsi yang persis sebagaimana kredit bank swasta jenis biasa. Hutang yang disalurkan melalui saluran koperasi tidak menguntungkan massa terbesar rakyat Cibodas, dan kesejahteraan massa rakyat itu tidak mengalami perbaikan karena hutang-hutang itu.

Pada waktu tuan tanah besar memperoleh pinjaman terutama dari luar desa, petani bebas kecil selanjutnya menerima hutang dari tuan tanah besar di dalam desa itu. Petani tidak tetap tidak dapat mempergunakan kredit dagang jenis apapun juga, hanya dengan alasan karena mereka itu bukanlah penghasil hasil tanaman yang memerlukan penanaman modal.

Jadi sebagai akibat dari terkumpulnya tanah, uang dan kredit di tangan mereka, maka para tuan tanah besar menduduki posisi penting secara ekonomi di desa itu. Sebagaimana telah dikemukakan, cara bagaimana hasil pertanian dipasarkan oleh para tuan tanah besar untuk sebahagian besarnya ditentukan oleh hubungan mereka dengan para pedagang yang memberikan pinjaman. Di desa itu terdapat juga beberapa perusahaan pengangkutan (empat perusahaan truk dan tiga perusahaan bis kecil) yang mengangkut hasil-hasil pertanian ke pasar-pasar di Bandung dan di tempat-tempat lain. Perusahaan ini juga mengangkut penumpang, dan demikian juga mengangkut batu bata yang dibakar secara tidak legal di lereng-lereng Bukit Tunggul. Hasil-hasil pertanian yang diangkut itu mungkin mencakup hasil para petani bebas kecil serta hasil tuan tanah besar. Organisasi pemasaran ini adalah titik terlemah dalam proses produksi.

Kedudukan Sosial

(a) Kalau bagi para buruh tani, kampung cenderung untuk dianggap sebagai kesatuan kemasyarakatan yang terpenting setelah keluarga, bagi para tuan tanah besar, keluarga luas telah mengambil fungsi ini.

Hal ini terasa benarnya terutama pada kelompok tuan tanah besar di Cebeunying, yang secara sosial dan ekonomi bukan saja mendominir kampung itu, tetapi juga seluruh bagian barat desa (kira-kira setengah dari keseluruhan daerah desa, dan bagian yang paling subur dari padanya). Hal seperti ini juga terjadi pada dua kelompok keluarga tuan-tanah besar di Dago, di bagian timur desa itu, walaupun keluarga-keluarga Dago itu lebih muda sejarahnya dan baru menonjol semenjak berakhirnya sebagian besar periode feodal dalam sejarah desa itu (yaitu masa menanam kopi secara paksa dan masa *cultuurstelsel* di abad yang lalu dan tahun-tahun pertama dari abad ini, sampai tahun-tahun sembilan belas dua puluhan).

Walaupun sudah pasti tidak dapat dikatakan bahwa selalu terdapat perdamaian dan keserasian antara para anggota berbagai kelompok keluarga tuan tanah besar itu, dan bahwa sikap antara sesama mereka selalu saling bersimpati tanpa perbenturan kepentingan, tetapi tidak dapat disangkal lagi bahwa kekuatan mereka terletak pada kenyataan bahwa secara bersama-sama mereka merupakan satu gabungan perusahaan besar (*trust*) yang mencakup tanah dan uang, kecerdasan, pengalaman dan ''Hubungan''. Akibat dari gabungan kekuatan-kekuatan ini, masing-masing orang-seorang yang termasuk ke dalam kelompok keluarga seperti itu jauh lebih berkuasa dibandingkan dengan apa yang dapat diharapkan atas dasar hak-milik mereka masing-masing, dan lebih berkuasa bukan hanya secara ekonomi tetapi juga secara kemasyarakatan. Merekalah orang yang mempunyai hubungan dengan badan-badan pemerintahan dan dengan anggota-anggota terkemuka pamong praja.

(b) Dalam hubungan mereka dengan buruh tani, tuan tanah besar masih tetap menduduki lebih kurang posisi tuan terhadap para pelayannya, atau bapak terhadap anak-anaknya, atau tuan feodal terhadap ulur-ulurnya. Ini terasa sekali benarnya pada kelompok keluarga Cibeunying. Dalam hubungan tuan-pembantu yang terdapat di sana itu, buruh pertanian terikat kepada tuannya dengan adat-istiadat, dengan hutang (di mana si buruh berjanji untuk membayar kembali dengan jalan berjanji bekerja untuk tuannya atau dengan menyerahkan tanahnya seandainya ia ada memilikinya), dan kadang-kadang dengan kenyataan bahwa ia tinggal di atas tanah milik si tuan. Dalam

keadaan yang tersebut terakhir ini, hal itu berarti bahwa buruh tani itu berkewajiban memberikan jasanya tanpa dibayar di waktu manapun juga. Keadaan seperti ini jarang terdapat di kalangan generasi muda di Cibeunying dibandingkan dengan generasi tua. Tadi telah dikemukakan tentang bagaimana buruh tani amat memperhatikan pendapat tuan tanah besar. Pengabdi memberikan pengabdiannya dan memperhatikan tanda-tanda yang diberikan tuannya. Konsep kesadaran kelas tidak dapat dipergunakan kepada hubungan ini yang tidak mengubah kenyataan bahwa terdapat tanda-tanda bahwa ikatan ini mulai melemah, terutama antara generasi muda dari kedua kelompok itu.

(c) Dari apa yang telah dikemukakan jelaslah bahwa tuan tanah besar, kendatipun mempunyai kedudukan sosial dan ekonomi yang amat berbeda, merupakan bagian yang integral dari masyarakat desa itu dan belum lagi merupakan unsur asing, dengan pengertian bertentangan dengan mayoritas terbanyak dari penduduk desa.

BAHAN UNTUK DISKUSI BAB V

I. Kerangka Pemikiran)*

Jika dalam grup sosial anggota-anggotanya melakukan relasi sosial yang langsung dan dalam Kolektifitas relasi sosial berkembang secara tidak langsung (yaitu dengan perantara), maka ORGANISASI SOSIAL merupakan gejala sosial yang lebih resmi, berkaitan dengan seperangkat peraturan-peraturan yang tertulis. Dalam hal ini Berelson menunjuk kepada beberapa ciri yang meliputi ORGANISASI SOSIAL, yaitu:

(1.1) FORMALITAS:

Suatu organisasi sosial mempunyai perumusan tertulis yang jelas dalam hal tujuan, peraturan-peraturan (berupa anggaran dasar, anggaran rumah tangga dsb), prosedur, penentuan atau regulasi (misalnya surat keputusan dsb) serta kebijaksanaan. naan.

(1.2) HIERARKI:

Suatu organisasi sosial mempunyai pola wewenang (yaitu KEKUASAAN yang diakui masyarakat) berbentuk piramida dengan demikian beberapa orang didudukkan dalam POSISI lebih tinggi dari anggota lainnya. PERANAN pun berbeda dengan sangat menonjol. Suatu organisasi paling sedikit mengenal 3 (tiga) tingkatan wewenang.

(1.3) UKURAN/BESARNYA ("SIZE"):

Suatu organisasi sosial biasanya mempunyai ukuran besar, sehingga para anggota tidak dapat melakukan relasi sosial yang langsung (sebagai kelompok disebut kolektifitas). Hubungan yang ada antara para pelakunya sifatnya bukan pribadi ("impersonal") hal tersebut dikenal sebagai gejala "BIROKRASI"

Catatan:

Differensiasi/pembagian kerja dan birokrasi, yaitu suatu tingkatan kekuasaan dan wewenang dari pusat atau tingkat atas sampai ke bawah, adalah ciri masyarakat yang modern dan massal.

**) Bernard Berelson & Gary A. Steiner (1964): "Human Behavior", Shorter Edition; Harcourt, Brase & World, 1964.*

(1.4) LAMANYA (''DURATION''):
Kehadiran suatu organisasi sosial lebih lama dari keterlibatan anggota-anggotanya, artinya: anggota organisasi sosial masuk, keluar atau meninggal, hal mana tidak mempengaruhi organisasi itu; kehadiran organisasi sosial tetap berlangsung.

2. *Melihat kegiatan para pelakunya; maka organisasi sosial mempunyai konsekuensi yang lebih mengarah kepada* ***produktivitas,*** *artinya*
(2.1) menyelesaikan segala pekerjaan.
(2.2) memecahkan masalah.
(2.3) mempertahankan atau memperbesar ''out put''.
(2.4) memperbaiki cara kerja, se-efektif mungkin.

3. *Sebagai konsekuensi ke-2 (konsekuensi ini masih penting tapi tidak begitu diperhatikan) adalah:*
(3.1) memberi kepuasan kepada para anggota, dalam arti kata sesuai dengan moral yang berlaku.
(3.2) memberi kepuasan dalam berperan serta.

4. ***Pertanyaan***
(4.1) tunjukkan macam-macam organisasi sosial yang ada dalam artikel 12 dan 13.
(4.2) Perincilah organisasi sosial tersebut menurut ciri-cirinya dan bandingkanlah menurut ciri-ciri yang ada.
(4.3) Bandingkan sistem pelapisan p yang terdapat dalam artikel 12 dan 13.

SISTEM STATUS DAN PELAPISAN MASYARAKAT

14. SISTEM STATUS YANG BERUBAH*)

Runtuhnya sistem status kolonial dalam abad kedua puluh

Sekitar tahun 1900, Belanda berhasil menegakkan kekuasaannya di seluruh kepulauan Indonesia. Pelapisan masyarakat kolonial menurut garis ras, yang lazim terdapat di Jawa, mulai meluas ke pulau-pulau seberang. Tetapi dalam pada itu di abad XX terjadi perkembangan dinamis yang menerobos pola yang kaku ini dan meningkatkan mobilitas sosial.

Di pulau-pulau seberang, uanglah terutama yang melakukan pendobrakan terhadap sistem asli yang lama. Para pedagang kota di Indonesialah yang pada pokoknya melakukan pembrontakan menentang tradisi dan kekuasaan suku. Pada banyak bagian pulau-pulau sekarang, rasa tidak senang penduduk asli terhadap pekerjaan dagang tidak begitu mendalam dibandingkan dengan di Jawa, dan akibatnya sistem status bersendikan kelompok-kelompok suku bangsa, yang telah menyerahkan perdagangan kepada orang Timur Asing, tidak mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap pola kemasyarakatan sebagaimana keadaannya di Jawa. Penanaman tanam-tanaman yang hasilnya untuk dijual di daerah-daerah luar kota juga telah menimbulkan sebentuk paham

---

*) Oleh W.F. Wertheim, dikutip dari buku *Indonesian Society Transition* (Masyarakat Indonesia dalam Transisi), W. van Hoeve Ltd., The Hague, 1959, 2nd revised edition, hal. 141—153.

individualisme ekonomi tertentu yang memberontak terhadap ikatan-ikatan tradisional dan terhadap kekuasaan ketua-ketua adat. Kemakmuran kebendaan yang dicapai oleh banyak petani dan pedagang telah menyebabkan mereka itu berjuang untuk memperoleh suatu prestise sosial yang sama dengan yang dimiliki ketua-ketua adat dan menuntut agar mereka mempunyai hak kawin (*ius connubii*) dengan kelas ketua-ketua adat.[1]

Keresahan di daerah pertanian yang mulai kentara di pulau-pulau seberang dalam tahun-tahun 1920-an (sebagaimana dalam pemberontakan komunis pada bulan Januari 1927 di Minangkabau) bukanlah hanya merupakan pengaruh kemiskinan sebagian petani sebagai akibat dimobilisasikannya hak milik tanah, tetapi juga disebabkan karena perlawanan yang dilakukan para petani yang baru saja menjadi kaya terhadap struktur tradisional.[2]

Lagi pula, sepanjang ada hubungannya dengan pertentangan antara kepentingan petani bumiputera dengan kepentingan pengusaha Barat — yang dalam masalah penanaman karet terjadi pada tahun-tahun krisis — perlawanan di daerah pertanian ini juga mempunyai warna kebangsaan, suatu kecenderungan yang diperkuat oleh kenyataan bahwa pemerintah biasanya bertindak bukan hanya sebagai pelindung dari kekuasaan tradisional para ketua adat, tetapi juga dari perkebunan-perkebunan Barat. Di beberapa daerah seperti di daerah Hulu Sungai (Kalimantan Tenggara), di mana pemerintahan adat feodal telah dikesampingkan pada waktu "pasifikasi", karena bermusuhan terhadap Belanda, maka paham individualisme telah mencapai kemajuan lagi, dan selain dari ukuran keagamaan yang mempunyai kepentingan yang amat besar terutama di daerah ini, kesejahteraan materi merupakan ukuran utama dalam menentukan prestise kemasyarakatan — lebih-lebih lagi di

---

1. Bandingkan umpamanya, B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies: Selected Writings* (Studi-Studi Sosiologis Indonesia: Tulisan-Tulisan Terpilih), Bagian I, hal. 138 dsl. Dalam bagian yang tidak diterbitkan dari tulisan tentang Laporan Pantai Barat Sumatera, Schrieke menjelaskan bagaimana "kelas menengah" yang baru timbul menentang hak-hak istimewa tradisional kaum aristokrat, dalam persoalan adat yang memandang siapa didahulukan dalam pesta dan dalam perkawinan. Tahun 1925 telah dilakukan di Silungkang untuk pertama kali perkawinan antara laki-laki "kelas menengah" dan gadis-gadis bangsawan.
2. Lihat B. Schrieke, *op. cit.*, hal. 131.

''daerah-daerah adat''[3]

Pendidikan juga mempunyai pengaruh dinamis di pulau-pulau luar Jawa, walaupun tidak sehebat di Jawa.[4] Untuk para cendekiawan atau setengah cendekiawan, tidak ada atau sedikit sekali pekerjaan di ladang atau di daerah karet. Juga kota-kota jauh lebih kecil dibandingkan dengan di Jawa. Karena itu, kebanyakan orang-orang yang mendapat pendidikan dengan cara Barat berkumpul di Jawa ketika bersekolah dan setelah selesai sekolah mereka. Jadi mereka lebih banyak merupakan masalah sosial di Jawa daripada di seberang. Karena itu, pentingnya pendidikan sebagai suatu pengarah dinamis lebih baik dipelajari di pulau Jawa.

Semenjak tahun 1900, di Jawa dapat pula diperhatikan bertambah meningkatnya perbedaan profesi. Bertambah meluasnya ekonomi uang dan meningkatnya hubungan dengan Barat telah menyebabkan timbulnya lapangan kerja baru, seperti montir, sopir, masinis dan mandor. Lalu timbullah suatu kelompok baru yang naik sampai ke suatu tingkat di atas masyarakat pada umumnya karena kemampuan teknis mereka. Orang Indonesia semakin banyak bekerja di bidang perdagangan dibandingkan dengan sebelumnya, mula-mula sebagai pedagang kecil, kemudian sebagai pedagang menengah. Kesan yang dikemukakan Kahin[5] bahwa kelas pedagang tidak bertambah jumlahnya, dan sampai Perang Dunia II, semakin dihapuskan oleh persaingan Cina, menurut pendapat saya dapat diperdebatkan, bahwa di Jawa sendiri dan di masa sebelum depresi. Hal itu tidak diperkuat oleh bahan-bahan statistik yang ada. Menurut *Onderzoek naar de mindere welvaart der Inlandasche bevolking op Java en Madoera*[6] dalam tahun 1905 terdapat 385.472 orang pedagang baru yang hidup tanpa pendapatan tambahan dari pertanian,

---

3. Lihat J. Mallinckrodt, *Het adatrecht van Borneo* (Hukum Adat Kalimantan), Leiden, 1928, Vol. II, hal. 154 dsl, 181.
4. Lihat sumbangan Schrieke dalam B. Schrieke (ed), *The Effect of Western Influence on Native Civillisation in the Malay Archipelago* (Akibat Pengaruh Barat terhadap Peradaban Bumiputera di Kepulauan Indonesia), hal. 241 dsl.
5. George McT. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia), Ithaca 1952, hal. 27 dsl.
6. *Onderzoek naar de mindere welvaart der Inlandsche bevolking op Java en Madoera* (Penyelidikan terhadap berkurangnya kesejahteraan penduduk Bumiputera di Jawa dan Madura), Batavia, 1905—1914, Vol. VIa, Appendix I.

atau 560.390 orang pedagang bebas termasuk mereka yang mempunyai tanah pertanian. Ada pula sejumlah kecil orang Indonesia yang bekerja untuk pedagang-pedagang lain yang mungkin ditambahkan, tetapi amat sukar untuk menentukan jumlah mereka dengan tepat, karena dalam penyelidikan tahun 1905 itu mereka dimasukkan ke dalam golongan yang lebih besar, yaitu orang yang bekerja di perdagangan, industri dan pengangkutan. Dalam sensus Hindia Belanda tahun 1930[7] terdapat 908.940 orang ''Bumiputera'' yang menyebutkan perdagangan sebagai pekerjaan mereka yang utama. Karena petani, baik pria maupun wanita, yang menambah penghasilan mereka dengan kegiatan perdagangan sering memberikan yang tersebut kemudian ini sebagai pekerjaan mereka yang utama,[8] maka adillah kiranya memperbandingkan angka tahun 1930 dengan angka yang lebih tinggi tahun 1905. Karena data tahun 1930 mencakup orang yang bekerja untuk orang lain, maka katagori itu lebih luas daripada pedagang bebas yang terdaftar tahun 1905. Tetapi sensus tahun 1930 memperlihatkan kesan bahwa orang Indonesia yang bekerja di bidang perdagangan untuk kepentingan orang lain masih amat sedikit jumlahnya, karena sebagian besar dari mereka yang bekerja di bidang perdagangan bergerak di bidang makanan dan rokok eceran, yang menunjukkan bahwa mereka adalah pedagang bebas kecil. Lagi pula, pemilik toko Cina umumnya mempekerjakan para pegawai Cina, sehingga tidak mungkin terjadi bahwa amat banyak jumlahnya orang Indonesia yang bekerja dengan Cina. Perbandingan antara kelompok pedagang tahun 1905 dan tahun 1930, di samping adanya kemajuan mutlak yang amat besar, memperlihatkan semakin tingginya persentase jumlah penduduk Jawa dan Madura yang bekerja di bidang perdagangan tahun 1930. Tahun 1905, 1,87% dari seluruh penduduk (30 juta) adalah pedagang, dibandingkan dengan 2,27% dari seluruh penduduk (40 juta) tahun 1930.[9] Mungkin diperoleh gambaran yang berbeda kalau dikurangi dengan orang-orang yang bekerja untuk

---

7. *Sensus tahun 1930 di Hindia Belanda, Batavia, 1933—1936,* Vol. VIII, hal. 126, tabel 19.
8. *Sensus tahun 1930 di Hindia Belanda,* Vol. VIII, hal. 56.
9. *Verslagden economischen toestand der inlandsche bevolking, 1924* (Laporan tentang keadaan ekonomi penduduk bumiputera, 1924), Weltevreden. 1926, Vol. I, p. 177 dsl. menunjukkan terjadinya suatu pertambahan yang sederhana, terutama antara tahun 1913 dan tahun 1920.

orang lain. Tetapi benar-benar berkurangnya persentase orang yang bergerak dalam perdagangan, sebagaimana diduga Kahin, masih harus dibuktikan terlebih dahulu.

Perkembangan selanjutnya ketika masa depresi tahun-tahun 30-an juga menunjukkan bahwa bahkan sebelum tahun 1930, suatu kelas bumiputera yang baru tumbuh telah mulai ada, mendobrak susunan masyarakat tradisional lama dan melakukan pengaruh yang bersifat individual. Juga perkebunan-perkebunan telah menarik para petani ke luar dari lingkungannya yang lama dan menghubungkannya dengan dunia Barat, di mana dalam proses ini mereka menjadi semakin terbiasa dengan cara kehidupan Barat, dan pertunjukan filem pada hari gajian telah memainkan peranan yang penting.

Tetapi di Jawa, pengaruh faktor-faktor ini seluruhnya terlindung oleh cara tradisional masyarakat. Akibatnya terasa bahkan dalam bentuk-bentuk mengajar yang paling sederhana di desa. Bagaimana elementernya pendidikan dasar (membaca, menulis dan berhitung), tetapi karena si anak harus mengenal kewibawaan guru, di samping kewibawaan orang tua, maka pendidikan itu mempunyai pengaruhnya pula terhadap skala tradisional prestise kemasyarakatan dan terutama terhadap kewibawaan orang tua; karena kewibawaan guru dilakukan dalam suatu lapangan di mana orang tua amat tidak mempunyai pengetahuan, bahkan jika dibandingkan dengan anak-anak mereka yang masih muda-muda sekalipun. Pengaruhnya lebih terasa lagi ketika pendidikan si anak telah memungkinkannya mendapat pekerjaan di luar lingkungan pertanian Indonesia, yang juga mengandung prestise kemasyarakatan dan kemakmuran materi yang jauh lebih hebat dari apa yang dapat dicapai di rumah.

Terlepas dari bentuk pendidikan yang diberikan dan sebagaimana lumrahnya pendidikan itu bertentangan sekali dengan konsep-konsep bumiputera tradisional—kenyataan adanya pendidikan itu saja telah mendobrak struktur masyarakat pertanian. Walaupun sekolah-sekolah mencoba sekuat mungkin untuk menyesuaikan pendidikannya dengan keadaan masyarakat pertanian, orang-orang yang umumnya mendapat pendidikan pertanian atau pendidikan teknis sekalipun amat cenderung untuk mencari pekerjaan di kota-kota, di mana mereka dapat mencapai

prestise yang lebih tinggi.[10] Sebabnya adalah karena dalam masyarakat Indonesia, nilai yang lebih tinggi diberikan kepada kerja yang lebih kurang bersifat intelek, dan karena sedikit sekali jumlahnya orang yang pandai baca-tulis, maka orang yang memiliki keahlian ini dapat menerima pendapatan yang relatif tinggi. Jurutulis biasanya mendapat penghargaan lebih tinggi dari seorang petani yang berpengalaman, dan bahkan mungkin mencapai suatu tingkat hidup yang lebih baik.[11]

Dengan demikian, pendidikan telah menciptakan suatu kelas baru kaum cendekiawan atau setengah cendekiawan yang menduduki suatu posisi khusus dalam masyarakat. Dalam pengertian tertentu, hal ini membuat orang menjadi individualistis, sebagaimana akibat yang ditimbulkan ekonomi uang di luar Jawa. Prestise sosial dan kehidupan materi yang lebih makmur yang dikaitkan kepada posisi ''cendekiawan'' adalah demikian menariknya sehingga banyak rakyat biasa yang rela memberikan pengorbanan yang amat berat untuk memberikan kepada anak-anak mereka keuntungan-keuntungan pendidikan yang baik secara pantas.[12]

Usaha pribadi untuk naik dalam tingkat-tingkat sosial dalam masyarakat ini tidak mengambil bentuk perjuangan untuk memperoleh laba dari perdagangan atau dari suatu pekerjaan bebas, tetapi dalam suatu perjuangan untuk mencapai pengakuan resmi dengan perantaraan ijazah.[13] Karena pengetahuan bahasa Belanda khususnya merupakan paspor untuk memperoleh jabatan yang tidak dapat dicapai

---

10. Lihat umpamanya J.S. Purnivall, *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India* (Kebijaksanaan dan Praktek Kolonial: Suatu Pengkajian Perbandingan antara Burma dan Hindia Belanda), Cambridge, 1948, hal. 381.
11. J. van Gelderen, *Voorlezingen over tropisch-koloniale staathuihoudkunde* (Beberapa kuliah tentang ekonomi politik di daerah tropis kolonial), Haarlem, 1927, hal. 68.
12. Lihat C. Hooykaas, ''Voldoet de A.M.S. nog'' (Apakah A.M.S. masih tetap memuaskan?), dalam *koloniale Studien* (Studi-Studi Kolonial), Vol. XXIV, 1940, hal. 24; Takdir Alisjahbana, ''De botsing van Oost en West'' (Pertarungan antara Timur dan Barat), dalam *Sticusa Jaarboek* (Buku Tahunan Yayasan Kerjasama Kebudayaan antara Belanda, Indonesia, Suriname dan Antilles Belanda), 1950, hal. 58.
13. D.H. Burger, *Structural Changes in Javanese Society: The Supra-Village Sphere* (Perubahan-perubahan Struktural dalam Masyarakat Jawa: Suasana di Atas Tingkat Desa), hal. 21.

oleh kebanyakan orang, maka pengetahuan tentang bahasa itu juga telah terlibat dalam penentuan prestise kemasyarakatan.

Ikatan-ikatan tradisional memainkan peranan dalam usaha mengumpulkan sejumlah uang untuk memungkinkan seorang anak pergi belajar, karena beberapa orang anggota keluarga harus ikut-serta membelanjai sekolah anak itu; sedangkan seluruh keluarga berusaha untuk mengambil untung daripadanya, bukan hanya dengan melalui prestise sosial yang lebih menanjak dari calon yang berhasil, tetapi juga dari pendapatannya yang bertambah besar. Tetapi kendatipun demikian usaha memburu ijazah itu juga membuat orang menjadi individualistis.

Dengan demikian, pendidikan telah menciptakan seluruh kelas orang Indonesia yang mempunyai pendidikan Barat sampai ke tingkat tertentu, dan adanya kelas ini telah menimbulkan suatu akibat yang sama dinamisnya terhadap sistem status di Jawa seperti pengaruh perkebunan karet di luar Jawa.

Pertama-tama, adanya kelas ini mempengaruhi sistem nilai kemasyarakatan dalam masyarakat Indonesia, (dalam arti sempit). Kalau di zaman dahulu, orang hanya memandang kepada pemuka-pemuka tradisional dan para pemimpin agama, sekarang mereka mulai menilai kewibawaan para pemimpin kerohanian yang baru, yaitu para cendekiawan, lebih dari kewibawaan para penguasa tradisional dan Kiai (guru agama Islam). Guru sekolah yang terlatih secara Barat inilah yang pertama-tama dan terutama melambangkan prestise yang baru ini. Tetapi kehidupan berorganisasi modernlah yang pertama-tama memperlihatkan dengan jelas betapa dalamnya pengaruh yang sudah masuk ke dalam struktur tradisional. Pertumbuhan Sarekat Islam yang luar biasa besarnya kira-kira di saat Perang Dunia I telah menunjukkan bahwa massa tidak lagi patuh kepada kekuasaan tradisional tetapi telah siap untuk mengikuti kepemimpinan kepala-kepala serikat buruh yang berasal dari kelompok cendekiawan.[14]

Persis sebagaimana orang-orang kaya baru di Minangkabau dan di tempat-tempat lain di luar Jawa menuntut *ius connubii* (hak untuk

---

14. Lihat P.A.A. Djajadiningrat, *Herinneringen van Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat* (Memoir Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat), Amsterdam/Batavia, 1936, hal . 284 dsl.

kawin) dengan para pemuka adat, maka demikian pula para cendekiawan baru yang paling makmur di Jawa, yang banyak dari mereka berasal dari Sumatera, juga menuntut masuk ke dalam kalangan bangsawan Jawa tertinggi.[15] Bersama-sama dengan aristokrat penguasa lama, para cendekiawan ini membentuk suatu kelas 'priyayi baru' yang akan merupakan lapis tertinggi dalam masyarakat Indonesia.[16]

Tetapi adanya suatu kelas cendekiawan atau setengah cendekiawan Indonesia tidak hanya mendobrak susunan kemasyarakatan Jawa tradisional saja. Kelas itu juga mendobrak pelapisan sosial kolonial abad XIX yang berdasarkan perbedaan ras. Pendidikan Barat telah memberikan kesempatan kepada orang-orang Indonesia untuk mengisi jabatan-jabatan yang tadinya hanya disediakan untuk 'kasta' Eropa saja. Dengan cara begini, dasar sistem status kolonial secara berangsur-angsur rubuh. Di sini, sebagaimana juga di tempat-tempat lain, pendidikan telah bertindak sebagai dinamit terhadap sistem kasta kolonial.[17]

Ketegangan gawat yang terjadi di Indonesia pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia II dihubungkan orang sampai ke suatu batas yang amat menonjol dengan kenyataan di mana berbagai kelompok telah saling berhubungan berkat pendidikan. Meluasnya badan-badan pemerintah dan usaha dagang Barat di waktu pertengahan kedua dari abad XIX telah menyebabkan timbulnya kebutuhan akan tenaga-tenaga yang terlatih dalam administrasi dan mahir berbahasa Belanda. Penyelesaian yang nyata adalah pertama-tama menarik kelompok-kelompok yang telah mempunyai semacam hubungan dengan kebudayaan Belanda. Dengan demikian maka golongan Indo adalah yang pertama beruntung dari kesempatan yang diberikan pendidikan. Di antara orang-orang Indonesia, anak-anak para pemuka adat, orang-orang Kristen Ambon dan Menado adalah yang pertama mendapat kesempatan secara besar-besaran memperoleh fasilitas pendidikan yang semakin bertambah.

---

15. D.H. Burger, *Structural Changes in Javanese Society: The Supra-Village Sphere*, hal. 21.
16. I.J. Brugmans dan Soenario, "Enkele gegevens van sociale aard" (Beberapa Data Tentang Susunan Sosial), dalam *Verslag van de Commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen* (Laporan Komisi Pengkajian reformasi politik), New York, 1944. Vol. I, hal. 72.
17. Bandingkan R. Kennedy, *op. cit.*, hal. 311: "Pendidikan akan merupakan dinamit bagi sistem kasta yang kaku di daerah jajahan".

Baru setelah tahun 1900, pendidikan terbuka untuk sejumlah besar orang-orang Indonesia. Permintaan akan tenaga terlatih selalu meningkat. Orang-orang Indonesia mulai diangkat kepada jabatan-jabatan yang tadinya merupakan hak istimewa orang-orang Eropa. Mungkin sekali bukan karena alasan keadilan, tetapi untuk mencegah agar para pegawai Indonesia yang bergaji rendah jangan mendepak orang-orang Eropa ke luar, maka gaji yang sama untuk kerja yang sama baik bagi orang-orang Indonesia maupun bagi orang-orang Eropa telah dianut sebagai suatu prinsip setelah tahun 1913.[18] Tetapi untuk pengangkatan-pengangkatan yang meminta pendidikan tinggi yang pada umumnya untuk sementara waktu hanya dapat diisi oleh orang-orang Indo, maka diadakan skala gaji khusus, disesuaikan dengan tingkat hidup golongan Indo yang lebih tinggi. Sedangkan jabatan-jabatan tertinggi, yang pada umumnya diisi oleh tenaga-tenaga yang didatangkan ke negeri itu dari luar negeri, diberikan gaji yang relatif jauh lebih tinggi daripada yang lainnya, demi untuk menarik tenaga staf ke daerah tropis. Dengan begini maka jabatan yang mempunyai hak istimewa dari lapis teratas Eropa dapat dipertahankan selama mungkin. Tetapi kemajuan di bidang pendidikan menjadikan pangkat-pangkat yang semakin penting berada dalam jangkauan orang-orang Indonesia, dengan akibat bahwa pembayaran tambahan yang biasanya diberikan kepada pengangkatan-pengangkatan yang lebih tinggi lama-lama menjadi hilang dan jabatan-jabatan khas untuk orang "Eropa" amat menurun jumlahnya. Terutama di masa depresi tahun-tahun tigapuluhan, proses "peng-Indoan" badan-badan administratif telah maju dengan cepat sekali.[19]

---

18. Lihat *Javanese Courant,* 12-8-1913, Nr. 67; Paul W. van der Veur, "The Eurasians of Indonesia: Castaways of colonialsm" (Orang-orang Indo Indonesia: Sampah Kolonialisme) dalam *Pacific Affairs* Vol. XXVII, 1954, hal. 125.
19. Lihat artikel-artikel tentang Peng-Indoan dalam *Koloniale Studiën,* Vol. XVI, 1932; Bagian I: J.H. Boeke, "Indianisation", hal. 243 dsl.; D.M.G. Koch :"De vakeweging en de Indianiseering" (Gerakan buruh dan Indianisasi), hal. 348 dsl.

Persentase tenaga administratif menurut kelompok penduduk pada tahun 1938 diperbandingkan dengan tahun 1928.[20]

	1938			1928		
	Eropa	Indo-nesia	Timur Asing	Eropa	Indo-nesia	Timur Asing
Staf teknis	77,14	20,12	2,74	84,77	14,38	0,85
Staf teknis ad-ministratif	55,81	41,98	2,24	77,06	22,28	0,68
Staf keuangan	67,08	30,46	2,46	80,45	18,8	0,75
Staf administratif	65,18	32,16	2,66	93,66	5,1	1,24
Staf pengawas	83,97	15,68	0,35	92,46	7,33	0,21

Persentase pegawai pemerintah dalam berbagai golongan menurut kelompok penduduk tahun 1938.[21]

Kelompok penduduk	Pegawai rendah	Pegawai menengah rendah	Pegawai menengah tinggi	Pegawai tinggi
Eropa	0,6	33,3	57,6	92,2
Indonesia	98,9	60,6	38,0	6,4
Indonesia berasimilasi dengan Eropa	0,2	3,4	2,0	0,5
Timur Asing	0,3	2,7	2,3	0,8
J u m l a h	100	100	100	100

Pendidikan model Barat, dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, telah menimbulkan keintiman kebudayaan antara kelompok-kelompok yang luas dari orang-orang Indonesia dan orang-orang Eropa yang tumbuh-kembang di Indonesia. Apakah hal ini juga

20. Diambil dari I.J. Brugmans dan Soenario, *op. cit.*, Vol. I, hal. 56.
21. Diambil dari I.J. Brugmans dan Soenario, *Ibidem.*

menjadikan mereka lebih dekat secara kemasyarakatan? Malah sebaliknya. Ketika dinding-dinding ras semakin hilang, ketegangan semakin bertambah. Kendatipun telah berkembang suatu kelas menengah Indonesia, yang terdiri dari pegawai pemerintah, pegawai swasta dan para pedagang, perbedaan pendapatan pada umumnya masih sejalan dengan pembagian ras, di mana rata-rata pendapatan orang Eropa adalah yang tertinggi, pendapatan orang Cina di tengah-tengah, dan pendapatan orang Indonesia yang paling rendah. Orang-orang Indonesia yang telah mendapat sedikit pendidikan tidak dapat lagi menerima pelapisan sosial kolonial berdasarkan ras sebagai suatu yang semestinya begitu. Diskriminasi hukum dan sosial berkurang, tetapi sisa-sisanya semakin menusuk perasaan. Garis-garis batas sosial mulai mencair. Karena itu, banyak timbul kelompok-kelompok rakyat yang merasa tidak puas lagi dengan status sosial mereka, sedangkan yang lainnya merasa kedudukan mereka yang lebih menguntungkan dalam perbandingan terancam. Persaingan ekonomi dan sosial timbul antara kelompok-kelompok yang berdampingan, dan persaingan ini menjadi semakin hebat setelah semakin dekat mereka mendekati yang lainnya secara kebudayaan.

Persaingan yang semakin hebat dalam suatu masyarakat di mana karena adanya suatu sistem ekonomi yang dominan, serta terdapat lebih banyak lamaran daripada kesempatan kerja, telah menyebabkan para anggota kaum borjuis mempersatukan barisan untuk mencapai solidaritas kelompok. Dan apakah lagi yang lebih wajar dalam suatu masyarakat yang sendinya adalah garis warna kulit, daripada suatu persatuan yang harus menurut garis-garis rasial yang ada?

Dengan demikian, sekitar tahun 1920, golongan Indo bergabung dalam Persatuan Indo Eropa (*Indo-Europeesch Verbond*) dalam menghadapi kelas yang sedang menanjak, yaitu orang-orang Indonesia yang berpendidikan Barat. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan hak-hak istimewa kemasyarakatan yang telah mereka peroleh sendiri. Mereka membangun suatu perasaan lebih tinggi yang dibuat-buat dalam menghadapi kaum bumiputera yang berjuang untuk menciptakan jarak yang lebih besar lagi antara yang tersebut kemudian ini dengan diri mereka, sementara itu menekankan watak ke-Eropaan mereka. Apa yang di abad XIX umumnya merupakan bayangan dari suatu kenyataan kemasyarakatan, sekarang telah berubah menjadi

pemisahan rasial yang dipertahankan dengan cara-cara yang dibuat-buat. Ketakutanlah yang telah menyebabkan mereka berkubu di belakang pagar-pagar rasial dengan lebih berteguh tekad daripada sebelumnya.

Di pihak lain, di kalangan orang-orang Indonesia terdapat kecenderungan yang lebih besar untuk mengadakan persatuan. Ini disertai dengan kesadaran kebangsaan yang semakin meningkat dan rasa hormat yang semakin berkurang terhadap bahasa Belanda sebagai suatu faktor sosial, juga terhadap pengangkatan di dalam dinas pemerintahan Belanda dan terhadap sikap berasimilasi ke dalam kalangan-kalangan Belanda. Penggunaan bahasa Indonesia, suatu bentuk bahasa Melayu yang dipermodern, serta pemakaian kopiah, suatu tutup kepala berwarna hitam, telah menjadi lambang dari kesadaran nasional. Seorang nasionalis tulen adalah seorang yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda; ia tidak lagi mendambakan suatu jabatan dalam dinas pemerintahan. Wanita-wanita Indonesia dengan rasa harga diri semakin lama semakin kurang mengindahkan bekerja sebagai pembantu rumah tangga merangkap selir bagi laki-laki Eropa yang tidak kawin. Pada akhirnya setelah tahun 1930, bahkan kelihatannya kawin dengan seorang laki-laki Eropa pun sudah dianggap kurang menarik bagi seorang wanita Indonesia dibandingkan dengan sebelumnya.[22] Dengan demikian, suatu ukuran nilai baru secara berangsur-angsur telah menampakkan dirinya di atas ukuran kolonial yang lama. Bersama-sama dengan pendidikan, ukuran nilai yang baru ini telah mempengaruhi wanita dan pemuda. Dalam kapasitasnya sebagai cendekiawan yang berpendidikan Barat dan teman seperjuangan dalam perjuangan nasionalis, kaum wanita dan pemuda sering dapat meraih prestise sosial untuk diri mereka yang pada hakekatnya bertentangan dengan gagasan Indonesia tradisional. Juga dalam pengertian ini, pendidikan Barat, yang juga telah dinikmati oleh banyak wanita-wanita muda, telah mempunyai suatu pengaruh yang revolusioner dalam masyarakat Indonesia.

---

22. A. van Marle, ''De groep der Europeanen in Nederlands Indie: Iets over ontstaan en groei'' (Kelompok Eropa di Hindia Belanda: Sesuatu tentang asal-usul dan pertumbuhan) dalam *Indonesie,* Vol. 1951/52, hal. 507. Gouw Giok Siong *op cit.,* hal. 21, menyatakan bahwa sebab dari berkurangnya perkawinan campuran antara wanita Indonesia dan laki-laki Eropa di waktu masa depresi adalah faktor-faktor Ekonomi. Tetapi pada waktu yang sama, perkawinan dengan wanita-wanita Cina memperlihatkan kecenderungan meningkat.

Dalam tahun kemelut, perjuangan persaingan ini menjadi lebih hebat. Orang-orang Indo harus mengikuti kursus-kursus yang lebih tinggi dalam pendidikan agar dapat mempertahankan tingkat Eropanya. Pada tingkat ini mereka berkompetisi dengan orang-orang kulit putih yang datang ke Indonesia dari luar negeri dalam jumlah yang jauh lebih sedikit semenjak tahun 1930. Di pihak lain, semakin banyak pula jumlahnya orang-orang Indo yang gagal dalam perjuangan ini dan ketinggalan, lalu, masuk ke dalam kampung, yaitu bagian kota yang miskin yang didiami penduduk asli. Pengangguran di tahun-tahun kemelut itu telah menyebabkan banyak orang-orang Indo jatuh ke dalam kondisi kemiskinan materi.

Proses seperti itu dapat juga dilihat di dunia dagang. Orang Cina tidak lagi memegang monopoli dalam lapangan ini. Pedagang-pedagang Indonesia yang jumlahnya semakin besar, beberapa di antara mereka mengorganisir diri menurut garis-garis koperasi, mulai mengancam kedudukan mereka dari bawah. Sebagaimana dikatakan Cator: ''Di Jawa Timur dan di keresidenan-keresidenan Priangan terdapat . . . . penurunan yang tidak dapat dibantah lagi dari saham Cina dalam perdagangan'', dan (untuk keresidenan-keresidenan Priangan dan Palembang) ''Pedagang-pedagang menengah bumiputera mulai mendepak orang-orang Cina.''[23] Dalam lapangan usaha industri kecenderungan ini kelihatannya lebih menonjol lagi. Menurut buku kecil Sitsen, yang ditulis di zaman perang pada waktu sepuluh tahun terakhir ini, bertentangan dengan apa yang terjadi sebelumnya, produsen-produsen batik Cina hampir semuanya telah didorong ke luar oleh kontraktor-kontraktor Indonesia, sebagaimana juga di Pekalongan.[24] Untuk daerah lain, harus diingat bahwa pada banyak daerah pulau-pulau luar Jawa, para pedagang bumiputera telah selalu berhasil dalam bersaing dengan perusahaan Cina. Di beberapa daerah, seperti Minangkabau dan Hulu Sungai,[25] yang tersebut kemudian ini telah mampu memperoleh

23. W.J. Cator, *The Economic Position of the Chinese in the Netherlands Indies* (Posisi Ekonomi Cina di Hindia Belanda), Oxford, 1936, hal. 74. dsl.
24. P.H.W. Sitsen, *Industrial Development of the Netherlands Indies* (Perkembangan Industri di Hindia Belanda), New York, 1942, hal. 21 dsl.
25. Lihat M. Joustra, *Minangkabau: Overzicht van land, geschiedenis en volk* (Minangkabau: Pandangan Umum tentang negeri, sejarah dan rakyatnya), Leiden, 1921, hal. 83. R. Broersma, *Handel en bedrijf in Zuid — en Oost-Borneo* (Perdagangan dan Industri di Kalimantan Timur dan Selatan), The Hague, 1927, hal.119.

pangkalan. Karena itu, argumentasi Kahin yang menyatakan bahwa orang-orang Cina telah mendepak orang-orang Indonesia ke luar dari perdagangan sampai Perang Dunia II,[26] tidak dapat dianggap pasti.

Lagi pula, di waktu periode kemelut, pedagang menengah Cina menghadapi lagi kesukaran yang lebih besar, karena para importir Jawa berusaha untuk menghilangkan perdagangan perantara Cina. Mereka juga menjadi terpaksa, baik untuk mengorganisir diri mereka menjadi perusahaan-perusahaan yang lebih besar untuk mempertahankan diri terhadap persaingan Indonesia dari bawah, maupun mencari pekerjaan di perusahaan atau dinas pemerintah yang di waktu yang lalu amat sedikit mereka perhatikan[27]. Para cendekiawan Cina mulai bersaing dengan orang-orang Indo dan Indonesia untuk memperoleh jabatan-jabatan tertinggi di Pemerintahan. Sebaliknya banyak orang-orang Cina menurun derajat mereka ke tingkat proletar, dan tidak lagi hanya terbatas kepada Singkeh saja, yaitu orang-orang Cina yang didatangkan dari luar negeri. Orang Cina juga mencari keselamatan diri dengan mengadakan solidaritas yang lebih kuat. Dalam keadaan mereka, hal ini, yang juga berupa pemisahan diri dari orang-orang Indonesia dalam bentuk yang semakin menghebat, adalah juga dibuat-buat, karena di antara kedua kelompok itu terdapat persamaan kebudayaan yang semakin besar. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa orang Cina Indonesia biasanya telah lupa akan bahasa Cina. Yang makmur dari mereka mempergunakan bahasa Belanda sedangkan yang kurang makmur mempergunakan bahasa Indonesia, baik bahasa setempat maupun bahasa Melayu Cina.

Dengan demikian, bahkan sebelum perang, kedudukan istimewa yang diduduki orang Eropa dan orang Cina, sebagaimana halnya dengan kaum bangsawan feodal, telah menjadi amat kurang stabil. Terdapat suatu kecenderungan yang kuat ke arah suatu sistem nilai yang baru berdasarkan kemakmuran individu dan kemampuan intelektual seseorang; tetapi perkembangan ini pada umumnya masih ditahan, baik oleh sisa-sisa struktur feodal maupun kolonial.

---

26. G. McT. Kahin, *op. cit.,* hal. 27 dsl.
27. Lihat Liem Twan Djie, *De distribueerende tusschenhandel der Chineezen of Java* (Perdagangan perantara distributif dari orang-orang Cina di Jawa), The Hague 1947, hal. 66 dsl. Lihat juga tabel-tabel yang dimuat di halaman 149 di atas, yang memperlihatkan bertambah meningkatnya dalam bentuk yang menyolok jumlah orang-orang Timur Asing dalam dinas-dinas pemerintahan.

15. PENYEBARAN INOVASI DARI LAPISAN ATAS KE LAPISAN BAWAH*)

Adopsi terhadap teknologi baru tidak terjadi secara serempak. Seseorang menerima lebih cepat dari orang lain, dan pada umumnya grafik adopsi selalu merupakan kurva S yang menandakan bahwa pada saat-saat permulaan hanya sedikit orang yang mengadopsi, tetapi lambat laun frekuensi adopsi per satuan waktu menjadi meningkat dengan laju yang selalu lebih tinggi, kemudian diakhiri dengan non-adopsi ketika di dalam masyarakat hanya tinggal ''*laggards*'' saja.

Adapun yang merupakan penelaahan dalam bagian ini adalah masalah komunikasi dengan mana orang-orang dari ''lapisan bawah'', yang pada umumnya merupakan ''penerima lambat'' (*late adopters*) menjadi tertarik untuk mengadopsi teknologi baru atas pengaruh-pengaruh dari orang-orang yang telah mengadopsi lebih dahulu. Penelaahan dilakukan di dua desa, Cianjur dan Bekasi.

1. Desa Cianjur

berdasarkan kelompok contoh yang telah terambil, desa ini termasuk pemilik warga lapisan atas yang lebih tinggi dari 50% (17 orang dari 25 responden). Selain itu penyebaran panca-usaha telah cukup meluas, juga pemakaian pupuk buatan (13 orang telah mulai memakai pupuk pada segala tanaman). Gambarannya sebagai berikut:

Skor panca-usaha seluruh tanaman:
LA = 16 orang = 94,12%, LB = 5 orang = 62,5%.

Skor pupuk seluruh tanaman:
LA = 10 orang = 58,8 %, LB = 3 orang = 37,50%.

---

*) Oleh h. Soewardi, dikutip dari *Respons masyarakat desa terhadap modernisasi produksi pertanian, terutama padi,* di Jawa Barat, 1972, halaman 170—185.

Skor panca-usaha padi:
LA = 15 orang = 88,23%, LB = 5 orang = 62,50%.

Skor pupuk padi:
LA = 7 orang = 41,17%, LB = 2 orang = 25,00%.

Melihat angka-angka persentase di atas kita condong untuk menyatakan bahwa warga lapisan atas menerima panca-usaha dan pupuk buatan lebih cepat dari lapisan bawah. Namun perbedaan-perbedaan itu tidak cukup besar untuk mencapai "perbedaan nyata".

Masalah selanjutnya adalah bagaimana warga lapisan bawah menjadi tertarik untuk menerima dan melaksanakan pancausaha dalam tanah garapan mereka melalui proses komunikasi. Untuk maksud ini kampung Selakawung telah dijadikan tempat penelitian lebih lanjut. Di kampung ini berdiam enam orang responden yang telah diteliti, ialah responden nomor 2 (warga lapisan bawah), dan responden-responden nomor 3, 4, 5, 7 dan 9 (dari lapisan atas).

Kampung Selakawung termasuk: lingkungan pengaruh keagamaan dengan Ajengan Abdul Halim sebagai tokohnya yang kuat. Ajengan ini termasuk tipe ajengan yang berpandangan bahwa "keduniawian (dan masalah-masalah pemerintahan) adalah bukan urusan saya", yang sesuai dengan pandangannya ini ia selalu menganjurkan kepada pengikut-pengikutnya untuk hidup dengan cara-cara tertentu sehingga dengan demikian mereka juga akan selamat dalam perjalanan hidup di akhirat. Misalnya dalam cara berpakaian setiap orang laki-laki hendaknya berkopiah (jangan bubudugulan seperti "babah"), dan orang perempuan harus berkerudung. Ia sangat tidak menyukai orang-orang desa yang berpakaian seperti orang-orang kota. Segala macam permainan yang menimbulkan kegembiraan (seperti bermain layang-layang, apalagi bila disertai dengan "perjudian") dan keramaian (misalnya gamelan, wayang golek) selalu dikutuknya. Dan selain itu memiliki pesawat radio (apapun tujuannya) dianggapnya sebagai kelakuan yang tidak senonoh. Jadi dia tidak memperkenankan pemakaian alat pengeras suara di dalam mesjidnya. Ajengan Abdul Halim tetap menganjurkan agar orang-orang berusaha menurut kemampuan masing-masing, agar tidak menjadi pengemis, namun dia tetap memperingatkan bahwa usaha seseorang, betapapun gigihnya, tidak akan bisa mengubah takdir yang sudah ditetapkan. Seseorang yang sudah tersurat miskin akan tetap

miskin, dan sebaliknya, yang tersurat kaya akan menjadi kaya, namun yang kaya hendaknya jangan memamerkan kekayaannya itu di hadapan orang-orang miskin. Yang selalu ditekankan untuk diingat oleh orang-orang kaya adalah mengeluarkan zakat dan fitrah daripada kekayaannya itu menurut jumlah yang sudah ditetapkan. Karena itu menurut pendapatnya, kekayaan material tak lain adalah ''beban'', maka apa perlunya dikejar-kejar. Lebih baik orang mengejar ilmu, yang ''ringan'' dan mudah dibawa ke mana-mana serta bermanfaat. Dia tidak bisa terlalu menyetujui orang-orang yang bersusah payah untuk meningkatkan hasil sawahnya dengan pancausaha, pemupukan dan lain-lain, karena hasil usaha itu sudah tersurat di dalam takdir.

Ajengan Abdul Halim adalah seseorang yang sangat teguh memegang pendiriannya itu. Tetapi juga dia bersikap toleran. Dia tidak memaksakan pendapatnya itu untuk diikuti oleh setiap orang. Karena itu di kampung Selakawung dia bisa tetap hidup rukun dengan orang-orang dari ''lingkungan pengaruh pemerintahan'' atas dasar saling hormat-menghormati pandangan masing-masing. Toleransinya ini dikagumi dan dihormati oleh orang-orang pemerintahan yang diam di kampung itu, dengan tokoh-tokohnya bekas lurah (Haji Sobandi), Juru Tulis desa (responden nomor 3), dan pensiunan sersan mayor TNI (responden nomor 5). Ketiga tokoh ini merupakan penerus unsur-unsur modernisasi untuk kampung Selakawung khususnya dan desa Cianjur umumnya.

Juru tulis desa menerangkan bahwa Ajengan Abdul Halim sering pula membantunya dalam hal-hal yang memerlukan pengerahan tenaga rakyat, misalnya dalam menjalankan berbagai pekerjaan gotong-royong. Di samping pandangan-pandangannya yang condong untuk mementingkan ''kehidupan di akhirat'' Ajengan Abdul Halim tetap mengakui pentingnya ''hidup di masa sekarang'' yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena itu Ajengan ini menaruh hormat terhadap ''apa yang diinginkan oleh pemerintah'', dan bila dapat dia selalu bersedia membantu aparat pemerintah desa, misalnya bila diperlukan pengaruhnya untuk mengerahkan tenaga rakyat. Demikianlah keterangan jurutulis desa.

Maka di kampung Selakawung ini ada dua macam kekuatan yang berpengaruh terhadap *kecepatan* menjalarnya unsur-unsur modern. Lingkungan pengaruh pemerintahan adalah kekuatan yang *meneruskan* dan menganjurkan sedangkan lingkungan keagamaan merupakan

kekuatan mengerem atau memperlambat. Namun kedua kekuatan ini tidak kuasa atau tidak berkemampuan untuk *memaksakan* pandangannya/kehendaknya. Bagi para pengikut masing-masing lingkungan pengaruh itu, pandangan tokoh-tokoh mereka barangkali lebih tepat disebut sebagai "pedoman" untuk diikuti atau tidak diikuti, terserah kepada hasrat masing-masing. Dan ternyata bahwa warga kampung Selakawung ikut lingkungan pengaruh keagamaan dalam beberapa hal, tapi ikut lingkungan pengaruh pemerintahan dalam hal-hal lain. Rupanya inilah yang merupakan salah satu sebab yang memungkinkan menyebarnya unsur-unsur modern di dalam lingkungan pengaruh keagamaan yang kuat tanpa menimbulkan pertentangan-pertentangan yang hebat. Khususnya tentang penyebaran unsur-unsur pancausaha di kampung Selakawung dapat diikuti pada gambar "*sosiogram*" di bawah.

Desa Cianjur mulai mengenal pancausaha sejak permulaan tahun limapuluhan. Beberapa orang tipe "inovator" (dari lapisan atas, di antaranya Wapi, ayah responden nomor 21) telah mulai melaksanakannya. Kemudian dalam tahun 1957 mantri pertanian Jupri mengadakan kursus. Sebanyak 17 orang lulus dari kursus tersebut, antara lain H. Sobandi (waktu itu menjadi lurah), Miftah (responden nomor 7), Sudirman (responden nomor 5), Adeng (responden nomor 4), Otang dan Asbani. Mereka semua orang-orang dari "lapisan atas".

Sangat tertarik dalam hal ini adalah ikut sertanya Adeng, Otang dan Asbani yang merupakan pengikut lingkungan pengaruh keagamaan. Mereka ikut serta karena ajakan Haji Sobandi yang merupakan teman bermain sewaktu kecil. Di lain pihak ada seorang H. Muchidin (responden nomor 9, juga warisan lapisan atas), namun tidak tertarik untuk ikut kursus, dan sampai penelitian ini dilakukan (pada tahun 1970), H. Muchidin masih tetap menentang penggunaan pupuk pabrik dan unsur-unsur pancausaha lainnya. Rupa-rupanya hal ini disebabkan berhubung H. Muchidin tidak memiliki "*reference*" lain kecuali lingkungan keagamaan, dan kepatuhan yang sangat besar terhadap Ajengan Abdul Halim.

Selanjutnya Anda (responden nomor 2), yang merupakan warga lapisan bawah, baru melakukan pemupukan (hanya urea saja), sejak tahun 1968 atau sebelas tahun kemudian setelah Adeng, Otang, Asbani (warga-warga lapisan atas) melaksanakannya. Anda (responden nomor 2), yang juga merupakan pengikut lingkungan pengaruh keagamaan,

Gambar VI.1. Penyebaran Pancausaha di Kampung Selakawung Cianjur
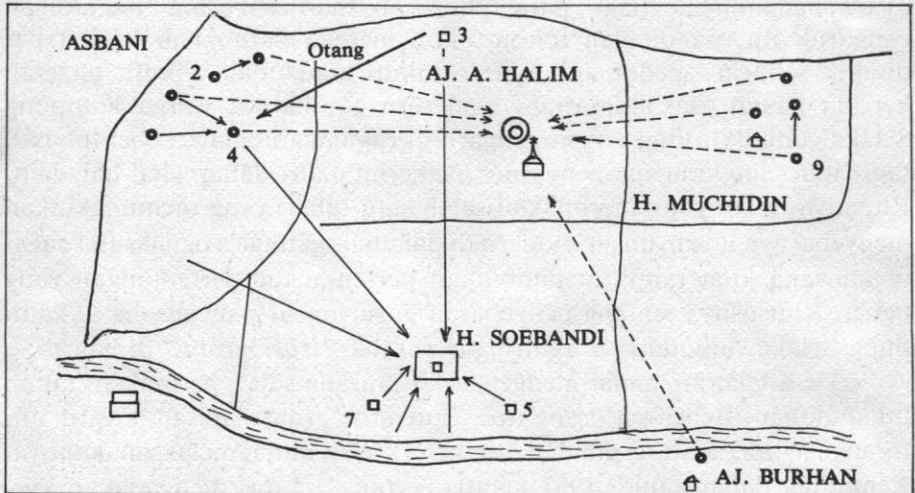
Keterangan:

◎ = pusat lingkungan pengaruh keagamaan
= mesjid
● = pengikut lingkungan pengaruh keagamaan
⊡ = pusat lingkungan pengaruh pemerintahan
□ = pengikut lingkungan pengaruh pemerintahan
----> = *reference* di bidang keagamaan
——> = *reference* di bidang pemerintahan
—— = jalan setapak
= jalan desa.

akhirnya dapat diyakinkan oleh Adeng dalam penggunaan-pancausaha sebelas tahun kemudian.

H. Sobandi, ketika menjabat sebagai lurah, sering menganjurkan penggunaan pancausaha kepada rakyatnya. Namun dia tidak mampu untuk "memaksa", dan menurut keterangannya penyebaran pancausaha dalam permulaan tahun enampuluhan sampai diadakan "Padi Sentra" sangat lambat jalannya. Begitu dia berhenti menjadi lurah, diapun tidak aktif lagi dalam penyuluhan kecuali bila ada orang yang bertanya kepadanya.

Para "inovator" lain (Miftah, Sudiman, Makmur, Wapi) juga tidak pernah secara sengaja menyuluh. Mereka berpendapat bahwa

menyuluh mengandung banyak risiko berhubung bila terjadi kegagalan-kegagalan, mereka takut dipersalahkan. Atas pertanyaan apakah banyak petani yang sengaja bertanya tentang pancausaha kepada mereka, juga mereka menjawab bahwa pada umumnya petani-petani (dari lapisan bawah) enggan bertanya. Tapi para petani itu biasa ''meniru dengan diam-diam'', yang tentunya hasilnya tidak akan sempurna.

Seorang ''inovator'' yang ingin menyuluh adalah jurutulis desa (responden nomor 3), berhubung hal itu adalah ''kewajibannya'' dan dia memang merasa senang menyuluh dan juga tidak malu bertanya bila ada seseorang petani yang ternyata mengungguli pengetahuannya di bidang pancausaha. Dia tidak segan bertanya kepada Adeng (responden nomor 4) misalnya.

Adeng ternyata mempunyai kedudukan yang istimewa di bidang penyebaran pancausaha. Secara *''visual''* Adeng menyerupai kebanyakan petani-petani dari ''lapisan bawah'' ialah rumahnya yang sederhana, tanahnya yang di bawah rata-rata luas tanah desa, dan selain itu juga ''kekurangan modal''. Akan tetapi Adeng memiliki karakteristik-karakteristik warga lapisan atas dan pergaulannya juga dengan orang-orang dari lapisan atas. Keistimewaan Adeng adalah bahwa dia merupakan pusat tempat petani-petani dari lapisan bawah, bertanya dalam soal-soal pancausaha dan soal-soal pencarian nafkah pada umumnya. Adenglah yang berhasil meyakinkan Anda (responden nomor 2, lapisan bawah) untuk menggunakan pancausaha dan selain Anda ada tiga atau empat petani lain yang berhasil diyakinkannya. Rupa-rupanya ''kesederhanaan'' Adeng, atau keadaan Adeng yang secara *visual* menyerupai orang-orang dari lapisan bawah itulah yang menjadikan petani-petani lapisan bawah tidak merasa enggan untuk bergaul dengan Adeng dan bertanya soal-soal pancausaha secara sungguh-sungguh.

Dari uraian-uraian di atas yang diungkapkan melalui ''sosiogram'', kita dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Warga lapisan atas pada umumnya bersikap responsif terhadap pembaharuan-pembaharuan, dan menerima unsur-unsur pembaharuan itu langsung dari penyuluh sebagai media yang menyebarkannya.
2. ''Lingkungan-lingkungan Pengaruh'' tidak berdaya ''memaksakan''

pandangan atau kehendaknya kepada para pengikutnya, baik untuk mengadopsi maupun untuk menghalangi terjadinya adopsi.

3. Terjadinya adopsi terhadap inovasi baru adalah atas pengaruh pergaulan akrab, di mana keakraban ini dimulai sejak kecil.
4. Penyebaran inovasi dari lapisan atas ke lapisan bawah terjadi melalui warga lapisan atas yang secara *visual* menyerupai orang-orang lapisan bawah, merupakan tempat bertanya atau ''bidang kontak'' antara lapisan atas dan lapisan bawah.
5. Warga lapisan atas sebagai ''inovator'' tidak suka menyuluh secara sengaja, juga tidak merupakan tempat bertanya bagi petani-petani lapisan bawah pada umumnya.
6. Para petani lapisan bawah pada umumnya tidak ada bertanya (kecuali beberapa orang yang sengaja bertanya kepada warga lapisan atas ''tipe Adeng''), maka mereka mengadopsi inovasi baru dengan jalan ''meniru secara diam-diam dengan hasil yang jauh dari sempurna''.

Dari keenam kesimpulan yang ditarik, kesimpulan nomor 4 merupakan kesimpulan yang penting dari segi praktis. Orang-orang ''tipe Adeng'', ialah yang memiliki karakteristik warga lapisan atas, bergaul dengan orang-orang dari lapisan atas, tapi tidak ''lepas'' dan tidak ''disegani'' oleh orang-orang dari lapisan bawah, merupakan ''bidang kontak'' antara lapisan atas dan lapisan bawah. Orang-orang tipe ''Adeng'' ini perlu diungkapkan lebih jauh dan diberi peranan yang lebih banyak sebagai ''kontak tani''. Mungkin sekali orang-orang tipe ini bisa dibangkitkan sebagai penggerak petani-petani bawah, yang kini merupakan mayoritas, demi proses penyebaran inovasi yang lebih cepat di masa-masa yang akan datang.

2. Desa Bekasi

Berdasarkan kelompok contoh yang telah terambil desa ini memiliki warga lapisan atas terkecil (dua dari 25 orang). Penyebaran pancausaha seluruh tanaman telah cukup meluas, tapi penggunaan pupuk masih sangat rendah. Penggunaan pancausaha dan khususnya penggunaan pupuk pada tanaman padi sangat rendah. Gambarannya adalah sebagai berikut:

Skor pancausaha seluruh tanaman:
LA = 2 orang = 100%; LB = 18 orang = 80%.

Skor pupuk seluruh tanaman:
LA = 2 orang = 100%; LA = 5 orang = 21%

Skor pancausaha padi:
LA = 2 orang = 100%; LB = 1 orang = 4%

Skor pupuk padi:
LA = 2 orang = 100%; LB = 1 orang = 4%.

Berdasarkan hasil penelitian, warga lapisan atas adalah responsif terhadap penggunaan pancausaha dan khususnya pemupukan pada tanaman padi. Secara relatif, penyebaran pancausaha pada tanaman padi di desa Bekasi adalah baru saja dimulai.

''Sosiogram'' desa Bekasi menunjukkan bahwa unsur-unsur pancausaha padi, berhubung baru saja menjalar, baru mencapai beberapa orang dari lapisan atas. Orang-orang dari lapisan bawah masih bersikap menunggu.

Gambar VI.2. Penyebaran Pancausaha di Desa Bekasi
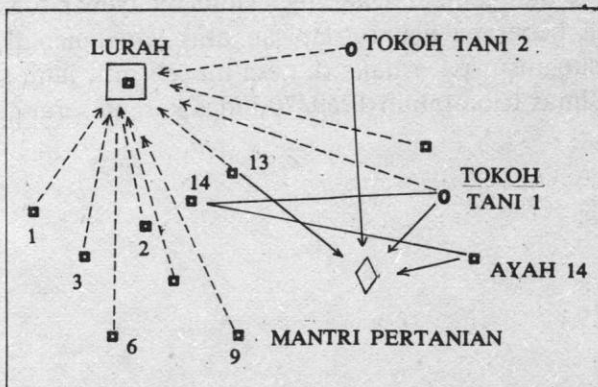
= Lurah, pusat lingkungan pengaruh pemerintahan

= Mantri pertanian

= Tokoh tani

-----→ = ***Reference*** **lingkungan pengaruh pemerintahan**

———→ = ***Reference*** **atau pemberi keyakinan untuk menjalankan Pancausaha padi.**

Di desa Bekasi hanya terdapat satu lingkungan pengaruh, ialah lingkungan pengaruh pemerintahan dengan Lurah sebagai tokohnya yang kuat. Lurah bersama Jurutulis desa merupakan orang-orang yang responsif terhadap pembaharuan-pembaharuan sehingga desa ini dinyatakan sebagai desa termaju di seluruh Kabupaten Bekasi. Akan tetapi, seperti halnya di desa Cianjur, lurah yang berpengaruh sangat besar ini tak mampu pula untuk melaksanakan kehendaknya agar petani-petani menggunakan pancausaha pada tanaman padinya. Namun atas ''bantuan'' Bimas Ciba, dalam tahun 69/70 banyak juga petani yang mulai memupuk sawahnya. Mereka ''terpaksa'' menurut, karena ingin solider terhadap lurah mereka.

Adapun petani-petani yang telah mengadopsi unsur-unsur pancausaha pada tanaman padi sebelum tahun 1969 adalah antara lain lima orang tokoh yang termasuk lapisan atas. Mereka ini Djaman (tokoh tani, No. 1), Bajang (tokoh tani No. 2), Ayah Simin (responden no. 14), Simin (responden no. 14), dan Adjang (responden No. 13). Selain itu, responden-responden nomor 2, 3, 4, 6, 9, 15 dan 23 adalah warga lapisan bawah dan belum mau melaksanakan unsur-unsur pancausaha.

Orang-orang dari lapisan atas ini bergaul rapat dengan mantri pertanian dan mengikuti kursus yang diselenggarakannya. Hasil kursus sangat sedikit, dan sampai sekarang belum menyebar luas, hanya terbatas kepada beberapa gelintir lapisan atas yang mengikutinya saja. ''Nasib'' unsur-unsur pacasuaha di desa ini sebegitu jauh sangat buruk berhubung Bimas Ciba tahun 1969/70 ludes karena serangan Ganjur.

BAHAN UNTUK DISKUSI BAB VI

1. Kerangka Pemikiran: Van Doorn & Lammers*)

(1.1) Hubungan sosial dan relasi sosial berlangsung karena terjadinya soal-soal yang penting di antara para pelaku interaksi dan komunikasi itu. Mengingat ciri-ciri dari interaksi dan komunikasi dengan tiga buah aspeknya (pikiran/pendapat, perasaan dan kemauan), dapat ditunjukkan ***dimensi-dimensi struktural*** *yang terdiri atas:*

a. ***Jarak Sosial*** *(menunjukkan pada kemungkinan relasi/hubungan sosial antara pelaku-pelaku tertentu mengingat sampai berapa jauh orang-orang/grup-grup itu dapat ''bertemu'').*

b. ***Integrasi Sosial*** *(menunjuk pada besar kecilnya keselarasan/harmoni di dalam proses-proses sosial).*

c. ***Tingkatan Sosial*** *(dengan ciri-ciri yaitu: arah sepihak dalam hal interaksi; pendapat dalam membedakan siapa ''lebih tinggi'' dan siapa ''lebih rendah'' kedudukannya; perasaan yang satu terhadap yang lain membedakan siapa ''lebih'' dan siapa yang ''kurang'' dan; kemauan untuk berinisiatif atau mengikuti inisiatif orang lain).*

(1.2) POSISI SOSIAL menggambarkan titik-titik pusat atau pertemuan sejumlah relasi dan hubungan sosial yang berpusat/bertemu pada diri pelaku tertentu yang berinteraksi dan berkomunikasi. Berdasar fungsi-fungsi tertentu dari interaksi yang menjadi ciri pelaku-pelaku tertentu (misalnya fungsi ''memimpin''; fungsi ''mengikuti'') maka kita dapat membedakan sejumlah posisi yang berbeda-beda (dalam contoh tersebut yaitu posisi ''pemimpin'', posisi ''pengikut'')

(1.3) Dalam hal TINGKATAN SOSIAL, posisi-posisi tersebut (misalnya pemimpin, pengikut) mempunyai STATUS SOSIAL tertentu. Karena PERANAN SOSIAL yang menunjuk pada keseluruhan norma dan harapan yang ditujukan orang hanya pada orang-orang dalam posisi-posisi tertentu; maka peranan orang-orang itu mencerminkan pula status sosialnya.

---

*) J.A.A. van Doorn & C.J. Lammers (1959): *Moderne Sociologie, Een systematische inleiding,* Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen.

(1.4) Perobahan status sosial karena perpindahan individu atau objek sosial dari suatu posisi ke posisi sosial lainnya yang tidak sederajat, digambarkan sebagai gerak sosial yang vertikal (yaitu yang naik atau yang turun) disebut ***mobilitas Sosial.***

(1.5) STRUKTUR SOSIAL suatu grup atau masyarakat dapat digambarkan dengan ***dua*** *alternatif, yaitu:*

a. Sebagai jaring-jaring sejumlah relasi dan hubungan sosial, di dalam suatu pola yang agak mantap unsur-unsurnya, seperti misalnya yang tergambar dari suatu jenis perbedaan tingkatan yang terdapat di antara pelaku-pelaku dalam relasi dan hubungan sosial itu.

b. Struktur sosial dapat pula dilihat sebagai kombinasi/susunan sejumlah posisi sosial yang berhubungan dan saling mengisi.

2. *Kerangka pemikiran: Pitirim A Sorokin*)*

(2.1) ***STRATIFIKASI SOSIAL atau PELAPISAN SOSIAL*** adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkhis) yang wujudnya adalah ***Kelas tinggi*** *dan* ***kelas-kelas yang lebih rendah.***

(2.2) Sistem pelapisan itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur.

(2.3) Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga (seperti misalnya tanah, uang, ternak dan sebagainya) dalam jumlah yang sangat banyak, dianggap oleh masyarakat berkedudukan dalam lapisan atasan; mereka yang hanya sedikit sekali atau sama sekali tidak memiliki sesuatu yang berharga itu dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah.

3. *Pertanyaan:*

(3.1) Sebutkan ciri-ciri yang menjadi ukuran masyarakat sehingga kita dapat membedakan sejumlah posisi-posisi yang berbeda, pada bacaan 14 dan 15.

Catatan: perhatikan bacaan 14 yang membedakan masyarakat Jawa dengan Sumatera.

(3.2) Sebutkan ukuran atau kriteria yang dipakai masyarakat pada bacaan 14 dan 15 untuk menggolong-golongkan warganya ke dalam lapisan-lapisan tertentu.

(3.3) Bandingkan sistem pelapisan pada bacaan 14 dan bacaan 15.

*) Pitirim A. Sorokin (1959): ''Social and Cultural Mobility'', The Free Press of Glencoe Collier Maxmilliam Limited, London, 1959, dalam ''Sosiologi'' suatu Pengantar oleh Soerjono Soekanto, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, cetakan ke 5, 1970, hal. 133-134.

POLA HUBUNGAN ANTARA SUKU BANGSA

16. MARGA LAMPUNG DAN KEDUDUKAN KAUM PENDATANG*)

1. SUSUNAN ADAT LAMPUNG DAN PEMERINTAH BERMARGA

Masyarakat Lampung mempunyai dasar genealogis yang tegas, baru kemudian faktor teritorial penting, menurut sifatnya dan sejarahnya. Menurut cerita, yang dicatat oleh Van Royen[1] golongan adat Lampung mempunyai daerah asal di pegunungan Bukit Barisan di sekitar danau Ranau: Belalau (Segalaberak). Dengan menyusur lembah sungai-sungai mereka sambil berladang, berpindah ke dataran-dataran rendah, ada yang ke arah Muaradua (Palembang) di mana gerakan itu dihalau kembali, dan ada yang sampai ke daerah yang sekarang bernama Lampung: di sini mereka mencapai pantai timur dan selatan. Kelompok-kelompok yang tersebar itu, yang bermoyang di daerah-asal Belalau, sesudah berkembang atas berbagai cabang keturunan, konon pernah mengenal 4 atau 6 ''ratu'' di Lampung[2].

---

*) Oleh Kampto Utomo, dikutip dari ''Masyarakat Transmigran spontan di daerah Way Sekampung, Lampung'', *Majalah Teknik Pertanian,* Tahun VII, no. 7, 8, 9, Juli-Sept. 1958, hal. 337—346.

1. J.W. Van Royen; ''Note over de Lampongse marga's.'' *Med. Afd. Bestuurszaken der Buitengew,* van het Dept. V.B.B. Serie B, no. 7, 1930, hal. 2,3.
2. H. Guyt: *Inleiding tot een studie van de proatin-adat in de Lampongs* (Ind. Tijdsch. v.h. Recht, dl. 145, 1937, hal. 157—177).

Masing-masing ''ratu'' itu pernah berkuasa di atas wilayah kekuasaan masing-masing, yang didiami oleh ''anak buah''nya, yang merupakan kelompok besar seketurunan. Percabangan-percabangan daripadanya menjadikan orang kemudian membeda-bedakan ''suku-asal'', yang bercabang-cabang lagi atas ''buai'' dan atas ''suku''.[3] Kesatuan teritorial disebut ''marga'' yang bertepatan dengan wilayah kekuasaan ''suku asal''. Kelompok-kelompok ''buai'' bertempat tinggal terbagi-bagi atas berbagai ''pekon'' (tujuh, ''anak'' kampung). Di masing-masing ''pekon'' tinggal berbagai ''suku'' yang terdiri atas ''cangkai'' (keluarga besar) terbagi-bagi atas ''nuwa'', masing-masing rumah (keluarga primer). Pembedaan atas golongan-golongan itu semua menuruti garis keturunan dan tak lain berarti: pengakuan tentang adanya cabang yang ''lebih tua'' dan yang ''lebih muda''. Yang tampil ke depan sebagai pemuka adat adalah orang laki-laki tertua dari masing-masing golongan (''suku''), yang berkumpul di ''sesat'' (balai tempat musyawarah di tiap kampung). Kepala suku (lebih tepat: pemuka suku) itu disebut ''penyimbang'', orang laki-laki tertua menurut keturunan, yang berlaku sebagai pengganti dari pemuka yang terdahulu pergi (''simbang'' artinya: ''mengganti''), dialah yang seakan-akan wajib melanjutkan ''kebijaksanaan pimpinan'' nenek moyang kelompok seketurunan itu.

Kumpulan pemuka adat itu (''proatin'') diketahui oleh penyimbang tertua dari suku tertua. Kecuali ''proatin kampung'' ada pula ''proatin marga'', di mana penyimbang-penyimbang yang berhak berkumpul, diketuai oleh pemuka yang tertua dari ''suku'' tertua dari ''pekon'' tertua. Permusyawaratan itu berlaku atas dasar sama tinggi sama rendah di antara pemuka-pemuka ''suku-suku''; yang berlaku sebagai ketua rapat proatin itu tak lebih dari *''primus inter pares''*.

Ekologis suatu marga terdiri atas ''pekon-pekon'', tempat perkampungan yang tersebar letaknya, dengan kebun-kebun dan ladang-ladang di sekitarnya. Orang-orang yang mempunyai ladang yang lebih jauh umumnya terpaksa meninggalkan ''pekon'' mereka dan berdiam untuk sementara di umbulan-umbulan kumpulan rumah-rumah darurat di ladang. Di sanalah mereka tinggal sampai berbulan-bulan, selama mengerjakan ladang dan memungut hasil. Selebihnya wilayah yang

---

3. *clan, sub-clan.*

dikuasai oleh marga berupa hutan (cadangan untuk berladang), belukar (bekas ladang yang sedang menuju kembali ke hutan) dan alang-alang (pemandangan alam yang tersebut terakhir telah meluas dalam waktu 50 tahun akhir-akhir ini).

Van *der* Zwaal[4] menyebut beberapa angka: luas rata-rata suatu marga di Sumatera Selatan: 500 km-persegi; di Lampung rata-rata penduduk suatu marga: 5.234 jiwa (tahun 1930) dan rata-rata suatu marga terdiri atas 8 kampung (''pekon'' di Lampung).

Bagaimanakah terjadinya ''pekon'' di dalam susunan adat Lampung? Dasar genealogis di situ menjadi syarat. Misalnya, suatu ''pekon'' dapat terjadi dari sebuah ''umbulan''. ''Nuwa'' yang mula-mula mendiami ''umbulan'' itu, karena berkembang-biak menjadi ''cangkai'' dan makin permanen, menetap di situ minta pengakuan sebagai ''suku'' baru. Hal ini berarti pemisahan diri dari ''suku'' yang lama. Sesudah izin untuk itu didapat dari wakil-wakil ''suku'' yang ada, barulah di dalam suatu upacara adat wakil tertua dari calon-suku itu diangkat menjadi ''penyimbang'' dari ''suku'' baru itu, dengan ''naik pepadon''. ''Pepadon'' itu berupa bangku, tempat duduk, memperlambangkan kedudukan adat yang penting dari penyimbang. Kemudian dengan upacara adat pula, ''umbulan'' itu diresmikan menjadi ''pekon'': nama ''pekon'' baru itu diumumkan dan ''sesat'' (balai bermusyawarat) diresmikan pula. Tiap langkah mencapai pengakuan yang penuh disertai syarat pembayaran uang adat (''dau'') yang dibagi antara penyimbang-penyimbang (''proatin marga'' tak terlupakan), dan ada persembahan-persembahan lain khususnya kepada penyimbang suku tempat memisahkan diri), pemotongan kerbau serta jamuan makan kepada para tamu yang diundang (''lingkungan kondangan'' adalah pula suatu kesatuan masyarakat).

Pemisahan diri suatu bagian dari ''suku'' dapat pula dihubungkan dengan dorongan ekonomis.[5] Jumlah orang bertambah, sehingga untuk mendapat nafkah, ranting-ranting yang ''lebih muda'' terpaksa pergi ke tempat-tempat ladang yang lebih jauh. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa ''penyimbang nuwo''-lah (anak laki-laki tertua) yang diserahi

4. *Van der Zwaal: Inlandse Gemeentewezen in Zuid-Sumatera en Javanen-Transmigratie,* Thesis Utrecht, 19, hal. 4.

5. J.W. van Royen: *De staatkundige zijde van het papadon wezen.* (Koloniale Studien, 12 de jg., 2de deel, hal. 429; 431—439.

penguasaan atas ''harta benda'' suku itu, yang dapat berupa barang, rumah dan bahkan tanah. Anak laki-laki yang lebih muda mungkin tidak banyak mendapat ''bagian''-nya lagi, atau menjadi tergantung dari ''penyimbang nuwo'' itu. Pemisahan diri atas ''suku-suku'' baru itu terjadi juga karena perselisihan-perselisihan yang timbul dalam ''pekon'' atau ''suku''. Bagian yang menarik diri itu mula-mula tentulah ber-''umbulan'': ladang menghasilkan segala harta untuk ''menebus'' pangkat ''penyimbang'', yang berarti pengakuan sebagai ''suku'' baru yang berdaulat.

Pengaruh apakah yang datang dari luar, dari kekuasaan-kekuasaan sentral yang kuat? Sebab susunan genalogis itu kemudian hanya mengenal ''lingkungan kekuasaan ratu-ratu'' sebagai cerita-cerita legendaris saja lagi; yang paling nyata sering tinggallah pertama-tama masyarakat adat di ''pekon'', kemudian barulah ''marga''. Di dalam perpecahan atas ''pekon-pekon'' itu sering kekuasaan dari luar yang lebih kuat memasukkan pengaruhnya, yang untuk masa 4 abad terakhir, tak lain adalah kekuasaan Sultan Banten dan kemudian Belanda (''V.O.C.'' dan Pemerintah Hindia Belanda). Sultan Banten[6] dengan maksud-maksudnya tersendiri (lada) memperkuat kelompok yang lebih besar: marga. Khususnya di bagian pesisir selatan kedudukan pengetua marga telah dijadikan kepala marga (''bandar'') yang otokratis dan turun-temurun diwariskan, sehingga pemasukan lada kepada Sultan terjamin. Di bagian selatan itu bahkan dapat dibentuk federasi marga-marga. Mula-mula kekuasaan Belanda (V.O.C.) lebih banyak merasakan diri secara tak langsung, yaitu lewat Sultan Banten (sampai 1808, sampai kesultanan itu dibubarkan). Permulaan kekuasaan pemerintah Hindia Belandapun masih ditandai oleh ''campur tangan yang sesedikit mungkin''[7]. Baru sesudah mundurnya ''penguasa militer' yang menindas R. Intan (1855) di Lampung Selatan, mulai lebih banyak perhatian pemerintah tertuju ke daerah Lampung. Campur tangan yang langsung itu agaknya tak dapat dipisahkan dari kehendak ''menyelamatkan'' Jawa dari ''gangguan-gangguan huru-hara'' semacam gerakan R. Intan itu. Maklum, waktu kekayaan Belanda yang perlu dilindungi dan Lampung tak jauh dari ujung barat Jawa: Banten (Ingatlah nasib SAIDJAH dan ADINDA).

6. *Ibid, loc. cit.*
7. Masa ''Governements-landschap, lihat J.W. van Royen; *De Verdwijning van de Lampongse Marga's* 1855—1913. (Kol. Tijdsche: 21e jg. 1932. hal. 172—173.

Sampai lama, (tiga seperempat abad) campur tangan langsung dari pemerintah Hindia Belanda di Lampung dilakukan dengan sama sekali tak mengindahkan susunan adat penduduk. Politik seperti di Jawa (sentralisasi dengan badan-badan pemerintahan bentukan baru) makin jelas, dengan tak mencari dasar-dasar pertemuan dengan susunan adat yang ada pada rakyat. Bukan marga, melainkan ''kampung'' yang diakui dengan diberi ''kepala kampung'' yang tak berakar dalam adat, (yaitu dengan pemilihan umum di kampung) yang oleh rakyat dipandang sebagai pesuruh pemerintah (semacam ''kepala rodi''). Di atas itu di tempatkan demang (banyak bukan orang Lampung) dan *controleur* Belanda. Marga dengan hak ulayatnya tak diakui, maka *domein-verklaring* menjadi pedoman utama dalam soal-soal hak tanah, di mana sejak 1870 kesempatan *erfpacht* untuk pengusaha-pengusaha asing dijamin. Tetapi sebelum itupun pengakuan yang sempit atas ''kampung'', pernah membawa akibat-akibat mengacaukan (1857—1869)[8]. Waktu itu untuk tiap kampung ditetapkan suatu wilayah kecil dan terbatas di sekitarnya saja, bertentangan dengan adanya hak ulayat marga. Baik golongan Rebang di dalam perpindahannya ke selatan, maupun golongan Abung ke arah pantai timur, telah memakai kesempatan itu untuk mendirikan kampung-kampung baru dengan ladang-ladangnya, menyusup masuk ke wilayah-wilayah marga lain. Begitu pula pengadilan pemerintah dimajukan, tetapi walaupun tak diindahkan ''proatin-proatin'' melanjutkan penyelesaian soal-soal adat di kalangan rakyat.

Akhirnya (1928) pemerintah Hindia Belanda mengakui ''marga'' di Lampung sebagai *Inlandse gemeente,* daerah otonomi tingkat terbawah. Ini pula bukan semata-mata karena hendak mengindahkan susunan adat penduduk, melainkan juga karena pertimbangan- pertimbangan kekuasaan suatu pemerintah sentral, yang mau bersambung ke bawah. Daripada pusing melayani (mengontrol) beratus-ratus kampung yang kecil-kecil, lebih baik memperkuat kelompok yang lebih besar, juga menurut luasnya *ressort,* yaitu marga. Di Bengkulu dan Palembang maga telah diakui lebih dulu dan agaknya pengakuan marga di Lampung pada akhirnya dijadikan kenyataan juga, mengingat ''bahaya baru'': partai politik, baik gerakan organisasi Islam dengan pengaruhnya di kampung-kampung maupun yang sudah berwujud pemberontakan yang dicap ''komunis'' di Banten yang dekat (1926).

---

8. J.W. van Royen: idem *op. cit., Kol. Tijdschr.,* hal. 181—184.

Politik Pemerintahan yang berdiri atas pertimbangan administratif (*ressort* pemerintahan) dan pengakuan marga sebagai masyarakat hukum *(rechtsgemeenschap)* tidak selalu cocok satu sama lain dan pemecahan soal berbeda-beda[9].

Dasarnya adat Lampung adalah bahwa kedudukan ''kepala'' (pengetua dari kelompok genealogis) ''diwariskan'' yaitu dengan pemilihan Maka ''kepala marga''pun dipilih oleh penyimbang-penyimbang suku, jadi: dalam pemilihan terbatas. Ada marga-marga yang telah lama mengenal pewarisan kedudukan itu karena pengaruh Banten, sehingga *''resident''* untuk menghormati adat itu, di situ mengangkat orang yang berhak itu. Sebaliknya ada pula marga yang mengenal pemilihan umum untuk kepala marga, yaitu marga-marga Pasemah orang-orang pendatang, di mana hubungan-hubungan genealogis tak amat dipentingkan lagi.

Di dalam susunan marga, pemerintah (1928) bermaksud sedapat-dapatnya mempertahankan tokoh *primus inter pares:* kepala-kepala kampung diseyogyakan berlaku sebagai pembantu-pembantu kepala marga (pesirah), bukan sebagai orang-orang yang dibawahi. Khususnya kerjasama itu hendak diberi bentuk dalam ''dewan marga'', di mana kepala-kepala kampung menjadi anggota dan pesirah menjadi ketua. Di Lampung ketentuan bahwa penyimbang-penyimbang suku, lain dari kepala kampung, dapat ditambahkan ke dalam dewan marga (sesudah pemilihan terbatas pula) tak pernah dipergunakan.

Dari ketentuan-ketentuan itu nyata kehendak pemerintah Hindia Belanda akan menarik pengetua-pengetua adat yang berpengaruh ke dalam organisasi pemerintahan: di dalam badan-badan yang bertanggung jawab dalam daerah pemerintahan otonom paling bawah *(''inlandse gemeente'').* Tetapi sebagai alat-alat pemerintahan ''Gubermen'', taklah dapat dihindarkan bahwa dalam praktek kepala kampung menjadi bertangung jawab kepala-kepala marga dan ini kepada kepala pemerintahan yang lebih atas. Pemerintahan (*bestuur*) waktu itu berupa demang serta *controleur* dan *resident* Belanda.

Dengan mengadakan kepala marga, yang diserahi tanggung jawab atas pemerintahan seluruh daerah marga menurut syarat-syarat pemerintahan atasan (khususnya menjaga ketertiban dan keamanan,

---

9. J. van Der Zwall: *op. cit.,* (Tesis), hoofdstuk IX dan X.

menarik pajak dan mengatur wajib kerja pemerintah: *heerendiensten* maka diusahakanlah sumber-sumber nafkah bagi kepala marga itu. Ketentuan-ketentuan itu terdapat dalam keputusan-keputusan dewan marga sumber-sumbernya didapat dari pemasukan-pemasukan ''uang adat'' yang berdasarkan hak ulayat yang ada pada marga, dari urusan pangkat-pangkat adat, urusan perkawinan, dari upah penarikan pajak dan uang tebusan *heerendiensten* dan wajib kerja marga. Dibanding dengan masa sebelumnya, pada waktu hanya kampung[10] (bukan marga) yang diakui di Lampung, maka di bawah kepala marga umumnya beban rakyat bertambah: untuk menebus dengan uang kewajiban-kewajiban terhadap marga dan pesirah. Inilah biaya rakyat untuk otonomi bermarga.

Dapatkah marga menunaikan kewajiban otonomi pemerintahan yang diserahkan atasnya? Dari ''dewan adat'' menuju ''dewan pemerintah'' memang bukan langkah yang kecil: pertama pengertian ''pemerintahan'' menurut ukuran-ukuran modern (''barat'') adalah soal baru. Misalnya, pemasukan uang pajak pemerintah dan uang adat sering tak dapat dipisahkan satu sama lain oleh pesirah-pesirah. Penggunaan uang pajak tak jarang berakibat pemerintah bertindak atas tuduhan kesalahan ''korupsi'. Dalam hal pemerintahan berdewan-marga, pemerintah terlalu banyak mengharapkan inisiatif dan peranan penting dari dewan itu. Banyak terjadi campur tangan pemerintah sebelum sesuatu peraturan atau keputusan ditetapkan oleh dewan-dewan marga, menurut . . . . . kehendak pemerintah sendiri! Rupa-rupanya politik pemerintah yang *''zakelijk''* itu, walaupun dilewatkan ''dewan marga'', oleh rakyat masih sering diterima sebagai peraturan (perintah) dari pemerintah atas, bukan karena timbul dari keperluan sendiri. Demikian pula usaha menghidupkan pengadilan adat (proatin) umumnya tak berhasil banyak di Lampung.

Umumnya di Lampung dapat diberi persesuaian antara pengakuan suatu kelompok genealogis (umpama suatu ''buai'') atas satu wilayah tertentu dan pembatasan daerah itu menjadi wilayah satu marga (dalam

---

10. Wajib-kerja untuk kepala kampung berupa: membantu pekerjaan di ladangnya (umumnya ditebus dengan ''uang kolong'') dan mengantarkan kepala-kampung di dalam berkeliling dinas, (juga dapat ditebus). Wajib-kerja untuk kampung (masyarakat) berupa: ''jaga kampung'', pemeliharaan jalan-jalan, sekolah dan pasar.

arti *ressort* pemerintah 1929). Perkecualian-perkecualian terdapat di daerah-daerah pesisir, di mana banyak kelompok-kelompok pecahan dari pemindahan ''buai-buai'' yang berasal dari gunung akhirnya berkumpul dan bercampur. Juga di pesisir itu pengaruh luar lebih intensif: di sana unsur teritorial sudah kuat.

Pengakuan marga di Lampung (sejak 1928) dengan pengakuan hak ulayat (*beschikkingsrecht*) memang sesuai dengan perasaan adat yang masih hidup, walaupun lama mencerita (¾ abad) karena tak diakui resmi. Tetapi pengakuan marga sedemikian itu, dengan secara resmi diberi arti, bahwa wewenang mengurus tanah itu adalah suatu hal yang oleh pemerintah dikuasakan kepada marga, (*in beheer*) sebab *speciale domeinverklaring* tetap dipertahankan.[11] Pembentukan *beheerskring* suatu marga seperti itu dianggap sesuai dengan tugas otonomi pemerintahan (*medebewind-staak*) suatu marga sebagai *inlandse gemeente*. *Beheerskring* marga itu adalah tanah seluas hak ulayat marga, dikurangi dengan bagian-bagian yang telah dikeluarkan sebagai *erfpacht* oleh pemerintah kepada perkebunan-perkebunan modal asing dan bagian-bagian lain yang disisihkan sebagai wilayah cadangan hutan. Dalam hal terakhir hal marga sedikit banyak diakui oleh Jawatan Kehutanan dengan menjanjikan sebagian dari pajak pemungutan hasil hutan dari hutan-hutan itu yang sekarang ada di bawah pengawasan jawatan.

Berbeda dari keperluan *erfpacht* yang dilindungi oleh *speciale domeinverklaring*, untuk penduduk Indonesia bukan-anggota marga yang hendak memakai tanah atau memungut hasil lainnya di wilayah marga berlaku hak ulayat marga. Dalam hal terakhir ketentuan adat diikuti.

2. MASUKNYA ORANG-ORANG BUKAN SE-ADAT KE DALAM MARGA

Bagaimanakah orang-orang luar, bukan anggota masyarakat adat, dapat masuk dan ikut berusaha di atas tanah wilayah marga? Yang dimaksud di sini khususnya kemungkinan-kemungkinan pembentukan kampung-kampung baru yagn terdiri dari orang-orang pendatang yang

[11] J. Van der Zwaal. *op. cit.*, (Thesis), hoofdstuk IX dan X.

menetap. Pendirian kampung-kampung baru diizinkan sesudah ada bukti pengakuan dari pendatang-pendatang itu akan wewenang marga atas hak ulayat marga. Selama marga di Lampung tak diakui oleh pemerintah Hindia Belanda, pada hakekatnya adat itu hidup terus: orang-orang pendatang itu membayar ''ulasan'' (uang pengakuan) kepada pengetua marga, sehingga jika hal itu ketahuan, pemerintah waktu itu menganggapnya sebagai ''pemerasan''.

Selama hanya ''kampung'' yang diakui oleh pemerintah di Lampung dan bukan marga, maka tak beda dengan lain-lain bagian dari Sumatera Selatan di mana marga itu diakui, susunan pemerintahan pada waktu itu tidak mengenal pembedaan-pembedaan antara kampung ''anak asli'' dan kampung pendatang. Dalam susunan adat masing-masing mempunyai hidup sendiri-sendiri terpisah satu sama lain, (contoh: kampung-kampung orang Banten, juga kampung-kampung orang Rebang dan Abung di daerah perpindahan mereka di Selatan dan di Timur).

Di dalam sejarah tumbuhnya kelompok masyarakat orang-orang pendatang di Lampung (jika golongan adat Lampung kita anggap yang ''asli'') ternyata, marga-marga baru dapat terbentuk dengan cara tersebut di muka: mula-mula berupa satu, dua kampung yang diizinkan berdiri sendiri, di atas wilayah tanah marga-penerima. Kemudian, mengingat besarnya jumlah rakyat-pendatang yang tumbuh dan perbedaan adat marga-penerima itu, sesudah ada uang pengakuan lagi, melepaskan wewenang dan hak atas sebagian wilayah tanahnya dan menyerahkannya kepada masyarakat adat yang baru diakuinya itu. Contoh hal terakhir adalah terjadinya marga baru Kasui (orang-orang Semendo-''Rebang'') di sebagian bekas wilayah marga Bahuga.[12]

Pemerintah Hindia Belanda yang mulai mengadakan kolonisasi orang-orang Jawa (1905), pada waktu itu berdiri atas *domeinverklaring*nya. Daerah kolonisasi Gedongtataan dipisahkan untuk maksud itu, (politik *enclave*), demikian pula kolonisasi Wonosobo (1922). Bedanya antara kedua kolonisasi itu: sesudah pengakuan (rehabilitasi) marga di Lampung (1928), Wonosobo dengan penduduk 5.500 orang dibawahkan lagi ke dalam marga (1936), sedangkan Gedongtataan dengan 33.000 orang tetap menjadi ''enclave' dalam susunan pemerintahan.

---

12. J. Van der Zwaal: *op. cit.*, Thesis 1936, hal. 47—48.

Di daerah itu kedua pihak marga maupun desa-desa kolonisasi Jawa enggan bergabung.[13]

Di daerah Gedongtataan, ''desa Jawa'' adalah satuan masyarakat adat, dan *inlandse gemeente*, di luar itu: marga Lampung. Untuk desa-desa kolonisasi itu, karena ada kebutuhan akan suatu kesatuan masyarakat yang lebih besar di atas tingkat desa, pemerintah membentuk suatu *plaatselijke Fonds*, agaknya percobaan ke arah bentuk otonomi di atas desa, yang dimulai dengan pembentukan ''kas'' bersama. Dalam susunan pemerintahan, *enclave* kolonisasi itu berupa *onderdistrict* dengan ''asisten-wedana'', tidak berbeda dengan keadaan di Jawa.

Waktu di daerah kolonisasi itu mulai penuh, (sejak 1930) transmigran-transmigran Jawa di daerah Gedongtataan juga ditempatkan di atas wilayah marga (khususnya marga-marga W. Lima dan W. Semah). Apakah artinya ini, sesudah sejak 1928 marga di Lampung diakui? Walaupun wewenang dan hak ulayat marga diakui, pemerintah pada waktu itu tidak mengizinkan pembayaran ''ulasan'' (retribusi), karena berpendapat bahwa pembebasan dari ''ulasan'' itu patut diberikan kepada semua penduduk orang Indonesia, padahal adat membedakan orang seadat dari orang-bukan-seadat. Hanya dalam hal pemrintaan suatu luas tanah untuk perluasan *enclave* kolonisasi tersebut yang akan ''dipotong'' dari wilayah marga, kepada marga Pogung pernah diberi ganti kerugian.

Untuk kampung-kampung baru orang-orang Jawa di bawah marga, ada perbedaan antara ''ikatan marga'' (hubungan pemerintahan) dan ikatan adat. Yang belakangan ini tidak dengan sendirinya terbuka bagi orang-orang pendatang Jawa yang membawa susunan adat sendiri. Untuk memasuki susunan adat Lampung yang dasar-dasarnya genealogis masih kuat, perlu syarat pengakuan masyarakat ''desa Jawa'' itu sebagai ''suku'' baru. Hal ini tidak terjadi dan tak dapat dipastikan. Penduduk baru itu terkena juga wajib kerja marga, di mana orang Jawa mengenal wajib kerja untuk desa. Walaupun penduduk lama dan baru sama-sama kena wajib kerja marga kepalakampung-kampung Jawa tak mempunyai hak pilih aktif maupun pasif untuk jabatan kepala marga. Di sini unsur genealogis dari susunan adat dipegang teguh.

---

13. J. Van der Zwaal. *op. cit.*, Thesis, hoofdstuk X.

Apakah bedanya bagi pendatang baru orang-orang Jawa, pertalian dalam *enclave* kolonisasi (seperti Gedongtataan) dan di dalam ikatan marga? Kecuali perasaan asing memasuki susunan marga yang belum dikenal, wajib kerja marga oleh orang Jawa dirasa lebih berat, sebab wajib kerja untuk marga sering dapat berarti, terpaksa meninggalkan kampung sendiri untuk beberapa waktu lamanya. Uang tebusannya lebih tinggi. Bagi kepala kampung Jawa pertalian ikatan marga berarti pendapatan dari iuran rakyat yang berkurang: dari ''jangolan''' (bakti rakyat berupa padi, satu pikul setiap kepala keluarga) yang diterimanya, sebagian 1/3 atau 2/3) jatuh kepada kepala marga. Demikian pula upah pemungutan pajak (*collecte-loon*) harus dibaginya dengan kepala marga itu. Dari sini terang, kepala marga itu menjadi berkepentingan sendiri di dalam menambah penduduk marga dengan pendirian kampung-kampung baru itu. Kepentingan pribadi mungkin menjadikan kabur pertimbangan-pertimbangan ''kepentingan umum''. Walaupun pendatang-pendatang orang Jawa itu sendiri lebih senang berdiri di luar marga, pemerintah pada waktu itu, sesudah pengakuan marga, tidak menghendaki *enclave* baru di dalam marga.

Lain halnya dengan kolonisasi ''Metro'', (dimulai 1935) di mana jumlah pendatang Jawa dalam waktu beberapa tahun saja telah jauh melebihi penduduk marga, orang Lampung. Pertimbangan-pertimbangan pro dan kontra memisahkan daerah kolonisasi ''Metro'' dari marga, sampai akhir 1941 (saat datangnya Jepang) belum memberi putusan. Hal ini juga berhubungan dengan adanya pimpinan terpusat di dalam pembangunan daerah kolonisasi tersebut yang sampai waktu itu dipandang perlu oleh pemerintah, dengan pimpinan asisten-Wedana dan mantri-mantri kolonisasi. Di situ, pada waktu itu belum timbul persoalan *inlandse gemeente,* untuk pemerintahan otonomi tingkat bawah. Tetapi sudah terang pada waktu itu kecenderungan, bahwa Metro menjadi *enclave* kolonisasi yang jauh lebih besar dari Gedongtataan.

Bagaimanakah perkembangan terakhir dalam hal ini? Beberapa perubahan dalam susunan pemerintahan di Lampung sudah terjadi sejak 1942, dengan perginya pejabat-pejabat Belanda dari *Binnenlands Bestuur,* diganti oleh penguasa-penguasa Jepang. Hilangnya dualisme baru terjadi sesudah dicapai kemerdekaan (1945), yang mengenal satu macam susunan pemerintahan, seperti yang terdapat di Jawa: dari residen ke bawah: bupati, wedana dan camat. Di tingkat bawah, susunan

marga tetap ada, sampai datang peraturan residen Lampung membentuk "negeri" (1954), yang umumnya berarti penggabungan beberapa marga. Daerah-daerah kolonisasi Jawa yang sebelum itu tetap tidak terbawakan oleh marga, sekarang tidak terkecuali disertakan dalam pembentukan "negeri". "Negerilah" yang hendak dijadikan pemerintah otonom tingkat tiga. Dalam susunannya ia mirip dengan marga: ada kepala negeri dan dewan negeri. Bedanya: anggota-anggota dewan dipilih dengan pemilihan umum (soal baru) dan kepala-kepala kampung (juga dengan pemilihan umum di kampung) tiada serta-merta lagi termasuk dewan itu. Kepala kampung menjadi pejabat "eksekutif" melulu di kampung masing-masing. Nyata titik berat kepada dasar teritorial dalam pertimbangan-pertimbangan administratif.

Adapun kekurangan "juridis" dari eksperimen "negeri" di Lampung (di mana untuk sandaran yang lebih "kuat" daripada peraturan-peraturan residen, orang masih saja mencari ketentuan-ketentuan dalam "I.G.O.B. 1938" yang pernah berlaku untuk marga,[14]) dalam prakteknya terdapat bahwa hanya beberapa 'negeri" yang berjalan baik. Justru dalam kehidupan rumahtangga (anggaran belanja), "negeri" itu umumnya lemah: tak ada 'wajibkerja negeri" yang harus ditebus oleh rakyat (jika garis persamaan hendak ditarik dengan keadaan marga dulu). Dengan tidak dapat memberi nafkah kepada kepala negeri dan stafnya dan "uang duduk" untuk dewan negeri, umumnya pemerintahan "negeri" macet. Maka dapatlah terjadi bahwa, ada pengetua marga (menurut susunan genealogis), bahkan kepala kampung, yang tampil ke depan dan mengaku sebagai pihak yang berwewenang dalam hal memutuskan soal "hak ulayat" (wilayah tanah), sedangkan "negeri" dikesampingkan.

Pemerintahan di tangan camat sebagai wakil "pemerintah pusat" dengan didampingi oleh jawatan-jawatan, ranting-ranting paling bawah dari susunan kementerian-kementerian di pusat, umumnya masih lebih hidup dan "segar-bugar" dari gambaran negeri yang "pucat-lesu'. Kiranya ini bukan maksudnya jalan ke arah otonomi daerah, di mana dicita-citakan bahwa negeri itu ke atas akan bersambung kepada kabupaten dan propinsi otonom.

Di dalam hubungan dengan soal-soal transmigrasi, yaitu pemben-

---

14. "Inlandse Gemeente Ordonnantie Buitengewesten — 1938".

tukan kampung-kampung baru dari pembukaan hutan sejak 1950 terdapat gambaran ini di daerah Lampung:

1) Di proyek-proyek transmigrasi yang sudah dimulai atau direncanakan sejak sebelum perang, Jawatan Transmigrasi berlaku sebagai pimpinan sentral di dalam merehabilitasi dan melanjutkan proyek-proyek lama tersebut. Ini terjadi khususnya di Lampung-tengah, di mana usaha transmigrasi itu berlangsung dengan tak ada hubungan apapun dengan marga, sebab daerah proyek-proyek tersebut tak dibawahkan kepada marga. ''Seksi'' dari proyek transmigrasi yang sudah ''cukup diisi'' dengan transmigran, kemudian oleh Pamongpraja diberi camat dan diusulkan menjadi ''kecamatan'' baru. Jika ada pendirian kampung transmigran di tanah marga, itupun hanya terjadi atas penawaran marga sendiri yang diterima oleh Jawatan Transmigrasi, umumnya dengan syarat bahwa jawatanlah yang tetap memimpin pembangunan proyek itu. Suatu luas tanah tertentu diukur dan dimintakan ganti kerugian ''tanam tumbuh''. Tak ada 'ulasan'' dan kampung-kampung baru itu tetap dibawahkan kepada marga. Hal ini menunjukkan pengaruh politik pemerintah sebelum perang, yang membuat ketentuan-ketentuan itu berlaku, walaupun sebenarnya tidak menurut adat asli.

Di Lampung hanya di dua tempat dibangun proyek-proyek kecil dari Jawatan Transmigrasi di tanah marga; di kabupaten Lampung-Utara di kampung Mesir-Ilir (marga Bahuga), perluasan kecil dari kolonisasi Belitung (daerah Palembang) dan kabupaten Lampung-tengah: Donomulyo (Nyampir) di kecamatan Sukadana, yang sebelum perang dimaksud sebagai tanah-sawah (proyek pengairan Metro) yang diperuntukkan marga itu sendiri (marga Gedongwani)[15].

2) Biro Rekonstruksi Nasional (B.R.N.) dengan transmigran bekas pejuang, memilih daerah Lampung-barat, yaitu sebelah barat jalan kereta-api. Dengan menghormati marga, dalam hal minta tanah dan memasukkan pendatang-pendatang baru itu sebagai anggota marga, diikuti saluran-saluran pemerintahan yang sah: dari residen sampai ke bawah: pesirah, kepala marga. Bahwa kemudian toh diadakan ''camat dan wedana B.R.N.'' tak lain sebagai tindakan darurat, karena pamong

---

15. Ali Wardhana: ''Obyek transmigrasi Nyampir (Donomulyo), Kecamatan dan Kewedanaan Sukadana, Kab. Lampung-tengah. (Laporan sementara, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi, Jakarta, Agustus 1956).

yang ada, juga pejabat-pejabat marga, tak sanggup memimpin orang-orang bekas pejuang itu.

3) Transmigran spontan, khususnya di daerah baru Way Sekampung, mengikuti pimpinan gerakan transmigran lokal, orang-orang Jawa yang berasal dari kampung-kampung kolonisasi lama di daerah Gedongtataan dan Pringsewu. Walaupun dalam hal adat hubungan antar orang Jawa ''lama'' dengan penduduk Lampung selama itu hampir tidak berarti, masing-masing mempunyai kehidupan adat sendiri-sendiri, dalam satu hal orang-orang Jawa telah memahami satu pelajaran penting: untuk mendapat tanah baru, mereka harus berhubungan dengan marga. Typis adalah ucapan seorang nenek tua: ''Pesirah adalah lurah, yang berkuasa membagi-bagi tanah!'' Kepada pesirah itulah orang Jawa datang untuk mendapat pembagian tanah.

1. Umur Kepala Keluarga di empat desa baru (1957)

a) Golongan umur	Orang lama (transmigran lama)	Orang baru (langsung dari Jawa)
sampai 24 tahun	35	74
25 — 29 tahun	111	222
30 — 34 tahun	112	192
35 — 39 tahun	104	118
40 — 44 tahun	98	117
45 — 49 tahun	45	32
lebih dari 50 tahun	37	29
Jumlah	594	843

b) Golongan umur	Transmigran lokal ("lama")	Pendatang baru
Sampai 24 tahun	6%) 44%	8%) 57%
25 — 34 tahun	38%)	49%)
35 — 44 tahun	34%	28%
45 — 54 tahun	17%	12%
55 — 69 tahun	5%	3%
Jumlah	100%	100%

2. Penduduk negeri Pringsewu (kabupaten Lampung Selatan) catatan kantor negeri, 1956

		Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah penduduk	K e t e r a n g a n
1. Pringsewu	(k)	1.294	7.156	Kampung-kampung no.1 s/d 13 adalah kampung lama yang berada di sebelah selatan sungai W. Sekampung no. 14 dan seterusnya adalah kampung-kampung baru di sebelah utara sungai itu. (k) = desa-desa kolonisasi Jawa (rintisan ± 1926) (i.m.) = kampung-kampung Jawa, dirintis dalam ikatan marga antara 1930 dan 1941 (L) = kampung Lampung lama.
2. Podomoro	(k)	696	3.230	
3. Sidohardjo	(k)	256	1.312	
4. Pajaresuk	(k)	522	3.145	
5. Bumiarum	(k)	280	1.423	
6. Ambarawa	(i.m.)	878	4.277	
7. Kresnomulyo	(i.m.)	355	1.624	
8. Sumberagung	(i.m.)	354	1.938	
9. Margodadi	(i.m.)	463	2.066	
10. Tanjunganom	(i.m.)	169	913	
11. Jatiagung	(i.m.)	150	668	
12. Waluyojati	(i.m.)	290	1.045	
13. Margakaya	(L)	283	1.221	
J u m l a h		5.990	30.018	(Jumlah penduduk kampung-kampung lama disebelah selatan sungai W. Sekampung)
14. Sukoharjo	(i.m.)	1.601 (1.926)	6.891 (10.144)	No. 14, 15 dan 16 dirintis tahun 1939/1940
15. Sinarbaru	(L)	266	1.042 (662)	
16. Pamahsalak	(L)	?	? (852)	
17. Banyumas		326	1.125	No. 17, 18, 19 dan 20 dirintis tahun 1950/1951.
18. Banyuwangi		386	1.125	
19. Nusawungu		121	420	
20. Srirahayu		?	?	
21. Silihwangi		?	?	No. 21 dan 22 dirintis 1952/1953, asuhan B.R.N.
22. Sukamulya		?	?	
		105	1.268	No. 23 dirintis 1953.
		(185)	269	(Angka-angka dalam kurung tidak bersumber pada kantor negeri).

3. Penduduk negeri Seputih-barat (kabupaten Lampung-tengah), sumber: kantor kecamatan Padangratu, Juli 1957.

Kampung (desa Jawa)	Jumlah kepala keluar-ga	Jumlah penduduk	Keterangan
1. Aji Pemanggilan	213	922	No. 1 s/d 22 adalah kampung-kampung lama (orang Lampung).
2. Negeri Bumi Ilir	384	1.527	
3. Bumi Aji	201	812	
4. Negeri Aji Tua	69	293	No. 23 dan seterusnya adalah desa-desa-baru. Kampung-kampung Lampung no. 1, 2, 3 dan 10 mempunyai bagian-kampung dengan penduduk perintis orang-orang Jawa, berturut-turut bernama: Karangtani (± 400 orang) Sulusuban ± 1.000 orang) Gunungterang (± 200 orang) dan Sinar Banten (± 500 orang).
5. Negeri Bumi Udik	92	385	
6. Negeri Aji Baru	103	448	
7. Gunung Cekukul	34	162	
8. Tanjung Harapan	53	207	
9. Kuripan	155	553	
10. Haduyangratu	318	1.128	
11. Padangratu	296	1.061	
12. Gunungraya	99	439	
13. Gununghaji	97	394	
14. Negeri Ratu	70	332	
15. Tanjungkemala	54	229	
16. Negeri Kepayungan	103	525	
17. Segalamidar	106	397	
18. Negeri Katun	121	552	
19. Gedungharta	79	246	
20. Tanjungratu	211	849	
21. Negeriagung	167	650	
22. Gilih Karangjati	72	287	
	2.997	12.397	(Jumlah penduduk kampung-kampung lama)
23. Waya Krui (1941) (L)	132	592	Angka-angka resmi ini dengan cepat ditinggalkan oleh pertumbuhan penduduk dari bulan ke bulan.
24. Kalirejo (1950)	739	3.628	
25. Kaliwungu (1950)	512	1.830	
26. Sridadi (1950)	340	1.386	
27. Srimulyo (1951)	299	984	Contoh: angka yang resmi untuk Sendangmulyo, yang dikemukakan oleh kantor kecamatan pada bulan Juli 1957: 2264 orang, menurut catatan lurahnya bulan April 1957 ada: 3.640 orang
28. Poncowarno (1951)	408	1.521	
29. Bandungbaru (1953)	693	2.344	
30. Sinar Waya (1953) (L)	136	603	
31. Sendangmulyo (1953)	611	2.264	
32. Wringinsari (1955)	312	1.311	
33. Sri Way Langsep (1953)	216	875	
Jumlah penduduk selu-	4.398	17.338	
ruh negeri	7.395	29.735	

17. PEMUKIMAN KAMPUNG RAWANG (SUMATRA UTARA)*)

1. PEMERAN-SERTA (PARTISIPAN)

Sebelum memulai diskusi tentang pola pemukiman yang berkembang di Kampung Rawang, marilah kita melihat sejenak pada peserta-peserta dalam aktivitas pemukiman tersebut. Salah satu hasil yang bermakna dari aktivitas pemukiman adalah pertemuan dan pergaulan dekat sehari-hari dari berbagai kelompok sosio-ekonomi. Kampung Rawang menunjukkan contoh keanekaragaman dari hubungan-hubungan demikian.

Di tahun 1955, 60 persen dari penduduk Kampung Rawang adalah orang Jawa, 30 persen orang Batak dan 10 persen anggota dari kelompok lain (Batubara, Asahan, Minangkabau, Banjar dan Cina). Mayoritasnya orang-orang Jawa, mula-mula terdiri dari pekerja-pekerja perkebunan yang datang karena kontrak atau datang dengan orangtua mereka di masa sebelum perang. Kebanyakan para pekerja itu datang dari daerah pertanian di Jawa, yang hidup di desa dan belajar mengerjakan tanah kecil mereka dengan anggota keluarga yang lain. Di perkebunan pola penghidupan mereka berubah sangat besar. Mereka menjadi pekerja bayaran, dengan gaji Rp 4,25 sehari (di tahun 1955) dan menerima beras, baju, tempat tinggal dan perawatan kesehatan sebagai tambahan yang bernilai Rp 13,75 seorang per-hari.

Perobahan dalam penghidupan itu, dan sesuatu kekecewaan dengan kondisi perburuhan, mengakibatkan banyak yang menghentikan kontraknya; ini sebaliknya membuat perkembangan adanya sanksi hukuman untuk memaksakan kontrak bagi mereka yang datang. Maka dapat dimengerti, bahwa reaksi terhadap tekanan ini timbul dalam pikiran para pekerja dan ide sosial berkembang di sekitar konsep ''orang bebas'' yang memiliki sebidang tanah untuk dikerjakan. Keadaan sesudah

---

*) Oleh C.E. Cunningham, dikutip dari *The postwar migration of the Toba-Bataks to East-Sumatra,* Yale University, Southeast Asia Studies, New Haven, 1958, hal. 101—104, 121—124 dan 127—136).

perang memberi kesempatan kepada banyak orang untuk menjadi "orang bebas", dan orang-orang Jawa meraih kesempatan ini dengan penuh gairah.

Orang-orang Jawa di Kampung Rawang sebagian masih berhubungan dengan perkebunan, bekerja setengah hari sebagai pekerja dan kembali tengah hari ke tempat pembukaan tanah mereka. Lain-lainnya yang tinggal di pondok-pondok H.A.P.M. atau bekerja sebagai pesuruh di rumah para administrator menempati juga tanah di Sungai Bangkuang, di mana mereka mendapatkan tambahan penghasilan dan di mana mereka menghabiskan waktu istirahat dan liburnya. Entah penyadap, tukang kebun, pembantu rumah, pekerja pabrik, klerk atau mandur, orang-orang Jawa ini telah memperkuat posisi ekonomi mereka sebagai hasil gerakan pendudukan tanah ini.

Hanya sedikit orang-orang Jawa yang datang ke pantai timur sebelum perang atas kemauan sendiri tanpa kontrak kerja. Sebagian dari mereka adalah petualang yang kadang-kadang mencapai sukses di desa-desa pantai timur sebagai penjual atau pedagang kecil. Karena telah mengetahui kerja berat di Jawa, orang-orang ini sering pekerja yang bersemangat dan pemegang pimpinan, dan memimpin para pembuka tanah di waktu sesudah perang. Suatu contoh dari ini ialah Sugandi, pemimpin desa untuk seluruh daerah pendirian Kampung Rawang.

Orang-orang Batak di Kampung Rawang datang dari berbagai daerah. Kira-kira dari (566) keluarga Batak di sana di tahun 1955, ada (300) dari Toba (Prapat), Porsea, Laguboti, Balige dan Muara), seratus lima puluh dari Samosir, seratus dari Silindung dan Humbang, empat dari Dairi (di sekitar Sidikalang) dan dua belas dari tanah Karo. Jumlah ini tidak berarti lebih daripada suatu perkiraan bagi desa tersebut, tetapi mereka dapat menggambarkan seluruh arah perpindahan penduduk dari Tapanuli. Pendatang dari Toba dan Samosir lebih banyak daripada orang-orang yang datang dari Humbang dan Silindung ke Selatan. Orang Pakpak dari Dairi dan oang Simalungun yang sedikit jumlahnya di daerah asalnya, mempunyai arti kecil dari seluruh pergerakan penduduk. Orang Karo dalam jumlah sangat sedikit yang bergerak ke daerah selatan ini. Jika statistik kependudukan dapat diperoleh di Langkat dan daerah Medan, akan memperlihatkan presentasi lebih tinggi dari penetap-penetap Karo. Nampak jelas bahwa kedua belas keluarga Karo di Kampung Rawang, mewakili sebagian kecil saja

dari delapan puluh keluarga Karo yang menetap di Sungai Bangkuang sebagai bekas tentara di tahun 1950. Sejak waktu itu, kebanyakan kelompok ini meninggalkan daerah, pindah ke utara untuk berkumpul dengan kumpulan keluarga/sukunya di Langkat. Lebih-lebih setelah arus perpindahan dari daerah Toba-Batak tahun 1951 dan 1952.

Hampir seluruh keluarga Batak yang pindah ke Kampung Rawang datang langsung dari Tapanuli setelah tahun 1950. Menurut suatu perkiraan, hanya limapuluh keluarga datang dari daerah lain di Simalungun atau dari Asahan, dan kebanyakan telah datang ke daerah yang disebut terakhir di masa revolusi 1945 hingga 1949. Hanya beberapa keluarga Batak bertempat tinggal di Kampung Rawang sebelum perang. Salah satunya adalah D. Hasibuan dari daerah Porsea dekat hulu sungai Asahan, yang datang sebagai petualang, penjudi dan pedagang di tahun 1937. Ia seorang Islam, dan kenyataan ini mempermudah penerimaan sosialnya di pesisir timur ini. Dengan kemampuan sendiri, ia mendirikan perdagangan kecil di masa sebelum perang. Pekerjaan dagangnya sangat terbatas di waktu masa pendudukan Jepang karena kekurangan barang, tetapi berkembang lagi di masa revolusi. Tahun 1950, Hasibuan, menurutkan langganannya di Pasar 5 dan ia menjadi pengusaha modal besar dari perusahaan swasta di desa, mempunyai tanah, toko besar dan penggilingan padi yang baru.

Sepuluh persen dari sisa penduduk Kampung Rawang terdiri dari banyak macam suku dari berbagai latar belakang. Pertama di antaranya adalah orang-orang Batubara. Mereka adalah orang-orang daerah pesisir yang berpencaharian utama menangkap ikan dan berkebun buah-buahan. Desa Silau Laut, darimana penetap Melayu dari Kampung Rawang berasal adalah contoh yang baik dari desa Batubara. Penduduknya beragama Islam, yang berpakaian, bertatacara dan berbahasa Melayu. Mereka memiliki bermacam-macam pohon buah-buahan yang luas seperti nangka, jeruk, kelapa dan durian yang memberikan penghasilan tetap bagi mereka. Mereka yang pindah ke Kampung Rawang menjauhkan diri dari bertanam padi dan kebanyakan berkonsentrasi pada penangkapan ikan dan perkebunan. Masa sebelum perang Kampung Rawang punya komponen Batubara yang kuat, tetapi diinfiltrasi sangat besar oleh orang-orang Jawa yang meninggalkan pekerjaan perkebunan seusai kontrak mereka dan tidak mau kembali ke Jawa. Pertambahan dari yang terakhir "*free men*" ini yang membantu

kepadatan penduduk yang melahirkan desa Pesisir sebelum perang.

Orang Asahan adalah elemen lain dari penduduk Kampung Rawang, walaupun minoritas kecil. Beragama Islam dan berbicara serta berpakaian Melayu, orang-orang ini sekalipun demikian dapat dibedakan dari orang Batubara dari bentuk badan dan dari keturunan Toba Bataknya. Meskipun mereka dapat dijumpai di desa Batubara, mereka mempunyai kesatuan teritorial tersendiri, hingga banyak desa-desa dikatakan tersusun seluruhnya dari orang Asahan. Bilamana satu pergi ke pedalaman, orang Batubara berkurang jumlahnya dan hanya orang Asahan yang dapat ditemui.

Orang Minangkabau dari Tengah-Barat Sumatra, orang Banjar dari Kalimantan dan orang Cina adalah minoritas yang lainnya di Kampung Rawang, masing-masing dengan jumlah yang sangat sedikit. Orang-orang Minangkabau datang sebelum perang dan bergabung dalam masyarakat Batubara, yang ada persamaan kuat dalam bahasa, agama, pakaian dan kebiasaan. Tiga keluarga Banjar datang sebagai buruh sebelum perang dan sekarang menjadi pedagang dan bertani. Dalam satu kasus, sebuah keluarga telah membentuk rumah petani khas Banjar dan hidup dalam isolasi kekeluargaan di tanah mereka. Dua lainnya bercampur dengan orang Jawa dan Batak di Pasar 5, bertempat tinggal berdekatan satu sama lain dan memelihara persahabatan dengan kelompok bangsa lain. Orang-orang Cina cuma dua saja, mereka telah kawin dengan orang Jawa sebelum memasuki daerah itu, satu mempunyai toko kecil dan kedai kopi, yang lain petani. Pada kedua kasus itu, orang-orang itu sesungguhnya adalah orang Jawa sebagai hasil dari proses akulturasi.

2. AKTIVITAS EKONOMI

Hasil utama dari Kampung Rawang adalah beras. Daerah pengairan ini begitu subur dan mudah dikerjakan hingga tanaman ini merupakan basis kehidupan ekonomi. Tanah pengairan berumur lima tahunan akan menghasilkan 2500 sampai 3500 liter padi, hasil yang baik di Indonesia. Bermacam tipe beras berkembang subur dan ditanam. Orang-orang Jawa juga menanam sayur-sayuran, pohon buah-buahan dan kelapa di pekarangan mereka. Praktek ini tidak

dikenal di lingkungan Batak. Setelah padi dituai orang-orang Jawa menanam kacang tanah, kedelai dan berbagai macam sayuran sebagai tanaman musim kering. Orang-orang Batak menghasilkan tidak lebih dari beras dan singkong. Kedua kelompok menangkap ikan untuk keperluan rumah tangganya di empang-empang yang dikembangkan di tanah mereka. Suku-suku lainnya juga menangkap ikan di sungai terdekat dan menjual hasil tangkapannya ke kota Kisaran dan pada buruh Jawa di pondok-pondok. Binatang ternak sangat jarang di Kampung Rawang, karena waktu pendirian yang masih baru ini. Hanya ada 8 ekor kerbau yang dilaporkan di seluruh daerah. Di sana terdapat banyak kambing, ayam dan itik yang dipelihara untuk dagingnya atau telur untuk keperluan keluarga mereka. Di Pasar 6 orang Batak memelihara babi. Faktor luar yang membatasi peternakan ditaraf permulaan pembangunan adanya kekurangan modal dan fasilitas-fasilitas. Penghuni belum bersedia membeli hewan-hewan atau memeliharanya. Kerbau atau sapi sangat terbatas penggunaannya karena tanah yang baru dibuka yang bertanggul dan berakar, belum bisa dibajak. Harimau merupakan bahaya nyata di taraf permulaan pendirian, yang menyerbu kandang hewan diwaktu malam.

Hasil yang tinggi dari tanah dan banyak waktu yang diminta mengerjakan bidang-bidang tanah yang lebih luas telah membatasi usaha industri rumah, wanita-wanita merajut tikar rumput untuk pemakaian setempat, tapi sedikit sekali menjualnya keluar daerah terdekat. Keluarga-keluarga Batak sering membawa pakaian tradisi mereka, tetapi itu tidak ditenun di tempat pendirian yang baru. Wanita-wanita Batak lebih dibuat sibuk di waktu musim pertanian di Kampung Rawang daripada di tanah Tapanuli.

Kedua kelompok suku bangsa, orang Jawa dan Batak, terlihat dalam ekonomi dari produksi padi, yang masing-masing mempunyai orientasi khusus yang membedakan aktivitasnya dan besar pengaruhnya pada seluruh posisi ekonomi. Orang-orang Jawa pada umumnya, berpendapat bahwa menduduki tanah sebagai ekspansi dari aktivitas perburuhan terdahulu. Bukannya meninggalkan perkebunan sama sekali untuk menjadi *"free men"* (orang bebas); orang-orang Jawa malah tetap mengikat diri dengan perkebunan, bekerja setengah hari sebagai buruh dan setengah hari lagi pada ladang sendiri. Jika seorang ayah menjadi petani penuh, anak-anak lelaki, anak-anak perempuan bahkan juga

isterinya akan terus bekerja di perkebunan guna menambah pendapatan keluarga.

H.A.P.M. menghadapi kenyataan yang tak dapat dibantah di Sungai Bangkuang, tidak menolak kerja orang-orang ini. Tiap hari jam 06.30 pagi, pasar-pasar penuh dengan laki-laki dan perempuan yang naik sepeda ke selatan menuju perkebunan, pada jam 12.30 penunggang sepeda ke selatan tadi kembali pulang ke Kampung Rawang. Kerja utama mereka sebagai penyadap, meskipun sebagian dipekerjakan sebagai penerima di pusat pengumpulan lateks. Wanita-wanita bekerja di penanaman bibit atau menyiangi rumput. Dalam pekerjaan orang-orang Jawa dari Kampung Rawang bercampur dengan orang-orang pondok terdekat, lebih bebas daripada dengan orang-orang Batak di pasar 6 atau orang Jawa di Pasar 11.

Perkawinan antar golongan antara orang-orang Jawa di Kampung Rawang dengan mereka dari pondok adalah lazim. Jika pesta selamatan atau pasar diadakan di suatu daerah, tamu-tamu dari lain daerah akan datang. Jika ada film diputar di Pasar 5 Kampung Rawang banyak orang-orang dari pondok datang bersepeda pada peristiwa itu.

Orang-orang Jawa telah mengadakan hubungan saling menguntungkan dengan H.A.P.M. yang saling memberikan keuntungan bagi pihak petani maupun bagi perkebunan besar. Tinggal di rumah-rumah mereka yang baru, para penetap hanya menerima upah, sepuluh rupiah sehari tanpa tambahan lain, upah yang dibayar ini cukup untuk keperluan keluarga sehari dan hasil dari tanah yang ditempati dapat dipakai untuk kebutuhan tambahan.

Orang-orang Batak tidak punya pengalaman pekerjaan seperti ini, ataupun sebagai kelompok mereka juga tidak mempunyai kebutuhan uang seperti halnya orang Jawa. Orang Jawa mengeluarkan uangnya untuk selamatan-selamatan, pakaian, sepeda-sepeda, perhiasan-perhiasan dan dekorasi; sangat bertentangan sekali dengan keperluan sederhana orang-orang Batak. Orang Batak tidak berusaha untuk menggabungkan upah kerja setahun dengan pertanian tidak perlu meningkatkan keanekaragaman variasi hasil pertanian. Banyak pria bekerja di luar desa untuk sementara waktu musim paceklik, mempertahankan pola perpindahan tenaga kerja yang kita lihat di Meat. Tetapi waktu musim bertani mereka tinggal di Kampung Rawang.

Rata-rata keluarga Batak mendapat keuntungan dari perpindahan

dan seiring dengan ekspansi penempatan tanah-tanah. Biar begitu ia tidak menandingi pola kerja orang-orang Jawa dan meskipun ia tidak dapat melakukan industri rumah yang tradisional dari Tapanuli, kebanyakan petani memperoleh peningkatan pendapatan. Walau orang-orang Batak telah secara efektif tercegah dari pekerjaan perkebunan, baik oleh banyaknya orang Jawa dan pengalamannya dan kesegaran mereka sendiri, mereka nampak sedikit terganggu olehnya. Mereka lebih terganggu lagi dengan tidak adanya air untuk sawah-sawah mereka. Sebagai hasil perbedaan orientasi, orang-orang Jawa lebih makmur di Kampung Rawang daripada orang-orang Batak. Mereka mempunyai sumber materi lebih banyak, mereka memperlihatkan banyak keinginan dalam memperbaiki dan memajukan apa yang telah mereka peroleh.

Seluruh gambaran Kampung Rawang dalam semua bagian dan kelompoknya, adalah suatu gambaran kemakmuran. Pembangunan toko-toko, kedai-kedai kopi, toko-toko perbaikan dan penggilingan padi adalah bukti kemampuan. Di Pasar 5 terdapat 2 kedai kopi, 2 restoran kecil, 4 toko serba ada, 2 penjahit, 2 bengkel sepeda, 1 tukang kayu, 1 warung tuak dan 3 penggilingan padi bermotor. Seorang punya sebuah bus yang jalan tiap hari dan 2 orang punya sado (kereta kuda) yang tiap hari pergi ke Kisaran untuk mencari penumpang. Sebuah bioskop dipunyai oleh 7 orang dan berada di Pasar 5. Seorang Jawa menjual es dan es krim, tiap hari mengendarai sepeda antara desa itu dengan Kisaran di mana ia mendapatkan suplai-nya. Di Pasar 6 pertumbuhan perdagangan yang sama terjadi walaupun kurang berkembang karena tidak adanya modal di antara penetap Batak. Pasar 11 ada lebih beragam dan lebih maju dalam banyaknya perusahaan daripada di Pasar 5.

Pertumbuhan perdagangan di Pasar 6 tidak terbatas pada salah satu suku bangsa. Orang-orang Batak, Jawa, Batubara, Banjar dan Cina berhubungan dalam beragam perdagangan. Di Pasar 5 di mana penduduk Jawa dan Batak sama banyaknya dengan lain kelompok yang merupakan minoritas kecil, orang-orang Batak memegang mayoritas dalam perdagangan, pengolahan, dan perusahaan-perusahaan penjualan eceran. Dari 21 perusahaan di Pasar 5, 11 dipunyai orang-orang Batak, 6 oleh orang Jawa, 2 oleh orang lain, satu koperasi dipunyai oleh orang Batak dan satu dipunyai bersama oleh orang Jawa dan Batak dan dipimpin oleh orang Batak (Tabel 1).

Tingkat perdagangan yang berada di atas bidang pertanian, meru-

pakan gambaran perekonomian yang baik dan adanya keanekaragaman perhatian. Hampir semua pemilik perusahaan, mengabdikan diri terutama pada perusahaannya, meskipun mereka juga mempunyai sawah-sawah yang mereka kerjakan sendiri dengan bantuan orang-orang upahan. Hanya seorang yang punya lebih dari satu perusahaan, Hasibuan, orang Batak. Ia punya dan menjalankan satu toko serba ada, menyewakan ruangan gedung dan mesin jahit kepada seorang saudaranya yang menjadi penjahit, punya penggilingan padi yang terbaru yang diusahakan oleh seorang manajer dengan 2 sampai 4 orang pekerja. Semua perusahaan di Pasar 5 mempekerjakan dari 18 sampai 25 orang buruh sebagai tambahan pada pemilik dan keluarganya yang juga ikut bekerja.

Tabel 1. Perusahaan-perusahaan di Pasar 5.*

Model perusahaan	Banyaknya perusahaan				Banyaknya pekerja
	Jumlah	dipunyai oleh suku			
		Jawa	Batak	Lain-lain	
Toko serba ada	4	2	1	1	2
Penggilingan padi	3	—	2	1 (co-op)	10
Kedai kopi	2	1	1	—	0
Penjahit	2	—	2	—	0
Bengkel sepeda	2	—	2	—	1
Restoran	2	2	—	—	2
Kusir sado	2	—	2	—	0
Toko anggur/kedai tuak	1	—	1	—	1
Bioskop	1	(Jawa dan Batak)		—	1-10
Tukang kayu	1	1	—	—	1—2
Tukang truk/gerobak	1	—	—	1	3
Jumlah	21	6	11	3	21—31

*) Informasi dikumpulkan berdasarkan penyelidikan sendiri.

3. ORGANISASI MASYARAKAT DAN KEPEMIMPINAN DI ANTARA ORANG-ORANG TOBA-BATAK DI KAMPUNG RAWANG

Organisasi di Kampung Rawang masih belum terbentuk. Para penetap berdaya upaya untuk membentuk kekuasaan di daerah mereka seperti yang dikerjakan orang di seluruh negara Indonesia. Seperti di tanah Batak tradisi dasar dari wewenang adat telah terbentuk setelah banyak menyesuaikan diri dengan pengaruh politik dan agama orang-orang Barat. Kepemimpinan desa menyesuaikan diri terhadap kondisi yang baru, dan unit-unit desanya telah dan masih terus menata kembali dalam bentuk baru dari kemerdekaan dan pembangunan Indonesia.

Unit-unit kekerabatan, keluarga inti dan kelompok dari marga telah memelihara hubungan yang rapat selama proses pemukiman dan telah membantu dalam mengurangi goncangan dari penyesuaian diri kembali bagi kebiasaan orang-orang Batak dan badan-badan sosial yang terdahulu. Dalam situasi perpindahan, peran dinamis dari kelompok keluarga patut diperhatikan. Bertugas sebagai juru penerang, bendahara dan pembantu bagi para perantau, kelompok keluarga yang mencakup persaudaraan dan kekeluargaan dalam kebiasaan Batak, telah menjadi elemen struktural dalam perpindahan. Oleh karena kelompok kekerabatan dan kelompok lokal bergaul sejak lama di tempat tinggal di daerah Tapanuli, ''Kelompok penetap lokal'' punya kerabat dekat di banyak daerah.

Di tempat-tempat pemukiman Sumatera Timur, kedua kelompok-kelompok kekerabatan dan kelompok lokal adalah unsur pokok dan basis dalam organisasi masyarakat perintis Batak. Di samping menjadi penduduk Kampung Rawang atau penghuni Pasar 6, ia mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok marga dan kelompok Tapanuli lokal. Identifikasi ini memberikan padanya dorongan yang baik dalam perintisan, karena kedua kelompok ini bekerja bersama dan saling menolong.

Karena orang-orang Batak pergi jauh dari Tapanuli, kedua asosiasi meluas dalam proporsi langsung ke daerah luar dari Tapanuli. Keanggotaan dari marga tidak hanya menjadi kelompok inti dari marga atau wilayah lokal yang lebih luas dari hutan, tetapi juga mempunyai arti penting untuk menggerakkan semangat saling membantu dan kesetiaan di daerah

yang jauh. Penduduk di daerah lokal, seperti Balige atau Samosir, dapat merangsang perasaan kebersamaan dan sering berikatan marga di daerah lingkungan yang jauh dan perbedaan antara Toba dan orang Tarutung sangat penting di Kampung Rawang, akan lenyap di Jawa atau di Amerika. Sejak penetap-penetap begitu efektif berpisah dari lingkungan asalnya dengan rasa kebanggaan dan kumpulan lamanya, ia mengingini asosiasi kelompok ''lokal'' guna kepercayaan diri dan bantuan pribadi, dan juga untuk kegembiraan berkumpul bersama.

Ter Haar, dalam menjelaskan proses dari formasi desa di lingkungan kelompok-kelompok seperti orang-orang Batak berkata: ''Dari semula kelompok-kelompok itu membentuk aturan mereka sendiri. Penemu dan keturunannya adalah orang-orang utama dan di bawah mereka adalah kepala dari lain keluarga-keluarga'' (Ter Haar, p. 103). Di Meat, proses ini berlangsung dahulu kala, tapi di Sumatra Timur telah berubah. Karena ketidakteraturan cara pendirian, karena cepatnya dan jumlah orang serta beragam orang terlibat, baik munculnya seorang pemimpin ataupun pengakuan yang dilakukan terhadap penetap pertama tidak terjadi. Karena tidak adanya marga yang berkuasa terhadap yang lain baik atas dasar keturunan maupun karena kedudukan, oleh karena kelompok lokal tak dapat terhindar dari perasaan asing /berlainan (memang demikian dalam hal adat lokal, dan cara berbicara), konflik dalam kepemimpinan telah timbul. Pada tahun 1955, persoalan kepemimpinan dari masyarakat ini belum juga teratasi dan perpecahan dalam banyak hal lebih sering terjadi daripada persatuan. Dalam 3 suasana berlainan ''perpecahan'' kerabat dan ''kelompok lokal'' telah merusak kepemimpinan desa — organisasi kampung, kepemimpinan gereja dan partai politik. Mari kita tinjau ketiga macam konflik.

Kampung Rawang sebagai unit administrasi (pemerintahan), adalah seperti anak-anak yang tumbuh terlalu cepat. Terbagi dalam kumpulan-kumpulan yang terpisah-pisah dan penduduknya tumbuh terus daerah-daerah tersebut tidak terkuasai. Kepala Kampungnya menerima mandat secara aklamasi yang tidak sah di tahun 1950 sebagai pemimpin Pasar 5. Penghuni tetap Batak di Pasar 6 yang telah mendiami derah ini sejak waktu itu, mencari otonomi lokal. Dalam berbagai hal sejalan dengan masalah otonomi lokal di seluruh Indonesia, kegiatan ini telah tumbuh semakin kuat dengan berkembangnya ketidaktergantungan orang-orang Batak di luar daerah Pasar 6, problema-problema

komunikasi dan kesetiaan antara mereka dan pemimpin orang Jawa di Kampung Rawang. Orang-orang Pasar 6 telah memutuskan bahwa mereka adalah unit Batak dan berkeinginan untuk memutuskan kontak administratif (pemerintahan) dengan Kampung Rawang atau Pasar 5.

Secara teoretis,Pasar 6 dan lain-lain kelompok merupakan ''blok'' pemerintahan dalam Kampung Rawang. Kepala Kampung mengangkat kepala blok berlaku sebagai pemimpin untuk wilayah-wilayahnya. Orang-orang ini melakukan sensus lokal, mendaftar kelahiran, perkawinan dan kematian, pengumpulan pajak dan pemilihan-pemilihan. Dalam realitasnya mereka merupakan kepala kampung untuk kelompoknya terutama di Pasar 6, di mana Sugandi harus tergantung pada pertemuan orang-orang Batak dan melaksanakan secara Batak dalam memimpin desa.

Di Pasar 6, persatuan belum tercapai, semua penduduk adalah Batak dan mengerti bahasa Toba, mereka hidup dalam hubungan teritorial; mereka berhubungan dalam kehidupan ekonomi, pada garis besarnya mereka mempraktekkan adat yang sama dan kebanyakan beragama Kristen. Tetapi faktor pemersatu ini dirusak oleh perpecahan. Marga dan kelompok lokal tetap merupakan basis perkumpulan dan loyalitas. Karena kuatnya kelompok kekerabatan, orang-orang tidak tergantung pada unit yang lebih luas. Oleh karena adanya kesetiaan kelompok dan kedengkian, selalu ada ''kesiagaan'' terhadap lain-lain kelompok. Sedikit perbedaan dalam adat, perbedaan dalam ucapan dan tradisi ketidakpercayaan pada orang-orang luar menyebabkan kelompok-kelompok itu mempererat persatuan kelompoknya sendiri dan menentang kelompok lainnya.

Di Pasar 6, terjadi perpecahan paling tajam antara orang-orang Toba dan Tarutung. Seperti diuraikan di atas, tiap kelompok mempertahankan kelompok asalnya dalam Pasar 6 dan mengunjungi kedai kopi masing-masing, gereja-gereja khususnya HKBP yang menggabungkan keduanya, merupakan ajang pertentangan kedua kelompok. Di dalam gereja HKBP di Pasar 6, orang-orang Toba dan Tarutung telah pecah di tahun 1955 mengenai persoalan kepemimpinan. Pertentangan ini menjadi perkelahian di luar, banyak pertentangan ini berbentuk pertengkaran mulut daripada perkelahian badaniah dan kelompok itu terpecah-belah pada waktu saya ke sana.

Partai politik tidak efektif dan tidak berpemimpin di Pasar 6.

Kesetiaan orang Batak pada Parkindo (Partai Kristen Indonesia) sangat kuat pada waktu pemilihan umum, tetapi dalam partainya sendiri ada perpecahan antara kelompok lokal. Partai itu sendiri tidak mempunyai arti sebagai kelompok sosial desa. Pemimpin tituler semata-mata menambah lagi kericuhan dalam kontrol dan pengakuan.

HKBP, daerah basis bagi pertentangan, sekalipun demikian tetap sebagai pusat pemersatu yang penting dalam Kamung Rawang. Selama pertentangan untuk kepemimpinan lokal di gereja, pendeta dari Kisaran datang ke desa itu dan berusaha membuat perdamaian secara adat Batak sebagai orang ketiga dan penengah. Ia berhasil mencegah perkelahian selanjutnya. ''Apabila pola-pola ruang gerak dan mobilitas sosial merusak kelompok kekerabatan dan kelompok lokal, maka penggantinya akan timbul'', kata Ralph Linton (Linton, hal. 350). Suatu kenyataan bahwa dalam peristiwa di mana perpecahan kelompok tidak begitu jelas, gereja akan berdiri di tengah-tengah persoalan masyarakat sebagai pengganti; menjadi titik temu antara kelompok yang beraneka ragam dan perorangan dalam memasuki pemukiman. Beberapa pendeta mengatakan pada saya bahwa banyak penetap yang bukan Kristen di Tapanuli masuk ke gereja waktu datang ke perkampungan, hanya untuk dapat bersama kawan atau ''Hanya untuk berteman''. Peranan integratif dari gereja ini dapat menjadi lebih menonjol, pada perkembangan pemukiman, gereja memberikan tempat bersama untuk kegiatan sosial. Sebaliknya, mungkin akan hilangnya posisi sebagai pusat, disebabkan oleh timbulnya konsep baru tentang kependudukan di Kampung Rawang atau Pasar 6 dan organisasi desa memperkuat diri sejalan dengan garis yang dapat diterima oleh kelompok-kelompok yang beraneka ragam.

Organisasi-organisasi yang berdiri secara spontan telah membentuk kekuatan di Pasar 6. Suatu organisasi, Badan Pekerja dibentuk dalam tahun 1951—1952 membagi tanah dan rencana perkampungan, membangkitkan hak atas tanah dengan memberikan hak sewa pada penetap dan bertanggung jawab atas berbagai tantangan dari perkebunan atau pemerintah. Waktu daerah ini diakui oleh kelompok ini, dibaginya dan ketika lebih banyak orang datang untuk menghuni daerah itu, Badan Pekerja tidak berfungsi. Organisasinya dibentuk dengan dasar keperluan tertentu yang dapat terpenuhi. Kemudian tak dapat lagi memenuhi setiap peningkatan kebutuhan; tidak mendapatkan

dukungan masyarakat yang kokoh; dan mati dengan sendirinya.

Kepemimpinan pasti masih tetap samar dan tidak menentu untuk beberapa lama di Pasar 6 dan Kampung Rawang. Kelompok yang beraneka telah bertemu di perkumpulan baru. Pola-pola kehidupan lama berdiri teguh karena efisiensi yang praktis. Sejak pola-pola lama menguntungkan perorangan dan kelompok kekerabatan tetapi melemahkan asosiasi yang meluas, orang dapat memperkirakan lambatnya timbul suatu pola kekuasaan baru dari antara orang-orang Batak Pasar 6.

4. HUBUNGAN KELOMPOK DI KAMPUNG RAWANG

Hubungan sosial dari Batak dengan Batak sangat ruwet dengan adanya perpindahan ini yang menimbulkan perkumpulan tertutup antara penduduk yang dahulu terpisah, yang telah mempunyai tradisi sejarah terisolir dan curiga terhadap sesamanya. Di Meat, ketidak senangan terhadap orang Samosir, yang dianggap pencuri-pencuri masih tetap berkobar. Dalam daerah pemukiman, perbedaan-perbedaan dan ketidak senangan ini diperluas sebelum dapat dirubah. Tetapi semua orang-orang ini adalah Batak dan mereka punya leluhur yang sama, adat, bahasa dan kebiasaan-kebiasaan.

Ketiga penetap-penetap Batak, Jawa, Melayu dan Banjar bertemu satu sama lain, ketidak sinambungan timbul antara mereka. Mereka masing-masing telah mengetahui sejarah tentang terjadinya perkumpulan dengan kelompok lain. Tetapi perkumpulan ini telah diatasi. Meskipun bermacam-macam suku telah berinteraksi dan saling mempengaruhi, seperti mereka telah terpengaruh oleh bangsa lainnya dari luar Indonesia, interaksi ini kelihatannya tidak melibatkan kontak yang tetap dalam jangkauan luas dari penduduk. Ini terutama merupakan kenyataan selama masa-masa lalu, ketika kelompok-kelompok ini sesungguhnya hidup dalam isolasi masing-masing. Kita telah lihat bagaimana isolasi ini dipaksakan hampir 75 tahun oleh N.E.I., Peraturan Pemerintah dan prosedur perkebunan asing di Sumatera Utara. Kecuali bagi beberapa orang yang tinggal di kota-kota besar sebelum Perang Dunia II, kontak tiap-tiap hari antara orang-orang Toba Batak, Jawa, Melayu, Asahan dan Karo Batak sangat dibatasi.

Semua kelompok bertemu orang-orang Barat dan Cina sebagai kontak biasa, tetapi sangat dibatasi dalam pencampur-bauran antara satu dengan lainnya.

Melanjutkan diskusi dari Kampung Rawang, telah menggambarkan situasi baru dari Sumatera Timur dalam hal kontak budaya. Di kampung Rawang, kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak sama telah bertemu sehari-hari sebagai orang-orang pembuka tanah. Sebaliknya dari kondisi perpindahan orang-orang Batak yang lalu, daerah baru tidak memberikan sistem dari hukum adat yang tetap, yang mengatur hak milik, hukum, wewenang kemasyarakatan dan hubungan dengan kelompok penetap yang terdahulu. Dalam pergerakan orang-orang Toba dan Karo ke daerah seperti Dairi atau Mandailing, ada sistem wewenang yang sudah tetap yang diterima dan diikuti oleh orang yang pindah. Ketidak adaan sistem adat seperti itu di dalam daerah bekas perkebunan menimbulkan beraneka sistem adat dari daerah asal membuka tanah, yang tidak seragam. Untuk dapat mengerti problema yang timbul, mari kita perbincangkan apa yang saya sebut ''faktor pemersatu'' dan ''memecah belah'' dalam hubungan kelompok dari kampung Rawang. Orang-orang Jawa dan Batak akan khusus ditekankan karena posisinya dalam jumlah anggota dan pengaruhnya. Kesimpulannya, beberapa hasil kontak kebudayaan yang jelas akan dibicarakan dalam batas faktor ''pemersatu'' dan ''memecah belah'' ini.

5. FAKTOR PEMERSATU

Pada kenyataannya semua kelompok kebudayaan telah menduduki secara ilegal daerah sungai Bangkung, menjadikan mereka dalam hal yang sama, entah sebagai pionir (perintis) atau pembuka tanah, tergantung dari pandangan seseorang. Semangat ini sangat penting di kampung Rawang. Penduduk harus bersatu dalam menghadapi dunia luar. Sebagai pembuka tanah mereka berhadapan dengan H.A.P.M. dan pemerintah dalam usaha mempertahankan tanah mereka. Dengan begitu, perbedaan suku bangsa dan agama harus dijembatani, dan ada bukti-bukti nyata bahwa di Kampung Rawang, perbedaan-perbedaan ini telah dijembatani bilamana suatu front bersama dianggap perlu.

Faktor utama dalam semangat ini adalah hal baru untuk menjadi

''bangsa Indonesia''. Bagaimana lemahnya semangat perasaan ini mungkin jika dibanding dengan kesetiaan suku, terutama yang dianut oleh penduduk yang sederhana dan lemah tetapi ini adalah suatu elemen dalam Indonesia modern yang tidak dapat diremehkan. Diskusi saya dari faktor pemecah belah akan kurang mempertegas semangat kenasionalan, bukan karena hal ini suatu yang penting, tetapi justru karena itu baru. Dasarnya dalam segala hal, tidak dicoba dan tidak dapat diukur. Lebih baik meng-analisa faktor yang mempunyai dasar sejarah yang lebih dalam dan yang telah bermanifestasi sendiri. Dengan begitu, suatu dasar akan diletakkan guna interpretasi yang lebih lanjut dan lebih dalam tentang semangat baru dari perasaan nasional yang berkembang dan berubah dengan zaman. Mungkin juga, semangat ini akan dapat mengatasi unsur, sejarah dan budaya daripada perpecahan, nilai sejarah dan bilaman ide dan nilai baru menang terhadap dasar purbasangka yang mendalam.

Perhubungan berdasar daerah geografis tak dapat dicegah untuk mempersatukan kelompok-kelompok dalam beberapa sektor, seperti Pasar 5 dan Pasar 11. Walaupun pada ''pengelompokan'' yang dijelaskan, kehidupan Pasar 5 mempertinggi kontak sehari-hari dan tiap hari meninggikan kekeluargaan antara kelompok-kelompok. Semua orang berkumpul diwarung kopi, di toko-toko dan pada obrolan. Ekonomi kedua kelompok, dan hubungan di luar berjalan sangat luas. Ekspor dan impor mengikuti jalan yang biasa dan dalam banyak persoalan, melewati tangan seorang pedagang di desa. Hasibuan, umpamanya, berdagang dengan baik orang Batak dan Jawa di tokonya, dan dalam perdagangan beras dan ikannya.

Secara politik, kelompok-kelompok itu bersatu dan tercatat dalam satu catatan sensus. Pimpinan-pimpinan ''blok'' mewakili banyak suku dan sering bertemu dalam konsultasi-konsultasi sebagai suatu kelompok. Di Pasar 5, sewaktu hari pemilihan, orang-orang Batak dan Jawa bekerja bersama dalam panitya pemilihan untuk mengatur pemilihan, dan bermacam-macam suku datang dan bercampur dalam pemilihan undian.

Faktor tambahan menolong menjembatani gap antara kelompok-kelompok. Bahasa Nasional Indonesia, meskipun tidak diketahui oleh semua penetap, dibawakan oleh banyak orang, terutama para pria. Melayu, sebagai bahasa dasar bahasa Indonesia telah lama menjadi

bahasa pengantar dipakai umum oleh kelompok-kelompok di Sumatera Timur dan seluruh kepulauan Indonesia. Terdapat kesamaan yang luas dalam kebiasaan dan sopan santun yang dapat disebut ''manusia Indonesia''. Keluarga dan anak dinilai sangat tinggi oleh kedua suku. Kesopanan dan kesantunan menerima tamu memberi dasar pada menyuguhkan kopi atau teh. Semua suku berpakaian serupa, pria dengan celana panjang (celana pendek) dan kemeja untuk bekerja dan sarung untuk waktu senggang, dan wanitanya dengan sarung dengan baju katun. Kedua kelompok menghormati kebebasan perorangan (privacy). Perayaan-perayaan kelahiran sama pada keduanya dan merayakan perkawinan secara besar-besaran. Keduanya mengubur orang yang meninggal. Keduanya memberi nilai tinggi bagi persawahannya dan meninggalkan tanah yang makmur ini pada anak-anak lelaki mereka melalui warisan.

Kesamaan-kesamaan antar suku merupakan minyak pelumas bagi hubungan kelompok. Lagi perasaan bersatu sebagai ''bangsa Indonesia'', dan sebagai pengakuan pula yang jujur dari perbedaan kelompok-kelompok dan diterimanya kelompok lain sebagai ''persamaan tetapi berbeda'', membantu menentukan berbagai suku Kampung Rawang dalam suatu kekeluargaan komuniti (Masyarakat).

6. FAKTOR PEMECAH-BELAH

Bagaimanapun, walaupun ada kesamaan dan kondisi yang integratif, faktor perpecahan ada lebih nyata, dan saya merasa mempunyai arti di Kampung Rawang. Perpecahan lebih nyata daripada persatuan karena situasi sejarah yang sebelumnya telah digariskan dan terdapatnya banyak perbedaan kultur antara kedua kelompok yang terlibat.

Pergaulan berdasar daerah geografis, seperti perasaan persatuan daripada para penetap, telah diperbaharui oleh pengelompokan dan sumber perasaan dari perkumpulan kelompok-kelompok kecil. Kehidupan ekonomi, meskipun menyalurkan perdagangan dari kelompok-kelompok yang berbeda pada saluran yang sama, tidak membawa kedua kelompok itu bersatu. Wanita Batak dapat dan belanja ke toko-toko Batak. Mereka pergi ke ladang sendiri tiap hari dan hidup dalam kelompoknya. Gereja adalah tempat orang-orang Batak berkum-

pul dan sebagai akibatnya, hanya sedikit kontak yang terjadi antara wanita Batak dan Jawa. Karena orang-orang Jawa bekerja di perkebunan, pria dan wanita Jawa dari Kampung Rawang lebih sering berkumpul bersama dengan pekerja-pekerja perkebunan daripada dengan kelompok-kelompok pembuka tanah dari lain suku. Penanaman padi adalah usaha penting perorangan atau keluarga dan pekerjaan lain hanya sedikit saja dapat memperluas kontak kelompok.

Agama merupakan sumber perpecahan yang kuat daripada perbedaan. Keduanya Batak dan Jawa mengakui sebagai pengikut-pengikut yang taat daripada agama yang berbeda. Tidak ada saling salahkan secara keras dari masing-masing untuk ketaatan pada agama yang berbeda, tetapi elemen ini menambah tajamnya perbedaan kebudayaan dari kelompok-kelompok suku. Orang-orang Jawa, Melayu dan Asahan bergabung lebih mudah karena ikatan agama, meskipun aspek lain dari budayanya dapat memisahkan mereka.

Meskipun toleransi agama dipraktekkan di Kampung Rawang, ada kebiasaan-kebiasaan khusus dalam agama yang menimbulkan persoalan. Satu di antaranya menyangkut soal babi. Islam pada umumnya sangat peka terhadap babi, menganggap babi kotor dan memuakkan. Kebiasaan Batak untuk beternak babi, berkembang di dataran tinggi yang terpencil di Tapanuli, membawa pertentangan dengan orang-orang Jawa, orang Melayu dan orang Asahan pada tingkat desa. Di antara orang-orang Islam yang sangat kesal (sakit hati), perpindahan Toba Batak ke Sumatera Timur. Hewan-hewan ini disebut alat-alat perjuangan yang menurut pendapat mereka dipergunakan oleh orang-orang Batak untuk mengusir lawan-lawannya, orang Jawa dan Melayu dalam perjuangan untuk tanah.

Bahasa juga faktor pemecah-belah yang pantas diperhatikan. Meskipun banyak orang berbicara dengan bahasa resmi ''Indonesia'', bahasa Indonesia khususnya di Sumatera Timur terdapat sedikit sekali kecenderungan oleh kelompok yang manapun, untuk menggunakan bahasa itu sebagai bahasa sehari-hari; bahasa percakapan orang Batak dan orang Jawa yang merupakan tipe Melayu-Polynesia dan dipengaruhi oleh bahasa Sansekerta, dan semenanjung Malaya, tetapi yang saling berbeda dan sama sekali tidak dapat saling dimengerti. Sangat jarang orang yang dapat berbicara baik bahasa Jawa maupun bahasa Batak dengan tingkat kelancaran yang sama, karena keterpencilan dari banyak

orang-orang Jawa di pondok-pondok perkebunan dan orang-orang Batak di dataran tinggi Tapanuli buruh biasa atau petani biasa sudah mengalami cukup kesulitan dengan bahasa Indonesia, lebih-lebih lagi dengan bahasa ketiga.

Terakhir, tetapi bukan tidak penting dalam setiap pendapat daripada faktor pemecah-belah dalam hubungan kelompok di Kampung Rawang ialah persoalan kepribadian. Saya tidak ingin memikirkan (menganggap) issue (pendapat terakhir) ''kepribadian kelompok'' atau ''kebudayaan dan kepribadian'' karena ini akan membutuhkan analisa yang mendalam dan saya kurang siap untuk itu. Suatu penyelidikan tentang cara bagaimana kebudayaan Jawa atau kebudayaan Batak mempengaruhi kepribadian (atau timbal balik) akan merupakan suatu kontribusi yang penting untuk memahami kedua kelompok itu terhdap problem daripada hubungan kelompok di daerah pemukiman, tetapi saya tidak bersedia untuk mengerjakan itu. Saya maksudkan, biarpun demikian bahwa ada perbedaan kepribadian yang nyata antara kedua kelompok yang kelihatan oleh kita sebagai orang luar dan yang kelihatan oleh mereka, dan bahwa perbedaan kepribadian kelompok ini merupakan faktor pemecah belah di Kampung Rawang dan di daerah pemukiman yang lain.

Kedua kelompok itu (dan yang lain di sekitar mereka) biasanya memperbedakan perbedaan antara orang-orang Jawa dan orang Toba Batak sebagai perbedaan antara halus dan kasar, atau secara tajam, diperhalus dan agak kasar.

Banyak orang Jawa akan memakai istilah ini berarti bahwa mereka sendiri adalah sopan dan hormat berlawanan dengan orang Batak yang kasar dan agak tidak sopan. Ekstremis-ekstremis akan memperdalam hal ini dan menganggap orang-orang Batak sebagai orang yang badaniah kotor, lancang mulut, membosankan dan tidak jujur. Orang-orang titik ekstrim selalu mengatakan bahwa leluhur Batak sebagai pemakan daging orang, dikatakan ''Orang Batak makan Orang''.

Orang Batak akan selalu memakai istilah ini, tetapi dalam makna yang lain. Ia merasa bahwa orang-orang Jawa terlalu lembut dan lemah, terlalu mudah disingkirkan dan tak sanggup mempertahankan hak dan pendapatnya, di mana orang-orang Batak teguh, agresif, berharga dan berkepribadian. Kelompok ekstrim merasa bahwa orang-orang Jawa adalah sangat lemah, penurut terhadap segala macam (nrimo) tak dapat

dipercaya karena kelemahan-kelemahan mereka, dan secara ekstrim, gampang dijajah dan ini merupakan suatu alasan mengapa orang Belanda menguasai seluruh Indonesia.

Orang-orang Jawa jika menghadapi problem atau tantangan, terutama dari lain orang, akan diam-diam, dan menerimanya. Orang-Orang Batak cepat penaik darah dan mudah dihasut. Orang-orang Jawa menyimpan ketidak senangannya dalam dirinya, mencoba memelihara keseimbangan kebatinan dan lahiriah daripada menentangnya. Orang Batak adalah terus terang. Jika marah akan menyumpahi secara terbuka, mencaci mereka yang berada di sekelilingnya, walaupun dalam keluarganya sendiri. Jika ia senang, ia akan bergembira luar biasa dan suka berkumpul.

Berhati-hati adalah ciri orang Jawa. Langkahnya seakan-akan diukur dan pelan-pelan, tindak-tanduknya teratur, tindakan tergesa-gesa dihindarinya, tidak ada gairah kerja dan matanya sayu. Aktivitas menandai orang-orang Batak. Berjalan lebih cepat dan kurang kesabaran, matanya bersinar, berbicara lebih lantang dan lebih argumentatif, tertawa dengan hati terbuka, pergerakan tangan dan badan sangat cepat, spontan dan ekspresif. Ini semua menunjukkan perbedaan yang nyata dan sikap umum kedua kelompok, yang akan menimbulkan persoalan karena memiliki sifat-sifat yang hampir bertolak belakang.

Sampai-sampai cara hidup kedua suku dalam desa menampakkan perbedaan. Orang-orang Jawa luar biasa apik dalam mengurus rumah tangga dan berkebun. Mereka atur dengan baik bunga-bunga dan pagar-pagar. Rumah orang-orang Jawa sering dicat dan didekorasi dengan cat atau gambar-gambar dinding dan burung dalam sangkarnya. Orang-orang Batak sebaliknya hampir tidak memelihara rumah mereka atau kebersihan dirinya. Meskipun ia sering berkepribadian bersih seperti orang-orang Jawa, rumahnya tidak didekorasi dan kelihatannya ia pada umumnya, tidak mempunyai konsep keindahan lingkungan hidup. Kebun-kebun, rumah-rumah dan jalan-jalan tidak terurus. Dalam hal kemajuan kemasyarakatan, kedua kelompok bertolak belakang. Orang akan heran karena tidak terurusnya jalan-jalan besar dan jalan-jalan di Pasar 6 jika dibandingkan dengan Pasar 3, 4 dan 5. Menyiang telah dilupakan di Pasar 6 dan rumput gelagah tumbuh liar di kedua sisi jalan. Orang Jawa lebih cenderung terhadap usaha kelompok atau masyarakat,

gotong royong, daripada orang-orang Batak yang sangat individualistis. Dalam bagian terdahulu telah dibicarakan untuk menetapkan pola daripada kekuasaan di Pasar 6. Kenyataan ini sekali lagi nampak dalam pemeliharaan jalan. Organisasi gotong royong hampir tak mungkin di antara orang-orang Batak, terutama di bawah pimpinan kepala desa orang Jawa, dan sebagai akibatnya, "kegiatan masyarakat" merupakan suatu konsep yang tidak berkembang di Kampung Rawang.

Dapat dilihat bahwa hal-hal yang penting nyata tentang ekonomi dan kebudayaan, kehidupan, bahasa, agama dan kepribadian membantu membedakan orang-orang Batak dan orang Jawa, membagi mereka, memperlambat proses asimilasi, dan mengurangi semangat menyeluruh dari "bermasyarakat" di Kampung Rawang. Apa yang menjadi hasil dan faktor pemersatu dan pemecah-belah pada hubungan kelompok di Kampung Rawang?

Pertama, di sana ada perpecahan politik. Pemimpin-pemimpin Batak dan orang-orangnya berkecil hati atas kepemimpinan kepala kampung orang Jawa di mana banyak tidak mengetahui karena cepatnya meluas dan pengelompokan geografis dari daerah pemukiman. Tak dapat dielakkan, mereka harus memilih pimpinan baru, dan jika ini terjadi "tidak akan diragukan lagi daerah ini akan terbagi menjadi kampung-kampung kelompok kesukuan".

Tidak ada bentrokan fisik terjadi dari kelompok yang berbeda di Kampung Rawang. Pada daerah pemukiman lain, tidak demikian, orang Batak dan Aceh telah bersengketa, dalam bentrokan yang sengit, seperti halnya dengan kelompok Batak lokal. Tetapi orang-orang Jawa berusaha meredakan bentrokan fisik, sering menarik diri daripada bersitegang.

Sakit hati lebih sering terjadi di daerah persengketaan Batak dan Jawa. Daripada terang-terangan membenci watak orang Batak dan babi-babi, orang-orang Jawa lebih baik menjual seluruh miliknya dan berpindah. Orang-orang Batak akhirnya dituduh sebagai berbuat kasar hanya untuk mengusir orang-orang Jawa pergi. Orang-orang Batak Simelungun menarik seperti ini dari kontak dengan orang-orang Toba. Untuk alasan ini, kedua kelompok ini sering disisihkan oleh orang-orang Toba karena kelemahan mereka.

Di kampung Rawang pola pemukiman yang berkembang telah menyebabkan perpecahan daripada anggota kelompok-kelompok

kesukuan. Assosiasi hanya terdapat di Pasar 5, dan juga di sana, kumpulan tiap kelompok tetap ada. Tiap-tiap kelompok masih dapat dibedakan secara mudah dengan tradisi-tradisinya. Wanita-wanita kelompok hidup berpakaian yang sama seperti mereka-mereka dari Jawa dan Batak (Tapanuli) walaupun mereka berasal dari daerah yang telah mendapat pengaruh dari luar Jawa. Kesamaan antara upacara adat orang-orang Batak dan Jawa (pada waktu kelahiran anak misalnya), terlihat di Kampung Rawang, tetapi juga kelainan-kelainannya, seperti halnya yang diperlihatkan dalam dua penyelidikan yang terpisah di daerah Jawa dan Tapanuli. Dalam perayaan yang demikian, kelompok-kelompok suku akan terbagi, dengan hanya beberapa orang yang akan menghadiri pada kedua pesta Batak dan Jawa karena mereka punya teman-teman akrab.

Pencampurbauran yang terakhir ini adalah bukti di antara generasi muda seperti yang diharapkan orang. Sekolah di Kampung Rawang di Pasar 5 akan membawa makin banyak anak-anak muda dalam pergaulan sehari-hari dalam bahasa Indonesia, di sini watak perorangan akan mengganti suku-suku dalam mencari teman-teman. Perkawinan campuran, hal yang luar biasa sekarang, selanjutnya akan menjadi langkah pada penyatuan kelompok.

3 KILOMETER
KAMPUNG RAWANG LAMA
KAMPUNG SILAU LAUT
KAMPUNG RAWANG
Sungai Bunut
DAM
Pasar 3
Pasar 4
Pasar 5
Pasar 6
Pasar 7
Pasar 8
Pasar 9
Pasar 10
Pasar 11
Sungai
Jalan Raya
Jalan setapak
Sawah
Huma
Karet
Orang Jawa
Orang Batak KAMPUNG RAWANG
Batas dari Sungai Benkuang
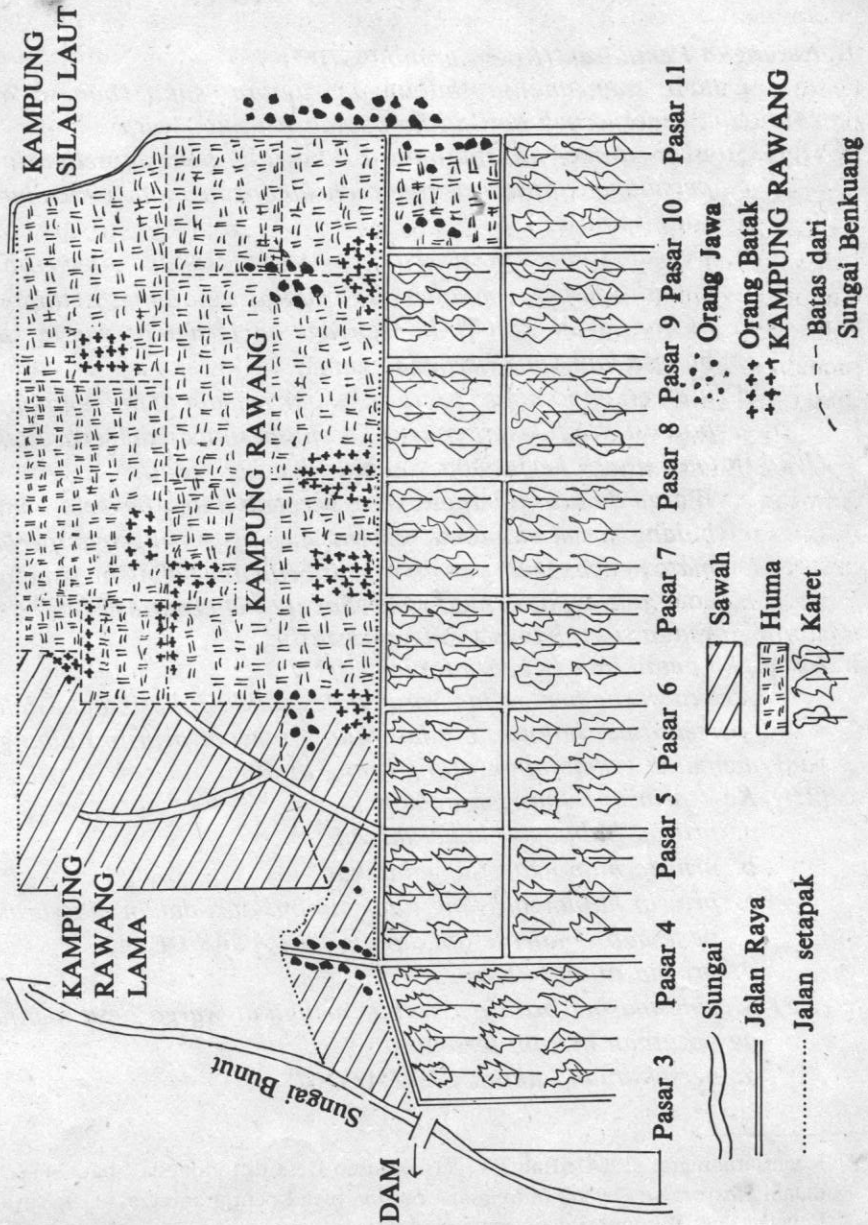
BAHAN UNTUK DISKUSI BAB VII

1. ***Kerangka Pemikiran*** *(Koentjaraningrat)**)*

Dalam menganalisa hubungan antara suku bangsa dan golongan, aspek-aspek berikut ini adalah penting, yaitu:

(1.1) Sumber-sumber konflik antara suku-suku bangsa meliputi:

a. persaingan untuk memperoleh lapangan mata pencaharian yang sama.

b. warga suatu suku bangsa memaksakan unsur-unsur kebudayaannya kepada warga suatu suku bangsa lain;

c. memaksakan konsep-konsep agama terhadap warga suku bangsa lain yang berbeda agama;

d. usaha mendominasi suatu suku bangsa lain di bidang politik;

e. potensi konflik terpendam karena permusuhan secara adat.

(1.2) ***Potensi untuk kerjasama*** *meliputi dua hal, yaitu:*

a. Warga dua suku bangsa yang berbeda dapat bekerjasama di bidang sosial ekonomi, karena masing-masing memperoleh mata pencaharian yang berbeda-beda dan saling melengkapi.

b. ada golongan ketiga yang dapat menetralisasi hubungan kedua suku bangsa yang berkonflik.

2. ***Kerangka pemikiran*** *(Koentjaraningrat)**)*

Aneka warna bentuk masyarakat desa diklasifikasikan ke dalam ***4 tipe persekutuan hukum,*** *berdasarkan* ***4 macam prinsip hubungan*** *yang mengikat sekelompok orang-orang di desa.*

(2.1) Ke-4 prinsip hubungan adalah:

a. prinsip hubungan kekerabatan

b. prinsip hubungan tinggal dekat

c. prinsip hubungan yang tidak timbul dari dalam masyarakat pedesaan sendiri tetapi datang dari ATAS DESA.

d. prinsip tujuan khusus.

(2.2) Masing-masing prinsip tersebut mengikat warga desa menjadi persekutuan hukum tersebut:

a. persekutuan hukum ***GENEALOGIS.***

**) Koentjaraningrat (19647: Bab XV, ''Isi Konsep Desa di Indonesia'' hal. 346—370, dalam *Masyarakat Desa di Indonesia Masa Ini,* oleh Koentjaraningrat (ed.), Yayasan Penerbit Fak. Ekonomi, Universitas Indonesia.

b. persekutuan hukum yang ***TERITORIAL***
c. persekutuan hukum atas kebutuhan disebabkan misalnya ***FAKTOR EKOLOGIS***
d. persekutuan hukum ditentukan karena ikatan dari atas desa.

Pertanyaan

(3.1) Tunjukkan prinsip-prinsip apa yang mendasari terjalinnya hubungan antara pelbagai suku bangsa dalam Bacaan 16 dan Bacaan 17; jelaskan pula tipe persekutuan hukum yang mengikat aneka warna masyarakat itu.

(3.2) Proses sosial apakah yang menyertai hubungan antara pelbagai suku bangsa itu (Bacaan 16 dan Bacaan 17); jelaskan faktor-faktor yang menjadi sumber proses-proses sosial itu.

(3.3) Bandingkan hubungan yang terjalin antara pelbagai suku bangsa itu pada bacaan 16 dan 17 berdasarkan nomor 3.1. dan 3.2.
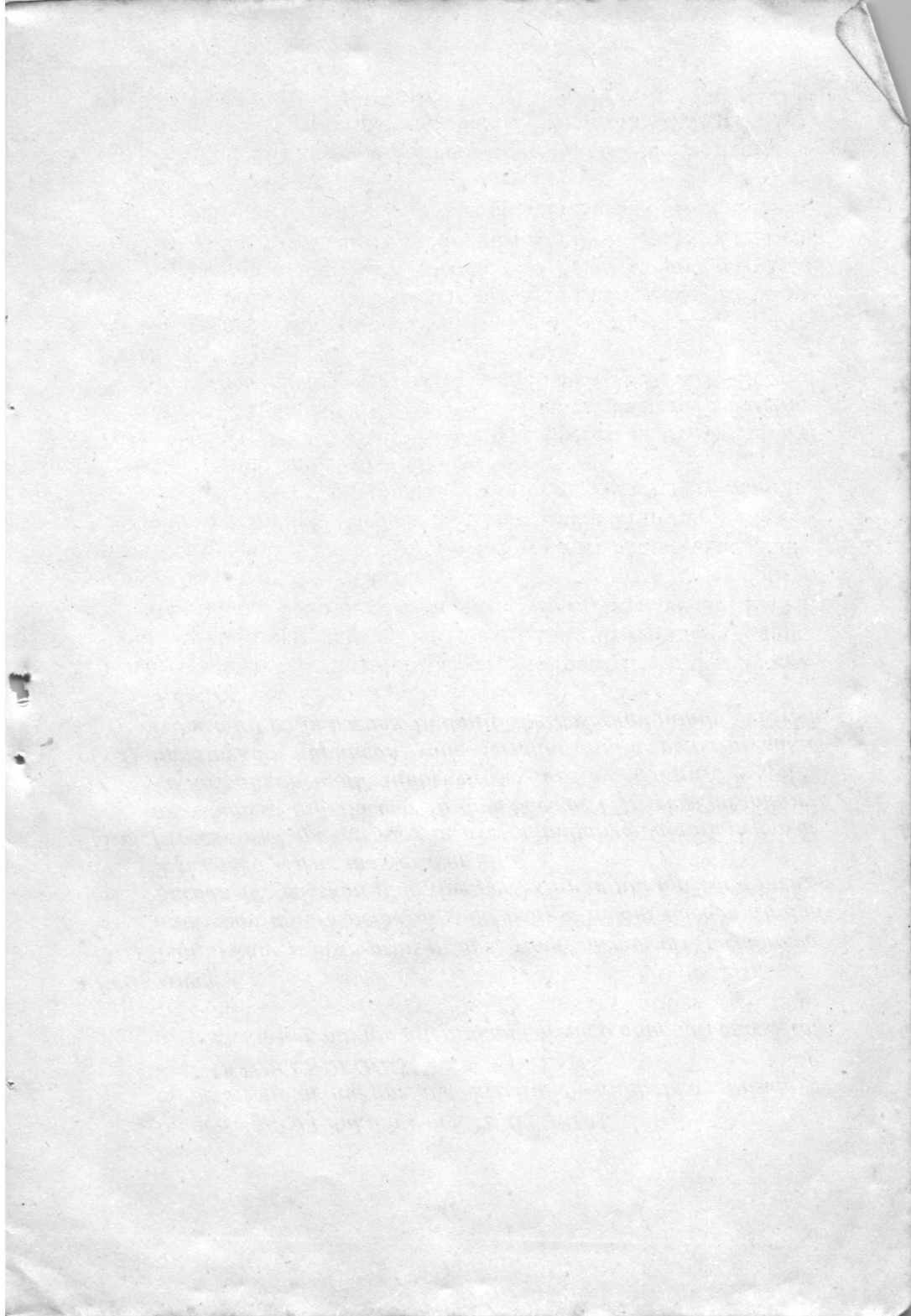
SUMBER KUTIPAN KARANGAN

1. Th. Koendjono: ''Mahasiswa dan Keluarganya'', kutipan dari majalah *Basis* Agustus 1970 no. XIX-11, halaman 370—375.
2. Team Penyelidikan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia bersama Kompas: ''Benarkah Norma-norma Pergaulan Muda-mudi Ibukota sudah berobah?'' kutipan dari *Harian Kompas,* Rabu 22 Maret 1972.
3. Koentjaraningrat: *Rintangan-rintangan Mental dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Lembaga Research Kebudayaan Nasional Terbitan Tak Berkala LIPI Seri no. 1/2; Bhratara, 1969, hal. 19—22; 25, 27—37.
4. W.W. Turner: ''Agricultural Extension Work'', Extension Training Advisor USAID in Nigeria.
5. Koentjaraningrat (ed.): Ciri-ciri dari Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia dalam ''Isi Konsep Desa di Indonesia'', buku *Masyarakat Desa Indonesia Masa Kini*. Yayasan BPFE, UI, Jakarta, hal. 354—370.
6. Kampto Utomo: ''Timbulnya Desa Jawa dari Masyarakat Transmigran Spontan'', kutipan dari Masyarakat Transmigran Spontan di daerah W. Sekampung (Lampung), *Teknik Pertanian,* th. ke-VII, 1958, hal. 347—357.
7. A.H. Niehoff dan J.C. Anderson: ''The Process of Cross Cultural Innovation (Positive Negative and Neutral Factors)''; *International Development Review,* IV, No. 2, June 1964, ADC Reprint (Sept. 1964).
8. Amir Karamoy: ''Kehidupan Pemuda Kota'', kutipan dari ''Peranan Komunikasi dan Pemanfaatan Waktu Luang dalam Kehidupan Pemuda di Jakarta''; kutipan dari *Pemuda dan Perobahan Sosial* (ed. Dr.ATaufik Abdullah), Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1974, hal. 71—89.
9. A.G. Dewey: ''Patterns of Exchange and Finance in Peasant Marketing in Java''; kutipan dari buku: *Peasant Marketing in Java*, The Price Press, New York.

10. Soeboer Boedhisantoso: ''Fase-fase dalam Lingkaran Kehidupan Individu''; dikutip dari *Jagakarsa: Desa Kebun Buah-buahan dekat Jakarta*, dalam ''Masyarakat Desa di Indonesia Ini'' (ed. Koentjaraningrat).
11. G.J. Grader: ''The Irrigation System in the Region of Jembrana''; dalam buku *Bali: Studies in Life Thought and Ritual* (editor: J.L. Swellingrebel), W. van Hoeve Ltd. The Hague, 1960, hal. 269—274.
12. P. Janssen: ''Inventarisasi Golongan-golongan, Kelompok-kelompok dan Orang-orang Terkemuka''; kutipan dari *Teknik-teknik Pengembangan Masyarakat*, Institut Pembangunan Masyarakat, Malang, 1970, hal. 26—37.
13. H. ten Dam: ''Cooperation and Social Structure in the Village of Chibodas'', *Selected Studies* by Dutch Scholars, Vol. VI, W. van Hoeve Publishers Ltd., The Hague, 1961, hal. 347—348—367; 368—382.
14. W.F. Wertheim: ''The Changing Status System''; kutipan dari: *Indonesian Society in Transition*, W. van Hoeve Ltd., The Hague, 1959, hal. 141—153.
15. H. Soewardi: ''Penyebaran Inovasi dari Lapisan Atas ke Lapisan Bawah''; kutipan dari: *Respons Masyarakat Desa Terhadap Modernisasi Produksi Pertanian, Terutama Padi di Jawa Barat*, 1972, hal. 170—185.
16. Kampto Utomo: ''Masyarakat Transmigran Spontan di Daerah Way Sekampung (Lampung)''; *Teknik Pertanian,* Th. ke-VII, No. 7, 8 dan 9, Juli-Sept. 1958, hal. 337—346.
17. C.E. Cunningham: ''The Settlement of Kampung Rawang (Sumate-Utara)''; dikutip dari: *The Postwar Migration of the Toba-Bataks to East Sumatra*, Yale University, Southeast Asia Studies, New Haven, 1958 hal. 101—104; 121—124 dan 127—136.

LAMPIRAN
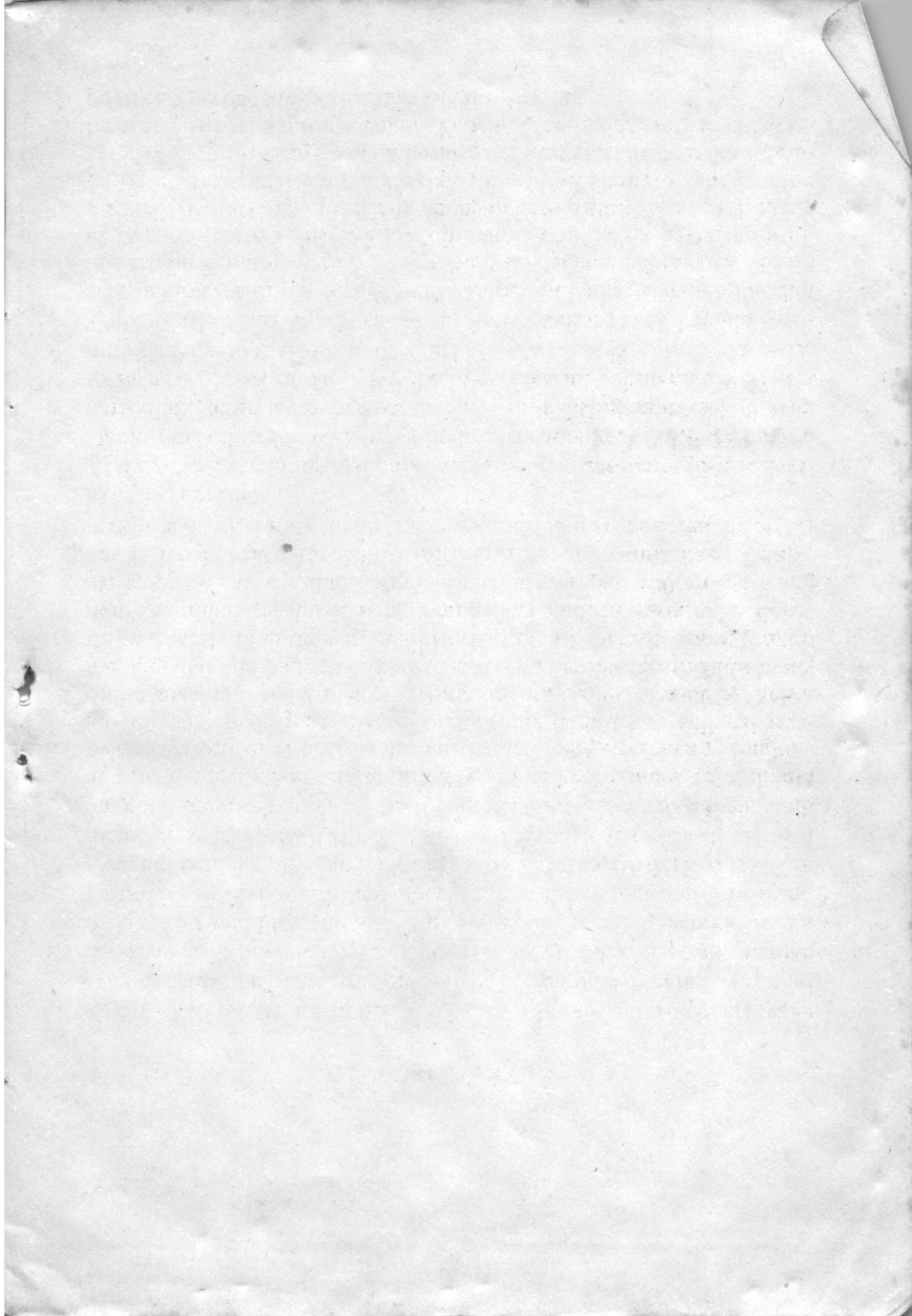
DISKUSI PANEL

1. **CARA/PROSEDUR:** Ketua dan dua sampai enam orang yang faham seluk beluk suatu persoalan merupakan "panel" dan di hadapan hadirin yang dapat mendengar dan melihat (forum), mereka melakukan pembicaraan satu sama lain. Selama itu mereka duduk dan dengan cara-cara lain tetap memelihara suasana informal. Dengan percakapan yang dipimpin oleh ketua, diskusi dilakukan menurut suatu garis patokan yang sebelumnya telah disetujui oleh anggota-anggota panel, menjadi pembicaraan **teratur dan logis.** Jadi ada pembagian pekerjaan antara anggota-anggota panel itu di dalam pembicaraannya. Pada akhirnya ketua mengemukakan ringkasan/ikhtisar isi diskusi, menurut apa yang dituturkan sebagai pendirian masing-masing oleh anggota-anggota panel. Kemudian ketua mempersilahkan hadirin ikut serta di dalam pembicaraan. Jadi: panel diskusi itu dimulai dengan pembicaraan oleh beberapa orang (panel) dan kemudian masing-masing orang dari hadirin yang suka dapat mengikuti pembicaraan forum. Biarpun sampai 100 orang yang hadir, hasil-hasil cara diskusi ini masih dapat memuaskan. Tetapi, makin banyak orang hadir kemungkinan untuk suasana informal akan berkurang.
2. **TUJUAN:** Tujuan diskusi panel sama dengan cara-cara diskusi lain. Dapat dipakai untuk membawa hadirin mendalami seluk-beluk suatu persoalan, lebih-lebih persoalan baru yang asing sama sekali bagi hadirin/khalayak ramai. Atau jika persoalan itu cukup dikenal, perlu untuk mengemukakannya dari beberapa sudut yang berbeda-beda. Walaupun diskusi panel itu tak memberi kesempatan kepada satu-satu pembicara untuk mengemukakan pandangannya yang bulat dan mendalam tentang persoalan itu beserta dengan pembelaan cukup akan pendiriannya, diskusi panel itu cara yang sebaik-baiknya untuk menarik perhatian hadirin. Juga dengan cara diskusi tersebut hadirin dapat menyaksikan contoh diskusi yang teratur antara orang-orang yang walaupun berbeda-beda pendirian, sanggup mengadakan pembicaraan sopan santun dengan kepala dingin dan tak membesar-besarkan perbedaan-perbedaan faham yang ada.

3. BAGAIMANA MEMILIH PEMBICARA-PEMBICARA/ANGGOTA PANEL.

a. Pertimbangan-pertimbangan umum:

Syarat-syarat seorang pembicara:

1. Faham akan persoalan yang akan jadi pokok pembicaraan.
2. Pandai berbicara, mengemukakan pendapat.
3. Sedia menjawab pertanyaan hadirin.
4. Menyokong dan yakin akan tujuan acara diskusi.
5. Dapat diterima oleh orang-orang yang akan mendengarkan (orang percaya akan kesanggupan dan kejujurannya).

Di dalam memilih pembicara-pembicara, **tujuan diskusi harus diingat benar-benar.** Jika ada persoalan yang baru/asing yang akan dikemukakan, pembicara-pembicara dipilih dapat memberi keterangan secukupnya tentang berbagai sudut persoalan itu. Jika di dalam persoalan yang tak asing lagi bagi khalayak ramai akan dicoba menimbang macam-macam jalan pemecahan soal itu, pembicara-pembicara dipilih yang mengemukakan jalan-jalan pemecahan soal yang berbeda-besa. Jika tujuannya mengemukakan pandangan yang berbeda-beda, pembicara dipilih yang sama-sama ''terkemuka'' di lapangan persoalan itu dan kira-kira berimbang dalam hal kecakapan/kesanggupan. Jika tidak demikian, pertimbangan-pertimbangan hadirin akan dipengaruhi dengan berat sebelah. Misalnya, jika pembicara yang satu adalah presiden bank, yang lain pegawai biasa, tapi dianggap ahli dan faham soal itu, pemimpin diskusi wajib memperkenalkan hadirin akan kualifikasi-kualifikasi si pegawai itu, sebelum diskusi dimulai.

b. Pertimbangan khusus.

1. Anggota-anggota panel bersama dengan ketua turut bertanggung jawab atas berhasilnya diskusi.
2. Supaya mutu pembicaraan terjamin, anggota panel dipilih yang benar-benar faham akan soal itu.
3. Anggota-anggota panel wajib dengan rela meluangkan waktu untuk persiapan-persiapan sebelumnya, yang diadakan pada suatu ''pertemuan perencanaan'' di mana hadir semua anggota panel dan ditentukan bersama jalan pembicaraan dalam garis besarnya.

4. Persiapan pertama bagi anggota panel berupa usaha menganalisa pembicaraan, meyakinkan diri akan pokok-pokok tersebut, di mana pengetahuan yang ada padanya yang khusus mengenai soal itu dapat dijadikan sumbangan di dalam diskusi itu.
5. Keterangan-keterangan lain yang perlu dikemukakan seseorang anggota panel untuk memperkuat pendirian yang diketengahkannya waktu pembicaraan atau waktu diadakan tanya jawab dengan forum, sudah harus dipersiapkannya lebih dahulu.
6. Malahan juga mengenai bagian-bagian persoalan yang telah dikupas oleh anggota-anggota panel yang lain, diapun harus bersedia pula menyatakan pendapatnya jika diminta oleh forum.
7. Harus dijaga di dalam memilih anggota-anggota panel supaya terjamin bahwa tak ada seorang dari mereka terlalu banyak ''menguasai'' jalan pembicaraan).

4. PERSIAPAN-PERSIAPAN SEBELUMNYA: MENETAPKAN GARIS PEMBICARAN

1. Penting sekali bahwa tujuan dan cara-cara ''diskusi panel'' itu difahami benar-benar oleh calon-calon anggota panel.
2. Garis pembicaraan yang akan dituruti terlebih dulu diperbincangkan dan disetujui bersama oleh calon-calon anggota panel, di mana pokok pembicaraan dianalisa pula menurut bagian-bagian dari masalahnya.
3. Untuk menjaga suasana informal dan spontanitas di waktu pembicaraan di muka umum kemudian, pada waktu pembicaraan perencanaan tersebut di atas bagian-bagian persoalan tersebut di atas tidak didiskusikan sampai kedetail-detailnya. yang perlu ialah menetapkan garis pembicaraan menurut garis besarnya dan selogis-logisnya, supaya kelancaran pembicaraan terjamin.

5. BAGAIMANA MEMIMPIN DISKUSI PANEL/KEWAJIBAN-KEWAJIBAN KETUA.

Umum:

Menjaga supaya diskusi itu dimulai berjalan (start) dengan baik tetapi menuruti garis pembicaraan, menjaga supaya dari pembicaraan-pembicaraan panel sama-sama banyak sumbangan di dalam diskusi itu, jangan sampai jalan diskusi menjadi "berat sebelah", ketua jangan sampai menguasai sendiri pembicaraan.

Mulai pertemuan diskusi;

Lebih dulu ketua menerangkan kepada hadirin cara-cara diskusi panel itu dan juga mengemukakan bahwa sesudah "panel" akan diadakan kesempatan kepada umum untuk tanya-jawab dan menampung komentar-komentar.

Jika perlu ketua dapat menerangkan pula kedudukan/kualifikasi-kualifikasi masing-masing pembicara panel sebelumnya. Harus diikhtiarkan supaya pendahuluan itu lancar; pembicaraan terus berlangsung mengenai soalnya. Baiklah di dalam **pendahuluan** pembicaraan masing-masing anggota panel sudah mengeluarkan "suaranya" pula. Hal itu berguna untuk memperkenalkan diri kepada hadirin.

Jagalah lancarnya pembicaraan:

Tiap anggota panel selama panel tetap menghadapi catatan ikhtisar "garis diskusi" sehingga memudahkan pula jalan pembicaraan yang teratur. ketua berdaya-upaya menarik anggota-anggota panel sama banyaknya ke dalam pembicaraan yang sedang berjalan itu. Untuk spontanitas, lebih baik bagi anggota panel dengan sendirinya menjawab/menyambung pembicaraan anggota panel lain, dengan tak usah menunggu ditanya/ditegur oleh ketua. Hanya jika dua orang berbareng berbicara lebih dulu, ketua wajib mempersilahkan salah seorang berbicara lebih dahulu. Di satu pihak dijaga suasana informal; anggota-anggota panel berbicara sambil duduk, bukan berpidato melainkan dengan cara sebiasa-biasanya mengadakan percakapan satu sama lain; di lain fihak mereka perlu berbicara cukup keras supaya pembicaraan

dapat diikuti oleh hadirin. Dengan silih berganti berbicara dan mendengarkan uraian-uraian orang lain mereka wajib pula menyatakan perhatian berupa gambaran wajah yang sungguh-sungguh, dan umumnya bersikap yang wajar seperti dalam percakapan sehari-hari.

Berilah gambaran soal yang terang:

Biasanya, jika waktu yang tersedia terbatas, tak ada kesempatan (selama pembicaraan panel itu berjalan) untuk mengemukakan suatu pendapat dengan lebih mendalam atau untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan tertentu. Lebih baik sedikit hal-hal persoalan yang dikemukakan, tapi lebih mendalam dan terang. Janganlah anggota-anggota panel mengulang-ulang apa yang oleh fihak lain kiranya telah dikemukakan, baiklah ia sendiri yang mengemukakan dan keterangan-keterangan dan perumusan-perumusan yang dikemukakan orang lain perlu ia teliti kebenarannya. Kemungkinan-kemungkinan salah faham baiklah dihilangkan dengan pertanyaan seperti ''Bukankah ini yang saudara maksudkan?........''

Jika perlu mengemukakan bahan-bahan keterangan yang sukar (statistik dsb.) baiklah terlebih dahulu menyebarkannya di atas stensilan kepada hadirin.

Menghakhiri diskusi (panel):

Pembicara panel itu jangan sampai melebihi separoh waktu yang tersedia. Supaya untuk diskusi umum (forum) juga cukup tersedia waktu. karena itu soal waktu itu perlu diperhitungkan juga ke dalam menelaah bagian masalah satu persatu. Selebihnya baiklah diserahkan kepada forum untuk menerangkan bagian-bagian persoalan itu dengan lebih mendalam, (di dalam tanya jawab kemudian dsb.). Pada akhir pembicaraan panel, perlu dikemukakan ikhtisar pembicaraan itu, oleh ketua sendiri atau lebih baik oleh masing-masing anggota panel satu persatu. Kemudian hadirin dipersilahkan turut serta menyambung diskusi itu yang berganti menjadi diskusi bersifat umum.